

Buku 1

Kondisi Eksisting SPBE Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang & Gap Analysis



Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2021 – 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
tahun 2021

Kondisi Eksisting SPBE Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan Gap Analysis

Buku 1

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Deli Serdang
tahun 2021



Kerjasama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang



dengan
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Visi dan Misi SPBE	1
1.2 Tujuan dan Sasaran SPBE	1
1.3 Pengertian Umum	2
1.3.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2
1.3.2 Pengertian Arsitektur SPBE	2
1.4 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE	4
1.4.1 Referensi Hukum atau Kebijakan Terkait	4
1.4.2 Referensi Arsitektur SPBE	5
1.5 Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE	8
1.6 Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE	9
1.7 Keluaran Kegiatan Arsitektur SPBE	11
BAB 2 Kondisi Yang Ingin Dicapai	13
BAB 3 Kondisi Eksisting Proses Bisnis SPBE dan Analisis GAP	15
3.1 Pengertian Proses Bisnis	15
3.2 Referensi Arsitektur Proses Bisnis	15
3.3 Kondisi Eksisting Proses Bisnis Kabupaten Deli Serdang	16
3.3.1 Daftar Urusan	16
3.3.2 Ketersediaan Peta Proses Bisnis	22
3.3.3 Ketersediaan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	22
3.4 Metadata Proses Bisnis SPBE	23
3.5 Permasalahan Proses Bisnis	23
3.6 Analisis GAP	24
BAB 4 Kondisi Eksisting Data dan Informasi dan Analisis GAP	27
4.1 Pengertian Data dan Informasi	27
4.2 Referensi Arsitektur Data dan Informasi	28
4.3 Kondisi Eksisting Data dan Informasi	28
4.3.1 Bentuk Data yang dimiliki	29

4.3.2 Tempat Penyimpanan Data.....	29
4.3.3 Aplikasi <i>database</i> yang digunakan	30
4.3.4 Jenis Akses Data.....	31
4.3.5 Integrasi Data dan Informasi eksisting	31
4.4 Metadata Data dan Informasi	33
4.5 Permasalahan Data dan Informasi	33
4.6 Analisis Gap	34
BAB 5 Kondisi Eksisting Layanan SPBE dan Analisis GAP	37
5.1 Pengertian Layanan SPBE	37
5.2 Referensi Arsitektur Layanan SPBE	37
5.3 Kondisi Eksisting Layanan SPBE.....	39
5.3.1 Layanan Administrasi Berbasis Elektronik.....	39
5.3.2 Layanan Publik Berbasis Elektronik.....	42
5.3.3 Layanan yang dimiliki Seluruh OPD	46
5.3.4 Ketersediaan Layanan Terhadap Program.....	48
5.4 Metadata Layanan SPBE.....	49
5.5 Permasalahan Layanan SPBE	50
5.6 Analisis Gap	50
BAB 6 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE dan Analisis GAP	53
6.1 Pengertian Aplikasi SPBE	53
6.2 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE	54
6.3 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE.....	55
6.3.1 Status Pengembangan Aplikasi SPBE.....	56
6.3.2 Status Penggunaan Aplikasi SPBE	57
6.3.3 Area Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE	58
6.3.4 Unit Pengembang Aplikasi SPBE	59
6.3.5 Basis Aplikasi SPBE.....	60
6.4 Metadata Aplikasi SPBE.....	61
6.5 Permasalahan Aplikasi SPBE	62
6.6 Analisis Gap	63
BAB 7 Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE dan Analisis GAP	67
7.1 Pengertian Infrastruktur SPBE	67

7.2 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	67
7.3 Metadata Infrastruktur SPBE.....	68
7.4 Kondisi Eksisting Jaringan Intra Pemerintah.....	72
7.4.1 Ketersediaan Topologi Jaringan	73
7.4.2 Ketersediaan Bandwidth.....	74
7.5 Kondisi Eksisting Pusat Data atau Ruang Server	82
7.5.1 Daftar Server	83
7.5.2 Aspek Pusat Data.....	86
7.6 Komputasi	92
7.6.1 Komputasi Awan	92
7.6.2 Fasilitas Komputasi (Server).....	93
7.7 Sistem Penghubung Layanan	93
7.8 Perangkat Keras dan Lunak.....	94
7.8.1 Ketersediaan Perangkat Keras	94
7.8.2 Ketersediaan Perangkat Lunak	107
7.9 Permasalahan Infrastruktur SPBE	108
7.9.1 Permasalahan Aplikasi dan Perangkat.....	108
7.9.2 Permasalahan Jaringan	109
7.9.3 Permasalahan Sistem Penghubung Layanan	109
7.9.4 Permasalahan Server	110
7.10 Analisis Gap.....	110
BAB 8 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE dan Analisis GAP	113
8.1 Pengertian Keamanan SPBE.....	113
8.2 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE.....	113
8.3 Metadata Keamanan SPBE	115
8.4 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE	117
8.4.1 Keamanan Tata Kelola dan Manajemen SPBE	118
8.4.2 Keamanan Teknis.....	118
8.4.3 Audit Keamanan SPBE.....	119
8.5 Permasalahan Keamanan SPBE	119
8.6 Analisis Gap	119
BAB 9 Kondisi Eksisting Tata Kelola dan Manajemen SPBE dan Analisis GAP	121

9.1 Pengertian Tata Kelola dan Manajemen SPBE	121
9.2 Kondisi Eksisting Tatakelola SPBE.....	121
9.2.1 Kebijakan SPBE.....	121
9.2.2 Pemantauan dan Evaluasi.....	122
9.2.3 Audit TIK.....	123
9.3 Kondisi Eksisting Manajemen SPBE	123
9.3.1 Manajemen Risiko SPBE.....	123
9.3.2 Manajemen Keamanan SPBE.....	124
9.3.3 Manajemen Data SPBE	124
9.3.4 Manajemen Aset TIK	125
9.3.5 Manajemen Sumber Daya Manusia	125
9.3.6 Manajemen Pengetahuan.....	126
9.3.7 Manajemen Perubahan	126
9.3.8 Manajemen Layanan SPBE	127
9.4 Kondisi Eksisting Rencana dan Anggaran SPBE.....	128
9.4.1 Kondisi Eksisting Tim Anggaran Pemerintah Daerah.....	128
9.4.2 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE.....	128
9.5 Permasalahan Tata Kelola dan Manajemen SPBE	132
9.5.1 Permasalahan Kebijakan SPBE	132
9.5.2 Permasalahan Pemantauan dan Evaluasi	132
9.5.3 Permasalahan Audit TIK.....	132
9.5.4 Permasalahan Manajemen SPBE.....	132
9.5.5 Permasalahan Rencana dan Anggaran	133
9.6 Analisis Gap	133
9.6.1 Analisis Gap Tata Kelola SPBE	133
9.6.2 Analisis Gap Manajemen SPBE	139
BAB 10 Kondisi Eksisting Penyelenggara SPBE dan SDM TIK dan Analisis GAP	145
10.1 Pengertian Penyelenggara SPBE	145
10.2 Referensi Penyelenggara SPBE dan SDM TIK	145
10.3 Kondisi Eksisting Penyelenggara SPBE.....	147
10.3.1 Ketersediaan Tim Koordinasi SPBE	147
10.3.2 Komitmen Pemimpin Daerah.....	149

10.4 Kondisi Eksisting SDM TIK.....	152
10.4.1 Ketersediaan SDM TIK.....	153
10.4.2 Kompetensi SDM TIK yang dimiliki.....	154
10.4.3 Pendidikan Terakhir SDM TIK.....	155
10.4.4 Status Kepegawaian SDM TIK.....	155
10.4.5 Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK.....	156
10.4.6 Kompetensi Training dan Sertifikasi SDM TIK.....	157
10.5 Permasalahan Penyelenggara SPBE dan SDM TIK.....	157
10.6 Analisis Gap.....	158
LAMPIRAN	160
Lampiran 3.1 Metadata Proses Bisnis SPBE.....	162
Lampiran 4.1 Metadata Data dan Informasi.....	171
Lampiran 5.1 Metadata Layanan SPBE.....	212
Lampiran 6.1 Daftar Aplikasi SPBE	250
Lampiran 6.2 Metadata Aplikasi SPBE.....	262
Lampiran 7.1 Kondisi Eksisting Kepemilikan Perangkat Jaringan.....	294
Lampiran 7.2 Kondisi Eksisting Media Penyimpanan	298
Lampiran 7.3 Kondisi Eksisting Perangkat Perkantoran.....	306
Lampiran 7.4 Kondisi Eksisting Perangkat Lunak Platform (1).....	310
Lampiran 7.4 Kondisi Eksisting Perangkat Lunak Platform (2).....	314
Lampiran 7.4 Kondisi Eksisting Perangkat Lunak Platform (3).....	320
Lampiran 9.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan Anggaran SPBE.....	326
Lampiran 10.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan SDM TIK.....	334

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gambar Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis	16
Gambar 3.2 Ketersediaan SOP pada Layanan	23
Gambar 4.1 Pengelompokan Arsitektur Data dan Informasi	28
Gambar 4.2 Persentase Bentuk Data.....	29
Gambar 4.3 Persentase Tempat penyimpanan data OPD	30
Gambar 4.4 Aplikasi Database yang digunakan.....	30
Gambar 4.5 Persentase Jenis Akses Data	31
Gambar 5.1 Struktur Referensi Arsitektur Layanan.....	38
Gambar 5.2 Persentase Ketersediaan Layanan SPBE	46
Gambar 5.3 Status akses layanan	47
Gambar 5.4 Persentase Jenis Layanan SPBE	47
Gambar 5.5 Ketersediaan Layanan Terhadap Program OPD	48
Gambar 6.1 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi	54
Gambar 6.2 Relasi langsung pada Domain Aplikasi SPBE	55
Gambar 6.3 Persentase Ketersediaan Aplikasi SPBE	56
Gambar 6.4 Status Pengembangan Aplikasi	57
Gambar 6.5 Status Penggunaan Aplikasi SPBE	58
Gambar 6.6 Persentase Referensi Aplikasi SPBE.....	59
Gambar 6.7 Persentase Unit pengembang aplikasi.....	60
Gambar 6.8 Persentase Basis Aplikasi SPBE	61
Gambar 7.1 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	68
Gambar 7.2 Jaringan WAN Kabupaten Deli Serdang.....	74
Gambar 7.3 Persentase Penggunaan Server	83
Gambar 7.4 Persentase Pemanfaatan Komputasi Awan	93
Gambar 7.5 Persentase Penggunaan Media Penyimpanan	106
Gambar 7.6 Persentase Jenis Penggunaan Sistem Operasi	107
Gambar 7.7 Persentase Penggunaan Aplikasi Perkantoran	108
Gambar 7.8 Permasalahan Aplikasi dan Perangkat.....	109
Gambar 7.9 Kategori Permasalahan Jaringan.....	109
Gambar 7.10 Kategori Permasalahan Sistem Penghubung Layanan	110
Gambar 7.11 Kategori Permasalahan Server	110
Gambar 8.1 Struktur Referensi Keamanan SPBE.....	114
Gambar 8.2 Persentase Pelaksanaan Keamanan	117
Gambar 8.3 Persentase Implementasi Keamanan	118
Gambar 8.4 Persentase Implementasi Perangkat Keamanan.....	118
Gambar 8.5 Permasalahan Keamanan SPBE.....	119
Gambar 10.1 Dukungan Kepala Daerah	150
Gambar 10.2 Dukungan Kepala Dinas.....	151
Gambar 10.3 Dukungan Sekretaris Dinas.....	152
Gambar 10.4 Ketersediaan SDM TIK.....	153

Gambar 10.5 Penunjukan SDM TIK.....	153
Gambar 10.6 Kompetensi SDM TIK.....	154
Gambar 10.7 Pendidikan terakhir SDM TIK.....	155
Gambar 10.8 Status kepegawaian SDM TIK	156
Gambar 10.9 Ketersediaan Tupoksi/ SK SDM TIK.....	156
Gambar 10.10 Komptensi Training dan Sertifikasi	157

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pemetaan jenis urusan OPD	17
Tabel 3.2 Analisa Gap Ketersediaan Proses Bisnis SPBE	24
Tabel 4.1 Ketersediaan Integrasi data dan informasi.....	32
Tabel 4.2 Analisis gap data dan informas	34
Tabel 5.1 Indikator domain Layanan Administrasi SPBE.....	39
Tabel 5.2 Daftar jenis Layanan Administrasi.....	40
Tabel 5.3 Indikator domain Layanan Publik.....	43
Tabel 5.4 Jenis Layanan Publik.....	43
Tabel 5.5 Atribut Metadata Layanan SPBE	49
Tabel 5.6 Analisa Gap Layanan SPBE.....	50
Tabel 6.1 Atribut Metadata Aplikasi SPBE	61
Tabel 6.2 Analisis Gap Aplikasi SPBE.....	63
Tabel 7.1 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi.....	69
Tabel 7.2 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah	69
Tabel 7.3 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	69
Tabel 7.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Penyimpanan	70
Tabel 7.5 Atribut Metadata Perangkat Server	70
Tabel 7.6 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform.....	71
Tabel 7.7 Atribut Metadata Komputasi Awan	72
Tabel 7.8 Ketersediaan Bandwith	74
Tabel 7.9 Eksisting Ketersediaan Akses Internet (Bandwith).....	78
Tabel 7.10 Pengadaan <i>Bandwith</i> Mandiri.....	79
Tabel 7.11 Eksisting Ketersediaan Server Kabupaten Deli Serdang	83
Tabel 7.12 Eksisting Aspek Pusat Data (Ruang Server)	86
Tabel 7.13 Eksisting Sistem Penghubung Layanan.....	94
Tabel 7.14 Eksisting Perangkat Periferal PC.....	95
Tabel 7.15 Eksisting Perangkat Periferal Laptop	97
Tabel 7.16 Eksisting Perangkat Printer	98
Tabel 7.17 Total Eksisting Perangkat Keras Utama.....	100
Tabel 7.18 Eksisting Perangkat Periferal.....	101
Tabel 7.19 Eksisting Perangkat Jaringan	106
Tabel 7.20 Analisis Gap Perangkat Keras dan Lunak SPBE	111
Tabel 8.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE.....	113
Tabel 8.2 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan	115
Tabel 8.3 Atribut Metadata Manajemen Keamanan	116
Tabel 8.4 Analisis Gap Keamanan SPBE	119
Tabel 9.1 Hasil penilaian Indikator dan Kebijakan Internal Eksisting.....	121
Tabel 9.2 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE tiap OPD	128
Tabel 9.3 Analisa Gap Tata Kelola SPBE	133

Tabel 9.4 Analisis Gap Manajemen SPBE.....	139
Tabel 10.1 Kompetensi OPD terhadap kompetensi Peta Okupasi.....	146
Tabel 10.2 Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Deli Serdang Kompetensi OPD terhadap kompetensi Peta Okupasi.....	148
Tabel 10.3 Analisis gap Ketersediaan Penyelenggara SPBE dan SDM TIK.....	158

BAB 1

Pendahuluan

Bab ini menjelaskan visi misi SPBE, tujuan dan sasaran SPBE, serta beberapa penjelasan mengenai penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

1.1 Visi dan Misi SPBE

Visi dan Misi SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang disusun berdasarkan visi misi Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga Visi SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menyeluruh untuk Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan memberikan pelayanan publik yang optimal”**

Pencapaian visi dijabarkan melalui **5 (lima) misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia SPBE yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh dengan memanfaatkan teknologi
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk berbasis elektronik yang terpadu mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab
4. Membangun infrastruktur untuk membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan sistem yang terintegrasi.

1.2 Tujuan dan Sasaran SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan dan sasaran SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026 adalah

1. Membangun sumber daya manusia SPBE yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh dengan memanfaatkan teknologi
3. Membangun profesionalisme aparatur pemerintah untuk berbasis elektronik yang terpadu mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab

4. Membangun infrastruktur untuk membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal
5. Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan sistem yang terintegrasi.

1.3 Pengertian Umum

Pengertian umum menjelaskan beberapa pengertian mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Arsitektur SPBE berdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini

1.3.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

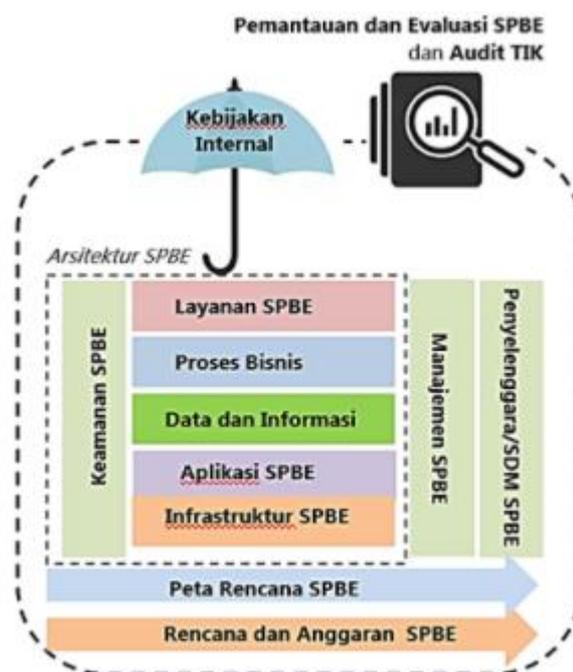
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan singkatan SPBE diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. TIK yang dimaksudkan adalah perangkat keras, perangkat lunak, Sumber Daya Manusia, basis data, jaringan, dan prosedur. Sedangkan Pengguna SPBE yang dimaksudkan adalah instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, dan masyarakat.

1.3.2 Pengertian Arsitektur SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah dan disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penerapan SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Kepala daerah harus melakukan koordinasi dan melakukan konsultasi dengan menteri penyelenggara urusan pemerintahan di bidang aparatur negara agar Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:

1. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
4. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Di dalam Perpres 95/2018, arsitektur SPBE memiliki beberapa komponen yang harus dipenuhi. Secara ringkas, komponen dari arsitektur SPBE dalam Perpres tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Komponen Arsitektur SPBE yang harus dirumuskan

SPBE memiliki beberapa unsur yang terdiri dari: a) Rencana Induk SPBE Nasional; b) Arsitektur SPBE; c) Peta Rencana SPBE; d) rencana dan anggaran SPBE; e) Proses Bisnis; f) data dan informasi; g) Infrastruktur SPBE; h) Aplikasi SPBE; i) Keamanan SPBE; dan j) Layanan SPBE. **Rencana Induk SPBE Nasional** bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. Sedangkan **Arsitektur SPBE Nasional** bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional. Arsitektur SPBE Nasional memuat 2 hal yaitu: a. referensi arsitektur; dan b. domain arsitektur.

Seperti yang diilustrasikan pada **Gambar 1.1**. Domain arsitektur yang dapat mendeskripsikan substansi arsitektur terdiri dari:

- a. domain arsitektur Proses Bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
- d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
- f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Dalam dokumen Arsitektur SPBE, perlu adanya Peta Rencana SPBE yang dijadikan sebagai *reminder* pengembangan setiap tahunnya. **Peta Rencana SPBE**

Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta Rencana SPBE ini memuat beberapa hal yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE; dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu, dalam arsitektur SPBE perlu adanya **Rencana dan anggaran SPBE** yang disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE yang berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

Keseluruhan komponen ini akan tidak maksimal tanpa adanya pemantauan dan evaluasi berkala, serta kebijakan atau payung hukum yang mendukung keberlangsungan dari arsitektur SPBE tersebut. Dalam suatu Pemerintah Daerah, payung hukum yang dimaksudkan dapat diwujudkan dengan membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang SPBE.

1.4 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE

Referensi yang digunakan dalam penyusunan Arsitektur SPBE dapat dijelaskan pada sub bab berikut ini.

1.4.1 Referensi Hukum atau Kebijakan Terkait

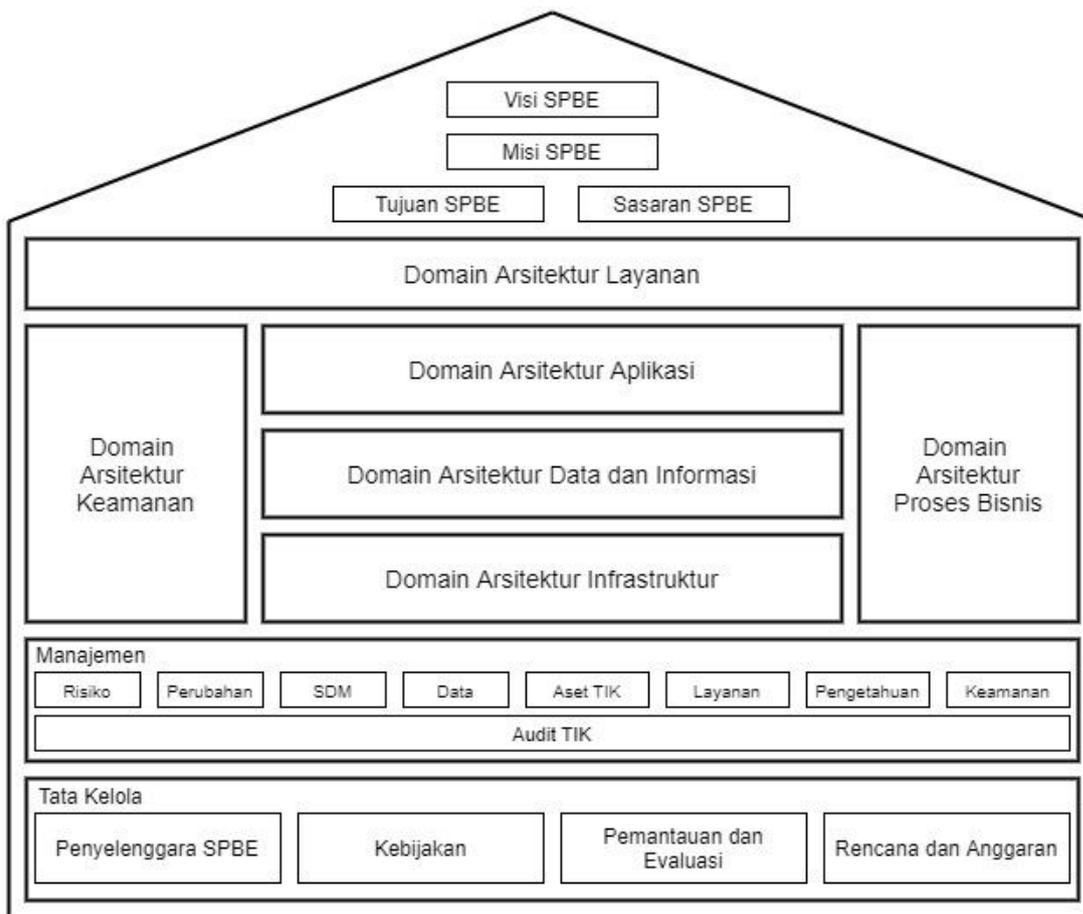
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dibuat dengan mengacu dan memenuhi peraturan - peraturan pemerintah terkait dan terkini, meliputi:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008** tentang *Keterbukaan Informasi Publik*
2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014** tentang *Pemerintahan Daerah*.
3. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012** tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
4. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*
5. **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019** tentang *Satu Data Indonesia*.
6. **Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014**. Tentang *Jaringan Informasi Geospasial Nasional*
7. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003** tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*.
8. **Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019** tentang *Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah*

9. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang *Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
10. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018** tentang *Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
11. **Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang *Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah*.
12. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016** tentang *Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika*.
13. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016** tentang *Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika*.
14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017** tentang *Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*.
15. **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007** tentang *Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi*.
16. **Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019** Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024*

1.4.2 Referensi Arsitektur SPBE

Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE harus memuat 2 hal, yakni **referensi arsitektur** dan **domain arsitektur**. Arsitektur SPBE Nasional merupakan arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional. Dengan pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Menurut Perpres 95/2018 tentang SPBE, **referensi arsitektur** mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Meskipun pada perpres 95/2018 tidak secara langsung menyebutkan jika arsitektur pemerintah daerah harus memuat referensi arsitektur, akan tetapi dikarenakan arsitektur SPBE Pemerintah daerah mengacu pada arsitektur nasional, maka arsitektur SPBE Pemerintah daerah juga harus memuat referensi arsitektur. Referensi arsitektur juga diperkuat dengan **indikator 11** pada **Permen PAN-RB 59/2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yaitu tingkat kematangan arsitektur SPBE baru akan bisa mencapai tingkat 3 apabila dokumen arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain arsitektur SPBE. Berikut akan diilustrasikan terkait susunan kerangka kerja SPBE seperti pada **Gambar 1.2**



Gambar 1.2 Kerangka Kerja SPBE

(sumber: Dokumen Referensi Arsitektur SPBE Nasional)

Berdasarkan **Gambar 1.2**, Unsur-unsur SPBE ini antara lain: a. rencana induk SPBE nasional; b. arsitektur SPBE; c. peta rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit TIK; d. rencana dan anggaran SPBE; e. proses bisnis; f. data dan informasi; g. infrastruktur SPBE; h. aplikasi SPBE; i. keamanan SPBE; dan j. layanan SPBE. Pada arsitektur SPBE Nasional yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat Taksonomi Referensi Arsitektur SPBE, yang terdiri dari:

1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RB)

RB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/ proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. RB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 46 (empat puluh enam) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua).

2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RD)

RD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. RD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu) dan 50 (lima puluh) data tematik di tingkat 2 (dua).

3. Referensi Arsitektur Layanan (RL)

RL adalah sistem pengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RL terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 40 (empat puluh) area layanan di tingkat 2 (kedua).

4. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RA)

RAA adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. RA terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1 dan 3 (tiga) area di tingkat 2. RA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi.

5. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RI)

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. RI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 8 (delapan) area di tingkat 2. RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK

6. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RK)

RK pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD. RK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 9 (sembilan) area keamanan di tingkat 2.

Arsitektur SPBE Nasional terdapat **6 (enam) domain referensi arsitektur** yang mempunyai saling keterkaitan yang erat. Keterkaitan antar referensi arsitektur dimulai dari **domain proses bisnis**, yakni sebuah urusan pemerintah pada dasarnya akan memiliki data dan informasi didalamnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan layanan, dimana layanan akan berbasis elektronik, berupa aplikasi yang berjalan diatas infrastruktur TIK berbagi pakai yang handal dan aman. Keterkaitan antar domain tersebut, dapat terlihat dalam kerangka kerja SPBE.

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa referensi arsitektur yang saat ini sudah ada, seperti Federal Enterprise Architecture Framework Version 2 (FEAF v2) dan The Australian Government Architecture (AGA). Setelah melakukan studi literatur pada kedua referensi arsitektur tersebut, referensi yang paling sesuai yaitu FEAF v2. Oleh karena kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Deli Serdang, menggunakan Federal Enterprise Architecture Framework Version 2 (FEAF v.2) sebagai referensi arsitektur. Kerangka ini menjelaskan domain arsitektur yang selaras dengan domain arsitektur SPBE berdasarkan Perpres 95/2018. Tidak hanya itu, dalam FEAF v.2 juga sudah disebutkan artefak dan *reference model* untuk setiap domainnya.

1.5 Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan Perpres 95/2018, dan mencakup **6 (enam) domain**, yakni:

- 1) Domain **Layanan SPBE**,
- 2) Domain **Proses Bisnis**,
- 3) Domain **Data dan Informasi**,
- 4) Domain **Aplikasi SPBE**,
- 5) Domain **Infrastruktur SPBE**, dan
- 6) Domain **Keamanan SPBE**.

Masing-masing penyusunan domain juga akan memiliki **Referensi Arsitektur**, yakni:

- a. Referensi Arsitektur SPBE Nasional untuk seluruh Domain arsitektur
- b. Referensi arsitektur Layanan SPBE akan menggunakan **Perpres 95/2018** dan **Permenpan-RB 59/2020**
- c. Referensi arsitektur Proses Bisnis akan menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang **Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**,
- d. Referensi arsitektur Data dan Informasi akan menggunakan kerangka kerja **Data Management Association (DAMA)**,
- e. Referensi arsitektur Aplikasi akan menggunakan standar **90003:2018** tentang *computer software guideline*,
- f. Referensi infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE akan menggunakan standar **ISO 27001-series**.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan metode:

- a. Studi pustaka (*literature review*) untuk referensi metodologi, perangkat pengumpulan data dan pengukuran, serta analisisnya;
- b. Survey online dan offline dengan menggunakan aplikasi berbasis web
- c. Observasi bukti pendukung (dokumen, peralatan, dll);
- d. Wawancara.

- e. *Focus Group Discussion* dan *Desk Evaluation* untuk konfirmasi temuan dan rekomendasi akhir.

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dirumuskan berdasarkan pada metodologi ilmiah yang telah terbukti sebagai praktik terbaik (*best practice*) di dunia, yakni:

1. Kerangka kerja (framework) TOGAF 9.1
2. Warren McFarlan's Strategic Matrix (1983), khususnya untuk prioritas sistem informasi.
3. COBIT 5, khususnya untuk melakukan evaluasi kondisi eksisting
4. ITIL 2011, khususnya untuk analisis struktur dan tupoksi unit TI

1.6 Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE

Dalam melakukan penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan ini terdiri dari **15 (lima belas)** proses untuk menghasilkan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang. Detail dari masing-masing tahapan, sebagai berikut:

1. **Inisiasi Kegiatan.**

Inisiasi kegiatan ini meliputi negosiasi anggaran, analisis kebutuhan, dan kesepakatan luaran dokumen

2. **Pembuatan Dokumen Administrasi**

Dokumen administrasi kegiatan dimulai dari penawaran kegiatan sampai serah terima pekerjaan

3. **Pembentukan Tim Proyek**

Pembentukan tim proyek terdiri dari project owner, project manager, analis dan surveyor yang terlibat dalam kegiatan.

4. **Pengumpulan Dokumen Eksisting**

Dokumen eksisting didapatkan dari laman web Kabupaten Deli Serdang serta dokumen dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Dokumen dari Diskominfotik dapat berupa RPJMD, renstra, renja, tupoksi, dan regulasi terkait pada Pemerintahan Deli Serdang.

5. **Sosialisasi *Offline* Seluruh OPD**

Sosialisasi dilakukan pada Hari Rabu, 08 September 2021. Kegiatan ini mengundang perwakilan dari 21 Dinas, 6 Badan, 3 Kantor, 2 RSUD, Sekretaris Dewan, 10 bagian pada Sekretaris Daerah, 2 Kecamatan, 2 Desa dan 1 Puskesmas. Proses sosialisasi dilakukan pukul 13.00 – 15.00. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ke masing-masing perwakilan OPD tentang SPBE dan detail kegiatan yang akan dilaksanakan. Menekankan pentingnya SPBE dan dukungan apa yang dapat diberikan oleh masing-masing OPD untuk kegiatan ini.

6. **Penjelasan Aplikasi Survei dengan Seluruh OPD**

Kegiatan ini dilakukan pada Hari Kamis, 09 September 2021 secara daring melalui zoom yang dihadiri oleh seluruh OPD. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mendemonstrasikan pengisian form survei berbasis web. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan pemahaman ke OPD terkait dokumen apa saja yang dibutuhkan saat survei nantinya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengenalan terhadap surveyor lapangan untuk berkoordinasi dengan PIC OPD terkait jadwal visitasi ke OPD.
7. **Pengisian Data Survei Secara Mandiri**

Pengisian data secara mandiri dilakukan oleh masing-masing PIC OPD, bekerjasama dengan seluruh bidang pada setiap OPD. Pengisian ini dilakukan pada laman web <http://survey-deliserdang.pttati.co.id/>. Masing-masing OPD memiliki *username* dan *password* untuk melakukan pengisian. Pengisian secara mandiri dilakukan pada tanggal 08 - 12 September 2021.
8. **Survei Lapangan dan Verifikasi Data Isian Survei Tiap OPD**

Survei lapangan dan Verifikasi data isian survei dilakukan oleh tim survey satu-per-satu tiap OPD. Proses survei dan verifikasi dilakukan setelah proses pengisian mandiri yaitu pada tanggal 13 - 17 September 2021. Sebelum melakukan verifikasi, tim proyek melakukan pengecekan hasil isian, untuk membuat daftar kekurangan data, data apa yang masih kurang jelas, dan bukti dokumen apa yang harus di unggah.
9. **Rekapitulasi data Hasil survei**

Rekapitulasi data hasil survei ini bertujuan untuk melihat kesenjangan data yang didapatkan serta data apa saja yang masih belum dikumpulkan. Pada tahap ini, tim proyek akan menghubungi PIC OPD terkait bilamana ada data yang dibutuhkan.
10. **Analisis gap dan Penyusunan Dokumen Eksisting SPBE**

Analisis gap dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi sekarang dan kondisi mendatang yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kondisi eksisting disusun berdasarkan data hasil survei dan dianalisis metadata dari setiap domain.
11. **Verifikasi Data Eksisting dengan Seluruh OPD**

Verifikasi data eksisting ini dilakukan via zoom pada Hari Selasa, 9 November 2021 pukul 09.00 - 13.00 melalui zoom dengan perwakilan PIC dari seluruh OPD. Tujuannya untuk melakukan konfirmasi data eksisting agar valid dan sesuai dengan kondisi setiap OPD. Analisis gap dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi sekarang dan kondisi mendatang yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
12. **Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE**

Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ini adalah penyusunan Buku 2 hingga Buku 7. Arsitektur yang disusun disesuaikan dengan

analisis eksisting dan hasil gap yang telah didapatkan. Hasil dari tahapan ini menghasilkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026.

14. **Presentasi Akhir**

Presentasi akhir dilakukan ketika keseluruhan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang telah selesai dianalisis. Presentasi mendatangkan perwakilan dari seluruh OPD di Kabupaten Deli Serdang.

15. **Revisi Dokumen & Penyerahan Dokumen Akhir**

Hasil dari presentasi akhir, tidak menutup kemungkinan untuk adanya revisi dokumen. Tim proyek akan melakukan pengecekan ulang dokumen berdasarkan revisi yang telah diberikan. Kemudian, hasil dari revisi akhir merupakan dokumen akhir **Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026**.

1.7 Keluaran Kegiatan Arsitektur SPBE

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa dokumen **Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Deli Serdang 2021-2026**, yang mencakup:

- 1) Buku 1: **Kondisi Eksisting dan Gap Analysis** SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
- 2) Buku 2: **Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan SPBE, dan Arsitektur Data dan Informasi**
- 3) Buku 3: **Arsitektur Aplikasi SPBE**
- 4) Buku 4: **Arsitektur Infrastruktur SPBE**
- 5) Buku 5: **Arsitektur Keamanan SPBE**
- 6) Buku 6: **Arsitektur Tata Kelola & Manajemen SPBE, dan Penyelenggara/SDM SPBE**
- 7) Buku 7 : **Prioritisasi Paket Kegiatan, Peta Rencana, dan Perkiraan Biaya Paket Kegiatan SPBE**

BAB 2

Kondisi Yang Ingin Dicapai

Pada tahun 2020, Kemen PAN-RB melakukan evaluasi SPBE berskala nasional berdasarkan indikator penilaian pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018** tentang *Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Pada tahun tersebut, tidak secara keseluruhan (K/L/D/I) dievaluasi, hanya 130 Instansi dan Pemerintah Pusat yang dievaluasi. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang termasuk salah satu Pemerintah Daerah yang dievaluasi.

Tujuan dilakukannya evaluasi ini agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya. Evaluasi SPBE dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai 1-5 yang nantinya akan menghasilkan nilai Indeks. Nilai ini dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Detail nilai indeks dan predikat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Predikat Indeks SPBE

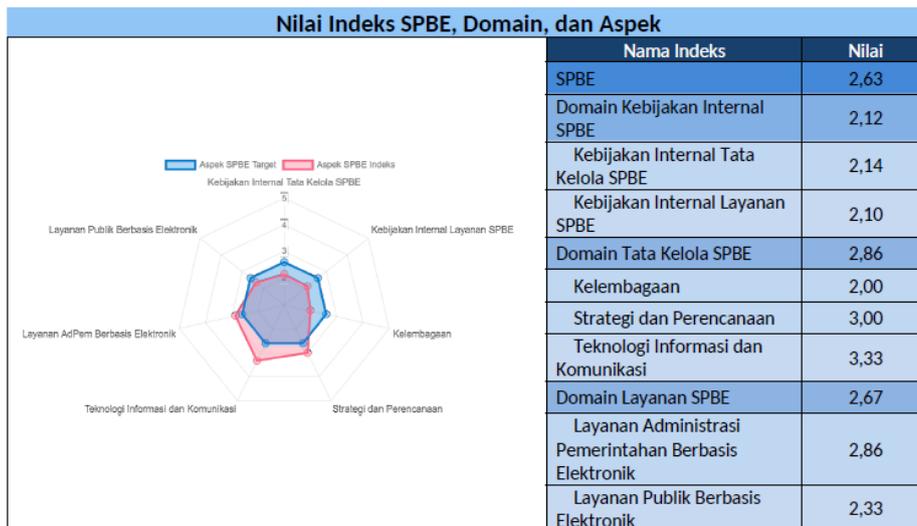
No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

(sumber: Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE)

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Berikut adalah hasil penilaian dari Evaluasi SPBE 2020 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilihat pada **Gambar dibawah ini**



Hasil Penilaian SPBE Tahun 2020

Buku ini akan fokus pada domain kebijakan internal SPBE dan tata kelola SPBE. Dapat dilihat pada **Gambar diatas** bahwa keseluruhan nilai Indeks SPBE untuk pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar **2.63 dengan predikat baik**. Hal lain yang dapat dijadikan sebagai *highlight* dari hasil penilaian tersebut adalah nilai domain kebijakan internal Kabupaten Deli Serdang sebesar 2.12 yang berarti berpredikat cukup dan masih diperlukan perbaikan hingga mencapai target penilaian sebesar 2.60. Sedangkan untuk domain tata kelola mendapat capaian nilai sebesar 2.86 yang berarti berpredikat baik.

Berdasarkan nilai tersebut, Kabupaten diusulkan untuk mencapai target indeks SPBE tahun 2022-2026, yaitu

Target Hasil Evaluasi SPBE 2022-2026

2022	2023	2024	2025	2026
3,3	3,7	4,1	4,5	4,9

Beberapa goal yang dapat ditingkatkan kedepannya yaitu

- Pelaksanaan reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE (indikator 11 dan 12) di Tahun 2022 agar mendapatkan nilai kematangan 5
- Pelaksanaan inovasi proses bisnis (indikator 14)
- Pelaksanaan kegiatan 8 manajemen SPBE (aspek 5)
- Pelaksanaan Audit TIK 2 tahun sekali (aspek 6)
- Melakukan peningkatan integrasi aplikasi layanan administrasi dan layanan publik.

BAB 3

Kondisi Eksisting Proses Bisnis SPBE dan Analisis GAP

Pada Bab 3 menjelaskan kondisi eksisting proses bisnis SPBE dan Analisis GAP yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Bab 3 dimulai dari pengertian proses bisnis, referensi arsitektur proses bisnis, kondisi eksisting, permasalahan proses bisnis dan analisis gap

3.1 Pengertian Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan peta bisnis proses agar setiap instansi pemerintah :

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

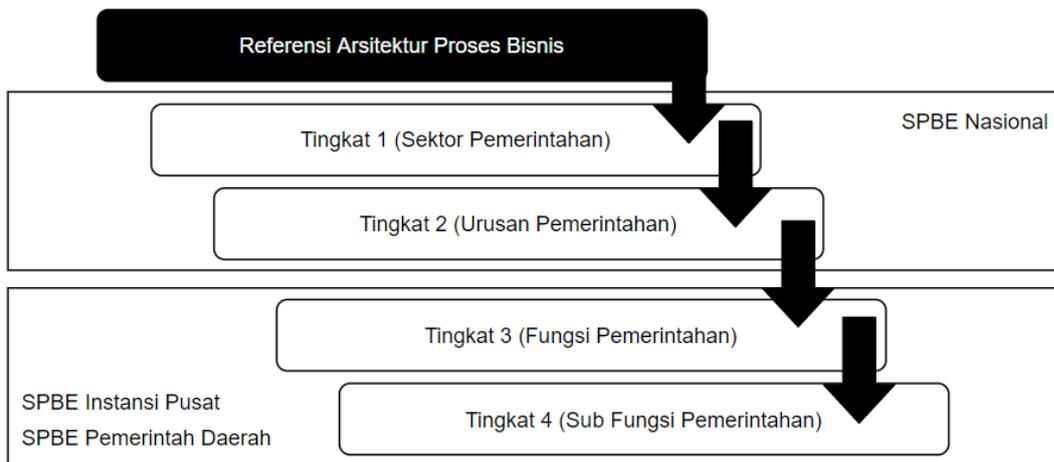
3.2 Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Berdasarkan Rancangan Lampiran Peraturan Presiden Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Referensi Arsitektur Proses Bisnis merupakan klasifikasi jenis fungsi bisnis yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Referensi Arsitektur Proses Bisnis mengelompokan fungsi bisnis dari setiap kementerian dan lembaga untuk menggambarkan potensi kolaborasi antar IPPD serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan fungsi-fungsi yang diemban. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan fungsi pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai RB tingkat 1 (pertama); dan

- 2) Urusan pemerintahan, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai RB tingkat 2 (kedua).

Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 46 (empat puluh enam) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua). IPPD, dalam menyusun RB masing-masing mengacu pada Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE Nasional, serta melengkapi proses bisnis pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada **Gambar 3.1**



Gambar 3.1 Gambar Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

3.3 Kondisi Eksisting Proses Bisnis Kabupaten Deli Serdang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kondisi Eksisting Proses Bisnis Kabupaten Deli Serdang meliputi Daftar Urusan, Ketersediaan Peta Proses Bisnis dan Ketersediaan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada setiap OPD pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

3.3.1 Daftar Urusan

Berdasarkan kelompok urusannya Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang terdapat **41 jenis urusan. 6 kelompok urusan Wajib Pelayanan Dasar. 18 kelompok urusan Wajib Pelayanan Bukan Dasar. 9 kelompok urusan Pilihan dan 8 kelompok Urusan Fungsi Penunjang.** Mengacu pada referensi arsitektur SPBE Nasional yang terdapat pada Lampiran Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, jenis urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang ada dipetakan sesuai dengan kode referensi proses bisnis, untuk lebih detailnya terdapat pada **Tabel 3.1**

Tabel 3.1 Pemetaan jenis urusan OPD

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Kode Referensi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur
Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan	RB 06.01	Pendidikan
	Kesehatan	Dinas Kesehatan	RB 04.01	Kesehatan
		RSUD Deli Serdang	RB 04.01	Kesehatan
		RSUD Pancur Batu	RB 04.01	Kesehatan
		Puskesmas	RB 04.01	Kesehatan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RB 03.01	Pekerjaan Umum
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kecamatan	RB 03.04	Perumahan
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Sekretariat Daerah - Pemberdayaan Masyarakat Dan Trantibum Linmas	RB 05.02	Keamanan
		Satuan Polisi Pamong Praja	RB 05.02	Keamanan
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RB 04.02	Sosial
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RB 05.02	Keamanan
	Sosial	Dinas Sosial	RB 04.02	Sosial
	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	RB 06.02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	RB 04.03	Pemberdayaan Perempuan
Pangan		Sekretariat Daerah - Perekonomian dan SDA	RB 02.10	Usaha Kecil dan Menengah
			RB 07.04	Kelautan
			RB 02.03	Pertanian

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Kode Referensi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur
		Dinas Ketahanan Pangan	RB 02.04	Perkebunan
			RB 02.05	Peternakan
			RB 02.06	Peternakan
	Pertanahan	Sekretariat Daerah - Pemerintahan dan Otonomi Daerah	RB 03.06	Pertanahan
			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RB 03.06
	Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah - Perekonomian dan SDA	RB 07.05	Lingkungan Hidup
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RB 03.06	Pertanahan
		Kecamatan	RB 09.01	Dalam Negeri
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	RB 07.05	Lingkungan Hidup
		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	RB 07.05	Lingkungan Hidup
		Dinas Lingkungan Hidup	RB 07.05	Lingkungan Hidup
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat Daerah - Pemberdayaan Masyarakat. Dan Trantibum Linmas	RB 04.02	Sosial
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RB 03.07	Kependudukan
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan	RB 03.07	Kependudukan
		Kelurahan	RB 09.01	Dalam Negeri
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan, Desa	RB 03.05	Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan	RB 04.01	Kesehatan
			RB 04.03	Pemberdayaan Perempuan

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Kode Referensi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur
		Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak		
	Perhubungan	Dinas Perhubungan	RB 03.03	Transportasi
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RB 06.04	Teknologi
RB 09.03			Informasi	
RB 09.04			Komunikasi	
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RB 02.01	Industri
RB 02.02			Perdagangan	
RB 02.09		Koperasi		
		Dinas Koperasi dan UKM	RB 02.10	Usaha Kecil dan Menengah
	Penanaman Modal	Sekretariat Daerah - Perekonomian dan SDA	RB 02.08	Investasi
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	RB 02.08	Investasi
		Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	RB 02.08	Investasi
		Badan Pendapatan Daerah	RB 09.02	Keuangan
	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	RB 06.06	Olahraga
			RB 06.05	Pemuda
	Statistik	Dinas Komunikasi Dan Informatika	RB 09.03	Informasi
	Persandian	Dinas Komunikasi Dan Informatika	RB 05.02	Keamanan
	Kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	RB 08.02	Kebudayaan
	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	RB 06.01	Pendidikan
	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	RB 09.06	Aparatur Negara

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Kode Referensi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur
Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	RB 02.06	Perikanan
	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	RB 02.11	Pariwisata
	Pertanian	Dinas Pertanian	RB 02.03	Pertanian
	Kehutanan	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan SDA	RB 07.03	Kehutanan
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretariat Daerah - Perekonomian dan SDA	RB 07.02	Energi
	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RB 02.02	Perdagangan
	Perdagangan	Perindustrian	RB 02.02	Perdagangan
	Perindustrian	dan Perdagangan	RB 02.01	Industri
	Transmigrasi		RB 03.02	Transmigrasi
Fungsi Penunjang	Pembinaan dan Pengawasan	Inspektorat	RB 09.07	Kesekretariatan Negara
	Perencanaan	Sekretariat Daerah - Pemerintahan dan Otonomi Daerah	RB 09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RB 09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional
		Sekretariat Daerah - Perekonomian dan SDA	RB 09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional
		Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan		
	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RB 06.03	Ilmu Pengetahuan
	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	RB 09.02	Keuangan

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Kode Referensi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur
		Bagian Perencanaan dan Keuangan	RB 09.02	Keuangan
		Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan	RB 09.02	Keuangan
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah	RB 09.06	Aparatur Negara
			RB 06.01	Pendidikan
	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah - Tata Usaha Pimpinan	RB 09.07	Kesekretariatan Negara
		Sekretariat Daerah - Pemerintahan dan Otonomi Daerah	RB 09.06	Aparatur Negara
		Sekretariat Daerah - Hukum	RB 05.01	Hukum
		Sekretariat Daerah - Organisasi	RB 09.06	Aparatur Negara
		Sekretariat Daerah - Umum	RB 09.01	Dalam Negeri
		Sekretariat Daerah - Pengadaan Barang dan Jasa	RB 09.06	Aparatur Negara
		Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	RB 09.07	Kesekretariatan Negara
		Pendukung DPRD	Sekretariat Daerah - Hukum	RB 05.01
	Sekretariat DPRD		RB 09.07	Kesekretariatan Negara
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Satuan Polisi Pamong Praja	RB 05.03	Hak Asasi Manusia
		Sekretariat Daerah - PMTL	RB 09.07	Kesekretariatan Negara
		Kecamatan	RB 09.01	Dalam Negeri
		Sekretariat Daerah - Kesejahteraan Rakyat	RB 04.02	Sosial
		Kesbangpol	RB 09.01	Dalam Negeri

3.3.2 Ketersediaan Peta Proses Bisnis

Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018, penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

b. Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

c. Level Selanjutnya (Level n)

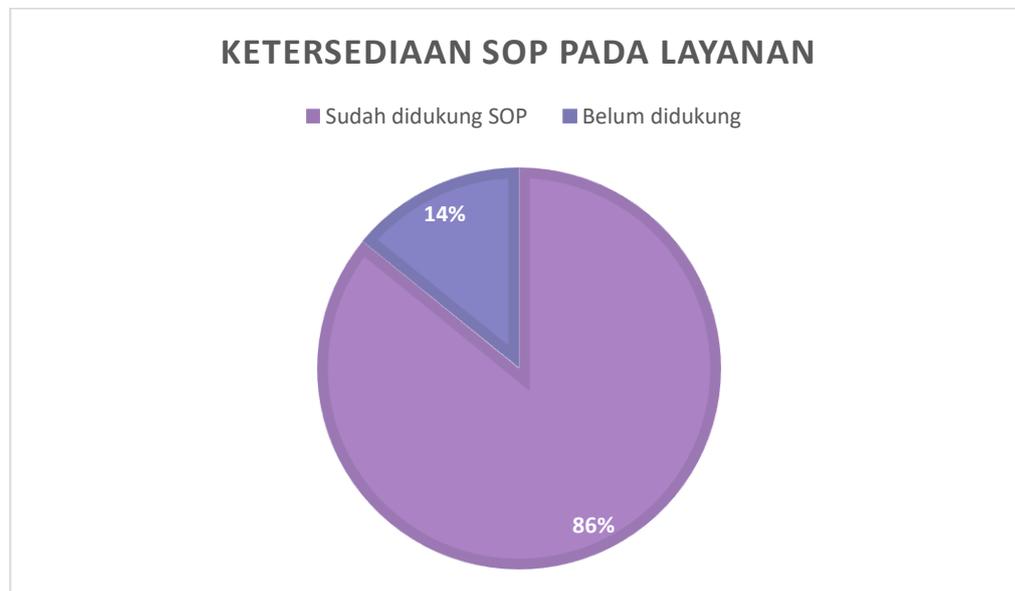
Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

Berdasarkan data yang diperoleh, 47 (empat puluh tujuh) OPD pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum memiliki peta proses bisnis.

3.3.3 Ketersediaan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu alur/cara kerja yang sudah ter-standarisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat menjadi suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Setiap

layanan harusnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan alur pemberian layanan kepada penerima layanan. Pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak semua OPD memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan hasil survei diperoleh jumlah layanan pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebanyak **312 layanan**. Dari 312 Layanan, **268 (86%) layanan sudah didukung SOP** sedangkan **44 (14%) layanan belum didukung SOP**. **Gambar 3.2** menggambarkan ketersediaannya Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 3.2 Ketersediaan SOP pada Layanan

Berdasarkan **Gambar 3.2**, ketersediaan SOP Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdapat 86% layanan telah memiliki SOP dan 14% layanan belum memiliki SOP. Contoh SOP tersebut adalah SOP Layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.4 Metadata Proses Bisnis SPBE

Metadata Proses Bisnis SPBE berisi informasi mengenai urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Entitas Metadata Arsitektur proses bisnis dapat mewakili Referensi Proses Bisnis. Metadata proses bisnis terdiri dari 5 (lima) atribut yang terdiri dari ID, nama bisnis/urusan, uraian bisnis/urusan, kode model referensi, ID metadata terkait. Detail dari metadata Proses Bisnis SPBE yang telah dianalisis dapat dilihat pada **Lampiran 3.1 Metadata Proses Bisnis SPBE**

3.5 Permasalahan Proses Bisnis

Permasalahan yang ada di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah dari **47 OPD pada Pemerintahan Deli Serdang belum ada yang memiliki Peta Rencana Proses Bisnis**. Hampir semua OPD masih belum melakukan pemetaan proses

bisnisnya. Terkait dengan SOP, juga masih banyak layanan, yaitu 40 layanan yang masih belum memiliki SOP.

3.6 Analisis GAP

Setelah melakukan analisis dari kondisi eksisting di Kabupaten Deli Serdang, maka dari kondisi tersebut akan di bandingkan dengan kondisi ideal proses bisnis. Hasilnya akan didapatkan gap analisis antara kondisi eksisting dan ideal dari proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Analisa Gap Ketersediaan Proses Bisnis SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Daftar Urusan	Terdapat 8 sektor urusan pemerintahan pada tingkat pertama Terdapat 42 sektor urusan pemerintahan pada tingkat kedua	Urusan pada seluruh OPD mengacu pada Lampiran Arsitektur SPBE Nasional pada Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE. Urusan pada proses bisnis terdiri dari 9 kelompok, 46 urusan proses bisnis.	<ul style="list-style-type: none"> Saat ini urusan pemerintahan pada tingkat pertama belum terpenuhi. Terdapat 2 sektor urusan yang belum ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Urusan tersebut adalah Pertahanan dan Urusan Luar Negeri. Urusan pemerintahan pada tingkat ketujuh belum terpenuhi. Terdapat 1 sektor urusan yang belum ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Urusan tersebut adalah Pertambangan.
Ketersediaan Peta Proses Bisnis	Belum ada OPD yang telah memiliki Peta Proses Bisnis	Peta proses bisnis disusun berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	Terdapat 47 OPD yang belum memiliki Peta Proses Bisnis
Ketersediaan Dokumen Standar Operasional Prosedur	Terdapat 86% layanan memiliki SOP	Pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam	Terdapat kesenjangan sebesar 14% Layanan yang belum memiliki SOP

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
		<p>mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Mulai dari Setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki SOP AP-nya masing-masing</p>	

BAB 4

Kondisi Eksisting Data dan Informasi dan Analisis GAP

Pada Bab 4 menjelaskan kondisi eksisting data dan informasi dan analisis gap yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Bab 4 dimulai dari Pengertian Data dan Informasi, Referensi Arsitektur Data dan Informasi, Kondisi Eksisting, Permasalahan Data dan Informasi dan Analisis Gap Data dan Informasi.

4.1 Pengertian Data dan Informasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 26 Ayat 1, Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

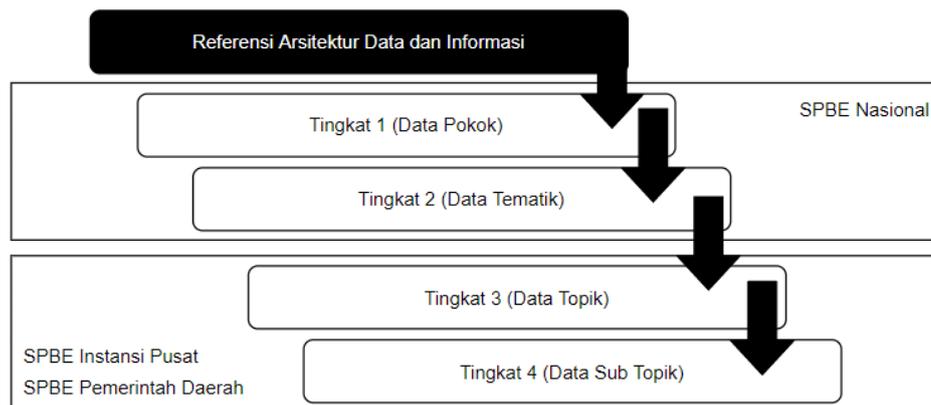
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perLrmusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang No. 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

4.2 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Berdasarkan Rancangan Lampiran Peraturan Presiden Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Referensi Arsitektur Data dan Informasi acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya keselarasan dengan Referensi Arsitektur Data dan Informasi Referensi Arsitektur Proses Bisnis memberikan kemudahan dalam menentukan metode berbagi pakai data (Data Share) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redundansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi. Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang diperlukan, di mana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Struktur Referensi Arsitektur Data SPBE Nasional dan Informasi terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai Arsitektur Data dan Informasi tingkat 1 (pertama)
- 2) Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai Arsitektur Data dan Informasi pada tingkat 2.



Gambar 4.1 Pengelompokan Arsitektur Data dan Informasi

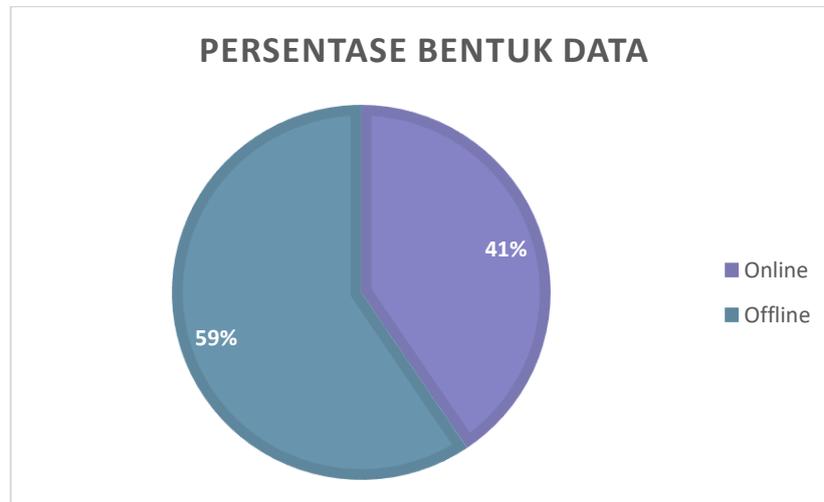
Gambar 4.1 menjelaskan pengelompokan Arsitektur Data dan Informasi. Berdasarkan Taksonominya Arsitektur Data dan Informasi terdiri dari sepuluh data pada Data Pokok tingkat pertama dan lima puluh data pada Data Tematik tingkat kedua.

4.3 Kondisi Eksisting Data dan Informasi

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah data yang dimiliki seluruh OPD pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah **397 data**.

4.3.1 Bentuk Data yang dimiliki

Berdasarkan hasil survei, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang **memiliki 397 data dari 47 OPD**. Bentuk data yang dimiliki OPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu *online* dan *offline*. **Gambar 4.2** menunjukkan bentuk data yang tersedia pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

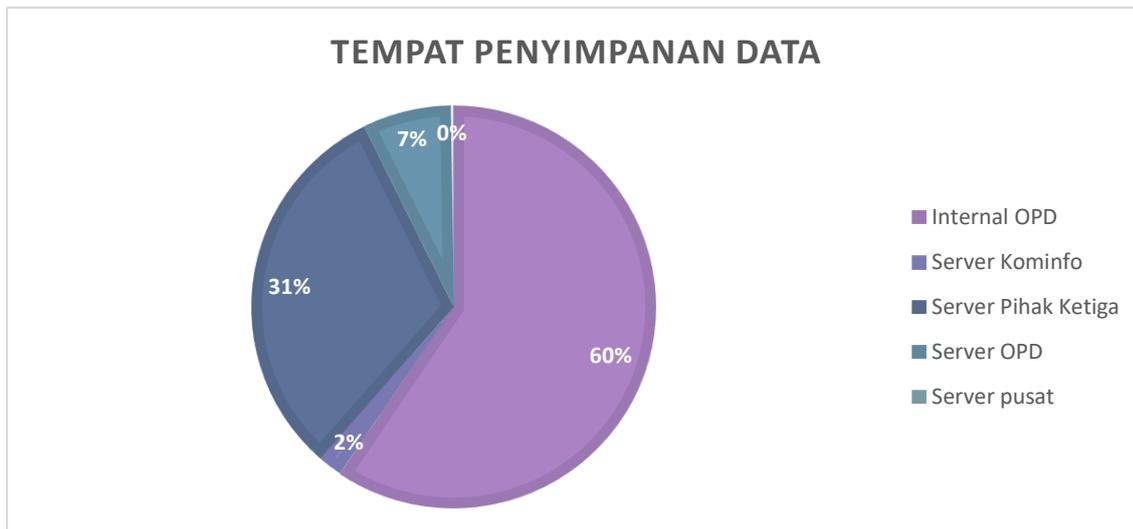


Gambar 4.2 Persentase Bentuk Data

Berdasarkan **Gambar 4.2**, dapat diketahui bahwa bentuk data **online sebanyak 161 (41%)** dan bentuk data **offline sebanyak 236 (59%)**. Jumlah bentuk data *offline* lebih besar karena sebagian besar OPD masih menyimpan data dengan manual pada komputer personal dengan aplikasi Ms.Office.

4.3.2 Tempat Penyimpanan Data

Berdasarkan hasil survey, tempat penyimpanan data yang digunakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah, internal OPD, server Dinas Komunikasi dan Informatika, server pihak ketiga dan server OPD. **236 (60%) data** disimpan pada **internal OPD** secara *offline*, **8 (2%) data** disimpan pada **server Dinas Komunikasi dan Informatika**, **124 (31%) data** disimpan pada **server pihak ketiga** dan **28 (7%) data** disimpan pada **server OPD**, **1 (0,25%) data** disimpan di **server pusat**. **Gambar 4.3** menunjukkan pembagian penyimpanan data pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

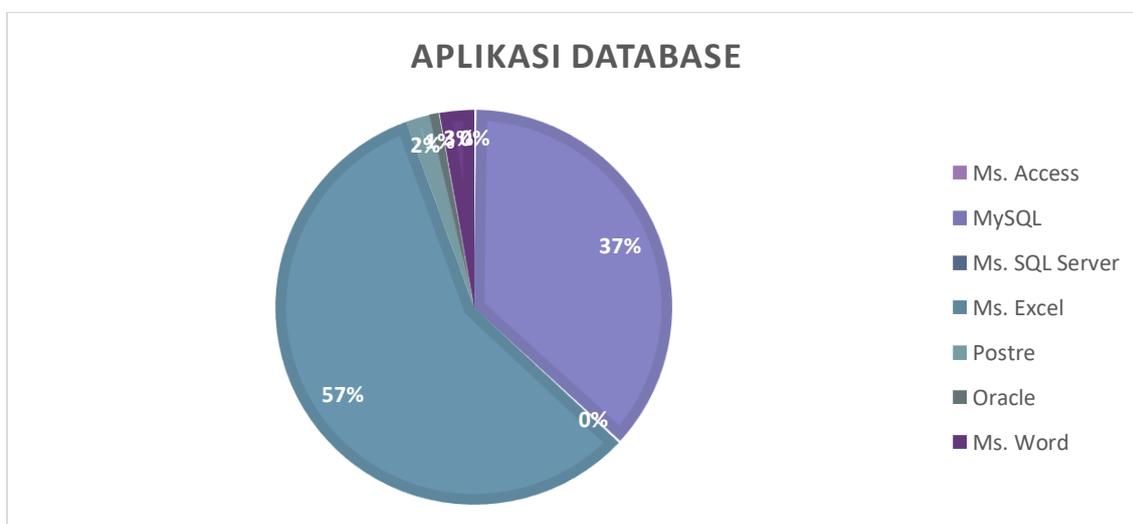


Gambar 4.3 Persentase Tempat penyimpanan data OPD

Berdasarkan **Gambar 4.3** mayoritas **penyimpanan data di masing-masing OPD masih secara manual**. Kondisi ini akan memberikan keterbatasan dalam melakukan integrasi data satu dengan data lainnya. Dari kondisi ini akan dianalisis untuk memberikan usulan tempat penyimpanan data yang aman dan mudah untuk diintegrasikan.

4.3.3 Aplikasi *database* yang digunakan

Aplikasi Database adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer untuk melakukan penyimpanan data secara terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses dari suatu sistem komputer. Berdasarkan hasil survei, aplikasi database yang digunakan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang antara lain yaitu **Ms.Word, Ms.Excel, Ms. Access, Ms. SQL Server, MySQL, Postgre dan Oracle**. Gambar 4.4 menunjukkan Aplikasi *database* yang digunakan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

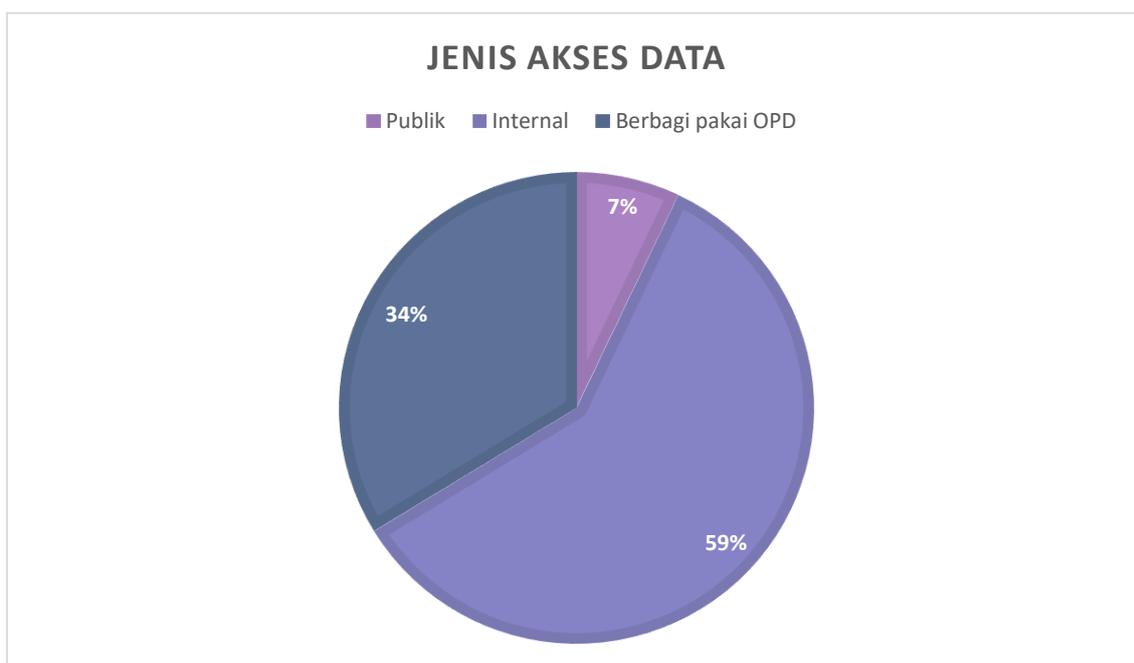


Gambar 4.4 Aplikasi Database yang digunakan

Berdasarkan **Gambar 4.4**. Secara keseluruhan penyimpanan data yang menggunakan aplikasi *database* maupun bukan aplikasi *database* pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah **11 (2,5%)** disimpan menggunakan **Ms.Word**, **228 (57%)** disimpan menggunakan **Ms.Excel**, **1 (0,25%)** data disimpan menggunakan **Ms. Access**, **1 (0,25%)** data disimpan menggunakan **Ms. SQL Server**, **145 (37%)** data disimpan menggunakan **MySQL**, **8 (2%)** data disimpan menggunakan **Postgre** dan **3 (1%)** disimpan menggunakan **Oracle**.

4.3.4 Jenis Akses Data

Jenis Akses Data merupakan penggunaan data dari setiap OPD. Berdasarkan hasil survei, terdapat tiga jenis akses data pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu, publik, internal, dan berbagi pakai OPD. **Gambar 4.5** menjelaskan jenis akses data pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 4.5 Persentase Jenis Akses Data

Berdasarkan **Gambar 4.5**, dari 397 data di Kabupaten Deli Serdang terdapat **28 (7%)** data dengan jenis akses data **publik**, **235 (59%)** data dengan jenis akses data **internal**, dan **134 (34%)** data dengan jenis akses data **berbagi pakai OPD**.

4.3.5 Integrasi Data dan Informasi eksisting

Berdasarkan hasil survei, berikut ini adalah integrasi ada dan informasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dari data yang ada terdapat integrasi data antar OPD dengan aplikasi tertentu. Contohnya pada Inspektorat Daerah terdapat integrasi data dengan Badan Kepegawaian Daerah terkait data kepegawaian melalui aplikasi SIASN. **Tabel 4.1** merupakan penjelasan ketersediaan integrasi data dan informasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 4.1 Ketersediaan Integrasi data dan informasi

Kode OPD	Nama OPD	Nama Aplikasi	Nama Data yang terintegrasi	Aplikasi Terintegrasi	OPD yang terintegrasi
11	Inspektorat Daerah	MY SAPK	Data kepegawaian	SIASN	Badan Kepegawaian Daerah
16	Badan Pendapatan Daerah	EPADI	Tidak ada	PBB	Badan Pendapatan Daerah
16	Badan Pendapatan Daerah	BPHTB Online	Tidak ada	Badan Pertanahan Daerah, Bank Mandiri	Badan Pendapatan Daerah
16	Badan Pendapatan Daerah	SISMIOP NG	Tidak ada	Bank Sumut	Badan Pendapatan Daerah
17	Badan Kepegawaian Daerah	SIMPEG	NIP	Ekinerja, absensi, Mutasi, dan	Badan Kepegawaian Daerah
17	Badan Kepegawaian Daerah	Ekinerja	NIP	Simpeg, Mutasi	Badan Kepegawaian Daerah
17	Badan Kepegawaian Daerah	Web BKD	Berita	e-kinerja, simpeg, mutasi online dan statistik PNS	Badan Kepegawaian Daerah
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Aplikasi profil DPMD	Profil desa dan BUMDES	Profil desa dan BUMDES	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (kemendes)
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Insligt Perpustakaan	Database dari Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pendataan jumlah buku yang keluar/dipinjam di perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	SERIDELI ONLINE	Nomor pokok wajib pajak, nomor objek pajak	BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Sismiop (Aplikasi PBB milik Bapenda), DJP Online, BSrE (Penerapan tanda tangan elektronik)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	SIMRS	NIK, No RM	Aplicare	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang

4.4 Metadata Data dan Informasi

Metadata merupakan ringkasan detail mendasar tentang suatu data yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata Data dan Informasi adalah sebuah data yang menjelaskan suatu kegiatan urusan pemerintahan pada setiap OPD. Berdasarkan Rancangan Lampiran Peraturan Presiden Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintah. Urusan tersebut di bagi menjadi dua jenis data yaitu Data Pokok dan Data Tematik. Data Pokok merupakan data yang dikelompokkan ke dalam sektor pemerintahan dan data pendukung umum. Data Tematik merupakan data yang menjelaskan urusan pemerintahan di emban oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pengelompokan ini memberikan data yang lebih akurat berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintahan dan menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019. Atribut yang akan diidentifikasi pada metadata ini adalah nama data, uraian data, tujuan data, kode model referensi data, kode OPD, penanggungjawab OPD, bidang OPD, bentuk data (*online/offline*), tempat penyimpanan data, aplikasi database atau penyimpanan data yang dipakai, akses data, dan ID meta data terkait. Daftar metadata eksisting Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada **Lampiran 4.1 Metadata Data dan Informasi**

4.5 Permasalahan Data dan Informasi

Berdasarkan hasil survei pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang, permasalahan Data dan Informasi yang dialami oleh beberapa OPD antara lain yaitu:

- 1) Data hilang
- 2) Data belum terpusat
- 3) Data belum teratur
- 4) Data tiak terbackup dengan otomatis
- 5) Data tidak update
- 6) Kerusakan data
- 7) Data berulang
- 8) Manajemen data belum baik
- 9) Data masih disimpan secara manual
- 10) Redundant data
- 11) Server hang

4.6 Analisis Gap

Analisis Gap atau kesenjangan adalah membandingkan kondisi data dan informasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan kondisi ideal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Analisis gap atau kesenjangan data dan informasi dijelaskan sesuai dengan parameter dan referensi nasional berdasarkan kondisi eksisting dan kondisi ideal sehingga diketahui tingkat kesenjangan atau Gap untuk menjadi usulan agar data dan informasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi lebih baik. **Tabel 4.2** menunjukkan Analisis Gap data dan Informasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Tabel 4.2 Analisis gap data dan informas

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Bentuk data yang dimiliki	Terdapat 41% bentuk data online pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Bentuk data Online dibutuhkan untuk mendukung program pemerintahan satu data	Terdapat kesenjangan 59% bentuk data Offline karena beberapa OPD penanggung jawab data masih menggunakan penyimpanan manual
Tempat Penyimpanan data	2% tempat penyimpanan data berapa pada Dinas Komunikasi dan Informatika 7% disimpan pada server OPD 60% disimpan pada internal OPD 31% disimpan pada pihak ketiga 0,25% disimpan di server pusat	Tempat penyimpanan data dan informasi disimpan pada server pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga penyimpanan data dan informasi terpusat pada 1 (satu) server pusat dan keamanan penggunaannya lebih terkontrol.	Saat ini masih terdapat 2% data yang telah disimpan pada server Dinas Komunikasi dan Informatika dan Informatika sehingga masih terdapat kesenjangan atau Gap sebesar 98% data yang masih belum disimpan pada Dinas Komunikasi dan Informatika secara terpusat
Aplikasi Database	11 (2,5%) disimpan menggunakan Ms.Word, 228 (57%) disimpan menggunakan Ms.Excel, 1 (0,25%) data disimpan	Aplikasi Database yang digunakan dapat mendukung penggunaan Sistem Penghubung Layanan sehingga dapat berbagi data yang dibutuhkan	Saat ini Aplikasi Database yang digunakan untuk menyimpan data pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih 40% sehingga masih terdapat kesenjangan atau Gap sebesar 60%.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	<p>menggunakan Ms. Access,</p> <p>1 (0,25%) data disimpan menggunakan Ms. SQL Server,</p> <p>145 (37%) data disimpan menggunakan MySQL,</p> <p>8 (2%) data disimpan menggunakan Postgre</p> <p>3 (1%) disimpan menggunakan Oracle.</p>		<p>dari 60% data yang disimpan, terdapat 2,5% disimpan menggunakan Ms. Word, 57% disimpan menggunakan Ms. Excel, dan 0,25% disimpan menggunakan Ms. Sql Server.</p>
Jenis akses data	<p>7% data dengan jenis akses data Publik</p> <p>59% dengan jenis akses data internal</p> <p>34% dengan jenis akses data berbagi pakai OPD</p>	<p>Jenis akses data dapat digunakan sesuai kebutuhannya, jika data milik OPD tertentu dibutuhkan oleh OPD lain atau Publik maka seharusnya dapat diekses atau berbagi data dengan pihak lain.</p>	<p>Saat ini masih terdapat data yang masih diakses secara individu sehingga apabila OPD lain atau publik membutuhkan data maka harus meminta secara manual kepada pemilik data tersebut.</p>

BAB 5

Kondisi Eksisting Layanan SPBE dan Analisis GAP

Layanan merupakan suatu cara atau kegiatan memberikan jasa atau barang kepada orang lain. Dalam hal ini penanggung jawab layanan adalah instansi Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan kepada publik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1 Pengertian Layanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Layanan SPBE merupakan suatu layanan umum pemerintahan kepada publik yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya. Layanan SPBE dalam sistem pemerintahan saat ini mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan terhadap layanan yang dimiliki. Sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pemerintah dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan pemerintah dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi layanan, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Adapun Inisiatif Strategi dari Kegiatan Layanan SPBE adalah sebagai berikut:

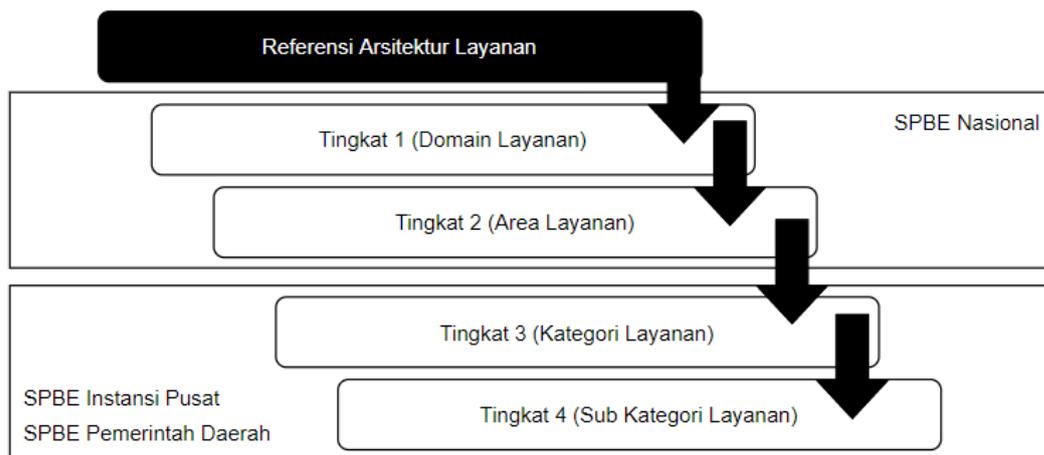
- 1) Survei Penggunaan SPBE;
- 2) Portal Pelayanan Publik yang terintegrasi;
- 3) Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi; dan
- 4) Penyelenggaraan Manajemen Layanan.

5.2 Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Berdasarkan penjabaran yang terdapat pada Lampiran Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Arsitektur SPBE Nasional, Referensi Arsitektur Layanan (RL) adalah sistem pengklasifikasian layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RL merupakan hasil dari identifikasi kemudian dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada pada lingkungan pemerintahan, hal ini bertujuan untuk

menghindari terjadinya duplikasi dan dapat memberikan layanan pemerintahan secara komprehensif.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna yang mewakili karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu Referensi Arsitektur Layanan diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam Referensi Arsitektur Data dan Informasi hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan Cipta Kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (Government to Citizen/G2C dan Government to Business/G2B) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (Government to Government/ G2G, Government to Employee/G2E).



Gambar 5.1 Struktur Referensi Arsitektur Layanan

Berikut ini merupakan penjelasan dari Struktur Referensi Arsitektur Layanan dari Error! Reference source not found. dan Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan.

1) Struktur Referensi Arsitektur Layanan

Struktur dari Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional terdiri atas dua tingkat, yaitu:

- Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai Referensi Arsitektur Layanan tingkat 1 (pertama).
- Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai Referensi Arsitektur Layanan tingkat 2 (kedua).

2) Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan

Referensi Arsitektur Layanan terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 40 (empat puluh) area layanan di tingkat 2 (kedua). IPPD, dalam menyusun Referensi Arsitektur Layanan masing-masing mengacu pada Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional, serta melengkapi Referensi Arsitektur Layanan pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Error! Reference source not found.. Berbagai layanan yang dapat diklasifikasikan dalam Referensi Arsitektur Layanan, akan menjawab tujuan dan sasaran SPBE.

5.3 Kondisi Eksisting Layanan SPBE

Dalam proses peningkatan pelayanan yang ada pada suatu pemerintahan hal pertama yang dapat dilakukan adalah proses identifikasi layanan yang dimiliki suatu pemerintah daerah. Untuk mengetahui kondisi eksisting suatu layanan dapat dilakukan dengan cara identifikasi berdasarkan kategorinya. Layanan tersebut dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama identifikasi layanan Administrasi dan identifikasi layanan Publik. Kabupaten Deli Serdang memiliki **310 layanan SPBE**, dengan rincian sebanyak **194 layanan publik** dan **106 layanan administrasi pemerintah**. Berikut ini merupakan hasil identifikasi hasil survey layanan yang ada pada pemerintah daerah Deli Serdang.

5.3.1 Layanan Administrasi Berbasis Elektronik

Layanan Administrasi Berbasis Elektronik berdasarkan pada **Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** merupakan layanan internal pemerintahan mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan **Permenpan 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, layanan administrasi terletak pada aspek 7 indikator 32-41. **Tabel 5.1** merupakan nama indikator domain layanan administrasi SPBE

Tabel 5.1 Indikator domain Layanan Administrasi SPBE

Aspek/Indikator	Nama Indikator Domain Layanan Administrasi SPBE
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Aspek/Indikator	Nama Indikator Domain Layanan Administrasi SPBE
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Berdasarkan **Tabel 5.1**, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik terbagi menjadi **10 jenis layanan**, yaitu layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Layanan administrasi diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum. Namun, jika layanan administrasi yang diberikan belum didukung oleh aplikasi umum, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus. Hasil identifikasi 10 Layanan Administrasi Berbasis Elektornik dapat dilihat pada **Tabel 5.2**.

Tabel 5.2 Daftar jenis Layanan Administrasi

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan
1	Perencanaan	RL 02.01 Dalam Negeri	Layanan Perencanaan	SIPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				E-Cascading	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Penganggaran	RL 02.02 Keuangan	Layanan Penganggaran	SIPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				SIMDA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan
			layanan penganggaran desa	SISKUEDES	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Keuangan	RL 02.02 Keuangan	layanan Keuangan Desa	SISKUEDES	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			layanan Keuangan	SIMDA Keuangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Pengadaan Barang dan Jasa	RL 02.08 Organisasi dan Tata Kelola	layanan Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				SIRUP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				E-Katalog	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	Kepegawaian	RL 02.04 Aparatur Negara	Layanan Informasi Pegawai Online	MySAPK	Badan Kepegawaian
			Layanan Integrasi Data dan Manajemen Kepegawaian	SIMPEG	Badan Kepegawaian
			Layanan Manajemen Data Kepegawaian di Dinas Pendidikan	SIMPAI (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dinas Pendidikan)	Dinas pendidikan
6	Kearsipan	RL 02.04 Aparatur Negara RL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Kearsipan	SRIKANDI	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan
7	Pengelolaan Barang Milik Negara	RL 02.02 Keuangan	layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	SIMDA BMD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8	Pengawasan Internal terkait Pemerintah	RL 02.04 Aparatur Negara RL 02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Pengawasan	belum ada aplikasi	
9	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RL 02.07 Akuntabilitas Kinerja	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	e-SAKIP REVIU	Bagian Organisasi
				E-Sakip	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Kinerja Pegawai	RL 02.04 Aparatur Negara	Layanan Kinerja Pegawai	E-Kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dapat diketahui berdasarkan **Tabel 5.2** dijelaskan bahwa terdapat 10 jenis layanan administrasi dengan 14 layanan yang ada pada instansi pemerintah daerah Deli Serdang, namun tidak semua jenis layanan tersebut didukung oleh aplikasi eksistingnya. Berdasarkan data tersebut, layanan didukung oleh aplikasi umum pemerintah pusat dan ada pula yang menggunakan aplikasi daerah. Mengacu pada Perpres 95 Tahun 2018 Tentang SPBE, pada layanan SPBE bahwa percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai. Jumlah aplikasi yang mendukung keseluruhan layanan adalah **16** aplikasi administrasi, **9 layanan** didukung oleh aplikasi umum dari pusat dan **9 layanan didukung aplikasi administrasi daerah**, Sedangkan 1 layanan belum didukung aplikasi dalam penggunaannya. Layanan yang belum didukung oleh aplikasi adalah layanan pengawasan internal yang merupakan layanan dari inspektorat untuk melakukan pengawasan di Lingkungan Kabupaten Deli Serdang

5.3.2 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Layanan Publik Berbasis Elektronik berdasarkan pada PERPRES 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan layanan yang ditujukan untuk mendukung instansi lain atau masyarakat publik untuk mendukung

tugas dan fungsi dari setiap perangkat daerah pemberi layanan. Berdasarkan PERMENPAN 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, layanan publik terletak pada aspek 8 indikator 42-47, berikut ini merupakan nama indikator domain layanan publik SPBE

Tabel 5.3 Indikator domain Layanan Publik

Aspek/Indikator	Nama Indikator Domain Layanan Publik SPBE
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
Indikator 44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2

Indikator 45-47 tentang Layanan Publik Sektoral ini sebelumnya telah dijelaskan pada Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE pada **Paragraf 3 Layanan Publik Berbasis Elektronik Pasal 44** ayat (1) yaitu Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Maka hasil identifikasi layanan publik berbasis elektronik pada Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada **Tabel 5.4**

Tabel 5.4 Jenis Layanan Publik

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan
1	Pengaduan Layanan Publik	RL 01.24 Pemerintahan daerah	layanan pengaduan layanan publik	SP4N LAPOR	Diskominfo dan Inspektorat
				Call Center Dinsos	Dinas Sosial
2	Data Terbuka	RL 02.44 Informasi	Layanan Informasi Data sektoral	Belum ada aplikasi	

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	RL 01.28 Hukum	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	JDIH	Bagian Hukum
Publik Sektoral					
1	Pendidikan	RL 01.31 Pendidikan	Layanan data pokok pendidikan	Datok Soltan	Dinas Pendidikan
2	Pengajaran	RL 01.33 Ilmu Pengetahuan	Tidak ada		
3	Pekerjaan dan Usaha	RL 01.32 Ketenagakerjaan	Layanan informasi pekerjaan	KARIRHUB	Dinas Ketenagakerjaan
			layanan informasi produk UMKM	Deliserdang mall.com	Dinas Koperasi dan UMKM
4	Tempat Tinggal	RL 01.20 Perumahan	Tidak ada		
5	Komunikasi dan Informasi	RL 01.44 Informasi	layanan Informasi publik	PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Lingkungan Hidup	RL 01.41 Lingkungan Hidup	Layanan Informasi Manajemen Air Minum dan Sanitasi	SIMANTAN	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
7	Kesehatan	RL 01.25 Kesehatan	layanan gawat daruratan kepada masyarakat	Public Service Center	Dinas Kesehatan
			layanan manajemen rumah sakit	SIMRS	RSUD Deli serdang
			layanan antrean online bagi pengguna JKN	SIMPUS	Puskesmas
8	Jaminan Sosial	RL 01.26 Sosial	layanan pra bencana, pasca bencana,	Belum ada aplikasi	Badan Penanggulangan

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Layanan Eksisting	Nama Aplikasi Eksisting	OPD Pemilik Layanan
			pengecehan bencana		Dinas Bencana Daerah
9	Energi	RL 01.38 Energi	Tidak ada		
10	Perhubungan	RL 01.19 Transportasi	layanan Pendaftaran uji berkala secara online	E-Kir	Dinas Perhubungan
11	Sumber Daya Alam	RL 01.04 Ekonomi	Tidak ada		
12	Pariwisata	RL 01.15 Pariwisata	layanan informasi pariwisata	SI DEWI DESA https://www.sidewide.com PTDUP	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata
13	Kependudukan	RL 01.23 Kependudukan	pendaftaran akta secara online berbasis email	Akta online	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	perizinan	RL 01.16 Perizinan dan Akreditasi	layanan perizinan	SERIDELI	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan PERPRES 95 Tahun 2018 tentang SPBE pada **pasal 44 ayat 3** menjelaskan bahwa layanan bahwa Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum. Namun, jika tidak ada aplikasi umum berbagi pakai layanan publik berbasis elektronik pakai maka menurut **pasal 44 ayat 4** layanan publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus untuk mendukung tugas dan fungsi instansi perangkat daerah.

Dapat diketahui berdasarkan **Tabel 5.4** menjelaskan bahwa terdapat **3 jenis layanan publik** dan **13 jenis layanan publik sektoral** yang telah teridentifikasi. Dari keseluruhan jenis layanan publik sektoral, terdapat **4 jenis layanan yang belum**

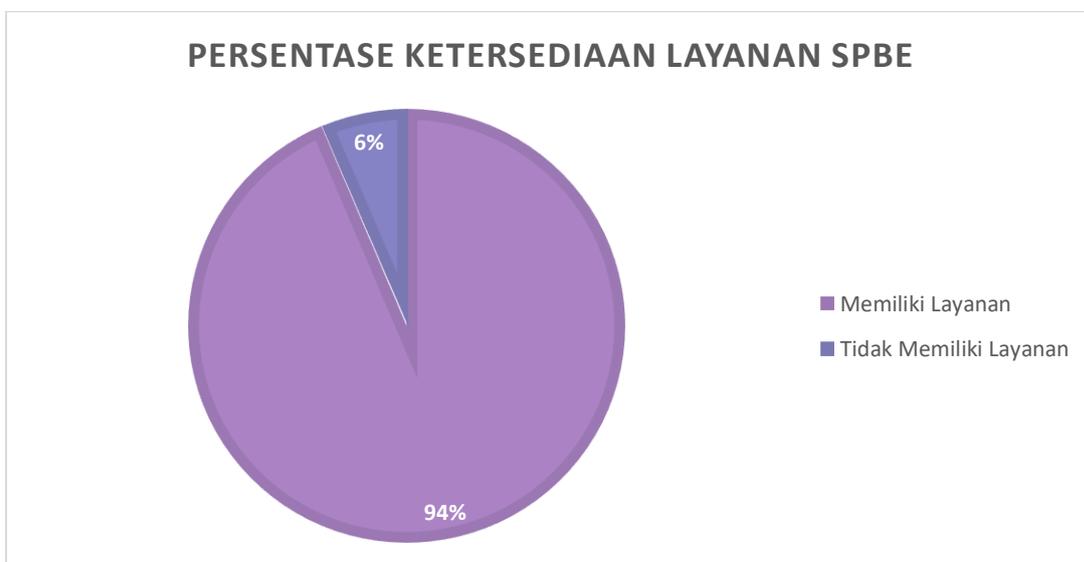
didukung oleh layanan dan aplikasi eksisting, jenis layanan tersebut yaitu sektor **sumberdaya alam, energi, tempat tinggal dan sektor pengajaran**. Berdasarkan hasil survey aplikasi publik pada pemerintah Deli Serdang diketahui bahwa terdapat **16 aplikasi, 11 layanan** didukung oleh aplikasi khusus, **5 layanan** didukung oleh aplikasi pusat.

5.3.3 Layanan yang dimiliki Seluruh OPD

Dalam identifikasi layanan yang ada pada pemerintah daerah berdasarkan Perpres 95 Tahun 2018, layanan di identifikasi menjadi tiga bagian, mulai dari ketersediaan layanan SPBE, Status Akses Layanan SPBE dan Jenis Layanan Berdasarkan Domain.

a) Ketersediaan Layanan SPBE

Berdasarkan hasil survey pada seluruh OPD di Kabupaten Deli Sedang, diketahui bahwa belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki layanan. Hasil identifikasi layanan SPBE pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdapat **310 layanan** di seluruh Instansi Pemerintah Daerah.



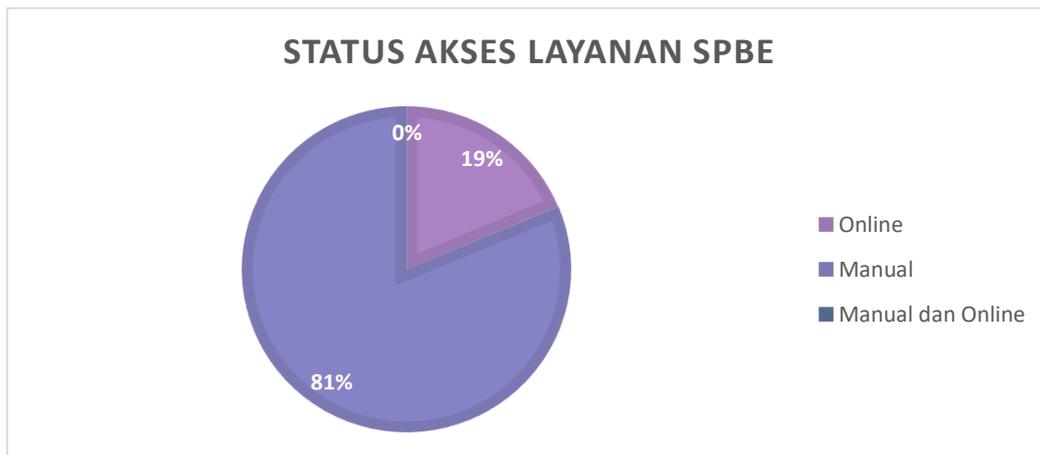
Gambar 5.2 Persentase Ketersediaan Layanan SPBE

Berdasarkan Error! Reference source not found., diketahui bahwa **6%** merupakan jumlah 3 OPD yang belum memiliki layanan dan **94%** merupakan jumlah 44 OPD telah memiliki layanan dari jumlah total 47 OPD yang ada pada pemerintah daerah Deli Serdang.

b) Status Akses Layanan SPBE

Dari hasil survey yang telah dilakukan pada pemerintah daerah Deli Serdang sebelumnya, status akses layanan dibedakan menjadi tiga bagian dengan mengacu

pada PERPRES 95 Tahun 2018 yaitu status akses layanan Online, Manual dan Manual & Online.

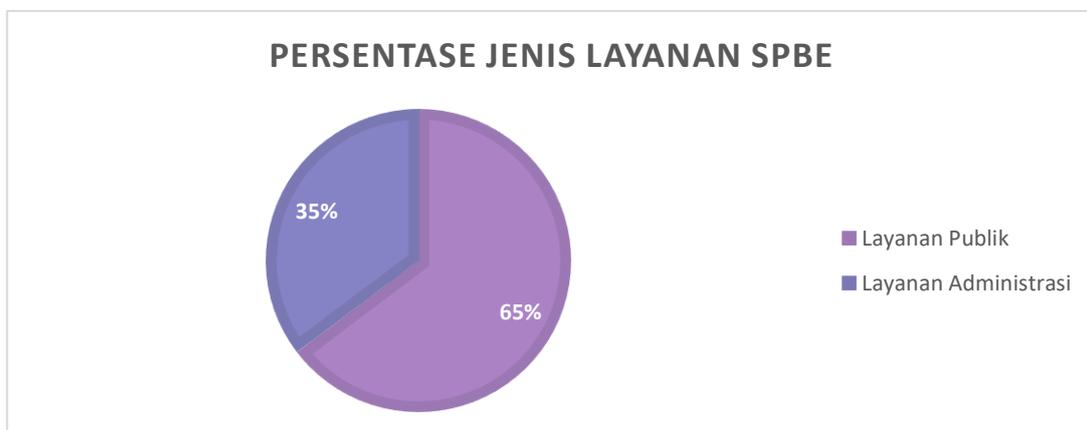


Gambar 5.3 Status akses layanan

Dari total **310 layanan SPBE** yang telah diidentifikasi terdapat layanan dengan status akses layanan **Online 19% dengan total 58** layanan SPBE, dengan status akses layanan **Manual 81% dengan total 252** layanan SPBE dan untuk status layanan **Manual & online tidak ada** layanan SPBE yang teridentifikasi.

c) Jenis Layanan Berdasarkan Domain Layanan

Berdasarkan hasil survey pada pemerintah daerah Deli Serdang jumlah layanan adalah 267 di keseluruhan instansi, layanan tersebut dikategorikan berdasarkan domainnya pada Perpres 95 Tahun 2018 ada dua yaitu layanan administrasi pemerintah dan layanan publik, **Gambar 5.4** menjelaskan layanan berdasarkan domainnya.



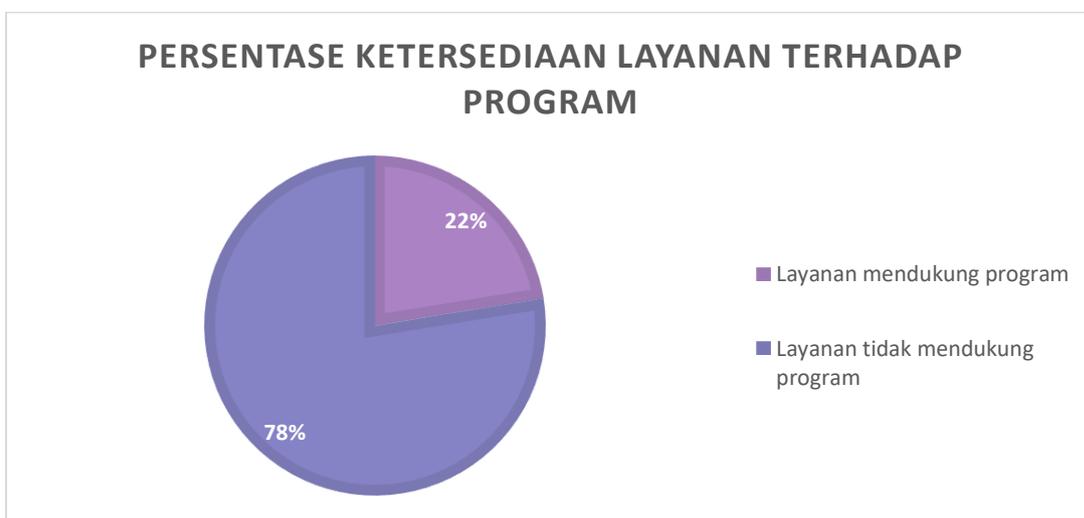
Gambar 5.4 Persentase Jenis Layanan SPBE

Dapat diketahui berdasarkan **Gambar 5.4** menunjukkan layanan dengan jenis layanan publik, termasuk didalamnya ada layanan publik umum dan sektoral pemerintah sebesar **65%** dengan jumlah **194 layanan publik**, sedangkan untuk jenis

layanan administrasi pendukung pemerintahan diketahui sebanyak **35%** dengan jumlah **106 layanan administrasi**.

5.3.4 Ketersediaan Layanan Terhadap Program

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan RPJMD terdapat program-program yang mendukung layanan untuk itu program-program tersebut dikelompokkan terhadap layanan pada instansi perangkat daerah dengan tujuan menjadi gambaran kepada masyarakat terkait layanan yang di emban oleh instansi perangkat daerah. RPJMD Kabupaten Deli Serdang di sahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Program-program pada RPJMD ini selanjutnya diidentifikasi berdasarkan layanan eksisting yang dimiliki. Penjabaran ketersediaan layanan terhadap program dalam RPJMD Tahun 2019-2024 pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dijelaskan pada **Lampiran 5.1 Identifikasi Ketersediaan Layanan Terhadap Program**. Gambar 5.5 merupakan persentase hasil identifikasi ketersediaan layanan terhadap program RPJMD.



Gambar 5.5 Ketersediaan Layanan Terhadap Program OPD

Dari hasil identifikasi 310 layanan SPBE, tidak secara keseluruhan layanan SPBE tersebut mendukung program dan sebaliknya. Jumlah program yang teridentifikasi di RPJMD sejumlah **152 program**. Program ini merupakan program prioritas yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait dalam periode tahun RPJMD. Keseluruhan program yang teridentifikasi terhadap **72 program yang didukung oleh layanan**. Dan sebaliknya, terdapat **229 layanan yang tidak mendukung program**. Sehingga **Gambar 5.4** dapat menjelaskan bahwa jumlah layanan yang mendukung program yaitu **65 (22%) layanan**, sedangkan layanan yang tidak mendukung program sejumlah **225 (78%) layanan**.

5.4 Metadata Layanan SPBE

Metadata Layanan SPBE merupakan informasi terstruktur terkait layanan yang ada pada pemerintah yang mendeskripsikan, menjelaskan agar mudah ditemukan, digunakan atau dikelola kembali. Berdasarkan Perpres 95 Tahun 2018 referensi metadata layanan SPBE terdapat 11 atribut dalam pengelompokannya, **Tabel 5.5** merupakan atribut dalam Metadata Layanan SPBE.

Tabel 5.5 Atribut Metadata Layanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Layanan	Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Tujuan Layanan	Merupakan penjelasan tujuan dari layanan
4	Fungsi Layanan	Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam layanan
5	Model Referensi Layanan	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama layanan yang dipilih
6	Unit Pelaksana	Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan layanan
7	Kementerian/ Lembaga terkait	Merupakan kementerian/lembaga terkait dengan layanan
8	Urusan Pemerintahan Terkait	Merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan layanan
9	Target Layanan	Merupakan target pengguna layanan
10	Metode Layanan	Merupakan model dari layanan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

Berdasarkan metadata layanan pada pemerintah daerah Deli Sedang menunjukkan bahwa layanan yang dikelola telah memenuhi referensi dari SPBE nasional namun tidak semua OPD terdapat layanan, seperti contoh pada OPD Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Bagian Perekonomian dan SDA. Untuk lebih detail dapat dilihat pada **Lampiran 5.2 Metadata Layanan SPBE**

5.5 Permasalahan Layanan SPBE

Dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun antar pelayanan lintas sektoral adapun permasalahan yang dialami oleh OPD. Permasalahan tersebut apabila tidak segera ditangani maka mengakibatkan kurang efektifnya pelayanan, pelayanan jadi lama bahkan bisa membuat gagal dalam pelayanan. Berdasarkan hasil survei layanan SPBE pada pemerintah daerah Deli Serdang ditemui beberapa permasalahan, antara lain adalah:

- Banyak layanan masih manual
- Kurangnya perangkat pendukung pelayanan
- SDM yang ahli kurang
- SDM dalam pelayanan kurang

5.6 Analisis Gap

Dari seluruh data yang dapat dikumpulkan menggunakan teknik survey, dapat ditemukan Gap atau Kesenjangan. Gap yang ditentukan adalah dengan membandingkan antara kinerja eksisting pemerintah kabupaten saat ini (2021) dengan kondisi ideal yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Adapun hasil dari analisis kesenjangan yang telah dilakukan dijabarkan pada **Tabel 5.6**

Tabel 5.6 Analisa Gap Layanan SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Layanan administrasi	Terdapat 16 aplikasi administrasi, 9 layanan didukung oleh aplikasi umum dari pusat dan 9 layanan didukung aplikasi administrasi daerah, 1 layanan belum didukung aplikasi dalam penggunaannya	Menggunakan aplikasi bagi pakai (Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Diperlukan perubahan 1 layanan daerah yang belum didukung aplikasi dan 9 layanan yang menggunakan aplikasi khusus harus di ganti dengan aplikasi umum dari pusat
Layanan Publik	Terdapat 3 jenis layanan publik dan 14 jenis layanan publik sektoral. 4 jenis layanan sektoral yang belum didukung oleh layanan eksisting OPD. dari seluruh layanan yang ada terdapat 10 layanan	Menggunakan aplikasi bagi pakai dan pemerintah dapat menyempurnakan dengan pembangunan aplikasi khusus jika belum tersedia aplikasi umum bagi pakai (Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Diperlukan usulan 4 layanan yang masih manual yaitu sektor sumberdaya alam, energi, tempat tinggal dan sektor pengajaran

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	didukung oleh aplikasi khusus, 8 layanan didukung oleh aplikasi pusat. Total terdapat 19 aplikasi yang mendukung layanan		
Ketersediaan layanan SPBE	terdapat 3 OPD yang belum memiliki layanan dan 44 OPD telah memiliki layanan	Seluruh instansi pemerintahan memiliki layanan dan atau mendukung layanan OPD lain	Perlu dilakukan analisis kembali terhadap OPD yang belum memiliki layanan
Akses layanan	Terdapat 58 layanan online, 252 layanan manual dan tidak ada layanan online dan manual	Layanan didukung aplikasi umum berbagi pakai dan atau aplikasi khusus (Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE)	Perlu dilakukan perubahan pada 252 layanan yang masih manual menjadi online untuk memaksimalkan pelayanan yang efektif dan efisien.
Ketersediaan layanan terhadap program	Terdapat 152 program RPJMD. Dimana program yang didukung oleh layanan pada yaitu sejumlah 72 Program . Sedangkan terdapat 83 Program yang tidak didukung oleh layanan.	Seluruh program yang tercantum pada RPJMD telah didukung oleh layanan pemerintah kabupaten Deli Serdang	Perlu dilakukan penambahan terhadap layanan agar program RPJMD dapat terealisasi secara keseluruhan

BAB 6

Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE dan Analisis GAP

Dalam pelaksanaan administrasi ataupun tugas dalam pemerintahan tidak luput dari peran aplikasi. Aplikasi dalam pemerintahan merupakan sebagai alat bantu dalam proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dapat sebagai alat bantu dalam pembuatan pelaksanaan pelayanan ke pada publik ataupun sebagai alat bantu laporan dan manajemen data pemerintahan. dalam mencapai tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah dikehendaki maka dikembangkan aplikasi sebagai salah satu media dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

6.1 Pengertian Aplikasi SPBE

Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 (Perpres SPBE, pasal 1 ayat 21) Tentang Arsitektur SPBE Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Dalam pengembangannya aplikasi dibagi menjadi 2 jenis, aplikasi umum dan aplikasi khusus.

Aplikasi Umum merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh kementerian atau pemerintah pusat agar bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam membantu manajemen dan melaksanakan proses bisnis pemerintahan daerah. Aplikasi Umum merupakan aplikasi yang diperuntukkan digunakan di seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar data yang dikelola menjadi satu dan mudah untuk dikelola.

Aplikasi khusus merupakan aplikasi yang dibangun, kembangkan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendukung proses bisnis ataupun pelayanan dengan kebutuhan tertentu. Aplikasi khusus pada umumnya dibangun untuk dikelola oleh suatu instansi daerah tertentu dikarenakan yang fungsinya tidak sama dengan instansi pemerintah daerah lainya.

Penjabaran arsitektur aplikasi SPBE menurut Lampiran Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Arsitektur SPBE Nasional menyebutkan bahwa posisi aplikasi dalam SPBE menjadi pendukung salah satu dari 4 pilar dalam SPBE yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dimana Domain Arsitektur Aplikasi menempati posisi di bawah domain layanan yang menunjukkan bahwa aplikasi sebagai media pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan dari instansi pemerintah.

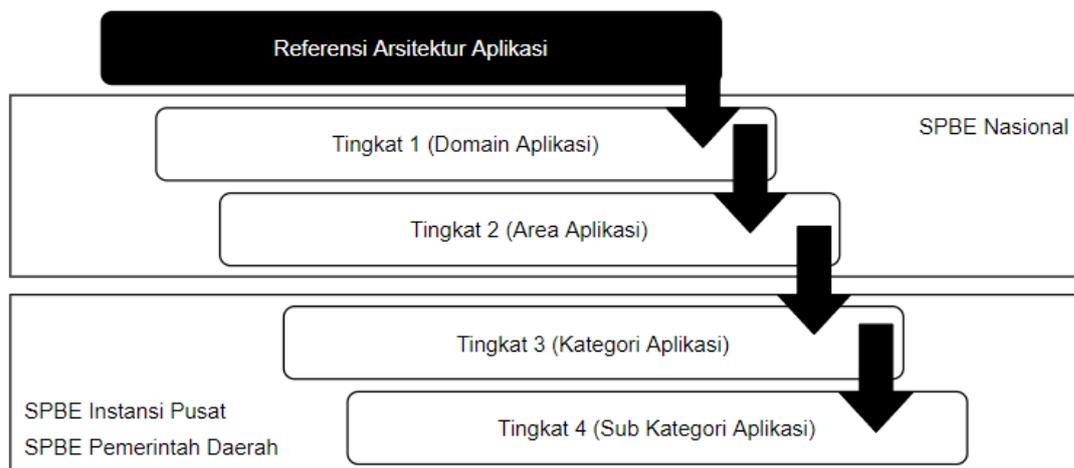
6.2 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Berdasarkan penjelasan pada Lampiran Perpres 95 Tahun 2018 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, **Referensi Arsitektur Aplikasi (RA)** adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi itu sendiri, adalah satu atau sekumpulan Referensi Arsitektur Layanan Tingkat 1 (Domain Layanan) Tingkat 2 (Area Layanan) Tingkat 3 (Kategori Layanan) Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan) SPBE Nasional SPBE Instansi Pusat SPBE Pemerintah Daerah 29 program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah

Tujuan dari disusunnya RA adalah menjadi acuan dalam pengklasifikasikan aplikasi dan komponennya. Dengan demikian pemetaan domain arsitektur aplikasi dapat disusun baik untuk kondisi saat ini maupun perencanaan pengembangannya. Berdasarkan informasi yang dihasilkan dari proses pemetaan tersebut, akan membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi ataupun redundansi, peluang untuk berbagi pakai, ataupun untuk penggunaan kembali.

Struktur dari RA SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam 2 (dua) domain aplikasi sebagai RA tingkat 1 (pertama).
- 1) Area aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam area aplikasi sesuai dengan masing-masing domain aplikasinya sebagai RA tingkat 2 (kedua).



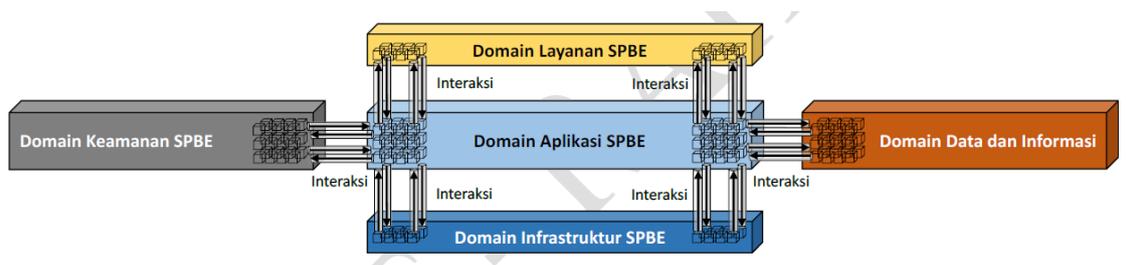
Gambar 6.1 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi

Gambar 6.1 merupakan struktur referensi Arsitektur Aplikasi. RA memiliki taksonomi yang terdiri dari terdiri dari **2 (dua) domain aplikasi** di tingkat 1 (pertama) dan **3 (tiga) area aplikasi** di tingkat 2 (kedua). Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Referensi Arsitektur Aplikasi antara lain:

- 1) Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK.
- 2) Aplikasi yang berorientasi pada layanan.
- 3) Didefinisikan sebagai hierarki komponen aplikasi.
- 4) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan.
- 5) Berbasis standar terbuka (*open source*),
- 6) Terkorelasi dengan RL, dan RD melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung RK.

Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK;
- b. aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- c. didefinisikan sebagai hierarki komponen aplikasi;
- d. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- e. berbasis kode sumber terbuka (*open source*); dan
- f. terkorelasi dengan domain layanan SPBE, dan domain data dan informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE,

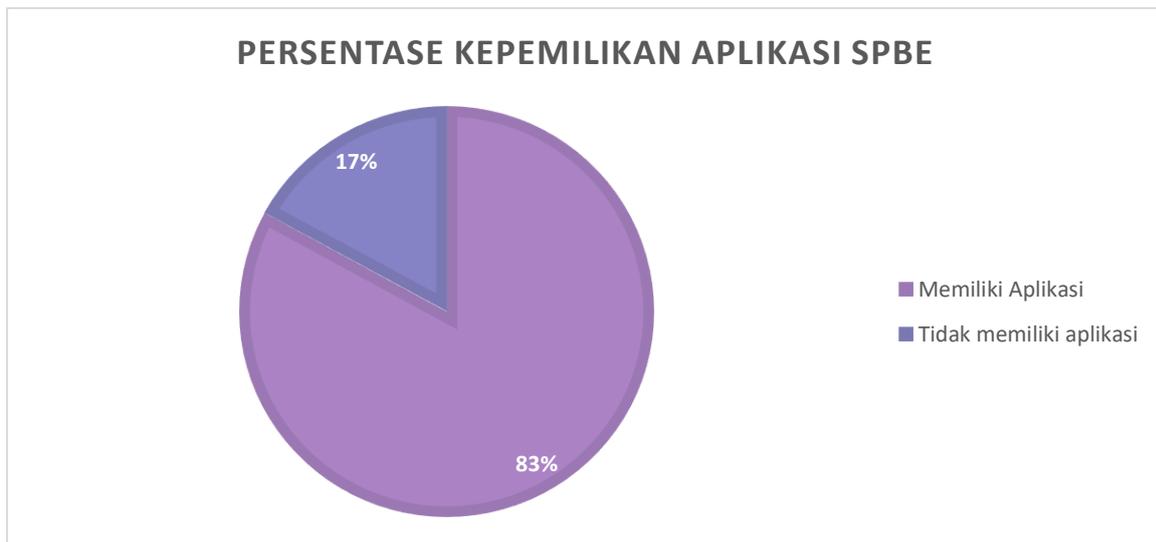


Gambar 6.2 Relasi langsung pada Domain Aplikasi SPBE

6.3 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE

Kondisi eksisting aplikasi SPBE pada pemerintah daerah Deli Sedang berdasarkan hasil survey diketahui bahwa terdapat **128 aplikasi** SPBE yang digunakan oleh keseluruhan OPD. Berdasarkan penggunaannya aplikasi di bedakan menjadi dua, yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum terdiri dari aplikasi administrasi dan publik, sedangkan aplikasi khusus terdiri dari aplikasi misi tertentu dan fungsi tertentu. Berdasarkan 47 OPD yang disurvey, tidak seluruhnya

memiliki aplikasi secara khusus yang digunakan oleh OPD tersebut, namun hanya sebagai pengguna aplikasi yang memang berbagi pakai dengan OPD lainnya. Persentase kepemilikan Aplikasi SPBE dapat dilihat pada **Gambar 6.3**.



Gambar 6.3 Persentase Ketersediaan Aplikasi SPBE

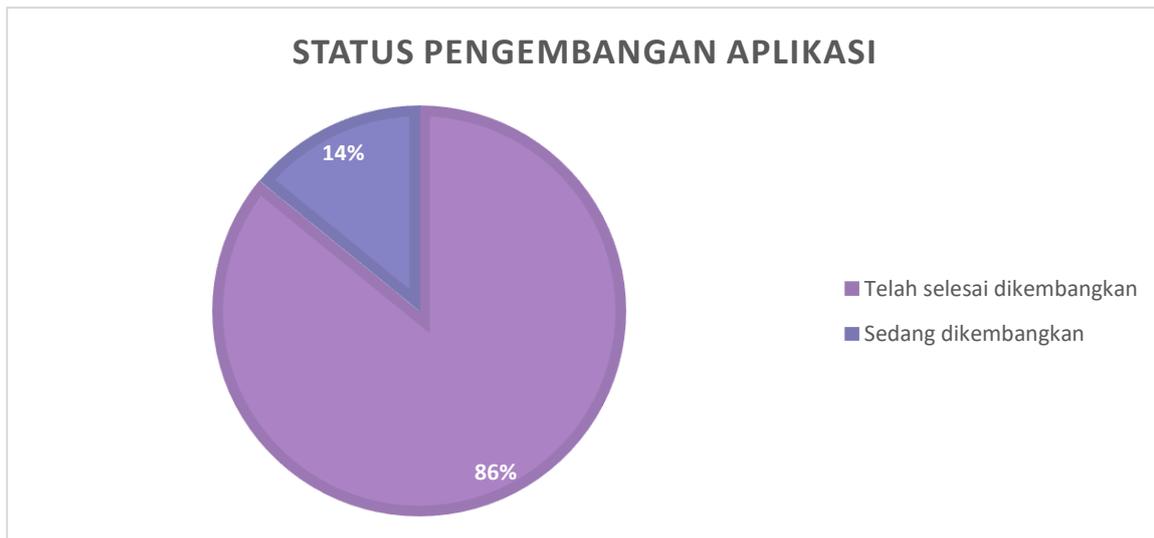
Dari **Gambar 6.3** diketahui bahwa, ketersediaanya aplikasi pada pemerintah daerah Deli Serdang terdapat 17% atau 8 OPD yang belum memiliki aplikasi, sedangkan 83% dengan 39 OPD telah memiliki aplikasi. OPD yang tidak memiliki aplikasi secara khusus yaitu Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Desa Sekip, dan RSUD Pancur Batu.

6.3.1 Status Pengembangan Aplikasi SPBE

Pada status pengembangan aplikasi pemerintahan dibedakan menjadi **dua kategori** berdasarkan status pengembangannya. Pertama adalah aplikasi dalam pengembangan atau sedang dilakukan pengembangan agar fungsi dari aplikasi lebih optimal dalam mendukung tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kedua adalah aplikasi yang telah selesai dikembangkan, aplikasi yang telah selesai dikembangkan merupakan aplikasi yang tidak ada lagi peningkatan fitur dalam mendukung pelayanan pemerintahan.

Status Pengembangan aplikasi dari keseluruhan aplikasi yang digunakan pada pemerintah daerah Deli Serdang tidak semua telah selesai dikembangkan, beberapa OPD masih melakukan pengembangan aplikasi sebagai pendukung tugas dan fungsi instansi. **Gambar 6.4** merupakan penjelasan terkait status pengembangan aplikasi pada pemerintah daerah Deli Serdang.

- **18 aplikasi (14%)** aplikasi SPBE yang sedang dikembangkan
- **110 aplikasi (86%)** aplikasi SPBE telah selesai dikembangkan



Gambar 6.4 Status Pengembangan Aplikasi

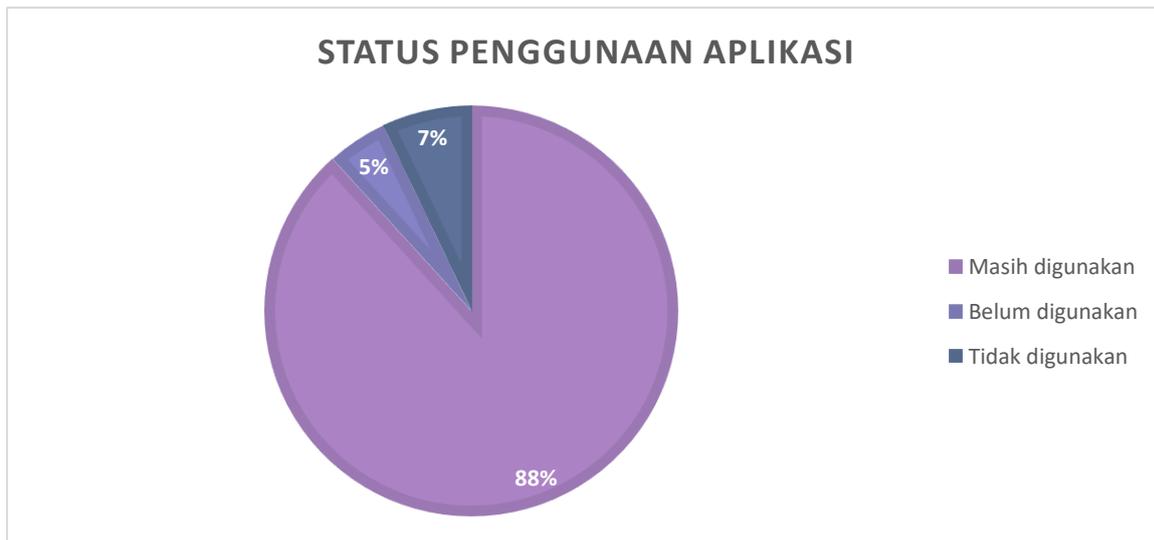
Gambar 6.4, menjelaskan status pengembangan aplikasi pada pemerintah daerah Deli Serdang terdapat **18 aplikasi atau 14%** sedang dikembangkan sedangkan **110 aplikasi atau 86%** telah selesai dikembangkan.

6.3.2 Status Penggunaan Aplikasi SPBE

Status penggunaan aplikasi dikategorikan menjadi **tiga**. Pertama yaitu aplikasi yang **tidak digunakan**, aplikasi yang tidak digunakan merupakan aplikasi yang ada dan pernah digunakan pada instansi pemerintah. Kategori yang kedua merupakan aplikasi yang **belum digunakan**, aplikasi ini merupakan aplikasi yang masih dalam proses pengembangan atau masih perlu adanya penyesuaian dalam mendukung tugas dan fungsi instansi pemerintahan dan belum digunakan dalam mendukung tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kategori yang terakhir merupakan aplikasi **masih digunakan**, aplikasi ini merupakan aplikasi yang masih aktif dan digunakan dalam mendukung tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan pada pemerintah daerah Deli Serdang masih ada aplikasi yang **tidak digunakan** pada instansi pemerintah. Dari hasil survey masih menemukan aplikasi yang **belum digunakan** pada OPD dan sebagian aplikasi **masih digunakan**. Untuk menggambarkan sebaran penggunaan aplikasi pada pemerintah deli serdang dapat dilihat pada **Gambar 6.5**.

- **6 aplikasi (5%)** tidak digunakan.
- **9 aplikasi (7%)** belum digunakan.
- **113 aplikasi (88%)** masih digunakan.



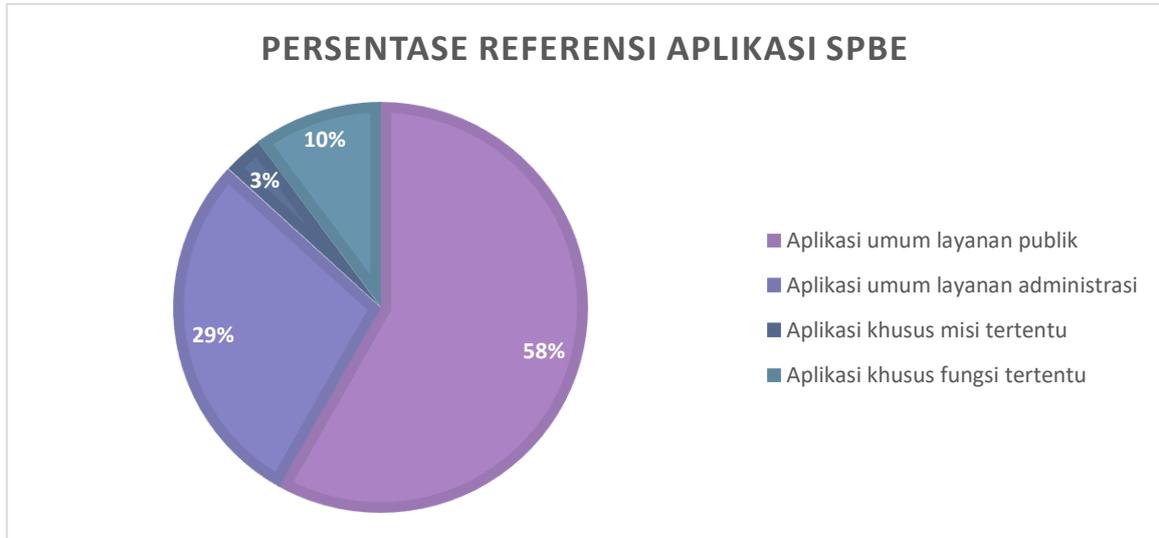
Gambar 6.5 Status Penggunaan Aplikasi SPBE

Dari **Gambar 6.5** dapat diketahui bahwa status penggunaan aplikasi pada pemerintah daerah Deli Serdang terdapat **5% atau 6 aplikasi** tidak digunakan, sedangkan untuk aplikasi yang belum digunakan terdapat **7% atau 9 aplikasi**. Sebagian besar aplikasi yang ada pada pemerintah daerah Deli Serdang masih digunakan dengan persentase **88% atau 113 aplikasi**.

6.3.3 Area Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Referensi arsitektur aplikasi SPBE terbagi menjadi 4 kode referensi, yaitu **RA 01.01 Aplikasi Umum layanan publik**, **RA 01.02 Aplikasi Umum adminitrasi pemerintahan**, **RA 02.01 Aplikasi Khusus Misi** dan **RA 02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu**. **Aplikasi Layanan Publik** adalah Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung pelayanan publik. **Aplikasi Administrasi Pemerintahan** adalah Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung administrasi pemerintahan. **Aplikasi Misi Tertentu** adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan IPPD lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu. **Aplikasi Fungsi Tertentu** adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi IPPD lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu. Persentase Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE dapat dilihat pada **Gambar 6.5**. Detail jumlah dan persentase dari domain aplikasi dari total **128 aplikasi** pada Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat di bawah ini:

- **75 aplikasi (58%)** Umum layanan publik (**RA 01.01**)
- **37 aplikasi (29%)** Umum administrasi pemerintahan (**RA 01.02**)
- **3 aplikasi (3%)** Khusus Misi Tertentu (**RA 02.01**)
- **13 aplikasi (10%)** Khusus Fungsi Tertentu (**RA 02.021**)



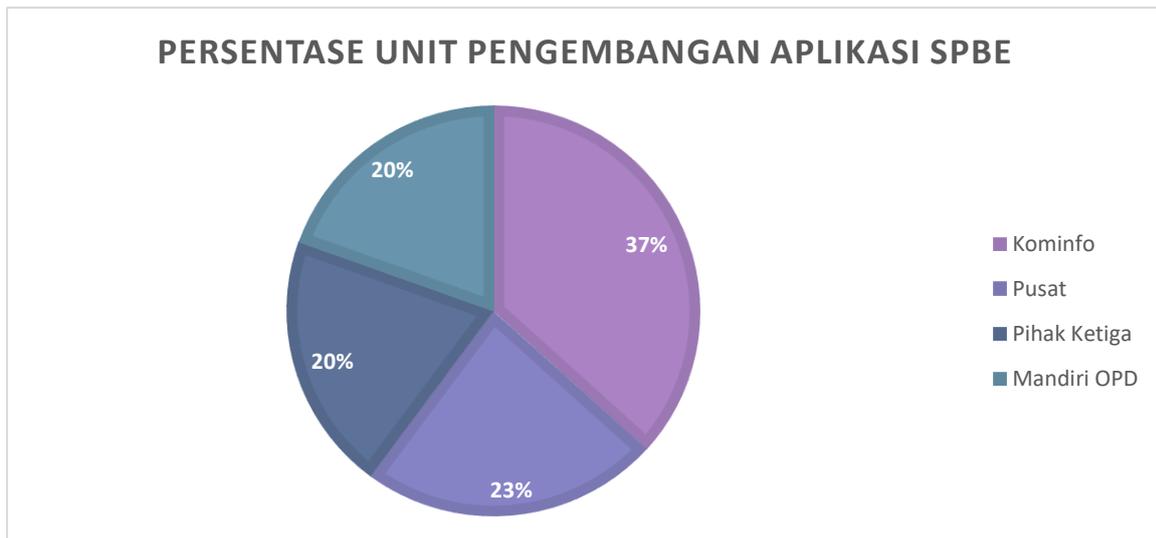
Gambar 6.6 Persentase Referensi Aplikasi SPBE

Berdasarkan **Gambar 6.6** mayoritas aplikasi yang digunakan OPD di Kabupaten Deli Serdang merupakan aplikasi untuk layanan publik yaitu sejumlah 58%, kemudian aplikasi yang memiliki jumlah terbanyak kedua yaitu aplikasi umum layanan administrasi 29%. Area aplikasi paling sedikit yang dimiliki yaitu aplikasi misi tertentu. Aplikasi tersebut yaitu **CAD (Covid Analisa Deliserdang)**.

6.3.4 Unit Pengembang Aplikasi SPBE

Unit Pengembangan Aplikasi SPBE dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu unit pengembang Pusat, DISKOMINFO, Pihak Ketiga dan Mandiri OPD. Unit pengembang pusat merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh kementerian atau pusat pemerintahan. Sedangkan unit pengembang daerah merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh mandiri OPD, Kominfo ataupun menggunakan jasa pihak ketiga. **Gambar 6.7** merupakan persentase unit pengembang aplikasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

- **47 aplikasi (37%)** dikembangkan Kominfo
- **30 aplikasi (23%)** dikembangkan Pusat
- **26 aplikasi (20%)** dikembangkan Pihak ketiga
- **25 aplikasi (20%)** dikembangkan Mandiri OPD



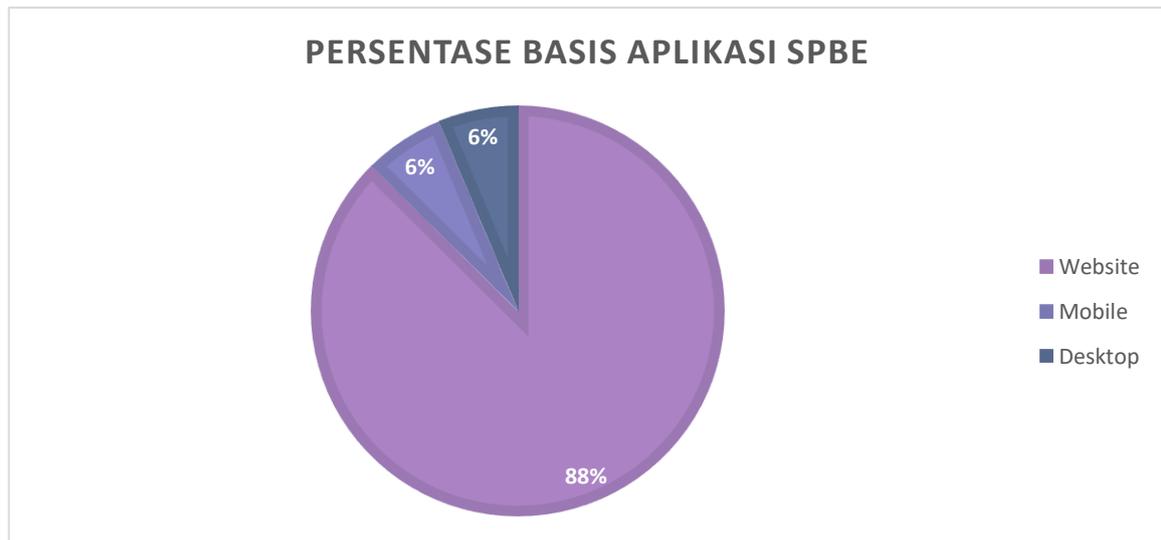
Gambar 6.7 Persentase Unit pengembang aplikasi

Berdasarkan hasil analisis pada **Gambar 6.7** dari pengembang aplikasi yang dimiliki, OPD di Kabupaten Deli Serdang mayoritas mengembangkan aplikasinya dilakukan oleh **Kominfo** yaitu **37% dari total aplikasi**.

6.3.5 Basis Aplikasi SPBE

Berdasarkan hasil survey pada pemerintah daerah Deli Serdang basis aplikasi SPBE dibedakan menjadi **3 (tiga) kategori**, yaitu **aplikasi berbasis *mobile***, **aplikasi berbasis *desktop*** dan **aplikasi berbasis *website***. Aplikasi berbasis *mobile* merupakan *software* yang dirancang digunakan pada perangkat *mobile*, sedangkan aplikasi berbasis *cloud* merupakan sebuah program *software* dimana *cloud computing* dan komponen lokal bekerja berdampingan. Teknologi *cloud computing* sendiri dapat digunakan dengan memanfaatkan pihak ketiga sebagai penyedia infrastruktur. Aplikasi berbasis *desktop* merupakan *software* yang dirancang dan dibangun untuk digunakan pada perangkat *desktop*, sedangkan aplikasi berbasis *website* merupakan *software* yang dibangun untuk di gunakan pada platform *website*. **Gambar 6.8** menjelaskan tentang jumlah dan persentase Basis Aplikasi SPBE pada pemerintah daerah Deli Serdang.

- **112 aplikasi (88%)** berbasis Website
- **8 aplikasi (6%)** berbasis Mobile
- **8 aplikasi (6%)** berbasis Dekstop



Gambar 6.8 Persentase Basis Aplikasi SPBE

Gambar 6.8 menunjukkan bahwa mayoritas aplikasi SPBE yang dimiliki oleh OPD di Kabupaten Deli Serdang berbasis Website. Jumlah ini berkaitan dengan mayoritas aplikasi yang dimiliki bersifat publik sehingga memang paling mudah untuk diakses oleh publik secara umum yaitu menggunakan website. persentasenya yaitu **88% atau 112 aplikasi**. Untuk aplikasi mobile terdiri dari aplikasi android, call center dan layanan menggunakan whatsapp.

6.4 Metadata Aplikasi SPBE

Metadata Aplikasi SPBE merupakan informasi terstruktur terkait aplikasi yang ada pada pemerintah yang mendeskripsikan, menjelaskan agar mudah ditemukan, digunakan atau dikelola kembali. Berdasarkan Rancangan Perpres tentang **Arsitektur SPBE Nasional Versi Juni 2021**. Referensi metadata Aplikasi SPBE terdapat 17 atribut dalam pengelompokannya, Error! Reference source not found. merupakan atribut dalam Metadata Aplikasi SPBE.

Tabel 6.1 Atribut Metadata Aplikasi SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi.
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung.
5	Kode Model Referensi Aplikasi	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan.
7	Data Yang Dibutuhkan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data.
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (Desktop; Web; Cloud; atau Mobile)
10	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server.
11	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (Open Source/Proprietary)
12	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi.
13	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau Framework yang digunakan oleh aplikasi.
14	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi
15	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi
16	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan
17	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

Atribut pada **Tabel 6.1** digunakan untuk melakukan analisis dari metadata Aplikasi SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Secara lebih detail Metadata Aplikasi SPBE dijelaskan dan dapat dilihat pada Error! Reference source not found. **dan** Error! Reference source not found.

6.5 Permasalahan Aplikasi SPBE

Dalam menjalankan proses bisnis dalam instansi diperlukanlah penggunaan aplikasi dengan harapan mampu mempermudah pekerjaan, namun apabila dalam penggunaan aplikasi tersebut terdapat permasalahan dapat menyebabkan kurang

efektif dan efisiennya dalam bekerja. Berikut adalah beberapa permasalahan dalam terkait aplikasi SPBE yang ditemui berdasarkan hasil survei pada pemerintah Deli Serdang.

- Kurangnya SDM IT dalam pengoperasian aplikasi
- Kurangnya pengetahuan pegawai tentang pengelolaan IT
- Perangkat layak guna terbatas
- Aplikasi error sehingga data tidak dapat tersimpan
- Server yang penuh atau over kapasitas membuat performa aplikasi tidak maksimal, atau menjadi lemot

6.6 Analisis Gap

Setelah melakukan analisis kondisi saat ini dari Aplikasi SPBE di Kabupaten Deli Serdang maka dilakukan analisis gap. Analisis Gap atau kesenjangan aplikasi ini ditentukan dengan membandingkan antara kinerja eksisting pemerintahan Kabupaten saat ini (2021) dengan kondisi ideal yang tercantum pada Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE. Analisis gap aplikasi SPBE ini dianalisis dari seluruh aplikasi yang dimiliki OPD, dilakukan pemetaan sesuai dengan bidang dan seksi, dan program RPJMD. Berdasarkan pemetaan yang telah dibuat maka akan dilihat berapa layanan dan program yang sudah didukung, dan berapa yang belum didukung aplikasi. Hasilnya analisis gap aplikasi dapat dilihat pada **Tabel 6.2**

Tabel 6.2 Analisis Gap Aplikasi SPBE

Kode OPD	Nama OPD	GAP
1	Bagian Organisasi	Terdapat 3 seksi dan didukung oleh 1 aplikasi
2	Bagian Administrasi Pembangunan	Terdapat 3 seksi dan belum didukung aplikasi
3	Bagian Tata Pemerintahan	Terdapat 3 seksi dan didukung oleh 1 aplikasi
4	Bagian Hukum	Terdapat 3 Seksi dan didukung oleh 1 aplikasi
5	Bagian Umum	Terdapat 3 seksi dan belum didukung aplikasi
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Terdapat 3 seksi dan didukung oleh 1 aplikasi
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Terdapat 3 seksi dan belum didukung aplikasi
8	Bagian Perekonomian dan SDA	Terdapat 3 seksi dan belum didukung aplikasi
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Terdapat 3 seksi dan didukung oleh 5 aplikasi
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Terdapat 3 seksi dan belum didukung aplikasi
11	Inspektorat Daerah	Terdapat 5 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
12	Sekretariat DPRD	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terdapat 5 bidang dan didukung oleh 6 aplikasi

Kode OPD	Nama OPD	GAP
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 4 aplikasi
16	Badan Pendapatan Daerah	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
17	Badan Kepegawaian Daerah	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 4 aplikasi
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terdapat 3 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Terdapat 6 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
20	Dinas Kesehatan	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 4 aplikasi
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
22	Dinas Lingkungan Hidup	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 2 aplikasi
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
24	Dinas Pendidikan	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 16 aplikasi
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Terdapat 5 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Terdapat 5 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
30	Dinas Perikanan	Terdapat 3 bidang dan didukung oleh 4 aplikasi
31	Dinas Perhubungan	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
32	Dinas Sosial	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 2 aplikasi
33	Dinas Ketenagakerjaan	Terdapat 3 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 17 aplikasi
35	Dinas Pertanian	Terdapat 6 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
36	Dinas Ketahanan Pangan	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 6 aplikasi
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 2 aplikasi
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terdapat 4 bidang dan belum didukung aplikasi
40	Satuan Polisi Pamong Praja	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
41	Rumah Sakit Umum Daerah	Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 7 aplikasi

Kode OPD	Nama OPD	GAP
42	Kecamatan Lubuk Pakam	Terdapat 1 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
43	Kecamatan Labuhan Deli	Terdapat 1 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
45	Desa Sekip	Terdapat 1 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
45	Desa Pematang Johar	Terdapat 1 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
46	RSUD Pancur Batu	Terdapat 2 bidang dan belum didukung aplikasi
47	Puskesmas Lubuk Pakam	Terdapat 1 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi

BAB 7

Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE dan Analisis GAP

Bab 7 menjelaskan mengenai Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat ini dan Analisis GAP terhadap kondisi Infrastruktur SPBE yang ingin dicapai. Penjelasan dimulai dari pengertian Infrastruktur SPBE yang didukung dengan Referensi Arsitektur dan Metadata Infrastruktur SPBE, dan dilanjutkan dengan Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penjelasan Selanjutnya terkait Permasalahan Infrastruktur dan Penjelasan dari hasil Analisis GAP antara kondisi eksisting (*as is*) dengan kondisi yang diinginkan (*to be*). Hal ini dapat menjadi sumber awal bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menemukan strategi pembangunan infrastruktur SPBE yang tepat dan baik selama 5 (lima) tahun mendatang.

7.1 Pengertian Infrastruktur SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu: jaringan intra pemerintah daerah dan sistem penghubung layanan pemerintah daerah. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Pemerintah Daerah.

7.2 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Tujuan dari disusunnya RAI adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilitasnya.

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan RI adalah:

1. Taksonomi RI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
2. Didefinisikan sebagai hierarki elemen infrastruktur TIK;
3. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;

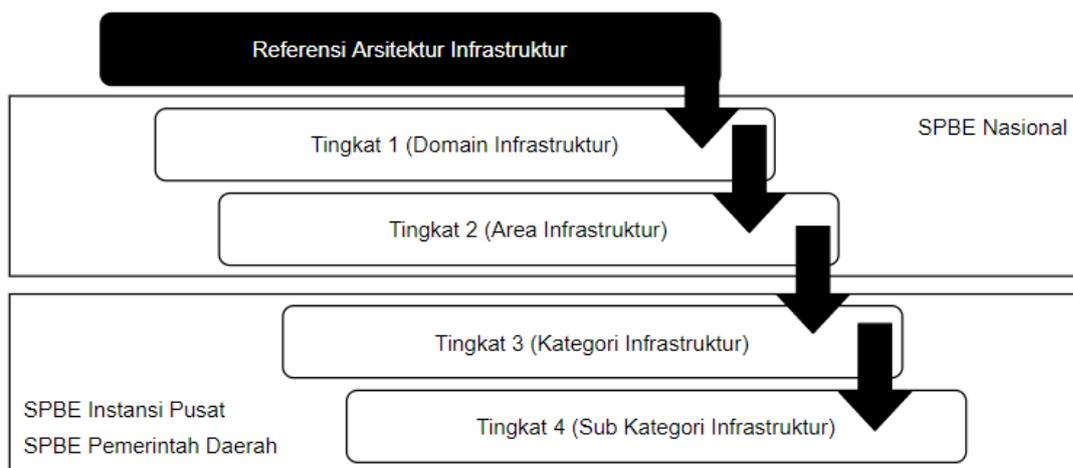
4. Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
5. Berbasis standar umum (open standard);
6. Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RK.

RI berlaku secara nasional, sehingga Pemerintah Daerah menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur TIK yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur TIK yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

Struktur dari RI SPBE Nasional pada 2 (dua) tingkat teratas, yaitu:

1. Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai RI tingkat 1 (pertama); dan
2. Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai dengan masing-masing domain infrastrukturnya sebagai RI tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya untuk mendefinisikan di tingkat bawahnya, akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.



Gambar 7.1 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

7.3 Metadata Infrastruktur SPBE

Entitas metadata arsitektur infrastruktur SPBE merupakan metadata yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan. Arsitektur infrastruktur SPBE dikelompokkan menjadi platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi. Dalam penggunaannya, ketiga entitas metadata arsitektur infrastruktur SPBE saling terkait satu sama lain sehingga menyebabkan terjadi hubungan internal dalam metadata arsitektur infrastruktur ini, untuk itu entitas ini perlu dilakukan dekomposisi, dengan atribut pada setiap komponen infrastruktur SPBE. Tabel 7.1 – Tabel 7.7 menunjukkan atribut yang digunakan untuk melakukan penyusunan metadata infrastruktur SPBE.

Tabel 7.1 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Fasilitas	Merupakan nama fasilitas komputasi
3	Kode Model Referensi SPBE	Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan fasilitas yang dipilih
4	Bandwidth Intranet	Merupakan jumlah bandwidth internet yang tersedia selama 1 tahun
5	Bandwidth Internet	Merupakan jumlah bandwidth internet yang tersedia selama 1 tahun
6	Lokasi	Merupakan lokasi dari fasilitas
7	Kepemilikan	Merupakan unit pemilik dari fasilitas
8	Unit Kerja Penanggung Jawab	Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang bertanggung jawab atas fasilitas
9	Klasifikasi Fasilitas <i>Tier</i>	Merupakan klasifikasi tier fasilitas
10	Sistem Pengamanan Fasilitas	Merupakan tipe pengaman fasilitas
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.2 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Jaringan	Merupakan nama jaringan intra pemerintah
3	Deskripsi Jaringan	Merupakan penjelasan dari jaringan
4	Jenis Jaringan	Merupakan jenis jaringan yang digunakan
5	Kepemilikan	Merupakan pemilik dari jaringan
6	Nama Pemilik	Merupakan nama dari pemilik jaringan
7	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Merupakan unit kerja/perangkat daerah pengelola jaringan
8	Bandwidth	Merupakan jumlah bandwidth yang tersedia
9	Tipe Media Jaringan	Merupakan tipe dari media jaringan
10	Media Lainnya	Merupakan tipe dari media jaringan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.3 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Sistem Penghubung	Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki.
3	Deskripsi Sistem Penghubung	Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang digunakan.
4	Jenis Sistem Penghubung	Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem penghubung pemerintah / Sistem penghubung non pemerintah)

No.	Nama Atribut	Keterangan
5	Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra
8	Aplikasi yang Dihubungkan	Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung, pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi
9	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Penyimpanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data <i>Storage</i>	Nama dari data storage yang digunakan
3	Deskripsi Data <i>Storage</i>	Berisi deskripsi dari data storage yang digunakan
4	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari data storage yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7	Unit Pengelola Data <i>Storage</i>	Unit pengelola data storage yang digunakan
8	Lokasi Data <i>Storage</i>	Lokasi dari data storage yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh data storage, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak
10	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada data storage, satuan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB)
11	Metode Akses Data <i>Sharing</i>	Metode akses data sharing yang digunakan pada data storage (Direct Attached Storage/DAS atau Network Attached Storage/NAS)
12	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.5 Atribut Metadata Perangkat Server

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Server</i>	Nama dari perangkat server yang digunakan
3	Deskripsi <i>Server</i>	Berisi deskripsi dari perangkat server yang digunakan
4	Jenis Penggunaan <i>Server</i>	Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis penggunaan tersebut a.l.: Web Server; Mail Server; Aplikasi; Database; File Server; Active Directory, keamanan informasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari server yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik server yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7	Unit Pengelola Server	Unit pengelola server yang digunakan
8	Lokasi Perangkat Keras Server	Lokasi dari perangkat server yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh server, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak
10	Kapasitas Memori	Kapasitas memori atau Random Access Memory (RAM) yang digunakan oleh server, satuan kapasitas memori dalam GigaByte (GB)
11	Jenis Teknologi Prosesor	Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh server, a.l.: High End, Mid End, Low End
12	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB)
13	Teknik Penyimpanan	Teknik penyimpanan yang digunakan pada server (RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID)
14	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.6 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak yang digunakan
3	Deskripsi Perangkat Lunak	Penjelasan dari Perangkat Lunak yang digunakan
4	Tipe Perangkat Lunak	Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan (Sistem Operasi, Sistem Utilitas, atau Sistem Database)
5	Jenis Sistem Operasi (jika pilihan adalah 1 pada No.3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
6	Jenis Sistem Utilitas (jika pilihan adalah 2 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
7	Jenis Sistem Database (jika pilihan adalah 3 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
8	Jenis lisensi	Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang digunakan (Lisensi Seumur Hidup, Lisensi Periodik, atau Kode Sumber Terbuka)
9	Nama Pemilik Lisensi	Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak
10	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.7 Atribut Metadata Komputasi Awan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak yang digunakan
3	Deskripsi Perangkat Lunak	Penjelasan dari Perangkat Lunak yang digunakan
4	Tipe Perangkat Lunak	Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan (Sistem Operasi, Sistem Utilitas, atau Sistem Database)
5	Jenis Sistem Operasi (jika pilihan adalah 1 pada No.3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
6	Jenis Sistem Utilitas (jika pilihan adalah 2 pada No.3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
7	Jenis Sistem Database (jika pilihan adalah 3 pada No.3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
8	Jenis lisensi	Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang digunakan (Lisensi Seumur Hidup, Lisensi Periodik, atau Kode Sumber Terbuka)
9	Nama Pemilik Lisensi	Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak
10	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Kondisi Eksisting Infrastruktur yang akan dibahas yaitu terkait dengan penerapan Infrastruktur SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Keseluruhan data yang berkaitan dengan Kondisi Infrastruktur SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diperoleh dari proses survey yang telah dilakukan sebelumnya oleh tim surveyor dan dikumpulkan data berdasarkan dengan Kondisi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pembahasan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meliputi Jaringan Intra Pemerintah yang terdiri dari pembahasan mengenai ketersediaan topologi jaringan, ketersediaan perangkat jaringan dan jumlah *bandwidth* yang tersedia. Pembahasan terkait ruang server, komputasi, , sistem penghubung layanan dan terakhir adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang secara mendetail akan dibahas pada poin berikutnya.

7.4 Kondisi Eksisting Jaringan Intra Pemerintah

Kondisi Eksisting terkait dengan Infrastruktur SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah cukup baik dalam penerapannya, hal ini ditunjukkan dengan sudah diterapkannya Jaringan Intra Pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang. Jangkauan jaringan intra yang diterapkan telah menjangkau setiap OPD, sejumlah **33 User (OPD dan Dinas terkait)**. Selain jangkauan pada OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menjangkau

hingga pada **21 Kecamatan, 34 Puskesmas** dan **2 Rumah sakit** melalui jaringan metro.

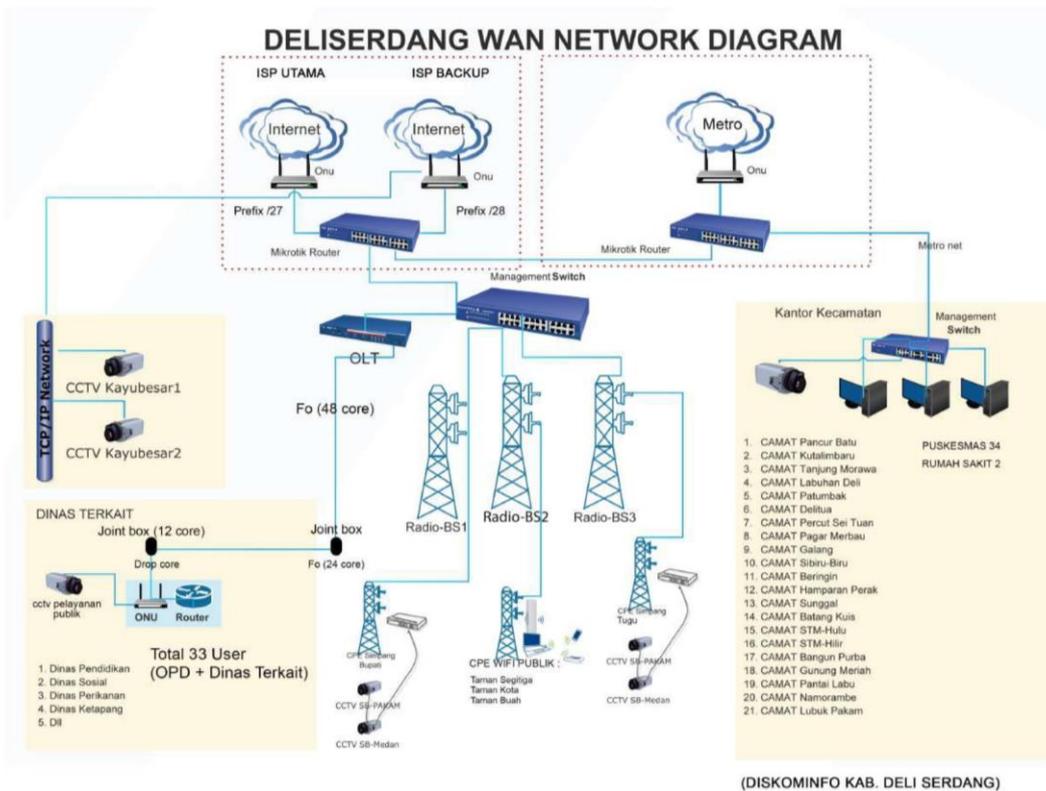
Penyediaan jaringan internet untuk publik juga disediakan pada beberapa titik, seperti pada Taman Segitiga, Taman Kota, dan Taman Buah. Jaringan intra pemerintah juga sudah mengakomodir penggunaan CCTV Kayu besar dan juga CCTV Pakam dan CCTV Medan. Secara keseluruhan, jaringan intra pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menjangkau **95 titik**.

Pengelolaan server pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih tersebar pada beberapa OPD. Untuk server yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang saat ini terdapat **6 server**. Yang secara penggunaan masih beragam antara Web Server, Mail Server, Aplikasi, Database, File Server. Implementasi Komputasi pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih belum terdapat OPD yang memanfaatkan teknologi komputasi. Dan hanya terdapat **1 OPD** yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan sebagai proses integrasi antar aplikasi.

7.4.1 Ketersediaan Topologi Jaringan

Terdapat **3 internet service provider (ISP)** yang secara fungsi dibagi menjadi ISP Utama, ISP Backup, dan juga ISP Jaringan Metro. Hal ini tergambar pada **Gambar 7.2** yang mewakili penerapan jaringan intra pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Distribusi Jaringan FO pada OPD dan dinas terkait menggunakan jaringan *fiber optic* yang didistribusikan menggunakan OLT dan Joint Box. Sedangkan untuk distribusi jaringan metro belum menggunakan jaringan FO. Pada jaringan metro terdapat **21 Kecamatan, 34 Puskesmas, dan 2 Rumah Sakit**. Sedangkan untuk distribusi untuk wifi publik sudah tidak lagi menggunakan Radio tetapi menggunakan modem atau router.

Jika melihat pada eksisting topologi, tidak ditemukan penggunaan firewall dan penerapan DMZ untuk area server. Namun dengan melihat penamaan router yang digunakan, penerapan firewall merupakan firewall yang sudah terpasang pada perangkat router atau yang sering kali disebut dengan mikrotik. Hal ini kurang direkomendasikan sebagai pengamanan pertama pada infrastruktur jaringan. Perlu adanya penggunaan firewall fisik untuk lebih memperkuat sisi keamanan jaringan. Sedangkan penggambaran area server pada topologi lebih mengarah pada penegasan bahwa sudah terdapat implementasi De-militarized Zone yang merupakan area khusus untuk akses pada lingkungan server.



Gambar 7.2 Jaringan WAN Kabupaten Deli Serdang

7.4.2 Ketersediaan Bandwidth

Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan sebelumnya, diperoleh data terkait dengan ketersediaan bandwidth pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pendataan bandwidth pada **Tabel 7.8** merupakan bandwidth yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Deli Serdang untuk Jaringan Intra Pemerintah. Selain menggunakan bahan survei yang dilakukan oleh masing masing OPD, kondisi eksisting juga melihat pada data titik sebaran bandwidth yang didapatkan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Deli Serdang. Terdapat beberapa OPD yang terdata belum memiliki bandwidth untuk Jaringan Intra Pemerintah.

Tabel 7.8 Ketersediaan Bandwith

ID	Nama OPD	Nama Jaringan	Nama Pemilik	Bandwidth	Tipe Media jaringan
1	Bagian Organisasi	Jaringan Intra Bagian Organisasi	Dinas Kominfo Deli Serdang	0	Kabel
2	Bagian Administrasi Pembangunan	Jaringan Intra Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Kominfo Deli Serdang	0	Kabel
3	Bagian Tata Pemerintahan	Jaringan Intra Bagian Tata Pemerintahan	Dinas Kominfo Deli Serdang	0	Kabel

ID	Nama OPD	Nama Jaringan	Nama Pemilik	Bandwidth	Tipe Media jaringan
4	Bagian Hukum	Jaringan Intra Bagian Hukum	Dinas Kominfo Deli Serdang	0	Kabel
5	Bagian Umum	Jaringan Intra Bagian Umum	Dinas Kominfo Deli Serdang	0	Kabel
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jaringan Intra Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kominfo Deli Serdang	0	Kabel
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jaringan Intra Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Kominfo Deli Serdang	0	Kabel
8	Bagian Perekonomian dan SDA	Jaringan Intra Bagian Perekonomian dan SDA	Dinas Kominfo Deli Serdang	0	Kabel
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Jaringan Intra Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Dinas Kominfo Deli Serdang	0	Kabel
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Jaringan Intra Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Dinas Kominfo Deli Serdang	0	Kabel
11	Inspektorat Daerah	Jaringan Intra Inspektorat Daerah	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
12	Sekretariat DPRD	Jaringan Intra Sekretariat DPRD	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jaringan Intra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Kominfo Deli Serdang	100 Mb	Kabel
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Jaringan Intra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Jaringan Intra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
16	Badan Pendapatan Daerah	Jaringan Intra Badan Pendapatan Daerah	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel

ID	Nama OPD	Nama Jaringan	Nama Pemilik	Bandwidth	Tipe Media jaringan
17	Badan Kepegawaian Daerah	Jaringan Intra Badan Kepegawaian Daerah	Dinas Kominfo Deli Serdang	100 Mb	Kabel
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jaringan Intra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jaringan Intra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Kominfo Deli Serdang	100 Mb	Kabel
20	Dinas Kesehatan	Jaringan Intra Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo Deli Serdang	100 Mb	Kabel
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jaringan Intra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Kominfo Deli Serdang	100 Mb	Kabel
22	Dinas Lingkungan Hidup	Jaringan Intra Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kominfo Deli Serdang	50 Mb	Kabel
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Jaringan Intra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Kominfo Deli Serdang	100 Mb	Kabel
24	Dinas Pendidikan	Jaringan Intra Dinas Pendidikan	Dinas Kominfo Deli Serdang	100 Mb	Kabel
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Jaringan Intra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Jaringan Intra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jaringan Intra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,	Jaringan Intra Dinas Pengendalian	Dinas Kominfo Deli Serdang	50 Mb	Kabel

ID	Nama OPD	Nama Jaringan	Nama Pemilik	Bandwidth	Tipe Media jaringan
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jaringan Intra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
30	Dinas Perikanan	Jaringan Intra Dinas Perikanan	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
31	Dinas Perhubungan	Jaringan Intra Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo Deli Serdang	50 Mb	Kabel
32	Dinas Sosial	Jaringan Intra Dinas Sosial	Dinas Kominfo Deli Serdang	50 Mb	Kabel
33	Dinas Ketenagakerjaan	Jaringan Intra Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jaringan Intra Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dinas Kominfo Deli Serdang	300 Mb	Kabel
35	Dinas Pertanian	Jaringan Intra Dinas Pertanian	Dinas Kominfo Deli Serdang	50 Mb	Kabel
36	Dinas Ketahanan Pangan	Jaringan Intra Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Jaringan Intra Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Jaringan Intra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
39	Dinas Pemadam Kebakaran	Jaringan Intra Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Kominfo Deli Serdang	0	Kabel
40	Satuan Polisi Pamong Praja	Jaringan Intra Satuan Polisi Pamong Praja	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel

ID	Nama OPD	Nama Jaringan	Nama Pemilik	Bandwidth	Tipe Media jaringan
41	Rumah Sakit Umum Daerah	Jaringan Intra Rumah Sakit Umum Daerah	Dinas Kominfo Deli Serdang	70 Mb	Kabel
42	Kecamatan Lubuk Pakam	Jaringan Intra Kecamatan Lubuk Pakam	Dinas Kominfo Deli Serdang	10 Mb	Kabel
43	Kecamatan Labuhan Deli	Jaringan Intra Kecamatan Labuhan Deli	Dinas Kominfo Deli Serdang	10 Mb	Kabel
44	Desa Sekip	Jaringan Intra Desa Sekip	Dinas Kominfo Deli Serdang	10 Mb	Kabel
45	Desa Pematang Johar	Jaringan Intra Desa Pematang Johar	Dinas Kominfo Deli Serdang	10 Mb	Kabel
46	RSUD Pancur Batu	Jaringan Intra RSUD Pancur Batu	Dinas Kominfo Deli Serdang	10 Mb	Kabel
47	Puskesmas Lubuk Pakam	Jaringan Intra Puskesmas Lubuk Pakam	Dinas Kominfo Deli Serdang	10 Mb	Kabel

Total ISP yang mensupport seluruh persebaran bandwidth pada Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah **4 ISP** yang dapat dilihat pada **Tabel 7.9**

Tabel 7.9 Eksisting Ketersediaan Akses Internet (Bandwith)

No	Akses Internet	Bandwith
1	Telemedia Network Cakrawala	400 Mbps
2	Inter Media Link Solusi	400 Mbps
3	Jaya Karta Solusindo	170 Mbps
4	Arta media Lintas Nusa	220 Mbps

Selain internet atau *bandwidth* yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, masih banyak OPD yang ada pada Kabupaten Deli Serdang yang masih melakukan sewa internet secara mandiri dengan provider. Alasan yang diberikan cukup beragam mulai dari kurangnya *bandwidth* yang diberikan kominfo hingga adanya kebutuhan pengawasan secara mandiri oleh OPD. Pada **Tabel 7.10** merupakan detail dari pengadaan *bandwidth* mandiri yang dilakukan oleh masing masing OPD

Tabel 7.10 Pengadaan *Bandwith* Mandiri

Kode OPD	Nama OPD	Bandwidth Mandiri	Alasan pengadaan bandwidth mandiri
1	Bagian Organisasi	Tidak ada	Tidak ada
2	Bagian Administrasi Pembangunan	Tidak ada	Tidak ada
3	Bagian Tata Pemerintahan	Tidak ada	Tidak ada
4	Bagian Hukum	Tidak ada	Tidak ada
5	Bagian Umum	Telkom indihome bagian umum 50 Mbps; bagian kesra 50Mbps; bagian pembangunan perencanaan 100Mbps; bagian perencanaan dan keuangan 50Mbps	Karena memang lebih dulu berlangganan dengan indihome daripada internet yang diberikan oleh KOMINFO. Langganan ke indihome tidak dicabut karena yang dari kominfo masih kurang, kebutuhan internet disini banyak. Untuk rumah dinas Sekda 50Mbps, rumah dinas bupati 100Mbps, rumah dinas wakil bupati 100 Mbps. Sedangkan untuk rumah dinas itu kami tidak menggunakan provider indihome melainkan inter medialink solusi, aplikasi lintasarta dan nusanet.
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Bagian Perekonomian dan SDA	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	IMS 50 Mbps Dedicated dan Backup dari Bag. Umum	perlu hak akses yang besar karena website LPSE terintegrasi secara nasional
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Tidak ada	Tidak ada
11	Inspektorat Daerah	iya	kebutuhan pegawai dalam melakukan browsing/kirim email

Kode OPD	Nama OPD	Bandwidth Mandiri	Alasan pengadaan bandwidth mandiri
			dalam hal keperluan pelaporan hasil pemeriksaan
12	Sekretariat DPRD	Ada, 150 Mbps	Manajable,
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indihome, 15	Kebutuhan, meskipun saat siang juga sering down.
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tidak ada	Tidak ada
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	100 MB dari Indosat 50 MB dari Indihome	Karena ada server dan aplikasi simda
16	Badan Pendapatan Daerah	ada. 100Mbps	penyediaan mandiri supaya jaringan tidak lambat dan bisa diawasi oleh tim IT OPD mandiri
17	Badan Kepegawaian Daerah	YA, 150 MBPS	Karena akses jaringan dari kominfo dibatasi dan sering terjadi gangguan internet sehingga dapat menghambat pekerjaan dan operasional kantor
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ya Indihome, 30 Mbps	mendukung kinerja pegawai
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ya, 100 Mbps	Kurangnya bandwidth dari kominfo dan sebagai cadangan
20	Dinas Kesehatan	ada, 50 Mbps	untuk server
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Ya, 100 Mbps	Dari kominfo kurang, jadi lebih leluasa
22	Dinas Lingkungan Hidup	Ya, Indihome menyediakan sebesar 20 Mbps	sebagai back up, apabila jaringan kominfo mengalami gangguan koneksi
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Indiehome, 50 MBPS	Butuh untuk kirim file, webinar bisa lebih stabil
24	Dinas Pendidikan	Iya, 20 Mbps Indihome	karena sudah berlangganan sejak lama sebelum kominfo memberikan jaringan intra pemerintah. tetap dipertahankan karena kita membutuhkan

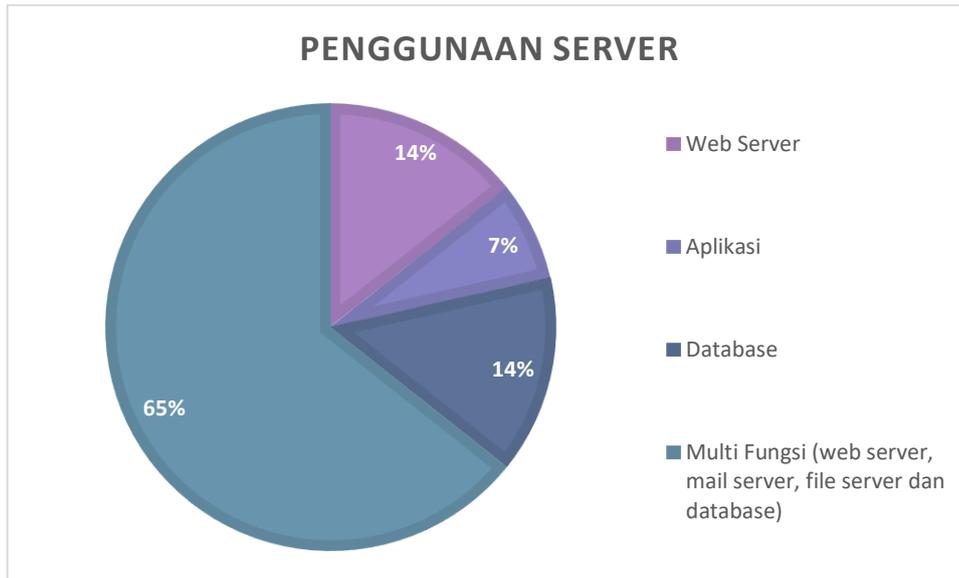
Kode OPD	Nama OPD	Bandwidth Mandiri	Alasan pengadaan bandwidth mandiri
			kecepatan internet OPD Dinas Pendidikan yang lebih stabil dan lebih cepat.
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	indihome, 40MBPS	butuh internet yang stabil
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	35Mbps	sebelum kominfo memberi akses jaringan kepada OPD-OPD. Dispora telah berlangganan dengan pasangan tower pada 2017 providenya adalah Neuviz. KOMINFO memberikan akses jaringan internet setahun setelahnya. Tetap berlangganan Neuviz karena untuk upload butuh internet yang cepat sedangkan dari kominfo kurang mencukupi.
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tidak ada	Tidak ada
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	iya	untuk mendukung percepatan akses internet dalam bekerja
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	ya (indihome)	Kurang nya bandwith dari kominfo
30	Dinas Perikanan	Tidak ada	Tidak ada
31	Dinas Perhubungan	Tidak ada	Tidak ada
32	Dinas Sosial	Iya. Indihome 20Mbps	Terlalu banyak user
33	Dinas Ketenagakerjaan	Ya (Indihome 20 Mbps)	untuk menambah kecepatan
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Masih ada. Untuk kapasitas bandwidth tidak tahu	Sebagai jaringan backup
35	Dinas Pertanian	10 Mbps	Sebagai Backup
36	Dinas Ketahanan Pangan	20 Mbps	Kebutuhan Pelayanan yang lebih besar

Kode OPD	Nama OPD	Bandwidth Mandiri	Alasan pengadaan bandwidth mandiri
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Tidak ada	Tidak ada
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	YA, 230 Mbps - Indosat 30 Mbps - Indihome 200 Mbps	Memaksimalkan pelayanan
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	50mbps	karena kominfo memberikan akses hanya untuk subbag keuangan untuk akses SIMDA
40	Satuan Polisi Pamong Praja	Ya, Telkom Indihome. Kecepatan 50Mbps	Kecepatan yang stabil
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	100 Mbps	Bandwidth yang di Sediakak oleh KOMINFO tidak Mencukupi kebutuhan Bandwidth di RSUD Deli serdang
42	Kecamatan Lubuk Pakam	Ya, Indihome 40 mbps	karena butuh internet yang stabil
43	Kecamatan Labuhan Deli	Tidak ada	Tidak ada
45	Desa Sekip	Iya, Indihome 20 MBps	Butuh internet stabil
45	Desa Pematang Johar	20 Mbps	Karena banyaknya yang memakai jaringan
46	RSUD Pancur Batu	Ya, 100 Mbps	koneksi internet dari kominfo sering putus, banyakan hilangnya
47	Puskesmas Lubuk Pakam	Ya,	Tidak tahu, kemungkinan 50Mbps minimal

7.5 Kondisi Eksisting Pusat Data atau Ruang Server

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018, Pusat Data atau Server memiliki definisi sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Dari hasil pengumpulan data survey yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdapat **30 Server** yang dimiliki oleh **24 OPD**. Mayoritas server digunakan sebagai server multi fungsi, yaitu sebesar **65%** atau **18 Server** dimana fungsinya terbagi antara web server, mail server, file server, dan database, untuk penggunaan server sebagai database dan web server

masing masing sebesar **4%** atau **4 server** dan terakhir penggunaan server sebagai penyimpanan aplikasi yaitu **7%** atau **2 server** seperti ditunjukkan pada Gambar 7.3



Gambar 7.3 Persentase Penggunaan Server

7.5.1 Daftar Server

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting terkait dengan data server yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdapat beberapa daftar server yang dimiliki dan dikelola oleh beberapa OPD. Jumlah eksisting server yang tersedia saat ini adalah sebanyak **30 server**. Secara yang dapat dilihat pada **Tabel 7.11**. Secara detail terkait dengan server eksisting yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada **Tabel 7.11**

Tabel 7.11 Eksisting Ketersediaan Server Kabupaten Deli Serdang

Kode OPD	OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Pemilik Server
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Server LPSE Deli Serdang	Server penggunaan LPSE Deli Serdang	web server	LPSE Deli Serdang
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Server DRC LPSE	Server Backup LPSE	-	Pihak ketiga
12	Sekretariat DPRD	Server aplikasi	Server ini digunakan untuk menyimpan aplikasi SIKKAD	Web server	Sekretaris DPRD
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	IBM X 3650	Server BPKA untuk aplikasi simda keuangan	Aplikasi	Milik Sendiri

Kode OPD	OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Pemilik Server
16	Badan Pendapatan Daerah	Tapping Box	Digunakan untuk menyimpan data Tapping box	Web Server Dan Database	Bapenda
17	Badan Pendapatan Daerah	SIMPATDA & E-PADI	untuk pengelolaan aplikasi SIMPATDA (pajak Restoran, parkir, Hotel, Hiburan, Sarang Burung Wallet, PJU, ABT dll) dan EPADI (aplikasi integrasi SIMPATDA, SISMIOP NG dan BPHTB Online)	Web Server & Database Server	Bapenda
18	Badan Pendapatan Daerah	Server Backup Database PBB 2017	Database Peralihan Dari Dirjen Perpajakan ke Bapenda	Web Server Dan Database Server	Bapenda
19	Badan Pendapatan Daerah	SISMIOP NG	Aplikasi data PBB	Web Server dan Database	Bapenda
20	Badan Pendapatan Daerah	Server Database	Pengelolaan Database	Web Server	Bapenda
21	Badan Kepegawaian Daerah	BKD SERVER	Server BKD menampung semua database dan vps dari aplikasi aplikasi yang ada di bkd	Webserver, Aplikasi,	BKD Kabupaten Deli Serdang
23	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Server PUPR	Mendukung Aplikasi Sistem Informasi Arsip Surat	Web Server	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Dinas Kesehatan	IP PBX	Penyimpanan data aplikasi PSC - Public Service Center	Database	DINAS KESEHATAN
31	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SIAK	HP ML G6, c	database	dinas kependudukan dan pencatatan sipil
35	Dinas Perhubungan	Server DISHUB	server untuk aplikasi (detail aplikasi tidak dapat di bagikan OPD bersangkutan)	Aplikasi Server	dinas perhubungan

Kode OPD	OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Pemilik Server
38	Dinas Komunikasi Dan Informatika	HP Proliant	Tipe DL 180 Gen 9	Webserver , Database	Dinas Komunikasi dan Informatika
39	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Zyrex	Type RM150	Web Server,Mail Server,Aplikasi,Database,File Server,Active Directory	Dinas Komunikasi dan Informatika
40	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Zyrex	Type RM150	Web Server,Mail Server,Aplikasi,Database,File Server,Active Directory	Dinas Komunikasi dan Informatika
41	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Zyrex	Type RM 150	Web Server,Mail Server,Aplikasi,Database,File Server,Active Directory	Dinas Komunikasi dan Informatika
42	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Zyrex	Type RM150	Web Server,Mail Server,Aplikasi,Database,File Server	High End
43	Dinas Komunikasi Dan Informatika	IBM	Type X3530M4	Web Server,Mail Server,Aplikasi,Database,File Server	Dinas Komunikasi dan Informatika
44	Dinas Pertanian	Dinas pertanian	-	-	-
47	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	perizinan.delise rdangkab.go.id	Server utama yang diakses publik	Web Server, Mail Server dan File Server	DPMPTSP
48	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	perizinan2.deli serdangkab.go.id	Databse Server	Database	DPMPTSP

Kode OPD	OPD	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan	Pemilik Server
51	Rumah Sakit Umum Daerah	Server SIMRS	Dell	Web Server,Aplikasi,Data base	RSUD DELI SERDANG
51	Rumah Sakit Umum Daerah	Server SISMADAK	Dell	Web Server,Aplikasi,Data base	RSUD DELI SERDANG
51	Rumah Sakit Umum Daerah	Server E-Claim	Dell	Web Server,Aplikasi,Data base	RSUD DELI SERDANG
51	Rumah Sakit Umum Daerah	Server E-Claim Training	Asus	Web Server,Aplikasi,Data base	RSUD DELI SERDANG
51	Rumah Sakit Umum Daerah	Server Website	Lenovo	Web Server,Aplikasi,Data base	RSUD DELI SERDANG
51	Rumah Sakit Umum Daerah	Server Training SIMRS	IBM	Web Server,Aplikasi,Data base	RSUD DELI SERDANG
54	Desa Sekip	Desa Sekip	Desa Sekip	Data Base	-

7.5.2 Aspek Pusat Data

Aspek pusat data merupakan salah satu tolak ukur kelayakan atau kesiapan sebuah ruang server dalam memenuhi fungsinya. Terutama apabila ruang server tersebut direncanakan untuk menampung kebutuhan atau pemusatan pusat data pemerintah daerah. Aspek ruang server diturunkan dari **TIA-942**. Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan, terdapat 13 OPD yang mengisikan aspek ruang server yang dimiliki. Dari **Tabel 7.12** dapat dilihat bahwa **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** lebih banyak memenuhi aspek yang direkomendasikan untuk ruang server.

Tabel 7.12 Eksisting Aspek Pusat Data (Ruang Server)

No	OPD	Aspek Ruang Server	Ada	Tidak
1	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Pintu masuk lebih dari satu	Ada	
		Ruangan khusus untuk memonitoring server	Ada	
		Raised floor	Ada	
		UPS	Ada	
		Cooling system	Ada	
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Ada	
		Cadangan listrik (power backup)	Ada	
		AC	Ada	
		Master sleeve AC	Ada	

No	OPD	Aspek Ruang Server	Ada	Tidak
		Pendeteksi asap		Tidak
		Pendeteksi api		Tidak
		Labelling kabel	Ada	
		CCTV	Ada	
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data	Ada	
2	Sekretariat DPRD	Pintu masuk lebih dari satu		Tidak
		Ruangan khusus untuk memonitoring server	Ada	
		Raised floor	Ada	
		UPS	Ada	
		Cooling system	Ada	
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Ada	
		Cadangan listrik (power backup)	Ada	
		AC	Ada	
		Master sleeve AC	Ada	
		Pendeteksi asap		Tidak
		Pendeteksi api		Tidak
		Labelling kabel	Ada	
		CCTV	Ada	
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data	Ada	
3	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pintu masuk lebih dari satu		Tidak
		Ruangan khusus untuk memonitoring server		Tidak
		Raised floor		Tidak
		UPS	Ada	
		Cooling system	Ada	
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data		Tidak
		Cadangan listrik (power backup)	Ada	
		AC	Ada	
		Master sleeve AC	Ada	
		Pendeteksi asap		Tidak
		Pendeteksi api		Tidak
		Labelling kabel		Tidak
		CCTV		Tidak
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data		Tidak

No	OPD	Aspek Ruang Server	Ada	Tidak
4	Badan Pendapatan Daerah	Pintu masuk lebih dari satu	Ada	
		Ruangan khusus untuk memonitoring server		Tidak
		Raised floor		Tidak
		UPS	Ada	
		Cooling system	Ada	
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Ada	
		Cadangan listrik (power backup)	Ada	
		AC	Ada	
		Master sleeve AC		Tidak
		Pendeteksi asap		Tidak
		Pendeteksi api		Tidak
		Labelling kabel		Tidak
		CCTV	Ada	
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data		Tidak
5	Badan Kepegawaian Daerah	Pintu masuk lebih dari satu	Ada	
		Ruangan khusus untuk memonitoring server	Ada	
		Raised floor		Tidak
		UPS		Tidak
		Cooling system	Ada	
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data		Tidak
		Cadangan listrik (power backup)	Ada	
		AC	Ada	
		Master sleeve AC	Ada	
		Pendeteksi asap	Ada	
		Pendeteksi api	Ada	
		Labelling kabel		Tidak
		CCTV		Tidak
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data		Tidak
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pintu masuk lebih dari satu		Tidak
		Ruangan khusus untuk memonitoring server		Tidak
		Raised floor		Tidak
		UPS	Ada	
		Cooling system	Ada	

No	OPD	Aspek Ruang Server	Ada	Tidak
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data		Tidak
		Cadangan listrik (power backup)	Ada	
		AC	Ada	
		Master sleeve AC		Tidak
		Pendeteksi asap		Tidak
		Pendeteksi api		Tidak
		Labelling kabel	Ada	
		CCTV		Tidak
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data		Tidak
7	Dinas Kesehatan	Pintu masuk lebih dari satu	Ada	
		Ruangan khusus untuk memonitoring server		Tidak
		Raised floor		Tidak
		UPS	Ada	
		Cooling system	Ada	
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data		Tidak
		Cadangan listrik (power backup)	Ada	
		AC	Ada	
		Master sleeve AC		Tidak
		Pendeteksi asap		Tidak
		Pendeteksi api		Tidak
		Labelling kabel	Ada	
		CCTV	Ada	
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data		Tidak
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pintu masuk lebih dari satu	Ada	
		Ruangan khusus untuk memonitoring server	Ada	
		Raised floor		Tidak
		UPS	Ada	
		Cooling system	Ada	
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Ada	
		Cadangan listrik (power backup)	Ada	
		AC	Ada	
		Master sleeve AC	Ada	
		Pendeteksi asap		Tidak

No	OPD	Aspek Ruang Server	Ada	Tidak
		Pendeteksi api		Tidak
		Labelling kabel	Ada	
		CCTV	Ada	
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data		Tidak
9	Dinas Perhubungan	Pintu masuk lebih dari satu		Tidak
		Ruangan khusus untuk memonitoring server	Ada	
		Raised floor		Tidak
		UPS	Ada	
		Cooling system	Ada	
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Ada	
		Cadangan listrik (power backup)	Ada	
		AC	Ada	
		Master sleeve AC		Tidak
		Pendeteksi asap		Tidak
		Pendeteksi api		Tidak
		Labelling kabel	Ada	
		CCTV	Ada	
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data	Ada	
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pintu masuk lebih dari satu		Tidak
		Ruangan khusus untuk memonitoring server	Ada	
		Raised floor		Tidak
		UPS	Ada	
		Cooling system		Tidak
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Ada	
		Cadangan listrik (power backup)	Ada	
		AC	Ada	
		Master sleeve AC		Tidak
		Pendeteksi asap		Tidak
		Pendeteksi api		Tidak
		Labelling kabel	Ada	
		CCTV	Ada	
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data	Ada	
11	Dinas Pertanian	Pintu masuk lebih dari satu		Tidak

No	OPD	Aspek Ruang Server	Ada	Tidak
		Ruangan khusus untuk memonitoring server		Tidak
		Raised floor		Tidak
		UPS	Ada	
		Cooling system		Tidak
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data		Tidak
		Cadangan listrik (power backup)		Tidak
		AC	Ada	
		Master sleeve AC	Ada	
		Pendeteksi asap		Tidak
		Pendeteksi api		Tidak
		Labelling kabel		Tidak
		CCTV	Ada	
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data		Tidak
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Pintu masuk lebih dari satu		Tidak
		Ruangan khusus untuk memonitoring server		Tidak
		Raised floor		Tidak
		UPS	Ada	
		Cooling system	Ada	
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Ada	
		Cadangan listrik (power backup)		Tidak
		AC	Ada	
		Master sleeve AC	Ada	
		Pendeteksi asap		Tidak
		Pendeteksi api		Tidak
		Labelling kabel	Ada	
		CCTV	Ada	
Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data		Tidak		
13	Rumah Sakit Umum Daerah	Pintu masuk lebih dari satu	Ada	
		Ruangan khusus untuk memonitoring server	Ada	
		Raised floor		Tidak
		UPS	Ada	
		Cooling system		Tidak

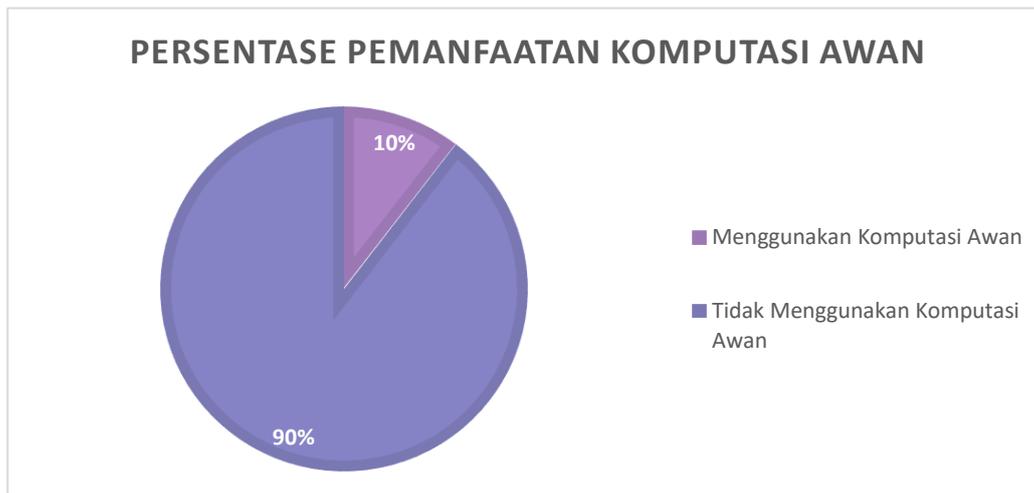
No	OPD	Aspek Ruang Server	Ada	Tidak
		Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Ada	
		Cadangan listrik (power backup)	Ada	
		AC	Ada	
		Master sleeve AC	Ada	
		Pendeteksi asap		Tidak
		Pendeteksi api		Tidak
		Labelling kabel	Ada	
		CCTV		Tidak
		Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data		Tidak

7.6 Komputasi

Secara umum komputasi memiliki pengertian jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan kombinasi formula tertentu. Dalam konteks SPBE, komputasi dibedakan menjadi 2, yaitu **komputasi awan** yang berfokus pada penggunaan perangkat lunak pada sistem cloud. Sedangkan **fasilitas komputasi** lebih mengarah pada metode komputasi yang lebih kompleks seperti halnya cloud computing ataupun pemrosesan sebuah program dengan sistem cloud.

7.6.1 Komputasi Awan

Komputasi Awan merupakan lapisan yang menghubungkan lapisan arsitektur lainnya secara logikal dalam bentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa sistem Infrastructure as a Services (IaaS), Platform as a Services (PaaS), dan Software as a Services (SaaS), dimana data dan informasi didalamnya, diolah menggunakan Big Data as a Services (BaaS), serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan Security as a Services (SecaaS). Komputasi awan yang umum digunakan adalah google drive yang tidak hanya menyediakan media penyimpanan tetapi juga media pengolah angka, pengolah kata dan lainnya.



Gambar 7.4 Persentase Pemanfaatan Komputasi Awan

Seperti halnya yang ditunjukkan pada **Gambar 7.4**, mayoritas OPD belum memanfaatkan media komputasi awan sebagai pendukung dari operasional pekerjaan. Hanya terdapat **5 OPD atau 10%** yang menggunakan media komputasi awan, yaitu **Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan kepegawaian Daerah, dan Dinas Pertanian.**

7.6.2 Fasilitas Komputasi (Server)

Terkait dengan fasilitas komputasi awan berdasarkan draf SPBE Nasional berupa pusat data nasional, pusat komputasi dan pusat kendali yang bersifat nasional dan dapat terdiri dari milik SKPD yang sudah sesuai dengan standar nasional. Dalam ruang lingkup daerah pusat data dapat diwakilkan dengan ruang server, sedangkan untuk pusat komputasi kendali dapat berupa *command center*. Pemanfaatan pusat komputasi cenderung membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, sehingga tidak banyak yang menerapkan untuk tingkat OPD. Namun kelebihan dari fasilitas komputasi yang memadai salah satunya adalah dapat digunakan secara berbagi pakai dengan SKPD lain. Untuk saat ini **belum ada** OPD yang menggunakan fasilitas komputasi untuk mendukung proses kerja.

7.7 Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 mengenai sistem penghubung layanan yang memiliki tujuan untuk mempermudah dalam melakukan integrasi layanan yang telah didukung dengan aplikasi. Sistem penghubung layanan dapat direalisasikan dalam bentuk Web Service, API (point to point maupun gateway), dan database. Tabel 7.13 menjelaskan Kondisi Eksisting dari Sistem Penghubung Layanan di Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 7.13 Eksisting Sistem Penghubung Layanan

Kode OPD	Nama OPD	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem	Jenis Sistem Penghubung
1	Bagian Organisasi	esr.menpan.go.id	Aplikasi Upload data dukung untuk Penilaian Nilai SAKIP Kabupaten oleh MENPAN RB	Website Application
16	Badan Pendapatan Daerah	EPADI API	Untuk Web Api dengan Dinas Perizinan dalam hal Kerjasama KSWP	Web API
17	Badan Pendapatan Daerah	API REALISASI	Untuk menampilkan data Realisasi Pajak ke Dashboard Eksekutif Kominfo	Web Api
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	webservice JDIH	Scrout API	webservice JDIH
41	Rumah Sakit Umum Daerah	Web Service Aplicare	Bridging Aplicare dengan SIMRS	API

Dari total **47 OPD** yang di survei, hanya terdapat **4 OPD** yang menggunakan sistem penghubung layanan. Ke empat OPD tersebut menggunakan jenis sistem penghubung **layanan API point to point dan web service**. 4 OPD tersebut adalah Bagian Organisasi, Badan Pendapatan Daerah 2 sistem penghubung layanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Rumah Sakit Umum Daerah.

7.8 Perangkat Keras dan Lunak

Berdasarkan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 15 menjelaskan bahwa Infrastruktur SPBE terdiri dari semua jenis perangkat yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Kondisi eksisting infrastruktur yang terdapat pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang diklasifikasikan menjadi empat jenis perangkat yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari Perangkat Keras Utama, Perangkat Periferal, Perangkat Jaringan dan Perangkat Media Penyimpanan. Sedangkan perangkat lunak yang terdiri dari sistem operasi dan aplikasi perkantoran digunakan sebagai penunjang dalam pelaksanaan infrastruktur SPBE pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

7.8.1 Ketersediaan Perangkat Keras

Perangkat keras terbagi menjadi 4 poin pembahasan yaitu, **perangkat keras utama, perangkat keras periferal, perangkat jaringan, dan perangkat lainnya**. Secara mendetail akan dijelaskan berikut ini

a) Perangkat Keras Utama

Perangkat keras yang dimaksud adalah perangkat keras utama yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari PC, Laptop dan printer yang digunakan untuk menunjang setiap pekerjaan pada masing-masing OPD. Berikut kondisi eksisting masing masing perangkat keras

- **Perangkat Personal Computer (PC)**

Eksisting perangkat PC yang ada didapatkan melalui hasil survei dan terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan, yaitu > 5 Tahun, 1-5 Tahun dan < 1 Tahun. Total jumlah perangkat PC sejumlah **900 PC** dimana mayoritas PC berusia diatas 5 tahun dengan jumlah **455 PC**. Secara detail dapat dilihat pada **Tabel 7.14**

Tabel 7.14 Eksisting Perangkat Periferal PC

OPD Pemilik	Nama Periferal	Deskripsi Periferal			Jumlah PC
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
Bagian Organisasi	PC	0	7	0	7
Bagian Administrasi Pembangunan	PC	2	7	0	9
Bagian Tata Pemerintahan	PC	1	0	0	1
Bagian Hukum	PC	2	1	0	3
Bagian Umum	PC	7	0	0	7
Bagian Kesejahteraan Rakyat	PC	0	3	0	3
Bagian Perencanaan dan Keuangan	PC	0	0	0	0
Bagian Perekonomian dan SDA	PC	3	0	0	3
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	PC	7	0	0	7
Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	PC	3	0	0	3
Inspektorat Daerah	PC	15	0	0	15
Sekretariat DPRD	PC	14	0	0	14
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PC	0	10	0	10
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	PC	0	4	0	4
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	PC	14	23	0	37
Badan Pendapatan Daerah	PC	0	0	0	0
Badan Kepegawaian Daerah	PC	0	24	0	24
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PC	0	7	0	7
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PC	38	52	11	101
Dinas Kesehatan	PC	20	5	0	25
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	PC	21	22	6	49

OPD Pemilik	Nama Periferal	Deskripsi Periferal			Jumlah PC
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
Dinas Lingkungan Hidup	PC	6	0	0	6
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	PC	1	0	0	1
Dinas Pendidikan	PC	44	41	0	85
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	PC	8	3	0	11
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	PC	19	2	0	21
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	PC	0	43	16	59
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	PC	0	1	0	1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	PC	1	4	0	5
Dinas Perikanan	PC	10	2	0	12
Dinas Perhubungan	PC	10	0	0	10
Dinas Sosial	PC	5	7	0	12
Dinas Ketenagakerjaan	PC	0	14	0	14
Dinas Komunikasi Dan Informatika	PC	17	1	0	18
Dinas Pertanian	PC	70	0	0	70
Dinas Ketahanan Pangan	PC	7	3	1	11
Dinas Perpustakaan Dan Arsip	PC	3	1	5	9
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PC	8	28	1	37
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PC	0	0	0	0
Satuan Polisi Pamong Praja	PC	12	6	0	18
Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	PC	60	40	30	130
Kecamatan Lubuk Pakam	PC	9	1	0	10
Kecamatan Labuhan Deli	PC	8	0	0	8
Desa Sekip	PC	3	4	0	7
Desa Pematang Johar	PC	0	1	0	1
RSUD Pancur Batu	PC	3	5	0	8
Puskesmas Lubuk Pakam	PC	4	3	0	7
		455	375	70	900

- **Perangkat Laptop**

Eksisting perangkat Laptop yang ada didapatkan melalui hasil survei dan terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan, yaitu > 5 Tahun, 1-5 Tahun dan < 1 Tahun. Total jumlah perangkat Laptop sejumlah **653 Laptop** dimana

mayoritas Laptop berusia antara 1-5 tahun dengan jumlah **347 Laptop**. Secara detail dapat dilihat pada **Tabel 7.15**

Tabel 7.15 Eksisting Perangkat Periferal Laptop

OPD Pemilik	Nama Periferal	Deskripsi Periferal			Jumlah Laptop
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
Bagian Organisasi	Laptop	0	5	0	5
Bagian Administrasi Pembangunan	Laptop	1	3	0	4
Bagian Tata Pemerintahan	Laptop	2	5	0	7
Bagian Hukum	Laptop	3	0	0	3
Bagian Umum	Laptop	7	0	0	7
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Laptop	0	2	0	2
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Laptop	0	2	0	2
Bagian Perekonomian dan SDA	Laptop	5	0	0	5
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Laptop	3	0	0	3
Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Laptop	0	5	0	5
Inspektorat Daerah	Laptop	15	3	0	18
Sekretariat DPRD	Laptop	10	0	0	10
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laptop	1	19	0	20
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Laptop	0	6	0	6
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Laptop	17	32	0	49
Badan Pendapatan Daerah	Laptop	0	0	0	0
Badan Kepegawaian Daerah	Laptop	0	16	0	16
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laptop	0	5	0	5
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Laptop	50	49	9	108
Dinas Kesehatan	Laptop	12	8	0	20
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Laptop	12	6	1	19
Dinas Lingkungan Hidup	Laptop	0	5	2	7
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Laptop	0	0	1	1
Dinas Pendidikan	Laptop	2	31	0	33
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Laptop	9	6	0	15
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Laptop	7	2	0	9
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Laptop	0	20	3	23
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Laptop	0	12	0	12

OPD Pemilik	Nama Periferal	Deskripsi Periferal			Jumlah Laptop
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Laptop	17	6	0	23
Dinas Perikanan	Laptop	21	4	0	25
Dinas Perhubungan	Laptop	0	13	0	13
Dinas Sosial	Laptop	3	3	0	6
Dinas Ketenagakerjaan	Laptop	0	7	0	7
Dinas Komunikasi Dan Informatika	Laptop	4	0	0	4
Dinas Pertanian	Laptop	20	0	0	20
Dinas Ketahanan Pangan	Laptop	10	3	1	14
Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Laptop	1	1	2	4
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Laptop	4	28	0	32
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Laptop	7	0	0	7
Satuan Polisi Pamong Praja	Laptop	6	1	0	7
Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	Laptop	10	20	10	40
Kecamatan Lubuk Pakam	Laptop	9	5	1	15
Kecamatan Labuhan Deli	Laptop	0	2	0	2
Desa Sekip	Laptop	3	0	0	3
Desa Pematang Johar	Laptop	0	0	2	2
RSUD Pancur Batu	Laptop	0	2	0	2
Puskesmas Lubuk Pakam	Laptop	3	10	0	13
		274	347	32	653

- **Perangkat Printer**

Eksisting perangkat Printing yang ada didapatkan melalui hasil survei dan terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan, yaitu > 5 Tahun, 1-5 Tahun dan < 1 Tahun. Total jumlah perangkat Printer sejumlah **1206 Printer** dimana mayoritas Printer berusai antara 1-5 dengan jumlah **747 Printer**. Secara detail dapat dilihat pada **Tabel 7.16**

Tabel 7.16 Eksisting Perangkat Printer

OPD Pemilik	Nama Periferal	Deskripsi Periferal			Jumlah Printer
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
Bagian Organisasi	Printer	0	3	0	3
Bagian Administrasi Pembangunan	Printer	4	2	0	6
Bagian Tata Pemerintahan	Printer	4			4
Bagian Hukum	Printer	3	0	0	3
Bagian Umum	Printer	7	0	1	8
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Printer	1	2	0	3

OPD Pemilik	Nama Periferal	Deskripsi Periferal			Jumlah Printer
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Printer	0	2	2	4
Bagian Perekonomian dan SDA	Printer	8	0	0	8
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Printer	2	0	5	7
Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Printer	3	0	0	3
Inspektorat Daerah	Printer	25	2	0	27
Sekretariat DPRD	Printer	25	0	0	25
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Printer	0	10	0	10
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Printer	1	4	0	5
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Printer	12	32	0	44
Badan Pendapatan Daerah	Printer	0	0	0	0
Badan Kepegawaian Daerah	Printer	0	26	0	26
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Printer	0	7	0	7
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Printer	27	83	20	130
Dinas Kesehatan	Printer	15	44	1	60
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Printer	15	44	1	60
Dinas Lingkungan Hidup	Printer	0	10	0	10
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Printer	1	0	0	1
Dinas Pendidikan	Printer	35	133	0	168
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Printer	3	17	0	20
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Printer	11	7	0	18
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Printer	0	138	0	138
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Printer	0	9	0	9
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Printer	15	0	0	15
Dinas Perikanan	Printer	27	4	0	31
Dinas Perhubungan	Printer	20	0	0	20
Dinas Sosial	Printer	0	7	0	7
Dinas Ketenagakerjaan	Printer	0	19	0	19
Dinas Komunikasi Dan Informatika	Printer	4	2	1	7
Dinas Pertanian	Printer	60	0	0	60
Dinas Ketahanan Pangan	Printer	9	7	2	18
Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Printer	4	1	5	10

OPD Pemilik	Nama Periferal	Deskripsi Periferal			Jumlah Printer
		>= 5 Tahun	1-5 Tahun	<= 1Tahun	
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Printer	8	36	0	44
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Printer	2	0	0	2
Satuan Polisi Pamong Praja	Printer	6	9	0	15
Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	Printer	20	60	20	100
Kecamatan Lubuk Pakam	Printer	17	7	0	24
Kecamatan Labuhan Deli	Printer	2	3	0	5
Desa Sekip	Printer	0	2	0	2
Desa Pematang Johar	Printer	0	2	1	3
RSUD Pancur Batu	Printer	4	8	0	12
Puskesmas Lubuk Pakam	Printer	0	8	0	8
		400	747	59	1206

Berdasarkan dengan kondisi eksisting perangkat keras yang ada pada **Tabel 7.14 – Tabel 7.16** dapat disimpulkan jumlah keseluruhan perangkat keras yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ditampilkan pada **Tabel 7.17**

Tabel 7.17 Total Eksisting Perangkat Keras Utama

No	Nama Perangkat Keras	Jumlah
1	PC	900
2	Laptop	653
3	Printer	1206

Dari hasil jumlah perangkat keras yang terdata dalam survei terdapat perangkat keras dengan usia lebih dari 5 tahun. Hal tersebut menjadi dasar usulan untuk pengadaan pembaharuan perangkat dengan usia diatas 5 tahun untuk mendukung kinerja dan performa kebutuhan kantor sehari hari. Usia tersebut adalah usia optimal untuk dilakukannya pergantian perangkat keras mengingat munculnya OS baru, keadaptifan dalam membuka browser atau melakukan hal berat pada perangkat keras dengan membuka aplikasi baru, serta performa perangkat keras yang sudah tidak lagi prima.

b) Perangkat Keras Periferal

Periferal atau perangkat tambahan atau perangkat saja adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Beberapa perangkat yang umum digunakan adalah pencetak, pemindai, mikrofon dan pengeras suara. Daftar Perangkat Periferal yang yang didapatkan dari hasil survey di seluruh OPD terdapat pada **Tabel 7.18**

Tabel 7.18 Eksisting Perangkat Periferal

ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
P.F.001	Keyboard	-	Nirkabel	7	Bagian Umum	Bagian Umum
P.F.002	Mouse	-	Nirkabel	7	Bagian Umum	Bagian Umum
P.F.003	LCD	tidak tahu	tidak tahu	1	Ruang rapat	Administrsi pembangunan
P.F.004	Keyboard	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
P.F.005	Monitor	Tampilan Komputer	Acer	1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
P.F.006	Monitor	Tampilan Komputer	Mx	1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
P.F.007	Keyboard	Alat untuk menginput data angka, huruf dan simbol	Vortex	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
P.F.008	Keyboard	Alat untuk input data angka, huruf dan simbol	Logitech	1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
P.F.009	Keyboard	Alat untuk input data angka, huruf dan simbol	MX	1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
P.F.010	Monitor	Tampilan Komputer	Lenovo	1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
P.F.011	PC Lenovo	Monitor	Corei5	1	OPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan
P.F.012	Proyektor	Media Visual	Media Visual	1	Ruang LPSE	LPSE
P.F.013	mouse, keyboard	sepaket komputer	sepaket komputer	5	ruang kerja bagian protokol dan komunikasi pimpinan 4, ruang kabag 1	bagian protokol dan komunikasi pimpinan
P.F.014	HARDDISK EKSTERNAL	HARDDISK EKSTERNAL	NON PABRIKAN	5	RUANG INSPEKTORAT PEMBANTU	INSPEKTORAT PEMBANTU
P.F.015	Keyboard	Keybooard	peningkat	12	masing-masing ruang	Sekretaris DPRD
P.F.016	Mouse keyboard	Mouse keyboard	Perangkat melekat komputer	10	Bappeda	Bappeda

ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
P.F.017	Keyboard	Untuk menginput data menjadi teks	Kabel	4	OPD	Bakesbangpol
P.F.018	Mouse	Memudahkan pengoperasian pointer pada layar	Kabel	4	OPD	Bakesbangpol
P.F.019	Perangkat Periferal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang	pencetak, pemindai dan pengeras suara.	main peripheral & auxiliary peripheral	30	Ruangan Sekretariat dan Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang
P.F.020	Printer	Mensin untuk mencetak dokumen surat	Mesin Cetak Dokumen	16	BKD	BKD
P.F.021	Scanner	Mesin Pindai Dokumen	Mesin Pindai	4	Kantor BKD Kabupaten Deli Serdang	BKD Kabupaten Deli Serdang
P.F.022	mouse, keyboard	untuk input data	input data	7	setiap ruangan	BPBD
P.F.023	keyboard mouse	keyboard mouse	keyboard mouse	49	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Dinas perumahan dan kawasan permukiman
P.F.024	printer fargo	untuk pencetak KTPL dan KIA	HDP5000	9	ruang operator	dinas kependudukan dan pencatatan sipil
P.F.025	HDD Eksternal	Tempat Penyimpanan Data	HDD Eksternal	4	Beberapa Bidang	Dinas P2KBP3A
P.F.026	Printer	Printer dan Scan	Printer dan Scan	5	Masing-Masing Bidang	Dinas P2KBP3A
P.F.027	Proyektor	Proyektor	Proyektor	2	Bagian Umum	Dinas P2KBP3A

ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
P.F.028	printer	untuk cetak berkas	percetakan	15	keuangan = 5, program = 2, bidang pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat = 2, bidang pembangunan kawasan dan ekopnomian pedesaan= 1, sossial daasar =2, binda pemdes =3	DPMD
P.F.029	mouse	-	-	25	-	DPMD
P.F.030	proyektor	-	-	4	keuangan 1, program 1, bina pemdes 1, pembangunan kawasan dan ekonomi pedesaan 1	DPMD
P.F.031	Input Device	Scanner, Monitor Layar Sentuh, Keyboard, Flash Disk, Mouse dan UPS	Perangkat keras	-	-	Dinas Perikanan
P.F.032	Output Device	Printer	perangkat keras	-	-	Dinas Perikanan
P.F.033	INFOKUS, SOUND SYSTEM, HT, CCTV,	INFOKUS, SOUND SYSTEM, HT, CCTV,	TERLAMPIR	INFOKUS (1); SOUND SYSTEM (1), HT (26), CCTV (RUSAK)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
P.F.034	Indihome	Indihome	Akses Point	5	Ruangan Sekretaris	Tidak Ada
P.F.035	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
P.F.036	Fiber Optic	Jaringan Intranet	Lokal	100 Opd	Komplek Kantor Bupati	Kominfo
P.F.037	Proyektor	Proyektor	Proyektor	15	Setiap BPP dan Dinas Pertanian	Dinas Pertanian

ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
P.F.038	Keyboard	Untuk input data	input	9	OPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip
P.F.039	Mouse	Mouse kabel	input	9	OPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip
P.F.040	Hard Disk	Terlampir	Terlampir	Terlampir	Terlampir	Terlampir
P.F.041	Scanner Barcode	Zebra	USB Cable	3	PCR,Pendaftar,an,	RSUD DELISERDANG
P.F.042	Pagging System	PIRS (Pusat Informasi Rumah Sakit)	Mini PC Intel NUC, Amplifier	1	PIRS	RSUD DELI SERDANG
P.F.043	DR (DIGITAL RADIO GRAPH)	merekam gambar sinar-X dan mengubahnya menjadi file digital yang dapat ditampilkan atau dicetak untuk dibaca dan disimpan sebagai bagian rekam medis pasien.	ALKES	1	RADIOLOGI	RSUD DELISERDANG
P.F.044	CR (Computed Radio Graphy)	proses digitalisasi gambar yang menggunakan Imaging Plate (IP) untuk akuisisi X-ray, data analog menjadi data digital yang berbasis system informasi dan processing.	ALKES	1	RADIOLOGI	RSUD DELISERDANG
P.F.045	CT SCAN	mesin pemindai berbentuk lingkaran yang besar dan cukup untuk dimasuki orang	ALKES	1	RADIOLOGI	RSUD DELISERDANG

ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Jumlah Perangkat (e-Gov)	Lokasi Penempatan	Unit Pengelola Network
		dewasa dengan posisi berbaring				
P.F.046	Proyektor	Infocus + Layar/Model IN14A	Teg 100-240 Vac-50-60 Hz	1	Ruang Kasi Pemerintahan	Pemerintahan
P.F.047	Mouse	Votre	-	1	Ruang Kasi Trantib	Kasi Trantib
P.F.048	Lenovo	Keyboard	-	1	Ruang Kasi Trantib	Trantib
P.F.049	HIKVISION	Mesin Absensi	Network Support 10/100/1000	1	Ruang Kasi Pemerintahan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
P.F.050	-	Pengeras Suara	-	1	Ruang Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
P.F.051	Sound System	Sound System	Portable	1	Aula Kantor Camat	Kantor Camat
P.F.052	EPSON PROJECTION	EPSON PROJECTION	EPSON PROJECTION	1	Aula	Kantor Camat
P.F.053	Mesin Absensi	Mesin Absensi	Face Recognition	1	Subbag Umum	BKD
P.F.054	Handy Talky	Handy Talky	Radio Komunikasi	2	Subbag Umum	Dukcapil
P.F.055	Server	HP ML350 G6	TOWER	1	SUBBAG UMUM	DISDUKCAPIL
P.F.056	Proyektor	-	-	1	internal PD	internal PD
P.F.057	Keyboard	keyboard untuk input tulisan	input	8	OPD	RSUD Pancur Batu
P.F.058	Mouse	petunjuk layar	input	8	OPD	RSUD Pancur Batu
P.F.059	Keyboard	Menginput data	Kabel	7	OPD	Puskesmas Lubuk Pakam
P.F.060	Mouse	Memudahkan pemindahan pointer pada layar	Kabel	7	OPD	Puskesmas Lubuk Pakam

c) Perangkat Jaringan

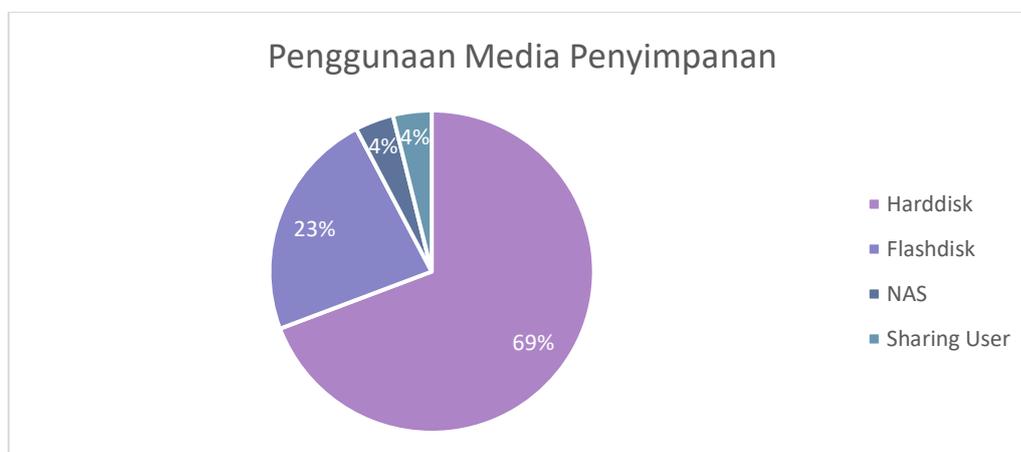
Berdasarkan hasil survei yang diperoleh terkait dengan perangkat jaringan, dapat dilihat pada **Lampiran 7.1 Kepemilikan Perangkat Jaringan** masih banyak OPD yang belum memiliki perangkat jaringan, termasuk salah satu diantaranya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Kondisi seperti ini termasuk pada hal yang perlu dilakukan tahapan pendataan ulang dikarenakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terdapat satu pun perangkat jaringan. Dimana Dinas Komunikasi dan Informatik merupakan leading sektor untuk TIK daerah serta merupakan pengelola jaringan intra pemerintah. Secara total ketersediaan perangkat jaringan dapat dilihat pada **Tabel 7.19**

Tabel 7.19 Eksisting Perangkat Jaringan

Nama Perangkat	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Jumlah
Modem	13	18	1	32
Hub/Switch	21	66	22	109
Gateway/router	17	29	2	48
Access Point	27	57	28	112
Repeater Wifi	4	24	0	28
Antena Outdoor	3	1	0	4

d) Perangkat Media Penyimpanan

Penggunaan perangkat media penyimpanan merupakan media pendukung untuk penyimpanan external. Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, penggunaan media penyimpanan lebih banyak pada penggunaan Harddisk Eksternal sebesar **69%** atau **18** perangkat, **23%** atau **6** perangkat menggunakan flashdisk. Dan yang terakhir adalah penggunaan NAS dan Sharing User sebesar **4%** atau **1** perangkat masing masing, hal ini dapat dilihat pada **Gambar 7.5**. Secara lebih rinci terkait data tiap OPD maka dapat dilihat pada **Lampiran 7.2 Kondisi Eksisting Media Penyimpanan**



Gambar 7.5 Persentase Penggunaan Media Penyimpanan

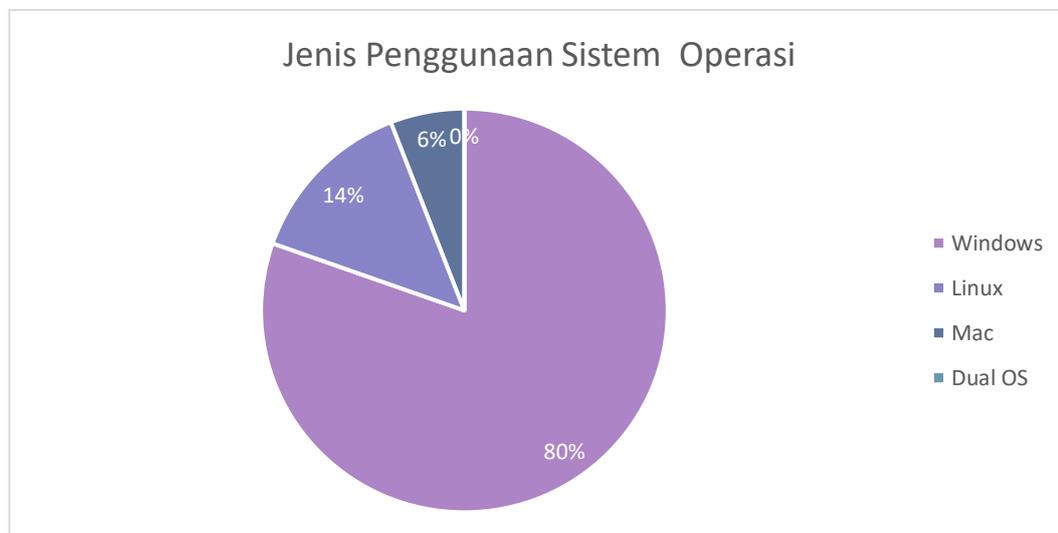
7.8.2 Ketersediaan Perangkat Lunak

Salah satu poin dalam Perpres 95/2018 tentang infrastruktur SPBE adalah tersedianya perangkat lunak. Penggunaan perangkat lunak dibutuhkan dalam mendukung aktivitas sehari-hari untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dalam Draft Arsitektur SPBE yang diterbitkan pada 22 Juni 2021 pada metadata disebutkan perangkat lunak platform terbagi menjadi sistem operasi dan aplikasi perkantoran (pengolah kata, pengolah angka dan lainnya).

Ketersediaan perangkat lunak (Platform) yang terdapat pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang digunakan sebagai penunjang atau sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya terdiri dari sistem operasi dan aplikasi perkantoran. Sistem operasi meliputi Windows, Linux, Mac, dan Dual OS, sedangkan aplikasi perkantoran meliputi MS.Office, Google doc, Google sheets, Google slide dan lainnya. Perangkat lunak yang terdapat pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang akan diuraikan lebih detail pada berikut.

a) Sistem Operasi

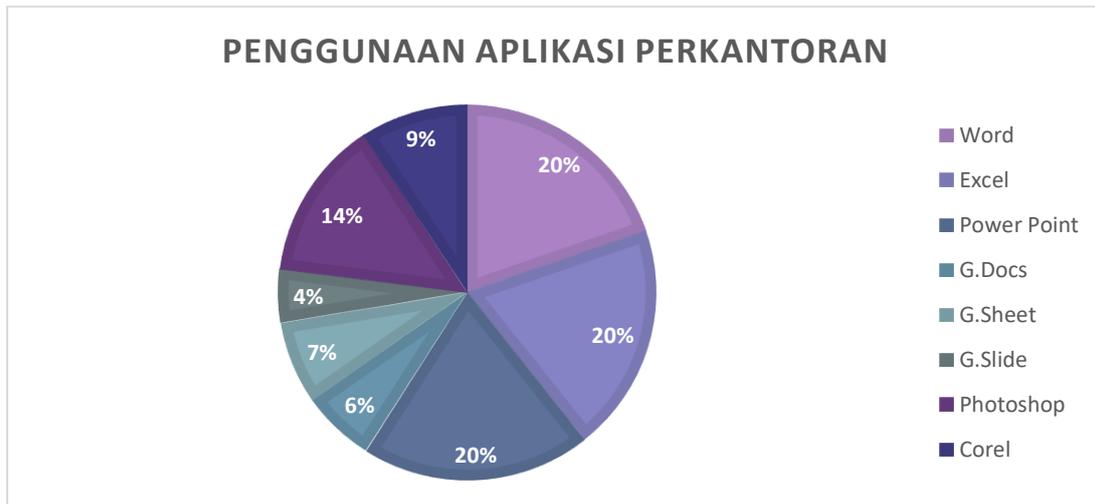
Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Penggunaan sistem operasi pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang mayoritas lebih kepada **Windows** dengan persentase **80%** atau **41 OPD** yang menggunakan, **Linux** dengan persentase **14%** atau **7 OPD** yang menggunakan, dan terakhir **Mac** dengan persentase **6%** atau **3 OPD** yang menggunakan. Sedangkan untuk dual OS tidak ada OPD yang menggunakan sistem operasi dengan jenis ini. Ilustrasi penggunaan sistem operasi dapat dilihat pada **Gambar 7.6**



Gambar 7.6 Persentase Jenis Penggunaan Sistem Operasi

b) Aplikasi Perkantoran

Aplikasi perkantoran digunakan untuk mendukung pekerjaan harian yang pada masing masing OPD. Aplikasi perkantoran yang banyak digunakan seputar microsoft word, excel, power poin, photoshop, corel dan lainnya. Mayoritas penggunaan aplikasi Microsoft seperti Word, Excel, dan Power Point dengan persentase **20%** atau **47 OPD** menggunakan jenis ini. Persentase terbesar ke dua adalah **14%** atau **33 OPD** menggunakan Photoshop. Persentase penggunaan aplikasi perkantoran dapat dilihat pada **Gambar 7.7**. Detail penggunaan aplikasi perkantoran dapat dilihat pada **Lampiran 7.3 Kondisi Eksisting Aplikasi Perkantoran**



Gambar 7.7 Persentase Penggunaan Aplikasi Perkantoran

Secara detail data eksisting tiap OPD untuk Sistem Operasi dan Kepemilikan Perangkat Lunak Platform dapat dilihat pada **Lampiran 7.4 Kondisi Eksisting Perangkat Lunak Platform**

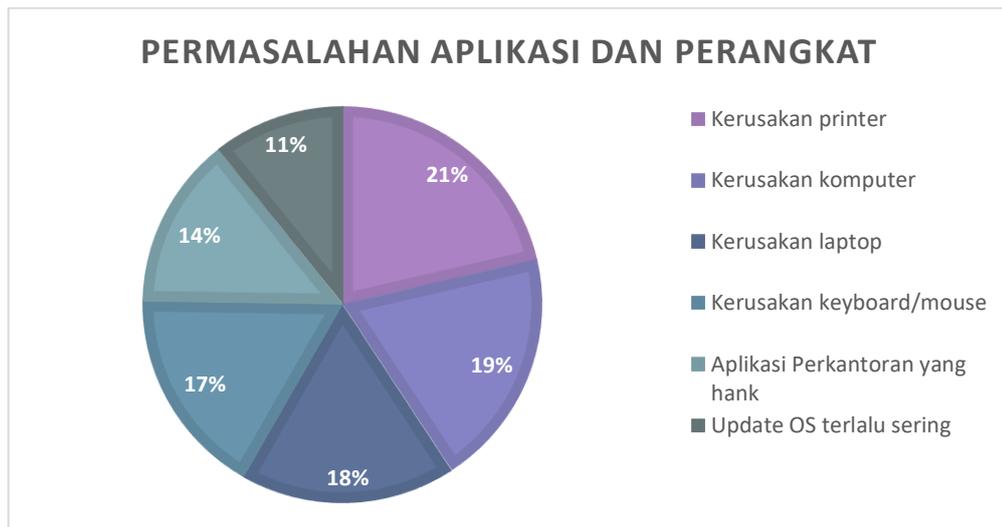
7.9 Permasalahan Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dengan kondisi eksisting infrastruktur SPBE Kabupaten Deli Serdang terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya permasalahan aplikasi dan perangkat, permasalahan jaringan, permasalahan sistem penghubung layanan, dan permasalahan server. Setiap permasalahan terkait dengan infrastruktur dibahas pada sub bab berikut

7.9.1 Permasalahan Aplikasi dan Perangkat

Permasalahan yang sering terjadi seputar aplikasi dan perangkat pada Pemerintah Deli Serdang cukup beragam, mulai dari kerusakan laptop, komputer, printer, aplikasi dan juga update OS yang terlalu sering. Persentase terjadinya masalah kerusakan printer sebanyak **21%** atau **44 OPD** mengeluhkan terjadi kerusakan printer. Sebanyak **19%** atau **40 OPD** mengalami keluhan kerusakan komputer, **18%** atau **36 OPD** mengalami keluhan kerusakan laptop, **17%** atau **35 OPD** mengalami kerusakan keyboard/mouse, kerusakan aplikasi perkantoran yang mengalami hank

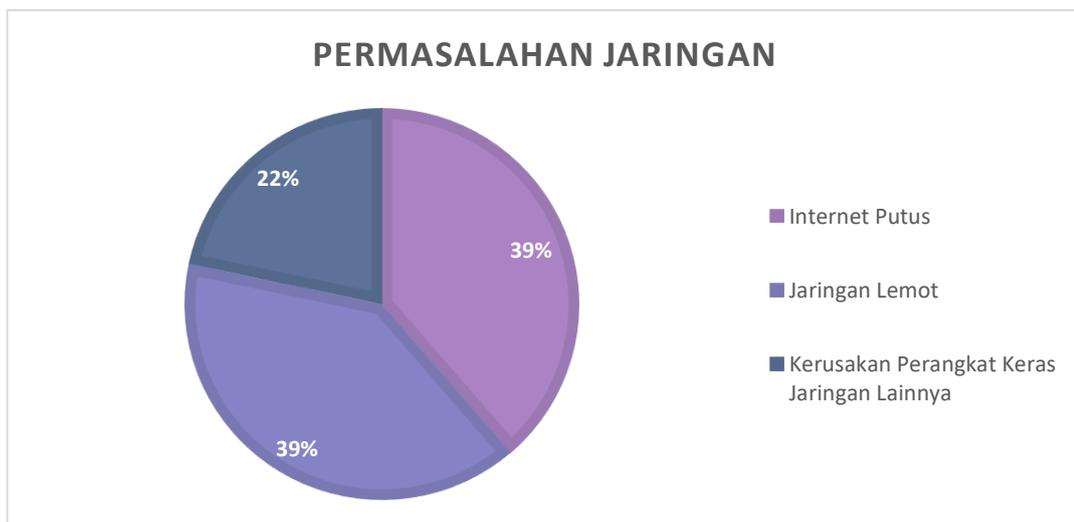
sebanyak **14%** atau **29 OPD**, dan **11%** atau **22 OPD** mengeluhkan update OS terlalu sering. Secara umum ditampilkan pada **Gambar 7.8**



Gambar 7.8 Permasalahan Aplikasi dan Perangkat

7.9.2 Permasalahan Jaringan

Permasalahan jaringan merupakan permasalahan yang cukup krusial, terutama jika menyangkut dengan pelayanan publik yang membutuhkan koneksi internet. Persentase terbesar terkait dengan permasalahan jaringan terletak pada keluhan terjadinya jaringan lemot dengan persentase sebesar **39%** atau **42 OPD** mengalami permasalahan ini, sebanyak **39%** atau **41 OPD** mengalami masalah internet putus, dan **22%** atau **23 OPD** mengeluhkan terjadinya kerusakan perangkat jaringan. Persentasenya dapat dilihat pada **Gambar 8.8**.

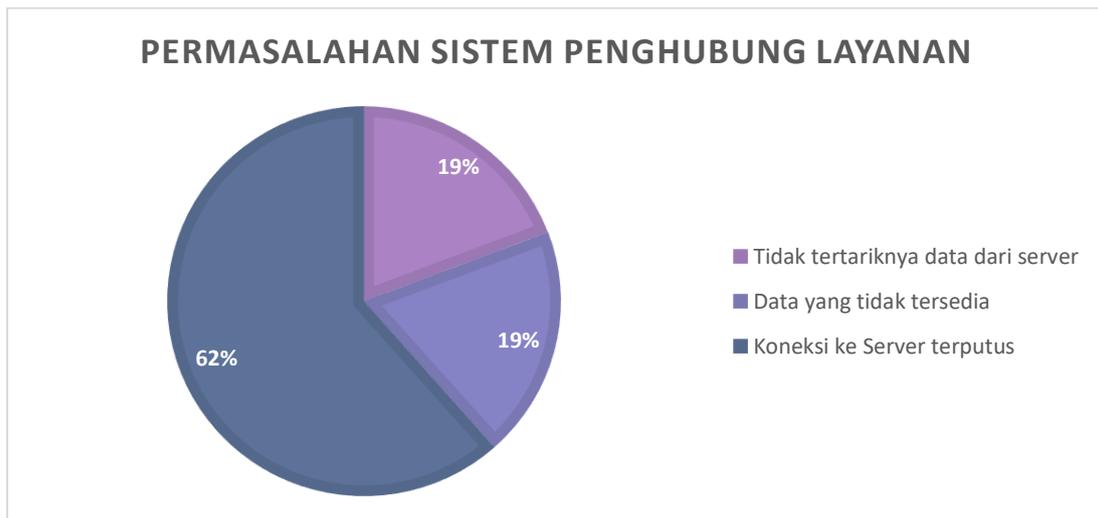


Gambar 7.9 Kategori Permasalahan Jaringan

7.9.3 Permasalahan Sistem Penghubung Layanan

Permasalahan terkait dengan sistem penghubung layanan terbagi menjadi tiga permasalahan berdasarkan hasil survei. Permasalahan terbesar adalah **62%** atau **16** berkaitan dengan terputusnya koneksi ke server, kemudian **19%** atau **5 OPD** masing

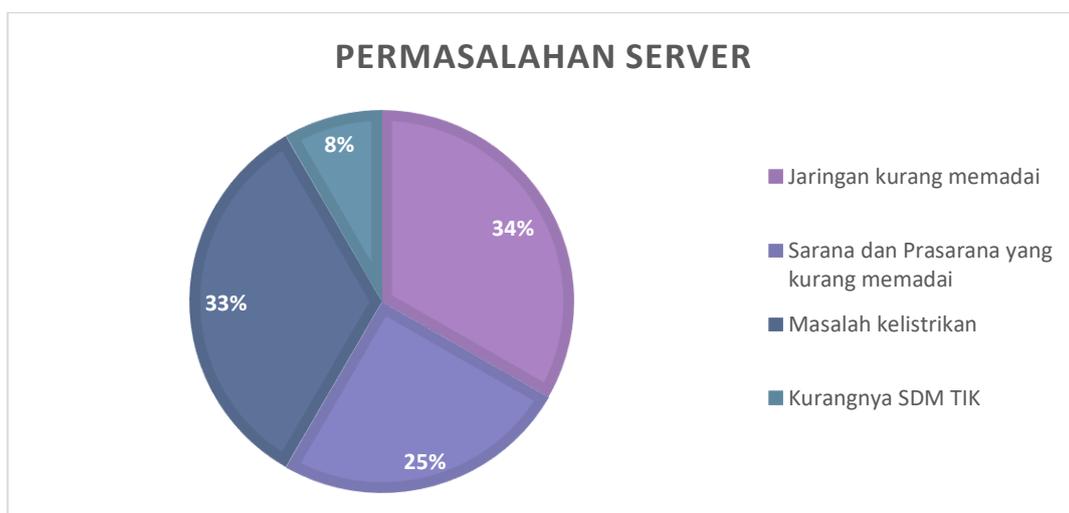
masing mengeluhkan tentang data yang tidak tersedia dan tidak tertariknya data dari server.



Gambar 7.10 Kategori Pemasalahan Sistem Penghubung Layanan

7.9.4 Permasalahan Server

Permasalahan yang terjadi seputar server dapat berkaitan dengan masalah pada sistem penghubung layanan. Permasalahan pada server yang paling banyak terjadi adalah jaringan yang kurang memadai dengan persentase **34%** atau **4 OPD** mengeluhkan masalah ini, selanjutnya masalah kelistrikan menjadi keluhan kedua dengan persentase **33%** atau **4 OPD** mengalami permasalahan listrik. **25%** atau **3 OPD** mengeluhkan permasalahan kurangnya sarana dan prasarana, dan sebanyak **8%** atau **1 OPD** mengalami permasalahan kurangnya SDM TIK yang memadai.



Gambar 7.11 Kategori Permasalahan Server

7.10 Analisis Gap

Terdapat beberapa permasalahan dan usulan yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas Arsitektur

Infrastruktur yang ada. Maka dari itu diperlukan Analisis GAP yang memenuhi proses perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang semuanya dilakukan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan tertulis pada Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 dan Arsitektur Nasional. Permasalahan dan Usulan yang dilakukan untuk perbaikan Infrastruktur yang ada dapat dilihat pada **Tabel 7.20**

Tabel 7.20 Analisis Gap Perangkat Keras dan Lunak SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
Infrastruktur	Belum ada implementasi DMZ pada area server	Perlu diterapkan DMZ sebagai bentuk penerapan keamanan	Belum ada implementasi DMZ pada area server
	Belum ada penerapan firewall fisik untuk penerapan keamanan jaringan	Implementasi firewall fisik sebagai bentuk peningkatan keamanan jaringan dan kontrol	Belum ada penerapan firewall fisik untuk penerapan keamanan jaringan
Pusat Data	Banyak OPD yang masih mengelola server sendiri	Idealnya pengelolaan server terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Banyak OPD yang masih mengelola server sendiri
	Pemenuhan aspek ruang server masih belum maksimal	Aspek ruang server perlu ditingkatkan untuk memenuhi aspek keamanan dan performa server	Pemenuhan aspek ruang server masih belum maksimal
	Belum adanya penggunaan DRC sebagai fasilitas <i>back up</i> data.	Perlu adanya DRC untuk menjaga tingkat reliabilitas server	Belum adanya penggunaan DRC sebagai fasilitas <i>back up</i> data.
Komputasi	Fasilitas komputasi belum diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kinerja	Pemanfaatan fasilitas komputasi untuk menunjang peningkatan kinerja	Fasilitas komputasi belum diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kinerja
Sistem Penghubung Layanan	Belum adanya penggunaan API Gateway untuk mendukung integrasi antar aplikasi	Implementasi API Gateway untuk mendukung proses integrasi aplikasi	Belum adanya penggunaan API Gateway untuk mendukung integrasi antar aplikasi
Perangkat Keras dan Perangkat Lunak	Terdapat perangkat keras utama yang usia pakai lebih dari 5 tahun dalam jumlah yang cukup banyak	Diadakan peremajaan perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun	Terdapat perangkat keras utama yang usia pakai lebih dari 5 tahun dalam jumlah yang cukup banyak

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
	Terdapat OPD yang tidak memiliki perangkat keras jaringan	Tersedia perangkat jaringan untuk mendukung penggunaan internet yang baik	Belum semua OPD memiliki perangkat jaringan

BAB 8

Kondisi Eksisting Keamanan SPBE dan Analisis GAP

Pada Bab 8 menjelaskan terkait kondisi eksisting keamanan SPBE yang ada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penjelasan awal dimulai dari pengertian keamanan SPBE, Referensi Arsitektur Keamanan SPBE, Metadata Keamanan SPBE dan dilanjutkan dengan kondisi eksisting keamanan SPBE yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penjelasan terakhir adalah terkait analisis kesenjangan antara kondisi eksisting (*as is*) dengan kondisi yang diinginkan (*to be*).

8.1 Pengertian Keamanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, **Keamanan SPBE** mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. **Penjaminan kerahasiaan** dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. **Penjaminan keutuhan** dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. **Penjaminan ketersediaan** dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. **Penjaminan keaslian** dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. **Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*)** dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

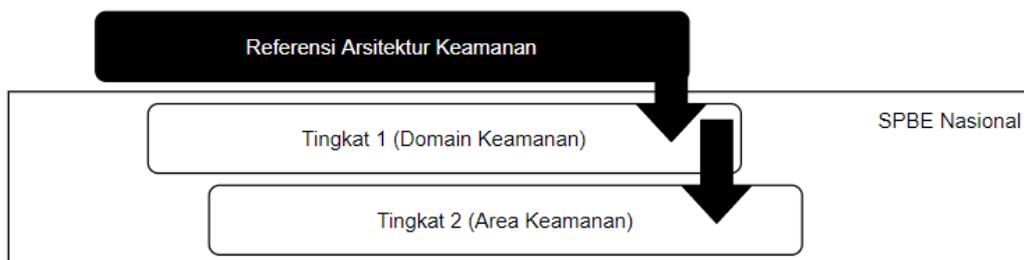
8.2 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Berdasarkan Draf Arsitektur SPBE Nasional, Referensi Keamanan SPBE (RK) pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara tidak langsung, RK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK.

Tabel 8.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.
01.03	Regulasi Lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPSKPD untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPSKPD untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPSKPD untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPSKPD untuk menanggulangi, memulihkan dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Uji kelaikan keamanan terhadap aplikasi umum yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPSKPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Uji kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPSKPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Infrastruktur SPBE Nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan



Gambar 8.1 Struktur Referensi Keamanan SPBE

Berdasarkan Draf Arsitektur SPBE Nasional Versi 1.2 yang diterbitkan pada 9 April 2021, didalamnya memuat beberapa hal yang bertujuan untuk melengkapi rencana penerapan SPBE. Pada Draf Arsitektur SPBE Nasional, terdapat Taksonomi atau pengelompokan Referensi Arsitektur SPBE dimana salah satunya adalah taksonomi Keamanan SPBE.

Struktur dari RK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan uji kelaikan keamanan, sebagai RK tingkat 1 (pertama); dan
2. Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE sebagai RK tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya untuk mendefinisikan elemen di dalamnya, akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.

8.3 Metadata Keamanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola. Metadata juga sering kali disebut dengan data tentang data atau informasi tentang informasi. Dalam Draf Arsitektur SPBE Nasional yang diterbitkan pada 22 Juni 2021 disebutkan penggunaan metadata pada beberapa komponen dimana Metadata Keamanan merupakan salah satu yang disebutkan. Metadata keamanan meliputi Keamanan Data dan Informasi, Keamanan Infrastruktur SPBE, Keamanan Aplikasi SPBE yang dituangkan dalam bentuk penerapan keamanan pengelolaan jaringan, penggunaan perangkat keamanan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Kemudian pada aspek Manajemen Keamanan merupakan penerapan standar keamanan yang digunakan, pemberlakuan SOP dan audit keamanan secara keseluruhan. Tabel 8.2 dan Tabel 8.3 menunjukkan atribut yang digunakan untuk melakukan penyusunan metadata keamanan SPBE

Tabel 8.2 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Security Device	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
3	Deskripsi Security Device	Penjelasan dari Security Device yang digunakan
4	Tipe Security Device	Jenis dari security device yang digunakan (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless intrusion prevention and detection system, Unified Threat Management, atau Network Access Control)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari Security Device yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)

No	Nama Atribut	Keterangan
6	Nama Pemilik	Status kepemilikan dari Security Device yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
7	Unit Pengelola Security Device	Unit pengelola Security Device yang digunakan
8	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

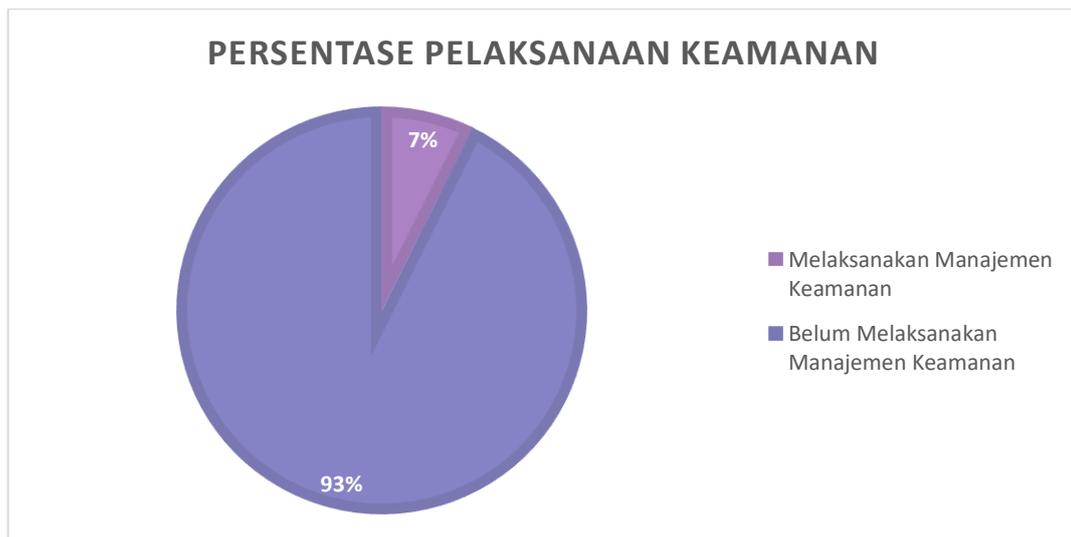
Tabel 8.3 Atribut Metadata Manajemen Keamanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Jenis Standar Keamanan	Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD diantaranya: Standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan SPBE. Standar internasional terkait keamanan informasi. Regulasi lainnya.
2	Keterangan Nama Standar	Nama dari jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD.
3	Hasil Audit Keamanan SPBE	Hasil dari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE untuk Aplikasi dan Infrastruktur SPBE yang terdiri dari: Belum/tidak dilaksanakan Memadai Perlu peningkatan Tidak memadai (Ket: Untuk data dan informasi tidak dilakukan Audit Keamanan
4	Tanggal Pelaksanaan Audit	Tanggal penyerahan laporan Audit Keamanan SPBE terbaru untuk Aplikasi dan Infrastruktur SPBE yang bersesuaian (Ket: Untuk data dan informasi tidak dilakukan Audit Keamanan, atribut ini tidak terbuka bila Atribut Audit Keamanan SPBE dijawab dengan “Belum/tidak dilaksanakan”)
5	Penerapan Keamanan	Program kerja atau kegiatan Keamanan SPBE yang dilaksanakan oleh setiap IPPD sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja atau kegiatan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi: Edukasi kesadaran Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
		Penilaian kerentanan Keamanan SPBE Peningkatan Keamanan SPBE Penanganan insiden Keamanan SPBE.
6	Pengujian Kelaikan Keamanan	Pengujian kelaikan keamanan yang telah dilaksanakan terhadap pengendalian data dan informasi, persyaratan keamanan Aplikasi Umum SPBE, dan persyaratan keamanan Infrastruktur SPBE Nasional.
7	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

8.4 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE

Berdasarkan dengan hasil survei yang sudah dilakukan terkait dengan keamanan SPBE, ditemukan data bahwa pelaksanaan keamanan masih rendah dengan persentase **7%** atau **3 OPD** yang melaksanakan. Namun pelaksanaan keamanan yang sudah dilakukan masih perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Pelaksanaan keamanan yang sudah dilakukan masih sebatas keamanan teknis seperti halnya menerapkan anti virus, pemasangan CCTV, finger lock dan lainnya

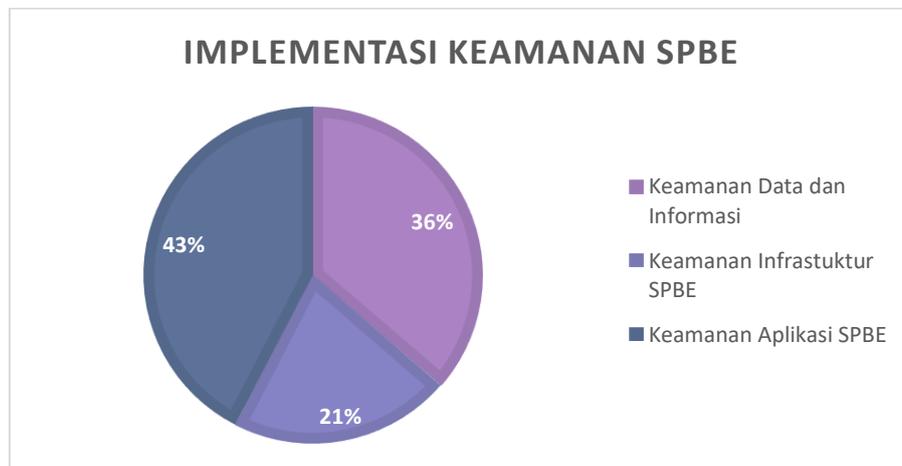


Gambar 8.2 Persentase Pelaksanaan Keamanan

Terkait dengan kebijakan dan tata kelola keamanan, untuk saat ini hanya sebatas penerapan SOP yang berkaitan dengan keamanan. Secara umum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat dikatakan belum menjalankan tata kelola dan manajemen keamanan.

8.4.1 Keamanan Tata Kelola dan Manajemen SPBE

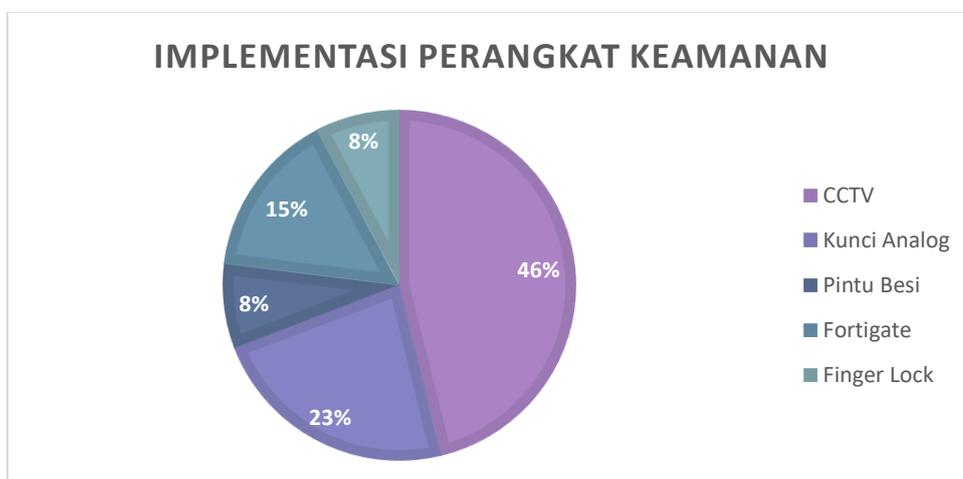
Implementasi keamanan SPBE yang meliputi keamanan data dan informasi memiliki persentase **36%**, dimana bentuk keamanan data dan informasi yang diterapkan meliputi penggunaan kunci, standar *username* dan *password*, dan juga framework dalam penulisan program. Selanjutnya keamanan infrastruktur SPBE sebesar **21%** dalam bentuk penerapan *finger lock*, dan yang terakhir **43%** untuk keamanan aplikasi juga sebatas penerapan *password* dan juga framework pemrograman



Gambar 8.3 Persentase Implementasi Keamana

8.4.2 Keamanan Teknis

Keamanan teknis lebih pada bentuk keamanan dalam bentuk penerapan hal hal teknis seperti halnya penerapan kunci analog, cctv, finger lock dan lain sebagainya. Penerapan keamanan teknis terbesar adalah **46%** menerapkan CCTV, dan **23%** menerapkan kunci analog, sebesar **15%** menggunakan firewall (fortigate), dan **8%** masing masing menggunakan pintu besi dan finger lock.



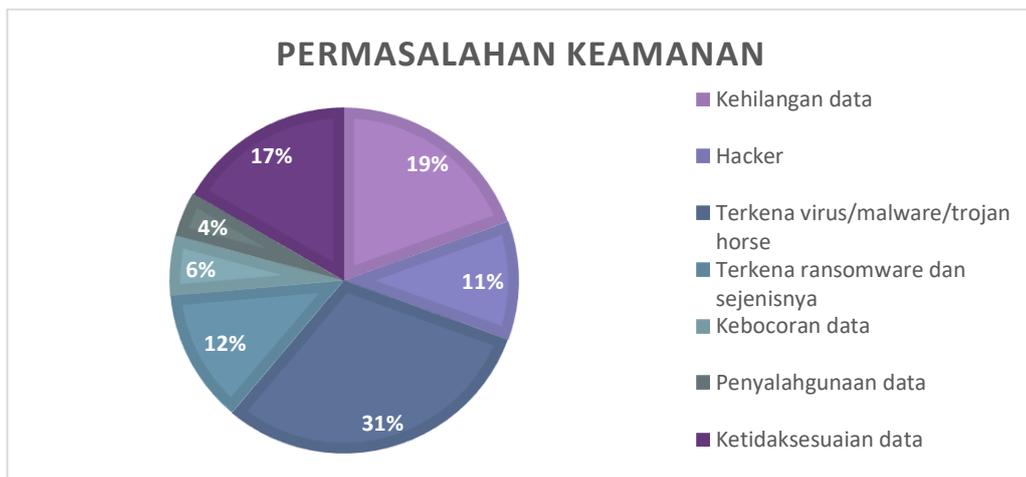
Gambar 8.4 Persentase Implementasi Perangkat Keamanan

8.4.3 Audit Keamanan SPBE

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum menjalankan audit keamanan baik kegiatan dari Monev SPBE, Monev Aplikasi, Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur, Audit Keamanan.

8.5 Permasalahan Keamanan SPBE

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terkait kondisi eksisting keamanan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdapat beberapa permasalahan yang diawali dalam menjalankan keamanan SPBE. Berikut terkait permasalahan yang terjadi terkait keamanan yang disajikan pada **Gambar 8.5**



Gambar 8.5 Permasalahan Keamanan SPBE

Kedudukan permasalahan keamanan yang paling banyak di alami pada OPD di Kabupaten Deli Serdang adalah Perangkat Keras terkan virus/ trojan/ malware sebanyak **31% atau sebanyak 22 Responden OPD**. Sedangkan Permasalahan terkait keamanan yang paling minim/ jarang di alami oleh OPD adalah penyalahgunaan data yang mendapat perolehan **4%** dari responden. Sisanya tersebar merata untuk permasalahan seperti kehilangan data, hacker, kebocoran data dan lain lain.

8.6 Analisis Gap

Terdapat beberapa permasalahan dan usulan yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas Arsitektur Keamanan SPBE yang ada. Maka dari itu diperlukan Analisis GAP memenuhi proses perbaikan dan peningkatan kualitas Keamanan yang semuanya dilakukan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan tertulis pada Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 dan Arsitektur Nasional. Permasalahan dan Usulan yang dilakukan untuk perbaikan Keamanan yang ada dapat dilihat pada **Tabel 8.4**

Tabel 8.4 Analisis Gap Keamanan SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
Tata Kelola dan	Penerapan manajemen keamanan yang	Melakukan manajemen keamanan mengacu pada	Penerapan manajemen keamanan yang

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi yang ingin dicapai	Gap Analisis
Manajemen Keamanan	dilakukan masih sebatas SOP	BSSN 10/2019 dan BSSN 4/2021	dilakukan belum maksimal
	Minimnya implementasi dan pemahaman keamanan	Implementasi keamanan SPBE sesuai dengan standar/framework	Minimnya implementasi dan pemahaman keamanan
Audit Keamanan	Belum dilakukannya audit keamanan secara berkala	Audit keamanan dilakukan secara rutin dalam 2 tahun sekali	Belum dilakukannya audit keamanan secara berkala
	Masih banyak permasalahan keamanan yang terjadi	Meminimalisir terjadinya permasalahan keamanan dengan implementasi audit keamanan	Masih banyak permasalahan keamanan yang terjadi

BAB 9

Kondisi Eksisting Tata Kelola dan Manajemen SPBE dan Analisis GAP

Bab ini akan membahas kondisi eksisting dari segi Tata kelola Penyelenggara SPBE dan kondisi Manajemen SPBE yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Setelah itu, akan dilakukan analisis gap dari kondisi eksisting (saat ini) dibanding dengan kondisi ideal untuk Tata Kelola dan Manajemen SPBE.

9.1 Pengertian Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Sesuai dengan Peraturan Preseiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, mengenai Sistem Pemerintah berbasis Elektronik (SPBE) Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Sedangkan pengertian dari Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

9.2 Kondisi Eksisting Tatakelola SPBE

Pada bagian ini akan membahas tentang kondisi eksisting saat ini dari Tata Kelola SPBE yang ada di 47 OPD Kabupaten Deli Serdang

9.2.1 Kebijakan SPBE

Sesuai dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020, mengenai Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik terdapat 10 indikator tentang kebijakan internal tata kelola SPBE. Penjabaran hasil penilaian indikator dan kebijakan internal tersebut yang telah ada di Kabupaten Deli Serdang ditampilkan pada **Tabel 9.1**

Tabel 9.1 Hasil penilaian Indikator dan Kebijakan Internal Eksisting

No	Indikator	Kebijakan Internal Eksisting
1.	Arsitektur SPBE	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
2.	Peta Rencana SPBE	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
3.	Manajemen Data	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

No	Indikator	Kebijakan Internal Eksisting
4.	Pembangunan Aplikasi SPBE	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
5.	Layanan Pusat Data	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
6.	Layanan Jaringan Intra	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
7.	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
8.	Manajemen Keamanan Informasi	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
9.	Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan tentang pelaksanaan Audit TIK.
10.	Tim Koordinasi SPBE	<u>SK Bupati nomor 525 tahun 2019</u> tentang keputusan serta tugas Tim Koordinasi yang mendukung penerapan SPBE untuk seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Sesuai dengan hasil penilaian indikator di Kabupaten Deli Serdang hanya ditemukan 1 kebijakan internal SPBE yang berisi tentang Tata Kelola Teknologi SPBE yaitu tentang pembentukan Tim Koordinasi SPBE yang dimuat pada Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 525 tahun 2019.

9.2.2 Pemantauan dan Evaluasi

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Sedangkan evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

Dari hasil survei yang telah dilakukan kepada 47 OPD di Kabupaten Deli Serdang, sebanyak **47 OPD tidak melakukan kegiatan baik dari Pemantauan dan Evaluasi SPBE.**

9.2.3 Audit TIK

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 Tahun 2018 Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada: penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi; fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi, kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan, dan aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Didalam peraturan tersebut juga menyatakan bahwa Audit TIK memiliki 3 kategori yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE.

a) Audit Infrastruktur

Setelah dilakukan survei ke semua OPD di temukan bahwa 47 OPD di Kabupaten Deli Serdang **belum melaksanakan audit Infrastruktur SPBE.**

b) Audit Aplikasi SPBE

Kondisi saat ini, ditemukan bahwa semua OPD masih **belum melakukan audit aplikasi SPBE.**

c) Audit Keamanan SPBE

Semua OPD di Kabupaten Deli Serdang masih **belum melakukan audit untuk Keamanan SPBE**

9.3 Kondisi Eksisting Manajemen SPBE

Sub bagian ini membahas kondisi eksisting dari manajemen SPBE yang ada di 47 OPD di Kabupaten Deli Serdang.

9.3.1 Manajemen Risiko SPBE

Sesuai yang dimuat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia **Nomor 5 tahun 2020**, pengertian **manajemen risiko SPBE** adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.

Kondisi saat ini, **hanya satu OPD yang telah melaksanakan manajemen risiko.** Namun pada kenyataannya kerangka kerja (*framework*) yang diterapkan untuk melaksanakan Manajemen Risiko tersebut **belum sesuai dengan kerangka kerja** yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Manajemen Keamanan SPBE. OPD yang dimaksud adalah **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu** yang melaksanakan manajemen risiko SPBE dengan menggunakan kerangka kerja/ Standar ISO 9001:2015 yaitu tentang manajemen mutu. Bentuk kegiatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh OPD

tersebut adalah dengan melakukan pendataan dan analisa risiko secara umum yang bisa terjadi pada organisasi.

9.3.2 Manajemen Keamanan SPBE

Sesuai dengan Peraturan **BSSN nomor 10 tahun 2019**, yang dimaksud dengan keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi. Manajemen keamanan SPBE harus dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018). Selain itu terdapat standar yang dapat diterapkan untuk melaksanakan Manajemen Keamanan SPBE seperti kerangka kerja ISO 270001. Didalam kerangka kerja tersebut mendefinisikan sistem manajemen keamanan informasi sebagai bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan, berdasarkan pendekatan risiko bisnis, untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi.

Setelah dilakukan survei menyeluruh terhadap 47 OPD yang ada di Kabupaten Deli Serdang, saat ini **belum terdapat pelaksanaan manajemen keamanan** sesuai dengan standar yang telah di rekomendasikan oleh Perpres Nomor 95 tahun 2018.

Kegiatan manajemen keamanan yang dilakukan oleh OPD saat ini sebagian berupa tindakan **pengamanan menggunakan pembatasan hak akses dengan VPN** untuk menjaga kerahasiaan data penting yang dimiliki oleh OPD. Namun tindakan tersebut masih belum memenuhi standar manajemen keamanan SPBE jika mengacu pada peraturan atau kerangka kerja tentang manajemen keamanan SPBE.

9.3.3 Manajemen Data SPBE

Manajemen Data SPBE yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 adalah serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Kerangka kerja yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan manajemen data adalah standar DAMA. Dalam *framework* (kerangka kerja) DAMA sendiri mendefinisikan manajemen data sebagai pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan rencana, kebijakan, program dan praktik yang mengontrol, melindungi, memberikan dan meningkatkan nilai data informasi dan aset.

Selain itu terdapat standar/*framework* lain yang dapat diterapkan yaitu **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019**. Saat ini OPD di Kabupaten Deli Serdang yang telah disurvei **belum menerapkan manajemen data SPBE** sesuai dengan *framework* yang rekomendasikan oleh Perpres 95 tahun 2018.

Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika mengklaim telah membuat **SOP Pengelolaan Data Center** dengan menyertakan SOP yang mengacu pada dasar hukum

Perpres 95 tahun 2018 namun tidak terdapat keterangan telah melaksanakan manajemen data sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019 tentang pelaksanaan manajemen data “Satu Data” ataupun pelaksanaan standar DAMA.

Sedang untuk **Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah** melakukan **manajamenen data dengan data di *personal computer* atau *cloud (Google Drive)* tanpa ada standar atau SOP**. Kegiatan yang telah disebutkan masih belum memenuhi standar peraturan manajemen data.

9.3.4 Manajemen Aset TIK

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018).

Framework atau kerangka kerja yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Manajemen Aset TIK adalah **ITIL 4 pada *practice IT Asset Management***. ITIL mendefinisikan manajemen aset TI adalah tentang perencanaan dan pengelolaan siklus hidup secara penuh pada semua aset TI, guna membantu organisasi. Dimana ruang lingkup manajemen aset TI mencakup semua perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, layanan *cloud*, dan perangkat klien. Dalam beberapa kasus, ini juga dapat mencakup aset non-TI seperti bangunan atau informasi yang memiliki nilai finansial dan diperlukan untuk memberikan layanan TI.

Terdapat OPD di Kabupaten Deli Serdang yang telah **melakukan pendataan aset melalui aplikasi BMD** namun pelaksanaannya **tidak mengacu pada standar atau SOP** serta tidak menyertakan bukti terlampir untuk mendukung pernyataan bahwa telah melakukan manajemen aset. Sehingga OPD yang ada di Kabupaten Deli Serdang dinyatakan **belum melakukan manajemen aset TIK**.

9.3.5 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 adalah serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dapat mengacu pada ***framework ITIL 4 pada *practices Workforce & Talent Management****. Dalam pendefinisian menurut ITIL tujuan dari manajemen tenaga kerja dan talenta adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang tepat dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dan dalam peran yang benar untuk mendukung tujuan bisnisnya. Manajemen ini mencakup serangkaian aktivitas luas yang berfokus pada keterlibatan dengan karyawan dan sumber daya orang organisasi, termasuk perencanaan, rekrutmen, orientasi, pembelajaran dan pengembangan, pengukuran kinerja, dan perencanaan suksesi.

Standar/ Framework lain yang dapat dijadikan sesuai acuan manajemen sumber daya manusia adalah Peta Okupasi Nasional sesuai dengan area Fungsi TIK BNSP. Didalamnya dijelaskan pemetaan profil kebutuhan serta ketersediaan sumber daya manusia informatika Indonesia dalam berbagai okupasi dan fungsi kunci, Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di bidang informatika yang mengacu pada KKNI sesuai, dan Penyelenggaraan aktivitas sertifikasi kompetensi yang berbasis pada skema okupasi nasional maupun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada praktik kegiatannya, **2 OPD** di Kabupaten Deli Serdang mengatakan telah melaksanakan manajemen sumber daya manusia dengan **mengikuti program pelatihan dan sertifikasi**, namun **tidak disertakan dengan bukti terlampir** dan kegiatan tersebut masih **belum sesuai dengan standar atau SOP** yang ada, sehingga OPD di Kabupaten Deli Serdang dinyatakan **belum melakukan manajemen sumber daya manusia**.

9.3.6 Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018). **ITIL 4 dengan *practice Knowledge Management*** adalah salah satu *framework* yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan. Menurut ITIL tujuan dari manajemen pengetahuan adalah untuk memelihara dan meningkatkan penggunaan informasi yang efektif, efisien, dan nyaman dan pengetahuan di seluruh organisasi. Manajemen pengetahuan memberikan pendekatan terstruktur untuk mendefinisikan, membangun, menggunakan kembali, dan berbagi pengetahuan (yaitu informasi, keterampilan, praktik, solusi, dan masalah) dalam berbagai bentuk.

Ada **2 OPD** yang telah mengklaim melakukan manajemen pengetahuan. Namun pada praktik kegiatannya masih sebatas **mengadakan bimbingan teknis**, melakukan pelatihan dasar tanpa mengacu standar dan melampirkan bukti. Sehingga kegiatan OPD tersebut dinyatakan **belum melaksanakan manajemen pengetahuan** di Kabupaten Deli Serdang.

9.3.7 Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018). Kerangka kerja yang dapat digunakan untuk pelaksanaan manajemen perubahan adalah **ITIL 4 pada *practice Change Control***. Pada ITIL tujuan dari perubahan kontrol adalah memaksimalkan jumlah layanan dan perubahan produk yang berhasil dengan memastikan bahwa risiko telah dinilai dengan benar, proses otorisasi perubahan, dan mengelola perubahan jadwal. Perubahan adalah penambahan, modifikasi, atau

penghapusan apa pun yang dapat berdampak langsung atau tidak langsung pada layanan. Ruang lingkup perubahan kontrol ditentukan oleh masing-masing organisasi. Ini biasanya akan mencakup semua infrastruktur TI, aplikasi, dokumentasi, proses, hubungan pemasok, dan hal lain yang mungkin

Setelah survei dilaksanakan, kondisi saat ini **tidak ditemukan OPD** di Kabupaten Deli Serdang yang telah melaksanakan manajemen perubahan sesuai dengan standar serta bukti terlampir.

9.3.8 Manajemen Layanan SPBE

Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018). Untuk pelaksanaan manajemen layanan, dapat mengacu pada **framework ITIL 4 pada practices Service desk, Incident management, Problem management, Monitoring & Event management, serta Service request management**. Layanan *Service desk* menyediakan jalur yang jelas bagi pengguna untuk melaporkan masalah, dan permintaan, dan memintanya untuk diakui, diklasifikasikan, dimiliki, dan ditindaklanjuti. Tujuan manajemen insiden adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari kejadian dengan memulihkan operasi layanan normal secepat mungkin, dimana kejadian adalah gangguan yang tidak direncanakan terhadap layanan atau penurunan kualitas layanan. *Problem management* adalah untuk mengurangi kemungkinan dan dampak insiden dengan mengidentifikasi penyebab insiden aktual dan potensial, dan mengelola solusi dan kesalahan yang diketahui. *Problem* di sini berarti penyebab, atau penyebab potensial, dari satu atau lebih insiden. *Monitoring & Event management* mengidentifikasi dan memprioritaskan infrastruktur, layanan, proses bisnis, dan peristiwa keamanan informasi, dan menetapkan respons yang tepat terhadap peristiwa tersebut, termasuk menanggapi kondisi yang dapat menyebabkan potensi kesalahan atau insiden. Sedangkan untuk manajemen permintaan layanan bertujuan untuk mendukung kualitas yang disepakati layanan dengan menangani semua permintaan layanan yang *pre-defined* dan *user-initiated* dengan cara yang efektif dan ramah pengguna.

Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Puskesmas Lubuk Pakam menyatakan telah melaksanakan manajemen layanan SPBE dengan kegiatan sebatas **membuat SOP pelayanan dan melakukan evaluasi pelayanan pada kurun waktu tersebut**. Dari bukti yang telah dilampirkan (dari OPD yang disebutkan) **tidak ditemukan** keterangan terkait pelaksanaan manajemen layanan SPBE sesuai dengan peraturan dan standar yang telah disarankan oleh Perpres 95 tahun 2018. Sehingga sebagai kesimpulan untuk OPD yang ada di Kabupaten Deli Serdang **belum melaksanakan manajemen layanan SPBE**

9.4 Kondisi Eksisting Rencana dan Anggaran SPBE

Bagian ini akan menjelaskan tentang kondisi saat ini terkait rencana dan anggaran SPBE dari 47 OPD di Kabupaten Deli Serdang

9.4.1 Kondisi Eksisting Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

Dinas Komunikasi dan Infomatika masuk kedalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan terkait implementasi anggaran terkait SPBE di Kabupaten Deli Serdang.

9.4.2 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE

Rencana dan anggaran SPBE dibagi menjadi 3 kategori, yaitu anggaran pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan *software* komersial, anggaran pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi serta anggaran pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan *software* komersial. Untuk detail jumlah anggaran yang ada dapat dilihat pada Error! Reference source not found. 9.2

Tabel 9.2 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE tiap OPD

Kode OPD	Nama OPD	A	B	C	TOTAL
1	Bagian Organisasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
3	Bagian Tata Pemerintahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
4	Bagian Hukum	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5	Bagian Umum	Rp0	Rp45.357.439	Rp29.764.000	Rp75.121.439
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
8	Bagian Perekonomian dan SDA	Rp43.084.000	Rp0	Rp0	Rp43.084.000
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp120.000.000

Kode OPD	Nama OPD	A	B	C	TOTAL
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
11	Inspektorat Daerah	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
12	Sekretariat DPRD		Rp550.093.936	Rp0	Rp550.093.936
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp60.000.000	Rp30.000.000	Rp7.000.000	Rp97.000.000
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Rp0	Rp18.652.000	Rp0	Rp18.652.000
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Rp0	Rp612.522.704	Rp72.980.000	Rp685.502.704
16	Badan Pendapatan Daerah	Rp200.000.000	Rp531.018.812	Rp236.530.000	Rp967.548.812
17	Badan Kepegawaian Daerah	Rp0	Rp463.645.000		Rp463.645.000
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp0	Rp544.471.240	Rp45.500.000	Rp589.971.240
20	Dinas Kesehatan	Rp0	Rp793.978.936	Rp60.000.000	Rp853.978.936
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp95.000.000	Rp215.796.000	Rp30.000.000	Rp340.796.000
22	Dinas Lingkungan Hidup	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Rp0	Rp115.803.984	Rp17.990.000	Rp133.793.984
24	Dinas Pendidikan	Rp20.000.000	Rp188.500.000	Rp321.549.500	Rp530.049.500
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga,		Rp186.410.680		Rp186.410.680

Kode OPD	Nama OPD	A	B	C	TOTAL
	Kebudayaan Dan Pariwisata				
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rp0	Rp2.227.694.680	Rp0	Rp2.227.694.680
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Rp0	Rp549.271.536	Rp20.046.000	Rp569.317.536
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Rp182.213.949	Rp0	Rp182.213.949
30	Dinas Perikanan	Rp0	Rp246.761.396	Rp23.040.000	Rp269.801.396
31	Dinas Perhubungan	Rp0	Rp140.504.000	Rp23.946.000	Rp164.450.000
32	Dinas Sosial	Rp0	Rp68.957.211	Rp0	Rp68.957.211
33	Dinas Ketenagakerjaan	Rp0	Rp86.558.800	Rp0	Rp86.558.800
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Rp0	Rp55.000.000	Rp3.446.000.000	Rp3.501.000.000
35	Dinas Pertanian	Rp0	Rp37.500.000	Rp52.280.000	Rp89.780.000
36	Dinas Ketahanan Pangan	Rp0	Rp0	34164000	Rp34.164.000
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Rp0	Rp130.729.680	Rp0	Rp130.729.680
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Rp0	Rp164.754.776	Rp6.168.000	Rp170.922.776
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
40	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp0	Rp101.588.000	Rp902.378	Rp102.490.378
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	Rp0	Rp1.199.800.000	Rp219.200.000	Rp1.419.000.000

Kode OPD	Nama OPD	A	B	C	TOTAL
42	Kecamatan Lubuk Pakam	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
43	Kecamatan Labuhan Deli	Rp0	Rp38.196.000	Rp0	Rp38.196.000
44	Desa Pematang Johar	Rp0	Rp14.000.000	Rp0	Rp14.000.000
45	Desa Sekip	Rp13.540.000	Rp6.960.000	Rp0	Rp20.500.000
46	RSUD Pancur Batu	Rp0	Rp268.618.868	Rp1.428.000	Rp270.046.868
47	Puskesmas Lubuk Pakam	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Keterangan:

A: Anggaran pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial

B: Anggaran pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi

C: Anggaran pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan *software* komersial

Dari total 47 OPD yang telah disurvei, **terdapat 16 OPD** yang masih **belum memiliki anggaran** untuk 3 kegiatan pembangunan aplikasi, pengadaan maupun pemeliharaan perangkat keras. Sebanyak **4 OPD telah memiliki anggaran untuk kegiatan pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan *software* komersial**. Sebanyak **26 OPD telah memiliki anggaran untuk pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi**, sedangkan sebanyak **17 OPD telah memiliki anggaran untuk kegiatan pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan *software* komersial**.

Total anggaran **tertinggi** yang dimiliki OPD untuk melakukan kegiatan pengembangan, pengadaan dan pemeliharaan *hardware* dan *software* berada di **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil** dengan total anggaran sebesar **Rp2.227.694.680**, sedangkan untuk OPD pemilik anggaran terkecil untuk tiga kegiatan tersebut berasal dari **Desa Sekip** dengan nominal anggaran sebesar **Rp20.500.000**.

Anggaran **pembangunan aplikasi tertinggi** dimiliki oleh **Badan Pendapatan Daerah** dengan besar nominal **Rp200.000.000** yang dipergunakan untuk **pengembangan aplikasi Pajak Daerah**. Anggaran **pengadaan *hardware* terbesar** berasal dari **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil** dengan nominal sebesar **Rp2.227.694.680**. Untuk anggaran pemeliharaan ***software* dan *hardware* terbesar** berasal dari **Dinas Pendidikan** dengan nominal anggaran sebesar **Rp321.549.500**

yang digunakan untuk **pemeliharaan komputer dan SIM Pintar**. Detail Anggaran SPBE dapat dilihat pada **Lampiran 9.1 Kondisi Eksisting Anggaran SPBE**

9.5 Permasalahan Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Pada bagian ini akan menjelaskan permasalahan tata kelola dan manajemen SPBE apa saja yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

9.5.1 Permasalahan Kebijakan SPBE

Belum adanya peraturan terkait mengenai kebijakan internal SPBE untuk Kabupaten Deli Serdang, sehingga indikator - indikator dari aspek kebijakan internal SPBE masih belum dapat terlaksana

9.5.2 Permasalahan Pemantauan dan Evaluasi

Belum adanya kegiatan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi untuk SPBE di seluruh OPD Kabupaten Deli Serdang.

9.5.3 Permasalahan Audit TIK

Audit TIK dibagi menjadi tiga yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi dan keamanan. Permasalahan yang muncul dari hasil survei untuk audit TIK di Kabupaten Deli Serdang adalah belum terlaksananya kegiatan audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan oleh OPD.

9.5.4 Permasalahan Manajemen SPBE

Banyak OPD yang **melakukan manajemen SPBE yang tidak sesuai peraturan atau *framework***. Selain itu tidak banyak juga dari OPD mengatakan telah melakukan manajemen SPBE tanpa menyertakan bukti pendukung terkait layanan yang dimaksud.

Seperti pada manajemen risiko, terdapat OPD yang telah melaksanakan penilaian dan analisis manajemen risiko namun tidak mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020. Untuk pelaksanaan manajemen keamanan, beberapa OPD telah melakukan kegiatan tersebut seperti membatasi akses ke aplikasi dengan menggunakan VPN tanpa mengacu pada aturan atau *framework* yang telah disebutkan. Pelaksanaan manajemen data, terdapat OPD yang telah membuat SOP Data Center namun belum mengacu pada *framework* atau peraturan yang telah disebutkan. Dari segi manajemen aset TIK terdapat OPD yang melakukan pengelolaan aset dengan mencatat manual melalui Ms. Excel ataupun dengan aplikasi BMD namun tidak mengacu pada standar atau *framework* yang telah disebutkan. Untuk manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE untuk beberapa OPD yang telah melaksanakan di kabupaten Deli Serdang belum mengikuti standar atau *framework* yang telah di tentukan.

9.5.5 Permasalahan Rencana dan Anggaran

Masih ada OPD yang belum mempunyai anggaran terkait TIK sama sekali. Padahal jika OPD tersebut menggunakan komputer untuk operasional sehari – hari maka akan membutuhkan biaya pengadaan perangkat keras dan pemeliharaan perangkat keras tersebut. Begitu juga terkait anggaran untuk perangkat lunak, OPD akan memerlukan biaya perawatan untuk perangkat keras yang biasa digunakan oleh OPD tersebut. Jika OPD masih belum menggunakan sistem elektronik untuk melakukan kegiatan operasionalnya maka sebaiknya ada anggaran untuk pengadaan perangkat lunak yang dapat menunjang layanan yang ada di OPD tersebut.

9.6 Analisis Gap

Bagian ini akan membahas tentang kesenjangan yang ada di Kabupaten Deli Serdang antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari tata kelola, manajemen serta rencana dan anggaran SPBE

9.6.1 Analisis Gap Tata Kelola SPBE

Bagian ini akan menjelaskan tentang kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari komponen **tata kelola SPBE**. Untuk penjelasan gap tata kelola dari Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada **Tabel 9.3**

Tabel 9.3 Analisa Gap Tata Kelola SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
Kebijakan SPBE			
1. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE) serta telah terintegrasi antar pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang ada belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
2. Peta Rencana SPBE	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh	Belum ada kebijakan internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
Pemerintah Daerah	kebijakan internal terkait Peta Rencana di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK) dan keselarasan dengan peta rencana SPBE nasional. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
3. Manajemen Data	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan internal Manajemen Data di Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Kebijakan internal Manajemen Data di Pemerintah Daerah belum mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, kualitas data dan masih mengatur sedikit tentang basis data dan interoperabilitas data.
4. Pembangunan Aplikasi SPBE	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah, serta keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah	Belum tersedianya kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah, serta keterpaduan

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
		yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
5. Layanan Pusat Data	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Belum tersedia kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
6. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra	Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah	Belum tersedia kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	di Pemerintah Daerah dan interkoneksi Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan interkoneksi Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
7. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Belum ada kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
8. Manajemen Keamanan Informasi	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi Instansi	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	Pusat/Pemerintah Daerah	lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) serta penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) serta penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.
9. Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur dan menerangkan tentang pelaksanaan Audit TIK.	Kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE). Selain itu, kebijakan internal telah direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Belum ada kebijakan internal terkait Audit TIK yang mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
10. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah	Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE.	Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal mendukung penerapan SPBE, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan kebijakan internal telah direviu	Kebijakan internal belum mendukung penerapan SPBE, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
		dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	
Pemantauan dan Evaluasi			
1. Pemantauan dan Evaluasi SPBE		Seluruh perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE secara rutin.	
2. Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi		Seluruh perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE secara rutin	
Audit TIK			
1. Audit Infrastruktur SPBE	Belum ada OPD yang melakukan audit infrastruktur SPBE.	Audit Infrastruktur dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit Infrastruktur serta dilakukan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi. Selain itu, hasil audit Infrastruktur SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE.	
2. Audit Aplikasi SPBE	Belum ada OPD yang melakukan audit aplikasi SPBE.	Audit Aplikasi dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit Aplikasi serta oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi. Selain itu, hasil audit Aplikasi SPBE telah ditindaklanjuti melalui	

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
		perbaikan penerapan Aplikasi SPBE.	
3. Audit Keamanan SPBE	Belum ada OPD yang melakukan audit keamanan SPBE.	Audit Keamanan dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan dan sesuai dengan pedoman Audit Keamanan serta oleh dilakukan auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi. Selain itu, hasil audit Keamanan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Keamanan SPBE.	

9.6.2 Analisis Gap Manajemen SPBE

Bagian ini akan menjabarkan kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal dari manajemen SPBE di Kabupaten Deli Serdang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 9.4**

Tabel 9.4 Analisis Gap Manajemen SPBE

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
1. Manajemen Risiko	Belum ada OPD yang melakukan manajemen risiko dengan program kegiatan yang terencana.	Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE. Kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui	Manajemen Risiko SPBE belum dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE. Kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE belum ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
		perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE.	
2. Manajemen Keamanan	Belum ada OPD yang menerapkan Manajemen Keamanan dengan program kegiatan yang terencana.	Pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE dan dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.	Pengendalian Keamanan Informasi belum dilaksanakan berdasarkan Risiko SPBE dan dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.
3. Manajemen Data	Belum ada OPD yang menerapkan Manajemen Data dengan program kegiatan yang terencana.	Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Manajemen Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data serta dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Data telah direviu dan dievaluasi secara periodik untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan	Manajemen Data belum diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Selain itu, Manajemen Data belum dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data serta dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
		Manajemen Data untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Data.	
4. Manajemen Aset TIK	Belum ada OPD yang menerapkan Manajemen Aset TIK dengan program kegiatan yang terencana.	Manajemen Aset TIK diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK serta dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK	Manajemen Aset TIK belum diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Selain itu, Manajemen Aset TIK belum dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK serta belum dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.
5. Manajemen Sumber Daya Manusia	Belum ada OPD yang menerapkan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan program kegiatan yang terencana.	Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE selanjutnya dilakukan peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik	Sumber Daya Manusia SPBE belum terpenuhi seluruhnya pada kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE selanjutnya belum dilakukan peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
		untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.	
6. Manajemen Pengetahuan	Belum ada OPD yang menerapkan Manajemen Pengetahuan dengan program kegiatan yang terencana.	Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan dan mengacu pada pedoman di Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE. Semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE	Manajemen Pengetahuan SPBE belum dilaksanakan dengan perencanaan dan mengacu pada pedoman di Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE. Semua unit kerja/perangkat daerah belum menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi.
7. Manajemen Perubahan	Belum ada OPD yang menerapkan Manajemen Perubahan dengan program kegiatan yang terencana.	Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan dan dilakukan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait di Pemerintah Daerah sesuai pedoman Manajemen Perubahan. Selain itu, kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE.	Manajemen Perubahan SPBE belum dilaksanakan dengan perencanaan dan belum dilakukan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait di Pemerintah Daerah sesuai pedoman Manajemen Perubahan.
8. Manajemen Layanan	Belum ada OPD yang menerapkan Manajemen Layanan	Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan dan dilakukan pada seluruh proses Manajemen Layanan SPBE	Manajemen Layanan SPBE belum dilaksanakan dengan perencanaan dan belum dilakukan pada seluruh proses Manajemen

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	dengan program kegiatan yang terencana.	yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE. Selain itu, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE.	Layanan SPBE yaitu Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE. Selain itu, Manajemen Layanan SPBE belum diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan.

BAB 10

Kondisi Eksisting Penyelenggara SPBE dan SDM TIK dan Analisis GAP

Bab ini akan membahas kondisi eksisting dari segi Penyelenggara SPBE dan kondisi SDM TIK yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Setelah itu, akan dilakukan analisis gap dari kondisi eksisting (saat ini) dibanding dengan kondisi ideal untuk penyelenggara SPBE dan SDM TIK.

10.1 Pengertian Penyelenggara SPBE

Peraturan Presiden Republik Indonesia yang tertuang di Nomor 95 Tahun 2018 membahas tentang pembentukan Tim Koordinasi SPBE Daerah yang ditujukan untuk meningkatkan percepatan dan keterpaduan antara pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE daerah. Tim yang dimaksud berada di bawah tanggung jawab Kepala Daerah Kabupaten/ Kota setempat. Tugas dan kewajiban utama Tim Koordinasi SPBE Daerah tersebut adalah melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

Mengutip definisi SDM (Sumber Daya Manusia) dari Perpres Nomor 95 tahun 2018, bahwa SDM untuk SPBE yang dimaksud adalah ASN dan masyarakat yang memegang peranan penting dalam mewujudkan keterlaksanaan penyelenggaraan SPBE. Sebagai perwakilan dari Instansi Pemerintah dan yang memiliki kepemimpinan serta kompetensi teknis SPBE, ASN diharapkan dapat mendorong dan memberi contoh dalam pelaksanaan SPBE di lini masyarakat. Sedangkan masyarakat diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan literasi yang memadai sehingga kesinambungan antara ASN dan Masyarakat dapat melaksanakan penerapan layanan SPBE sehingga didapat manfaat yang optimal yang dapat diterima kedua belah pihak.

10.2 Referensi Penyelenggara SPBE dan SDM TIK

Referensi atau sumber utama yang digunakan untuk penyelenggaraan SDM TIK pada Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Peta Okupasi yang diambil dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peta Okupasi ini adalah dokumen pemetaan pengembangan sumber daya manusia yang disusun oleh pemangku kepentingan sebagai referensi dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia.

Pihak pemangku kepentingan tersebut terdiri dari kumpulan asosiasi industri, asosiasi profesi, perguruan tinggi hingga lembaga terkait di samping sejumlah profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Konten dari dokumen ini disusun melalui berbagai kajian komprehensif dengan melihat berbagai tren kebutuhan sumber daya manusia yang mengacu pada kebutuhan nasional, regional sampai internasional.

Pada Peta Okupasi, terdapat fungsi kunci yang terdiri dari **16 domain area**. Didapat dari hasil survei yang diadakan di Kabupaten Deli Serdang, terdapat **9 unit kompetensi** yang dimiliki oleh SDM TIK Kabupaten Deli Serdang. Setelah dipetakan sesuai dengan fungsi kunci dari Peta Okupasi, bisa disimpulkan Kabupaten Deli Serdang memenuhi **7 domain area**.

Di bawah ini adalah bentuk detail dari penjelasan domain yang dimaksud pada Error! Reference source not found.**bel 10.1**

Tabel 10.1 Kompetensi OPD terhadap kompetensi Peta Okupasi

No	Kompetensi sesuai Okupasi	Kompetensi yang dimiliki OPD
1.	Data Management System	Admin Database
2.	Programming and Software Development	Programmer
3.	Hardware and Digital Peripherals	Teknisi Komputer
4.	Network and Infrastructure	Admin Jaringan
5.	Operation and System Tools	Teknisi Komputer Service/Help Desk Operator/User Sistem
6.	Information System and Technology Development	Analisis & Desain Sistem
7.	IT Governance and Management	-
8.	IT Project Management	-
9.	IT Enterprise Architecture	-
10.	IT Security and Compliance	Admin Keamanan TI
11.	IT Services Management System	Service/Help Desk
12.	IT and Computing Facilities Management	-
13.	IT Multimedia	-
14.	IT Mobility and Internet of Things	Admin Website
15.	Integration Application System	Programmer
16.	IT Consultancy and Advisory	-

Hasil pemetaan pada **Tabel 10.1** terkait sembilan (9) kompetensi SDM dengan kompetensi sesuai okupasi menunjukkan hasil bahwa terdapat **6 (enam) kompetensi yang belum dimiliki oleh OPD** yaitu IT Governance and Management, IT Project Management, IT Enterprise Architecture, IT and Computing Facilities Management, IT Multimedia, dan IT Consultancy and Advisory

10.3 Kondisi Eksisting Penyelenggara SPBE

Bagian ini akan menjelaskan tentang kondisi eksisting (saat ini) dari penyelenggara SPBE di Kabupaten Deli Serdang.

10.3.1 Ketersediaan Tim Koordinasi SPBE

Pada Perpres 95 tahun 2018, Tim Koordinasi SPBE dijabat oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur daerah. Selanjutnya akan terdapat anggota yang diantaranya:

1. Ketua OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah;
2. Ketua OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
3. Ketua OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
4. Ketua OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
6. Kepala lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Deli Serdang telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 525 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Deli Serdang. Dalam surat keputusan tersebut telah diatur juga tugas dari Tim Koordinasi SPBE sebagai berikut :

a. Tim Pengarah

- 1) Memberikan arahan terhadap Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota lain, dunia usaha, lembaga luar negeri, dan lembaga resmi lainnya terkait SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Mengevaluasi Tim Teknis Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

b. Tim Teknis

- 1) Mengoordinir keterpaduan dan pengelolaan pelaksanaan tata kelola SPBE yang baik, transparan, berkualitas, terintegrasi, terstandarisasi menjangkau Pemerintahan Pusat/ Provinsi dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang
- 2) Mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan (sarana & prasarana) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam melaksanakan SPBE di Kabupaten Deli Serdang
- 3) Melakukan penataan, penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis Elektronik yang terpadu dilingkup Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang
- 4) Melakukan optimalisasi pengembangan layanan publik melalui Aplikasi Berbasis Elektronik/ Online secara terpadu, menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas
- 5) Menjaga aset Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang seperti Data Informasi dan sumber daya terkait TIK pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang
- 6) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan dan aplikasi
- 7) Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
- 8) Melaporkan kepada Tim Pengarah tentang perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

Di bawah ini adalah penjelasan jabatan yang terdapat di Tim Koordinasi SPBE yang tertera pada **Tabel 10.22**

Tabel 10.2 Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Deli Serdang Kompetensi OPD terhadap kompetensi Peta Okupasi

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	Ketua	Bupati Deli Serdang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Deli Serdang
3	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang
4	Wakil Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Deli Serdang
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Deli Serdang
		Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Deli Serdang
5	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Deli Serdang
6	Anggota	Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

7	Ketua Tim Teknis	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang
8	Wakil Ketua Tim Teknis	Bidang Teknologi Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Deli Serdang

Sesuai **Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 525 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Deli Serdang**, Ketua Tim Koordinasi dijabat langsung oleh Bupati Deli Serdang dan wakil ketua dijabat oleh Wakil Bupati Deli Serdang. Di bawahnya masih dibagi menjadi Tim Pengarah (Koordinator) dan Tim Teknis yang masing-masing membawahi wakil hingga anggota.

Bentuk nyata dari mulainya pelaksanaan SPBE di bagian Pemerintahan adalah pelaksanaan rapat untuk melakukan evaluasi SPBE. Kegiatan Evaluasi didampingi oleh Sekretaris Daerah (SEKDA). Tim Koordinasi cukup membantu dalam pelaksanaan evaluasi internal.

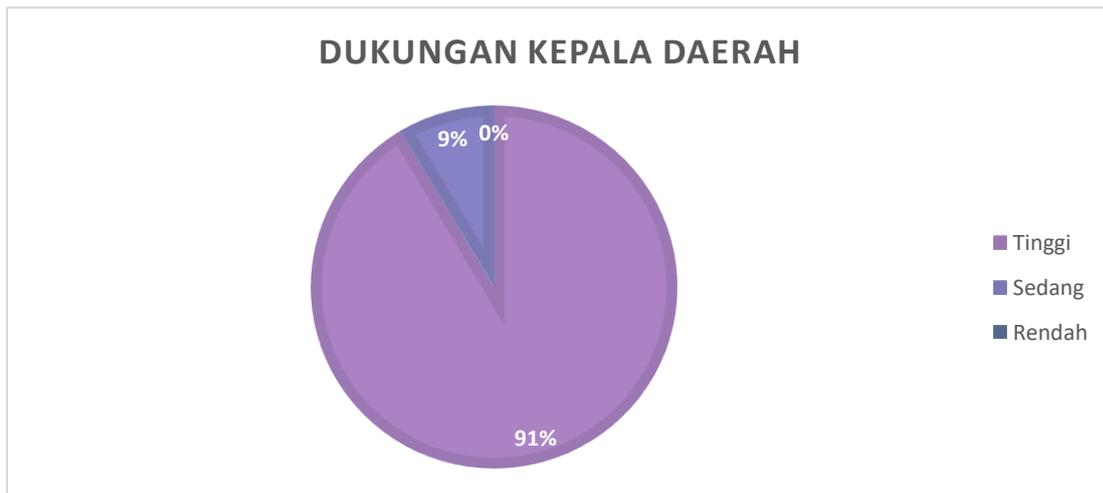
10.3.2 Komitmen Pemimpin Daerah

Pada Sub Bab ini, akan dibahas tentang tingkat dukungan serta komitmen keterlibatan pimpinan daerah Kabupaten Deli Serdang pada penyelenggaraan SPBE. Pemimpin daerah yang akan dibahas antara lain adalah Bupati sebagai Kepala Daerah, Kepala Dinas, serta Sekretaris Dinas. Selain itu akan dijelaskan mengenai hubungan komunikasi antara OPD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang

a) Dukungan Pemimpin Daerah

Tingkat dukungan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang pada penyelenggaraan SPBE tertera pada **Error! Reference source not found..** Hasil ini didapat dari kegiatan survei yang melibatkan 47 OPD di Kabupaten Deli Serdang.

Tingkat dukungan Kepala Daerah tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkat dari rendah, sedang hingga tinggi.



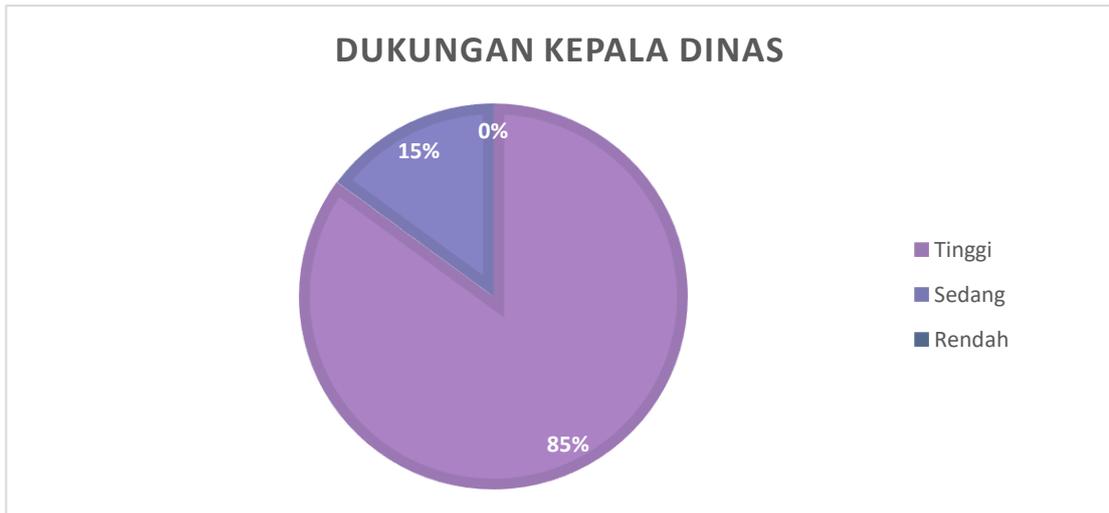
Gambar 10.1 Dukungan Kepala Daerah

Dari Error! Reference source not found. dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas OPD menyatakan bahwa Kepala Daerah memiliki tingkat dukungan tinggi pada penyelenggaraan SPBE. Adalah sebanyak **43 OPD** atau sebesar **91%** dari total keseluruhan OPD yang disurvei menyatakan **dukungan Kepala Daerah tinggi terhadap penyelenggaraan SPBE.**

Sisanya sebanyak **4 OPD** atau sebesar **9%** menyatakan dukungan Kepala Daerah sedang terhadap penyelenggaraan SPBE.

b) Dukungan Kepala Dinas

Selanjutnya adalah tingkat dukungan Kepala Dinas Kabupaten Deli Serdang terhadap penyelenggaraan SPBE. Ini ditunjukkan pada Error! Reference source not found. Hasil ini didapat dari kegiatan survei kepada 47 OPD di Kabupaten Deli Serdang. Tingkat dukungan tersebut terdiri dari 3 tingkat mulai dari rendah, sedang dan tinggi.



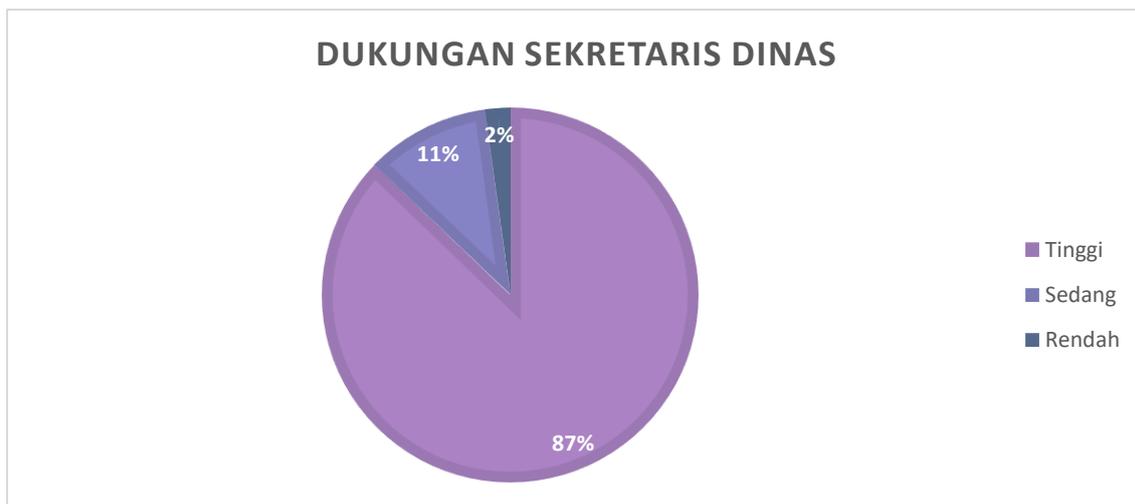
Gambar 10.2 Dukungan Kepala Dinas

Dari Error! Reference source not found. didapat bahwa sebagian besar OPD menyatakan bahwa Kepala Dinas memiliki andil besar terhadap penyelenggaraan SPBE. Sebanyak **40 OPD** atau sebesar **85%** menyatakan tingkat **dukungan Kepala Dinas tinggi terhadap SPBE**. Salah satu kegiatan yang mendukung data tersebut adalah keterlibatan aktif para Kepala Daerah dalam mengikuti sosialisasi serta selalu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan SPBE hingga proses evaluasi.

Selanjutnya, untuk **7 OPD** atau sebanyak **15%** menyatakan tingkat dukungan Kepala Daerah terhadap SPBE sedang. Kegiatan yang mendukung pernyataan data tersebut salah satunya adalah pengimbuhan dan pemberian arahan terhadap SPBE kepada masing masing jajaran pegawainya.

c) Dukungan Sekretaris Dinas

Tingkat dukungan Sekretaris Dinas Kabupaten Deli Serdang terhadap SPBE diterangkan pada Error! Reference source not found. Hasil ini didapat dari kegiatan survei yang dilakukan di 47 OPD di Kabupaten Deli Serdang. Tingkat dukungan Sekretaris Dinas di kategorikan menjadi 3 tingkatan mulai dari rendah, sedang sampai tinggi.



Gambar 10.3 Dukungan Sekretaris Dinas

Error! Reference source not found. menunjukkan bahwa sebagian besar OPD menyatakan Sekretaris Daerah memberikan dukungan Tinggi pada pelaksanaan SPBE. Sebanyak **41 OPD** atau sebanyak **87%** menyatakan tingkat **dukungan Sekretaris Dinas untuk OPD mereka adalah Tinggi**. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya dukungan dari Sekretaris Dinas dalam mewujudkan aplikasi IT untuk kebutuhan OPD dan ikut aktif untuk menyelenggarakan SPBE di OPDnya.

Sebanyak **11%** atau **5 OPD** menyatakan tingkat dukungan dari Sekretaris Daerah sedang. Salah satu kegiatan yang mendukung data tersebut adalah terlibat dalam susunan Tim Koordinator SPBE.

d) Hubungan OPD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari 40 OPD Kabupaten Deli Serdang yang telah disurvei, sebagian besar menyatakan bahwa hubungan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang **lancar dan harmonis**. Itu ditunjukkan dengan kesigapan dinas tersebut menyelesaikan masalah teknis jaringan internet, terlibat aktif dalam kegiatan TPAKD. Juga sangat responsif dalam pendampingan dan pengalokasian domain web dan aplikasi yang diperlukan OPD.

10.4 Kondisi Eksisting SDM TIK

Pada bagian ini akan dibahas tentang kondisi eksisting SDM TIK pada 47 OPD di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi eksisting (saat ini) SDM TIK akan dijabarkan berdasarkan ketersediaan, kompetensi, pendidikan terakhir, status kepegawaian, ketersediaan tupoksi serta kompetensi training dan sertifikasi yang telah dilakukan oleh pada pelaku SDM TIK di masing masing OPD.

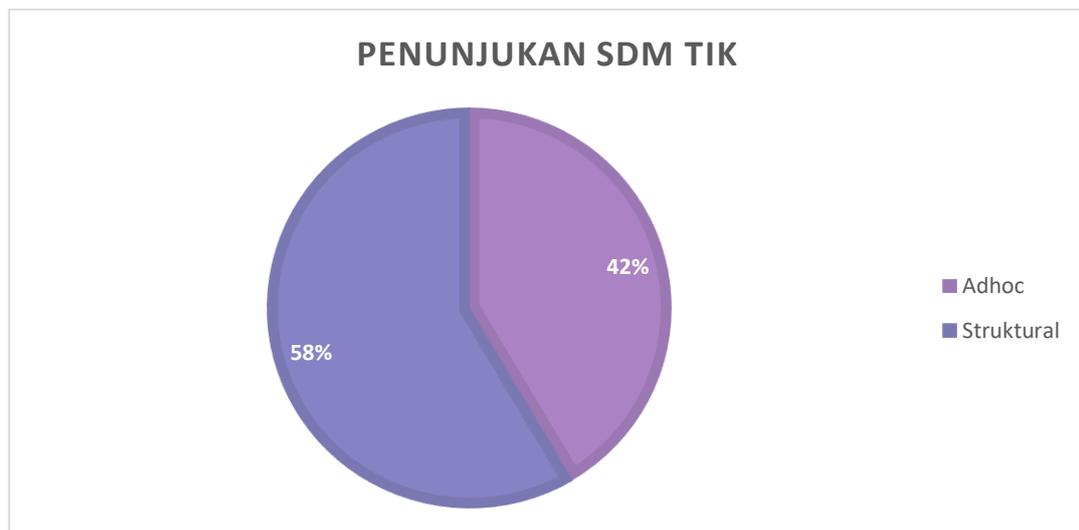
Terkati detail tabel SDM TIK yang dimiliki dapat dilihat pada **Lampiran 10.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan SDM TIK**

10.4.1 Ketersediaan SDM TIK

Ketersediaan SDM TIK pada 47 OPD di Kabupaten Deli Serdang dijelaskan pada Error! Reference source not found.

Gambar 10.4 Ketersediaan SDM TIK

Dari Error! Reference source not found. dapat disimpulkan mayoritas OPD telah memiliki SDM TIK. Sedang sisanya sebanyak **19%** atau **9 OPD** dari hasil survei menyatakan belum memiliki SDM TIK.



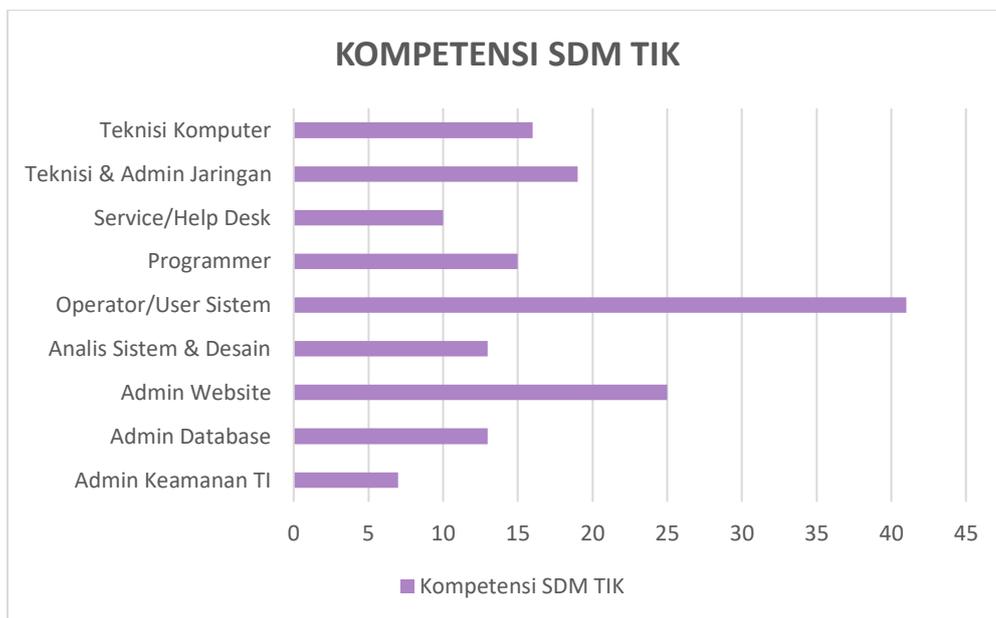
Gambar 10.5 Penunjukan SDM TIK

Hasil ketersediaan SDM TIK tersebut masih dapat digali informasi berupa jenis penunjukan SDM TIK yang dapat dikategorikan menjadi *adhoc* dan struktural. Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa sebanyak **58% (62 Tenaga TIK)** ditunjuk sebagai SDM TIK secara struktural dan sisanya sebanyak **42% (44 Tenaga TIK)** ditunjuk sebagai SDM TIK secara *adhoc* (tanpa SK).

10.4.2 Kompetensi SDM TIK yang dimiliki

Sub Bab ini menjelaskan tentang kompetensi SDM TIK yang dimiliki oleh **47 OPD** yang dapat dilihat pada Error! Reference source not found.. Pada grafik tersebut, ditemukan bahwa di beberapa OPD Kabupaten Deli Serdang terdapat satu orang yang memiliki lebih dari satu kompetensi TIK.

Kompetensi SDM TIK tersebut dikelompokkan menjadi **9 kelompok** seperti teknisi komputer, teknisi dan admin jaringan, service/help desk, programmer, operator/user sistem, analisis sistem dan desain, admin website, admin database serta admin keamanan TI

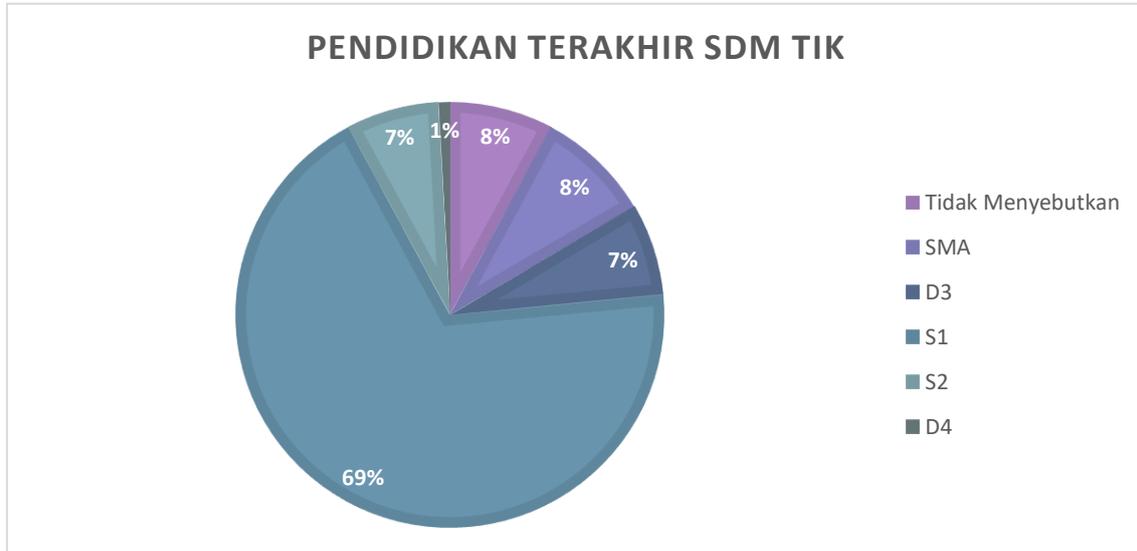


Gambar 10.6 Kompetensi SDM TIK

Dari Error! Reference source not found. terlihat kompetensi terbanyak yang dikuasai oleh SDM TIK adalah **kompetensi Operator/ User Sistem**. Diurutan selanjutnya terdapat **kompetensi Admin Website** disusul dengan **kompetensi Teknisi & Admin Jaringan** yang dimiliki SDM TIK di Kabupaten Deli Serdang.

10.4.3 Pendidikan Terakhir SDM TIK

Pendidikan terakhir dari SDM TIK dari hasil survei di 47 OPD di Kabupaten Deli Serdang di rangkum pada Error! Reference source not found. Pendidikan terakhir SDMT IK di OPD Kabupaten Deli Serdang terdiri dari **4 kelompok** diantaranya adalah tingkat SMA, D3, S1, dan S2.

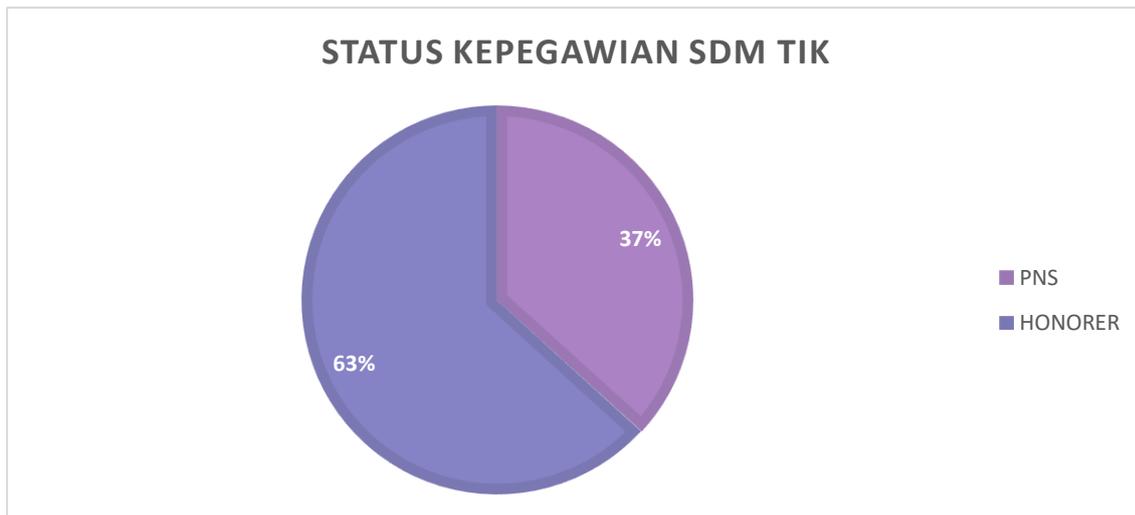


Gambar 10.7 Pendidikan terakhir SDM TIK

Untuk tingkat pendidikan dengan jumlah tertinggi yang dimiliki oleh SDM TIK adalah dari kelompok **S1** dengan perolehan persentase sebesar **69%** atau sebanyak **79 orang**. Sisanya tersebar di tingkat kelompok pendidikan diantaranya sebanyak **10 orang (9%)** dengan pendidikan terakhir **SMA**, **8 orang (6%)** dengan pendidikan terakhir **tingkat S2**, **8 orang (7%)** dengan tingkat pendidikan terakhir **D3** dan sisanya sebanyak **9 orang (8%) tidak berkenan untuk menyebutkan** tingkat pendidikan terakhirnya.

10.4.4 Status Kepegawaian SDM TIK

Dari hasil survei yang telah dilakukan ke 47 OPD di Kabupaten Deli Serdang, terdapat dua kelompok jawaban untuk status kepegawaian SDM TIK pada masing masing OPD. Kelompok tersebut terdiri dari status PNS dan Honorer. Gambaran perbandingan jumlah status PNS dan Honorer untuk SDM TIK seluruh Kabupaten Deli Serdang terdapat pada Error! Reference source not found.

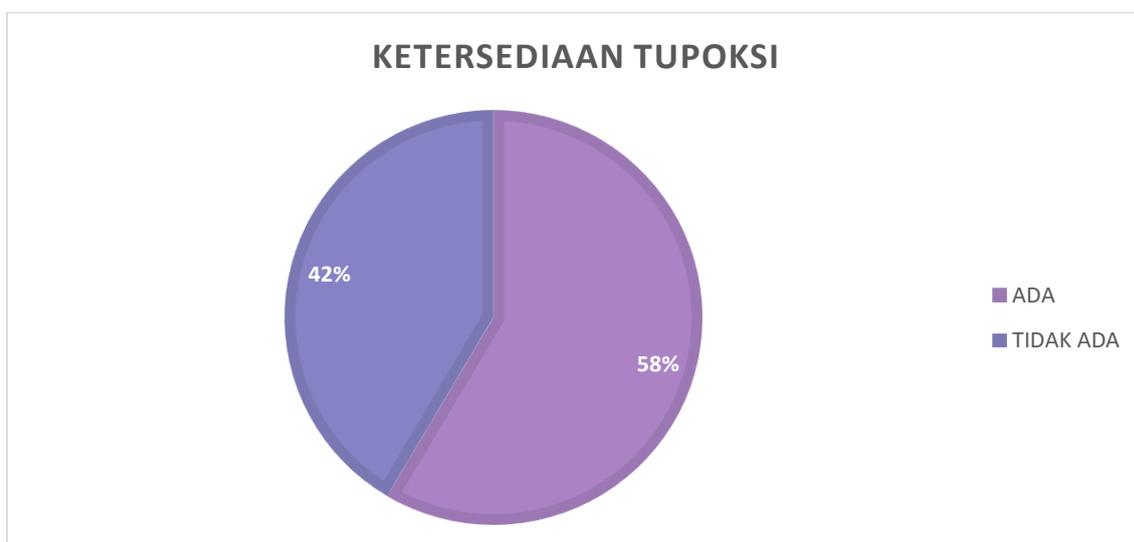


Gambar 10.8 Status kepegawaian SDM TIK

Mayoritas dari SDM TIK yang tersurvei berstatus sebagai Honorer dengan perolehan persentase sebesar 63% atau sebanyak **67 orang** berstatus sebagai **honorer** yang tersebar di seluruh OPD di Kabupaten Deli Serdang. Sisanya sebanyak **39 orang atau sebesar 37%** berstatus sebagai **PNS**.

10.4.5 Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK

Dari Jumlah Keseluruhan SDM TIK yang ada di 32 OPD di Kabupaten Deli Serdang, penunjukan SDM TIK dapat dilakukan melalui SK sehingga SDM TIK dapat dikelompokkan berdasarkan ketersediaan tupoksinya yaitu SDM yang ditunjuk melalui SK dan SDM yang ditunjuk secara ad-hoc tanpa adanya SK. Ketersediaan Tupoksi SDM TIK dapat dilihat pada **Gambar 10.9** berikut



Gambar 10.9 Ketersediaan Tupoksi/ SK SDM TIK

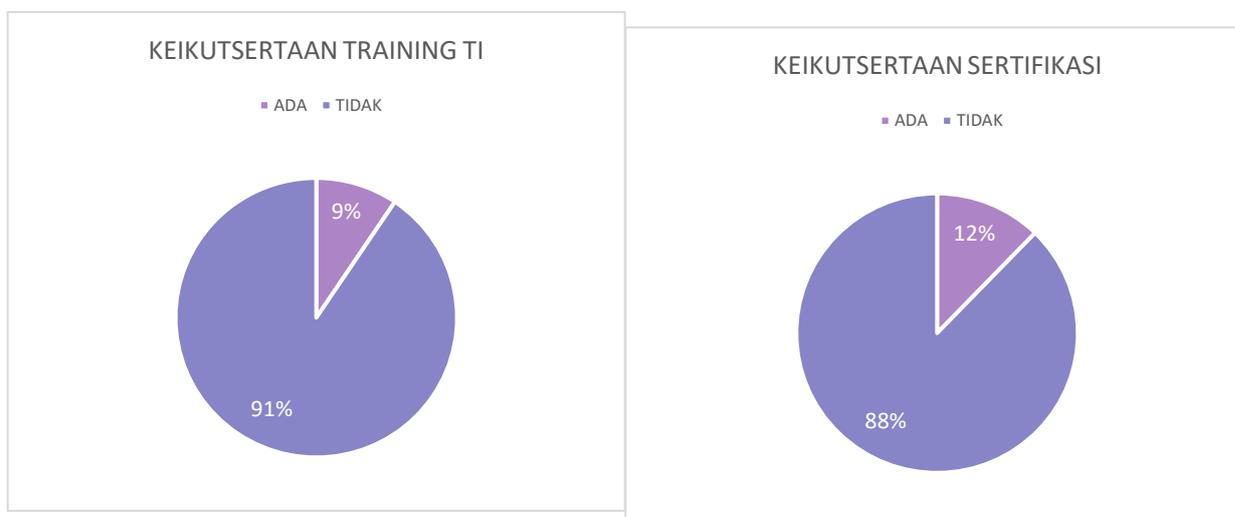
Penunjukan SDM TIK yang ada di 47 OPD di Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan menerbitkan SK (Surat Keputusan). Untuk pegawai struktural memiliki

tupoksi jelas yang terdokumentasi pada peraturan terkait dalam menjalankan SPBE. Ada pula dengan penunjukan secara langsung pegawai tanpa penerbitan SK yang biasa disebut penunjukan secara adhoc. Penunjukan ini tidak dimuat dalam tupoksi pegawai tersebut.

Hasil survei pada **Error! Reference source not found.** menunjukkan ketersediaan tupoksi yang secara tidak langsung juga memperlihatkan cara penunjukan pegawai tersebut menjadi SDM TIK di masing-masing OPD. Sebanyak 89 orang atau **56%** pegawai SDM TIK yang tersebar di masing-masing OPD ditunjuk dengan SK atau tugasnya tertera pada tupoksi. Sisanya sebesar **69 orang atau 44%** pegawai ditunjuk **secara adhoc** dengan tidak tersedianya tupoksi dari penunjukan tersebut.

10.4.6 Kompetensi Training dan Sertifikasi SDM TIK

Kompetensi yang dimiliki oleh SDM TIK dapat dilihat dari pengalaman pelatihan yang diikuti dan juga sertifikasi yang dimiliki. Kompetensi pelatihan dan sertifikasi yang dimiliki oleh SDM TIK dapat dilihat pada **Gambar 10.10**



Gambar 10.10 Komptensi Training dan Sertifikasi

Dari hasil survei menunjukkan terdapat **10 orang** atau sebesar **9%** yang **mengikuti Pelatihan TIK**, beberapa diantaranya menyebutkan mengikuti pelatihan *programming* sebanyak **5 orang**, dan pelatihan mikrotik jaringan **sebanyak 7 orang**. Untuk sertifikasi TIK, **sebanyak 13 orang** atau sebesar **12%** dari total survei menyatakan mengikuti sertifikasi BNSP.

10.5 Permasalahan Penyelenggara SPBE dan SDM TIK

Komitmen atau dukungan yang diberikan pemimpin daerah masih banyak OPD – OPD yang menyatakan bahwa komitmennya sedang atau bahkan rendah. Untuk ketersediaan SDM TIK belum semua OPD memiliki SDM TIK. **Masih ada 13 OPD yang belum memiliki SDM TIK.** SDM TIK yang ada juga mayoritas tidak memiliki tupoksi atau SK berkaitan dengan TIK.

Kompetensi SDM TIK yang ada masih terbatas pada kompetensi pengelolaan TIK dan layanan. Belum ada atau sedikit SDM TIK di OPD yang memiliki kompetensi perencanaan SPBE atau rekayasa proses bisnis pemerintah. Selain itu masih sedikit SDM TIK yang mengikuti training dan memiliki sertifikasi yang berkaitan dengan TIK.

10.6 Analisis Gap

Bagian ini akan menjelaskan tentang kesenjangan atau gap antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari Penyelenggara SPBE dan SDM TIK. Untuk penjelasan gap tata kelola dari Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada Error! Reference source not found. 10.3

Tabel 10.3 Analisis gap Ketersediaan Penyelenggara SPBE dan SDM TIK

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
Ketersediaan Tupoksi pada SDM TIK SPBE	Sebagian besar pegawai tidak memiliki SK atau tupoksi mengenai TIK.	Setiap OPD di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki divisi/tim khusus untuk mengelola SI/TI secara struktur organisasi yaitu memiliki SK/tupoksi khusus untuk pekerjaan terkait TIK.	Ada SDM TIK yang tidak memiliki tupoksi atau SK mengenai TIK.
Kompetensi SDM TIK sesuai peta Okupasi	Memiliki 9 unit kompetensi yang berada pada 7 domain area .	Pemerintah daerah memiliki SDM TIK yang berkompentensi pada 16 domain area di Peta Okupasi.	SDM TIK yang ada belum memiliki kompetensi pada 9 domain area yaitu: Hardware and Digital Peripherals, IT Governance and Management, IT Project Management, IT Enterprise Architecture, IT Services Management System, IT and Computing Facilities Management, IT Multimedia, Integration Application System dan IT Consultancy and Advisory.
Kompetensi SDM TIK SPBE	Sebagian besar kompetensi SDM TIK berupa pengelolaan TIK dan pengelolaan	Terdapat 4 kompetensi yang dimiliki SDM TIK yaitu: 1) Kompetensi perencanaan SPBE	Masih sedikit SDM TIK yang berkompentensi pada perencanaan SPBE dan rekayasa

Parameter	Eksisting	Kondisi Ideal	Gap
	layanan.	2) Rekayasa proses bisnis pemerintah 3) Pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal 4) Pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif.	proses bisnis pemerintah.
Pendidikan SDM TIK SPBE	SDM TIK yang ada mayoritas menempuh pendidikan S1 atau D3 pada jurusan Sistem Informasi atau Teknik Informatika.	SDM TIK memiliki keahlian terkait dengan kompetensi atau pekerjaan yang dilakukan sebagai bentuk adanya standar kompetensi teknis SPBE	Masih ada beberapa SDM TIK yang memiliki pendidikan terakhir tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
Training SDM TIK SPBE	Sedikit SDM TIK yang mengikuti training di bidang TIK.	Adanya peningkatan kompetensi dengan kegiatan training berbagai bidang khusus TIK	Hanya beberapa SDM TIK yang melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti kegiatan training
Sertifikasi SDM TIK SPBE	Sedikit SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi mengenai TIK.	Tersedianya SDM TIK yang telah memiliki sertifikasi secara kompetensi terkait	Hanya ada sebagian kecil SDM TIK yang memiliki sertifikasi TIK.

LAMPIRAN

Lampiran 3.1 Metadata Proses Bisnis SPBE

Kode	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.1	Bagian Organisasi	Pendukung KDH dan WKDH	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi	RB 09.06	Aparatur Negara
P.2	Bagian Administrasi Pembangunan	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan	RB 09.02	Keuangan
P.3	Bagian Tata Pemerintahan	Pendukung KDH dan WKDH	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah	RB 09.06	Aparatur Negara
P.4	Bagian Hukum	Pendukung KDH dan WKDH	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian perundang undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi	RB 05.01	Hukum
P.5	Bagian Umum	Pendukung KDH dan WKDH	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian tata usaha pimpinan, staff ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan	RB 09.07	Kesekretariatan Negara
P.6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan dan Pengawasan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian bina mental, kesejahteraan bagian dan kesejahteraan masyarakat	RB 09.07	Kesekretariatan Negara
P.6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian bina mental, kesejahteraan bagian dan kesejahteraan masyarakat	RB 04.02	Sosial
P.6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pendukung KDH dan WKDH		RB 08.01	Agama
P.7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian perencanaan	RB 09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional
P.7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian keuangan	RB 09.02	Keuangan

Kode	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.8	Bagian Perekonomian dan SDA	Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian perekonomian, penanaman modal, perizinan dan BUMD dan sumber daya alam	RB 02.10	Usaha Kecil dan Menengah
P.8	Bagian Perekonomian dan SDA	Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian perekonomian dan sumber daya alam	RB 07.03	Kehutanan
P.8	Bagian Perekonomian dan SDA	Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian perekonomian dan sumber daya alam	RB 07.04	Kelautan
P.8	Bagian Perekonomian dan SDA	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian sumber daya alam	RB 07.05	Lingkungan Hidup
P.8	Bagian Perekonomian dan SDA	Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian perekonomian dan penanaman moda	RB 02.08	Investasi
P.8	Bagian Perekonomian dan SDA	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian perekonomian, penanaman modal, perizinan dan BUMD dan sumber daya alam	RB 02.02	Perdagangan
P.8	Bagian Perekonomian dan SDA	Perencanaan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian perekonomian, penanaman modal, perizinan dan BUMD dan sumber daya alam	RB 09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional
P.8	Bagian Perekonomian dan SDA	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam Energi dan Sumber Daya Mineral	RB 07.02	Energi
P.9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	RB 09.02	Keuangan
P.9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Pendukung KDH dan WKDH	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	RB 02.08	Investasi
P.10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Pendukung KDH dan WKDH	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian protokol, komunikasi, dan dokumentasi pimpinan	RB 09.06	Aparatur Negara
P.11	Inspektorat Daerah	Pengawasan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengawasan	RB 09.07	Kesekretariatan Negara

Kode	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.12	Sekretariat DPRD	Pendukung DPRD	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bagian umum, keuangan, huku, risalah, dan humas, fasilitasi penganggaran dan pengawasan	RB 09.07	Kesekretariatan Negara
P.13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan keistimewaan, perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	RB 09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional
P.13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang penelitian dan pengembangan	RB 06.03	Ilmu Pengetahuan
P.14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi sosial budaya dan organisasi masyarakat, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional	RB 05.03	Hak Asasi Manusia
P.15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Keuangan	Penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset	RB 09.02	Keuangan
P.16	Badan Pendapatan Daerah	Penanaman Modal	Penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pajak daerah,	RB 09.02	Keuangan
P.17	Badan Kepegawaian Daerah	Kepegawaian	Penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang pengadaan pemberhentian dan kinerja, mutasi promosi dan informasi	RB 09.06	Aparatur Negara
P.17	Badan Kepegawaian Daerah	Pendidikan Dan Pelatihan	Penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang pengembangan kompetensi dan disiplin aparatur	RB 06.01	Pendidikan
P.18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi	RB 04.02	Sosial

Kode	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, peralatan dan perlengkapan jalan, penataan ruang, bina teknik,	RB 03.01	Pekerjaan umum
P.19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penyehatan lingkungan permukiman dan air minum, sumber daya air	RB 07.05	Lingkungan Hidup
P.20	Dinas Kesehatan	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan	RB 04.01	Kesehatan
P.21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perumahan dan pemukiman	RB 03.04	Perumahan
P.21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pertanahan	RB 03.06	Pertanahan
P.21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penyehatan lingkungan	RB 07.05	Lingkungan Hidup
P.22	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang tata lingkungan, kebersihan, pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup , pengelolaan sampah dan limbah B3, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	RB 07.05	Lingkungan Hidup
P.23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang kelembagaan dan usaha koperasi	RB 02.09	Koperasi
P.23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang pemberdayaan SDM koperasi dan usaha mikro	RB 02.10	Usaha Kecil dan Menengah
P.24	Dinas Pendidikan	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan ketenagaan	RB 06.01	Pendidikan

Kode	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri, Sarana dan Pelaku Distribusi	RB 02.01	Industri
P.25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pengembangan perdagangan	RB 02.02	Perdagangan
P.26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Kepemudaan dan Olah Raga	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang olahraga	RB 06.06	Olahraga
P.26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Kepemudaan dan Olah Raga	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang kepemudaan	RB 06.05	Pemuda
P.26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang kebudayaan	RB 08.02	Kebudayaan
P.26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan, Sarana dan Prasarana	RB 02.11	Pariwisata
P.27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaann informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	RB 03.07	Kependudukan
P.28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak-hak anak	RB 04.03	Pemberdayaan Perempuan
P.28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang keluarga berencana, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga	RB 03.07	Kependudukan

Kode	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pemerintahan desa, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan dan kerjasama	RB 03.05	Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
P.30	Dinas Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengawasan dan bina usaha perikanan	RB 02.06	Perikanan
P.30	Dinas Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengawasan dan bina usaha perikanan	RB 07.04	Kelautan
P.31	Dinas Perhubungan	Perhubungan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana, pengembangan dan keselamatan	RB 03.03	Transportasi
P.32	Dinas Sosial	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	RB 04.02	Sosial
P.33	Dinas Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	RB 06.02	Ketenagakerjaan
P.33	Dinas Ketenagakerjaan	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam hal pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan penataan persebaran penduduk melalui program transmigrasi	RB 03.02	Transmigrasi
P.34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi	RB 06.04	Teknologi
P.34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang informasi publik	RB 09.03	Informasi
P.34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang komunikasi publik	RB 09.04	Komunikasi
P.34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Statistik	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang persandian dan statistik	RB 09.03	Informasi

Kode	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persandian	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang persandian dan statistik	RB 05.02	Keamanan
P.35	Dinas Pertanian	Pertanian	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang prasarana dan sarana pertanian,	RB 02.03	Pertanian
P.36	Dinas Ketahanan Pangan	Pangan	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan	RB 02.03	Pertanian
P.36	Dinas Ketahanan Pangan	Pangan	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan	RB 02.04	Perkebunan
P.36	Dinas Ketahanan Pangan	Pangan	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan	RB 02.06	Perikanan
P.36	Dinas Ketahanan Pangan	Pangan	Penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan	RB 02.05	Peternakan

Kode	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
P.37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Perpustakaan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pengolahan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan	RB 06.01	Pendidikan
P.37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Kearsipan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arsip	RB 09.06	Aparatur Negara
P.38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan	RB 02.08	Investasi
P.39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana	RB 05.02	Keamanan
P.40	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat	RB 05.02	Keamanan
P.40	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang penegakan peraturan daerah dan	RB 05.02	Keamanan

Kode	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Kode Model Referensi	Referensi Arsitektur
			peraturan kepala daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat		
P.41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pelayanan medis, keperawatan, pelayanan penunjang medis	RB 04.01	Kesehatan
P.42	Kecamatan	Kecamatan	Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan	RB 09.09	Kependudukan
P.43	Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.	RB 09.01	Dalam Negeri
P.44	RSUD Pancur Batu	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pelayanan medis, keperawatan, pelayanan penunjang medis	RB 04.01	Kesehatan
P.45	Puskesmas Lubuk Pakam	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat	RB 04.01	Kesehatan

Lampiran 4.1 Metadata Data dan Informasi

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.001	Data SOP Subag Pelayanan Publik	Himpunan data SOP yang dimiliki seluruh OPD	Bertujuan untuk mengetahui Himpunan data SOP yang dimiliki seluruh OPD	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms. Word	Internal
D.002	Data LKIP	Informasi laporan Kinerja Instansi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi laporan Kinerja Instansi	RD 09.06 Data aparatur negara, RD 09.07 Data kesekretariatan negara	Offline	Internal OPD	Ms. Word	Internal
D.003	Progres fisik pembangunan	Daftar progres proyek pemabangunan dibawah pengawasan PD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Daftar progres proyek pemabangunan dibawah pengawasan PD terkait	RD 03.01 Data pembangunan, RD 09.06 Data aparatur negara,	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.004	Realisasi penyerapan keuangan	Perbandingan realisasi perencanaan keuangan dengan pelaksanaan keuangan tiap PD	Bertujuan untuk mengetahui Perbandingan realisasi perencanaan keuangan dengan pelaksanaan keuangan tiap PD	RD 03.01 Data pembangunan, RD 09.06 Data aparatur negara,	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.005	Tender	Daftar Tender yang berjalan di kabupaten dibawah pengawasan PD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Daftar Tender yang berjalan di kabupaten dibawah pengawasan PD terkait	RD 03.01 Data pembangunan, RD 09.06 Data aparatur negara,	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.006	DAK	Informasi data pengajuan usulan kegiatan dengan Dana Alokasi Khusus	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data pengajuan usulan kegiatan dengan Dana Alokasi Khusus	RD 03.01 Data pembangunan, RD 09.06 Data aparatur negara, RD 09.07 Data kesekretariatan negara	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.007	Data SOP Bagian Penyusunan Program	Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.008	Data Percepatan Penyelesaian Batas Antar Daerah	Daftar titik batas daerah kabupaten setempat	Bertujuan untuk mengetahui Daftar titik batas daerah kabupaten setempat	RD 01.01 Data Pertahanan, RD 10.01 Kebijakan Pemerintah	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Publik

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.009	Data Pendukung Proses Pemekaran	Informasi elemen pendukung proses pemekaran	Bertujuan untuk mengetahui Informasi elemen pendukung proses pemekaran	RD 03.01 Data pembangunan, RD 10.03 Data Kewilayahan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Publik
D.010	Data Nama Rupabumi Di Kabupaten Deli Serdang	Daftar nama rupabumi yang dihimpun dari dataran yang ada dikawasan kabupaten setempat	Bertujuan untuk mengetahui Daftar nama rupabumi yang dihimpun dari dataran yang ada dikawasan kabupaten setempat	RD 03.01 Data pembangunan, RD 10.03 Data Kewilayahan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Publik
D.011	Data Evaluasi Kinerja Kecamatan	Informasi hasil evaluasi kinerja kecamatan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi hasil evaluasi kinerja kecamatan	RD 09.06 Data aparatur negara, RD 09.07 Data kesekretariatan negara	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Publik
D.012	Data Paten	Informasi paten dan hak intelektual produk	Bertujuan untuk mengetahui Informasi paten dan hak intelektual produk	RD 09.06 Data aparatur negara, RD 09.07 Data kesekretariatan negara, RD 10.01 Kebijakan Pemerintah	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Publik
D.013	Data Lppd Spm Apkasi	Informasi terkait Data Lppd Spm Apkasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait Data Lppd Spm Apkasi	RD 09.06 Data aparatur negara, RD 09.07 Data kesekretariatan negara,	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Publik
D.014	Data Kerja Sama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Informasi kerja sama antara daerah yang bersama kabupaten setempat	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kerja sama antara daerah yang bersama kabupaten setempat	RD 09.06 Data aparatur negara, RD 09.07 Data kesekretariatan negara	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.015	Data Evaluasi Anggaran Kelurahan Penyusunan Lkpj	Informasi hasil evaluasi anggaran kelurahan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi hasil evaluasi anggaran kelurahan	RD 09.06 Data aparatur negara, RD 09.07 Data kesekretariatan negara	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.016	Data Produk hukum daerah (JDIH)	Daftar kumpulan produk hukum daerah	Bertujuan untuk mengetahui Daftar kumpulan produk hukum daerah	RD 10.01 Kebijakan Pemerintah	Online	Server Kominfo	MySQL	Publik

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.017	Data SOP Bagian Hukum	Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms. Word	Internal
D.018	Data Surat Keluar/Masuk	Informasi penomoran surat masuk, atau surat keluar, nomor arsip surat seluruh OPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi penomoran surat masuk, atau surat keluar, nomor arsip surat seluruh OPD	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.019	Data Arsip surat	Daftar arsip surat keluar masuk sekretariat daerah	Bertujuan untuk mengetahui Daftar arsip surat keluar masuk sekretariat daerah	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.020	Data pegawai	Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jabatan	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jabatan	RD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.021	Data aset fasilitas kantor	Data inventaris aset fisik, non fisik sekretariat daerah	Bertujuan untuk mengetahui Data inventaris aset fisik, non fisik sekretariat daerah	RD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.022	Data aset kebutuhan Rumah tangga	Data inventaris kebutuhan rumah dinas Bupati	Bertujuan untuk mengetahui Data inventaris kebutuhan rumah dinas Bupati	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.023	Data-data organisasi dan kegiatan keagamaan	Daftar aktivitas keagamaan, perayaan hari besar dan libur	Bertujuan untuk mengetahui Daftar aktivitas keagamaan, perayaan hari besar dan libur	RD 08.01 Data agama	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.024	Data juara MTQ	Daftar pemenang kejuaran MTQ	Bertujuan untuk mengetahui Daftar pemenang kejuaran MTQ	RD 08.01 Data agama	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.025	Data keberangkatan haji	Daftar keberangkatan calon jamaah haji	Bertujuan untuk mengetahui Daftar keberangkatan calon jamaah haji	RD 08.01 Data agama	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.026	Data bilal jenazah	Daftar nama bilal jenazah	Bertujuan untuk mengetahui Daftar nama bilal jenazah	RD 08.01 Data agama	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.027	Data Penggalian kubur	Daftar waktu penggalian kubur	Bertujuan untuk mengetahui Daftar waktu penggalian kubur	RD 08.01 Data agama	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.028	Data Upacara hari nasional	Daftar tanggal pelaksanaan upacara untuk seluruh OPD	Bertujuan untuk mengetahui Daftar tanggal pelaksanaan upacara untuk seluruh OPD	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.029	Data Perjanjian Kinerja	Daftar informasi perjanjian kinerja	Bertujuan untuk mengetahui Daftar informasi perjanjian kinerja	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.05 Data	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
				perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,				
D.030	Data Pendapatan Asli Daerah	Informasi jumlah total dan fluktuasi pendapatan daerah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah total dan fluktuasi pendapatan daerah	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.031	Data pengelolaan Belanja Pegawai	informasi total belanja pegawai yang dihabiskan pada periode waktu tertentu	Bertujuan untuk mengetahui informasi total belanja pegawai yang dihabiskan pada periode waktu tertentu	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.032	Data SPIP	Rekap informasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah daerah	Untuk mengetahui pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.033	Data TPAKD	Dokumen Akses Keuangan dari website Tim Pengendalian Akses Keuangan Daerah	Bertujuan untuk mengetahui Dokumen Akses Keuangan dari website Tim Pengendalian Akses Keuangan Daerah	RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.02 Data keuangan	Online	Server Kominfo	MySQL	Publik
D.034	Data kajian urusan pemerintahan	Informasi kajian bidang Perizinan, Penanaman Modal dan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kajian bidang Perizinan, Penanaman Modal	RD 10.01 Kebijakan Pemerintah, RD	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
			dan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta	02.07 Data badan usaha milik negara, RD 02.08 Data investasi				
D.035	Data SOP Sub Bagian Sumber Daya Alam	Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms. Word	Internal
D.036	Data e-katalog	Daftar katalog paket pengadaan barang jasa lokal	Bertujuan untuk mengetahui Daftar katalog paket pengadaan barang jasa lokal	RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.037	Data Inventaris Paket Pengadaan	Daftar pengadaan barang/ jasa kabupaten setempat yang masih berjalan	Bertujuan untuk mengetahui Daftar pengadaan barang/ jasa kabupaten setempat yang masih berjalan	RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.038	Data pengadaan barang / jasa	Daftar pengadaan barang/ jasa kabupaten setempat yang masih berjalan	Bertujuan untuk mengetahui Daftar pengadaan barang/ jasa kabupaten setempat yang masih berjalan	RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	Online	Server pihak ketiga	Postgre	Publik
D.039	Data Hasil pengukuran kinerja pengadaan	Informasi hasil evaluasi pengelolaan dan pengukuran pengadaan barang dan jasa	Bertujuan untuk mengetahui Informasi hasil evaluasi pengelolaan dan pengukuran pengadaan barang dan jasa	RD 09.06 Data aparatur negara, RD 09.07 Data kesekretariatan negara,	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.040	Data pendukung DPA	Informasi tentang sub kegiatan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan dan anggaran nya	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang sub kegiatan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan dan anggaran nya	RD 09.02 Data keuangan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.041	Data SOP Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms. Word	Internal
D.042	Data SOP Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms. Word	Internal
D.043	Data Pengawasan	LPH	Bertujuan untuk mengetahui LPH	RD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server Kominfo	MySQL	Bagi Pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.044	Data Program Kerja Inspektorat	Informasi tentang Data Program Kerja Inspektorat	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data Program Kerja Inspektorat	RD 09.06 Data aparatur negara, RD 09.07 Data kesekretariatan	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.045	Data keuangan	Informasi realisasi anggaran SIPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi realisasi anggaran SIPD	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.06 Data aparatur negara,	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi pakai
D.046	Data produk penyusunan peraturan perundang-undangan	Informasi tentang Data produk penyusunan peraturan perundang-undangan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data produk penyusunan peraturan perundang-undangan	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.047	Data pemantauan tindak lanjut aspirasi	Informasi tentang Data pemantauan tindak lanjut aspirasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data pemantauan tindak lanjut aspirasi	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.048	Data perencanaan Program	Data perencanaan program dan anggaran	Bertujuan untuk mengetahui Data perencanaan program dan anggaran	RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.049	Laju Pertumbuhan ekonomi	Integrasi laju pertumbuhan ekonomi pertanian, perindustrian, koperasi UKM, perikanan, pendapatan daerah, PMD yang terkait badan usaha milik desa	Bertujuan untuk mengetahui Integrasi laju pertumbuhan ekonomi pertanian, perindustrian, koperasi UKM, perikanan, pendapatan daerah, PMD yang terkait badan usaha milik desa	RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.050	Data monitoring	pelaksanaan program dari setiap OPD	Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program dari setiap OPD	RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.051	Data SOP Bidang Sosial dan Budaya	Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms. Word	Internal
D.052	Data usulan pembangunan	Informasi usulan pembangunan terkait dengan urusan perhubungan dan Pekerjaan Umum untuk DPRD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi usulan pembangunan terkait dengan urusan perhubungan dan Pekerjaan Umum untuk DPRD	RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara, RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.053	Data penelitian	Informasi penelitian yang dilaksanakan terkait urusan Sub Bidang Ekonomi, Sosial, dan Pemerintah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi penelitian yang dilaksanakan terkait urusan Sub Bidang Ekonomi, Sosial, dan Pemerintah	RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Offline	Internal OPD	Ms. Word	Internal
D.054	Data DTKS dari dinas sosial,	Informasi bantuan dinas sosial untuk rayat miskin	Bertujuan untuk mengetahui Informasi bantuan dinas sosial untuk rayat miskin	RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.055	dispورا budpar aplikasi sidaily	Informasi tentang dispورا budpar aplikasi sidaily	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang dispورا budpar aplikasi sidaily	RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.056	data TKTK	Informasi tentang data TKTK	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang data TKTK	RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.057	data kabupaten sehat	Informasi data kesehatan yang diambil dari Dinas Mitra Bappeda	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data kesehatan yang diambil dari Dinas Mitra Bappeda	RD 04.01 Data kesehatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Bagi Pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.058	data kebudayaan	Informasi data kebudayaan yang diambil dari Dinas Mitra Bappeda	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data kebudayaan yang diambil dari Dinas Mitra Bappeda	RD 08.02 Data kebudayaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.059	Data sosialisasi Nilai pancasila	Data sosialisasi terkait orientasi dan pengayaan aktualisasi nilai-nilai pancasila terhadap generasi bangsa untuk setiap kecamatan	Bertujuan untuk mengetahui Data sosialisasi terkait orientasi dan pengayaan aktualisasi nilai-nilai pancasila terhadap generasi bangsa untuk setiap kecamatan	RD 09.01 Data dalam negeri	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.060	Data pelajar	Data pelajar yang ada di kabupaten Deli Serdang	Bertujuan untuk mengetahui Data pelajar yang ada di kabupaten Deli Serdang	RD 06.05 Data pemuda, RD 06.01 Data Pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.061	Data Partai Politik	Informasi partai dan saluran dana yang diterima oleh partai politik yang ada di deli serdang	Bertujuan untuk mengetahui Informasi partai dan saluran dana yang diterima oleh partai politik yang ada di deli serdang	RD 09.01 Data dalam negeri	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.062	Data SOP Bidang Ketahanan Ekonomi	Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms. Word	Internal
D.063	Data SOP Bidang Kewaspadaan Nasional	Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Standar Pelayanan yang dimiliki OPD terkait	RD 09.06 Data aparatur negara	Offline	Internal OPD	Ms. Word	Internal
D.064	Data Anggaran	Informasi anggaran seluruh OPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi anggaran seluruh OPD	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Online	Server OPD	MySQL	Bagi Pakai
D.065	Data realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Informasi tentang Data realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	RD 09.02 Data keuangan	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.066	Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Informasi tentang Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	RD 09.02 Data keuangan	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.067	Data Aset Inventaris	Informasi rekap aset fisik non fisik dari seluruh OPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi rekap aset fisik non fisik dari seluruh OPD	RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Online	Server OPD	MySQL	bagi pakai
D.068	Data keuangan	Informasi anggaran dan pendapatan seluruh OPD yang ditangani OPD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Informasi anggaran dan pendapatan seluruh OPD yang ditangani OPD terkait	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.069	Data realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB	Informasi tentang Data realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB	RD 09.02 Data keuangan	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.070	Data pajak Daerah	Informasi pajak daerah dari seluruh OPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pajak daerah dari seluruh OPD	RD 09.02 Data keuangan, RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.071	Data pajak Bumi	Informasi pajak bumi dan banungan dari seluruh OPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pajak bumi dan banungan dari seluruh OPD	RD 09.02 Data keuangan, RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.072	Data verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB	Informasi tentang Data verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB	RD 09.02 Data keuangan	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.073	Data kepegawaian	Informasi seleuruh data pegawai yang dikelola oleh OPD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Informasi seleuruh data pegawai yang dikelola oleh OPD terkait	RD 09.06 Data aparatur negara	Online	Server OPD	Postgre	Bagi Pakai
D.074	Data Kinerja	Laporan hasil dari aplikasi E-Kinerja	Bertujuan untuk mengetahui Laporan hasil dari aplikasi E-Kinerja	RD 06.02 Data ketenagakerjaan, RD 09.01 Data dalam negeri, RD 09.07 Data kesekretariatan negara	Online	Server OPD	MySQL	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.075	Data administrasi PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan	Informasi tentang Data administrasi PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data administrasi PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan	RD 09.06 Data aparatur negara, RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.076	Data usulan PNS yang akan menerima Penganugerahan	Informasi tentang Data usulan PNS yang akan menerima Penganugerahan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data usulan PNS yang akan menerima Penganugerahan	RD 09.06 Data aparatur negara, RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.077	data penganan bencana	laporan bencana dan dokumentasi	Bertujuan untuk mengetahui laporan bencana dan dokumentasi	RD 10.03 Data Kewilayahan, RD 10.04 Data dukung lainnya	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.078	data kegiatan rehabilitasi	laporan kerja kegiatan rehabilitasi	Bertujuan untuk mengetahui laporan kerja kegiatan rehabilitasi	RD 10.03 Data Kewilayahan, RD 10.04 Data dukung lainnya	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.079	data penanaman pohon,	informasi kebencanaan	Bertujuan untuk mengetahui informasi kebencanaan	RD 10.03 Data Kewilayahan, RD 10.04 Data dukung lainnya, RD 02.04 Data perkebunan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.080	data pelatihan SDM (masyarakat)	data pelatihan masyarakat untuk sosialisasi kesiapsiagaan bencana	Bertujuan untuk mengetahui data pelatihan masyarakat untuk sosialisasi kesiapsiagaan bencana	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.081	Gambar Titik Lokasi SD Air	Memberikan data terkait lokasi SD Air	Bertujuan untuk mengetahui Memberikan data terkait lokasi SD Air	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.082	Hasil Survei SD Air	Memberikan data terkait SD Air	Bertujuan untuk mengetahui Memberikan data terkait SD Air	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.083	Data Hasil Pekerjaan SD Air	Memberikan data terkait SD Air	Bertujuan untuk mengetahui Memberikan data terkait SD Air	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.084	Gambar Titik Lokasi Pembangunan Jalan	Memberikan data terkait lokasi pembangunan jalan	Bertujuan untuk mengetahui Memberikan data terkait lokasi pembangunan jalan	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.085	Hasil Survei Pembangunan Jalan	Memberikan data terkait lokasi pembangunan jalan	Bertujuan untuk mengetahui Memberikan data terkait lokasi pembangunan jalan	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.086	Data Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan	Memberikan data terkait lokasi pembangunan jalan	Bertujuan untuk mengetahui Memberikan data terkait lokasi pembangunan jalan	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.087	Gambar Titik Lokasi pemeliharaan Jalan	Memberikan data terkait lokasi pemeliharaan jalan	Bertujuan untuk mengetahui Memberikan data terkait lokasi pemeliharaan jalan	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.088	Hasil Survei pemeliharaan Jalan	Memberikan data terkait lokasi pemeliharaan jalan	Bertujuan untuk mengetahui Memberikan data terkait lokasi pemeliharaan jalan	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.089	Data Hasil Pekerjaan pemeliharaan Jalan	Memberikan data terkait lokasi pemeliharaan jalan	Bertujuan untuk mengetahui Memberikan data terkait lokasi pemeliharaan jalan	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.090	Hasil Survei peralatan dan perlengkapan Jalan	Memberikan data terkait peralatan dan perlengkapan jalan	Bertujuan untuk mengetahui Memberikan data terkait peralatan dan perlengkapan jalan	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.091	Data Hasil Pekerjaan peralatan dan perlengkapan Jalan	Memberikan data terkait peralatan dan perlengkapan jalan	Bertujuan untuk mengetahui Memberikan data terkait peralatan dan perlengkapan jalan	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.092	Gambar Survei Tata Ruan	Memberikan data terkait lokasi tata ruang	Bertujuan untuk mengetahui Memberikan data terkait lokasi tata ruang	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.093	Hasil Survei Tata ruang	Memberikan data terkait tata ruang	Bertujuan untuk mengetahui Memberikan data terkait tata ruang	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.094	Sertifikat Pembinaan Jasa Konstruksi	Rekap Sertifikat aktivitas pembinaan untuk jasa konstruksi	Bertujuan untuk mengetahui Rekap Sertifikat aktivitas pembinaan untuk jasa konstruksi	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.095	Data analisis harga satuan pekerjaan	Informasi tentang Data analisis harga satuan pekerjaan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data analisis harga satuan pekerjaan	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.096	Data Laporan gizi	Informasi Laporan gizi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Laporan gizi	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.097	Data kematian ibu dan anak	Informasi kematian ibu dan anak	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kematian ibu dan anak	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.098	Data stunting	Informasi stunting	Bertujuan untuk mengetahui Informasi stunting	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.099	Data kesehatan lingkungan	Informasi kesehatan lingkungan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kesehatan lingkungan	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.100	Data posyandu	Informasi posyandu	Bertujuan untuk mengetahui Informasi posyandu	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.101	Data lansia	Informasi lansia	Bertujuan untuk mengetahui Informasi lansia	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.102	Data penyakit menular dan tidak menular	Informasi penyakit menular dan tidak menular	Bertujuan untuk mengetahui Informasi penyakit menular dan tidak menular	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.103	Data Imunisasi	Informasi Imunisasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Imunisasi	RD 04.01 Data Kesehatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.104	Data fasilitas kesehatan	Informasi ketersediaan rumah sakit, klinik swasta, puskesmas, tempat pengobatan tradisional/alternatif	Bertujuan untuk mengetahui Informasi ketersediaan rumah sakit, klinik swasta, puskesmas, tempat pengobatan tradisional/alternatif	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.105	akreditasi fasilitas kesehatan	Informasi akreditasi rumah sakit, klinik swasta, puskesmas, tempat pengobatan tradisional/alternatif	Bertujuan untuk mengetahui Informasi akreditasi rumah sakit, klinik swasta, puskesmas, tempat pengobatan tradisional/alternatif	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.106	data fasilitas kesehatan patner BPJS	data RS dan puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS	Bertujuan untuk mengetahui data RS dan puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.107	data SP2TP (sistem pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas)	data SP2TP (sistem pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas)	Bertujuan untuk mengetahui data SP2TP (sistem pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas)	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.108	data pencapaian KBKP (kapitasi berbasis komitmen pelayanan di FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama))	data pencapaian KBKP (kapitasi berbasis komitmen pelayanan di FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama, data transfusi darah;	Bertujuan untuk mengetahui data pencapaian KBKP (kapitasi berbasis komitmen pelayanan di FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama, data transfusi darah;	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.109	sarana dan prasarana di F-KTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama),	informasi detail jumlah, kondisi sarana dan prasaran Fasilitas Kesehatan	Bertujuan untuk mengetahui informasi detail jumlah, kondisi sarana dan prasaran Fasilitas Kesehatan	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.110	kalibrasi alat medis	Informasi terkait kalibrasi alat medis	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait kalibrasi alat medis	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.111	data kesehatan pegawai	Informasi terkait data kesehatan pegawai	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data kesehatan pegawai	RD 09.06 Data aparaturnegara	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.112	obat dan alat kesehatan,	Informasi terkait obat dan alat kesehatan,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait obat dan alat kesehatan,	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.113	Data Ruang terbuka hijau	Informasi rekap tempat ruang terbuka hijau	Bertujuan untuk mengetahui Informasi rekap tempat ruang terbuka hijau	RD 03.04 Data perumahan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.114	Data sarpras taman	informasi jumlah, kelengkapan sarana dan prasarana taman	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah, kelengkapan sarana dan prasarana taman	RD 03.04 Data perumahan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.115	Data letak pembangunan gedung pemerintah	Informasi pembangunan gedung pemerintah yang berjalan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pembangunan gedung pemerintah yang berjalan	RD 03.04 Data perumahan, RD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.116	Data jumlah kondisi IMB	Informasi pelayanan, kondisi, kelayakan, hasil survei Ijin Mendirikan Gedung	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pelayanan, kondisi, kelayakan, hasil survei Ijin Mendirikan Gedung	RD 03.04 Data perumahan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.117	Data kondisi lokasi pembangunan (rekomendasi ijin pembangunan)	Informasi pelayanan, kondisi, kelayakan, hasil survei Ijin Mendirikan Gedung	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pelayanan, kondisi, kelayakan, hasil survei Ijin Mendirikan Gedung	RD 03.04 Data perumahan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.118	Data perumahan MRD	Informasi fashum dan fasos pada perumahan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi fashum dan fasos pada perumahan	RD 03.04 Data perumahan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.119	Data fashum dan fasos di perumahan MDR	Informasi fashum dan fasos pada perumahan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi fashum dan fasos pada perumahan	RD 03.04 Data perumahan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.120	Data Pembuatan PERDA Jalan lingkungan	Peraturan kegiatan Informasi kondisi jalan Jumlah rumah yang tidak layak huni yang tertangani	Bertujuan untuk mengetahui Peraturan kegiatan Informasi kondisi jalan Jumlah rumah yang tidak layak huni yang tertangani	RD 03.05 Data pembangunan kawasan atau	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
				daerah tertinggal				
D.121	Data panjang jalan	Informasi kondisi jalan, panjang jalan yang tidak layak huni yang tertangani	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kondisi jalan, panjang jalan yang tidak layak huni yang tertangani	RD 03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.122	Data kerusakan RTLH	Informasi daftar kerusakan Rumah tidak layak huni	Bertujuan untuk mengetahui Informasi daftar kerusakan Rumah tidak layak huni	RD 03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Publik
D.123	Data Bedah rumah	Informasi daftar penerima layanan bedah rumah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi daftar penerima layanan bedah rumah	RD 03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Publik
D.124	Data rehab	Informasi jumlah rumah keluarga yang diperlukan rehabilitasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah rumah keluarga yang diperlukan rehabilitasi	RD 03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.125	Data pembangunan saluran drainase permukiman Sampah	Informasi panjang saluran yang terbangun	Bertujuan untuk mengetahui Informasi panjang saluran yang terbangun	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.126	Data drywater-air cucian dari dapur	luas area genangan yang tertangang jumlah SR yang terkoneksi ke ipal	Bertujuan untuk mengetahui luas area genangan yang tertangang jumlah SR yang terkoneksi ke ipal	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.127	Data air limbah air kotor	luas DPA/TPST yang terbangun dan dikelola secara maksimal, jumlah tangki septik yang dibangun, jumlah MCK di kawasan permukiman SR yang terkoneksi ke SPAM (Sistem penyediaan air minum)	Bertujuan untuk mengetahui luas DPA/TPST yang terbangun dan dikelola secara maksimal, jumlah tangki septik yang dibangun, jumlah MCK di kawasan permukiman SR yang terkoneksi ke SPAM (Sistem penyediaan air minum)	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.128	Data back water-pembuangan	Informasi back water pembuangan sanitasi Jumlah SR yang terkoneksi ke transmisi (air bersih)	Bertujuan untuk mengetahui Informasi back water pembuangan sanitasi Jumlah SR yang terkoneksi ke transmisi (air bersih)	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.129	Data jumlah sumur bor yang terbagun	Informasi total sumur bor yang sudah dibangun	Bertujuan untuk mengetahui Informasi total sumur bor yang sudah dibangun	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.130	Data pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Informasi penjelasan Pemanfaatan tanah, lokasi pengadaan tanah, inventarisasi bangunan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi penjelasan Pemanfaatan tanah, lokasi pengadaan tanah, inventarisasi bangunan	RD 03.01 Data pekerjaan umum, RD 03.04 Data perumahan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.131	Data limbah rumah tangga,	Jumlah pelayanan penyedotan lumpur tinja	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah pelayanan penyedotan lumpur tinja	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.132	Data dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL	Informasi tentang Data dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL	RD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.133	Data Sarpras penanganan sampah	Informasi tentang Data Sarpras penanganan sampah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data Sarpras penanganan sampah	RD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.134	Data baku mutu sumber pencemar	Informasi tentang Data baku mutu sumber pencemar	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data baku mutu sumber pencemar	RD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.135	Data aduan Masyarakat	Informasi tentang Data aduan Masyarakat kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data aduan Masyarakat kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	RD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.136	Data Teknis Anggota Koperasi	Informasi tentang Data Teknis Anggota Koperasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data Teknis Anggota Koperasi	RD 02.09 Data Koperasi	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.137	Data perizinan kelembagaan dan usaha koperasi	Informasi perizinan kelembagaan dan usaha koperasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi perizinan kelembagaan dan usaha koperasi	RD 02.09 Data Koperasi, RD 02.07 Data	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
				badan Usaha Milik Negara				
D.138	Data penilaian kesehatan Koperasi	Informasi perizinan kelembagaan dan usaha koperasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi perizinan kelembagaan dan usaha koperasi	RD 02.09 Data Koperasi	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.139	Data ODS	Informasi tentang Koperasi dan UMKM	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Koperasi dan UMKM	RD 02.01 Data Perindustrian	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.140	Data UMKM	Jumlah, Jenis Data UMKM dan Data UKM Binaan	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah, Jenis Data UMKM dan Data UKM Binaan	RD 02.01 Data Perindustrian, RD 02.10 Data usaha kecil dan menengah	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.141	Data UKM Binaan	Jumlah, Jenis Data UMKM dan Data UKM Binaan	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah, Jenis Data UMKM dan Data UKM Binaan	RD 02.01 Data Perindustrian	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.142	data jumlah guru	informasi jumlah guru dan pegawai	Bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah guru dan pegawai	RD 06.01 Data pendidikan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.143	Data sekolah PAUD	Informasi BOP (bantuan operasional penyelenggaraan) yang diberikan kepada PAUD dan PKBM	Bertujuan untuk mengetahui Informasi BOP (bantuan operasional penyelenggaraan) yang diberikan kepada PAUD dan PKBM	RD 06.01 Data pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.144	Data PKBM	Informasi BOP (bantuan operasional penyelenggaraan) yang diberikan kepada PAUD dan PKBM	Bertujuan untuk mengetahui Informasi BOP (bantuan operasional penyelenggaraan) yang diberikan kepada PAUD dan PKBM	RD 06.01 Data pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.145	Data kurikulum dari SD,	Informasi kurikulum dari SD,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kurikulum dari SD,	RD 06.01 Data pendidikan, RD 06.03	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.146	data peserta dan nilai akhir kelas 5 dari semua siswa SD	Informasi peserta dan nilai akhir kelas 5 dari semua siswa SD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi peserta dan nilai akhir kelas 5 dari semua siswa SD	RD 06.01 Data pendidikan, RD 06.03	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.147	Data surat ijin perpanjangan sekolah,	Informasi surat ijin perpanjangan sekolah,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi surat ijin perpanjangan sekolah,	RD 06.01 Data pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.148	Data proposal pengajuan bantuan sarana dan prasarana dari sekolah	Informasi proposal pengajuan bantuan sarana dan prasarana dari sekolah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi proposal pengajuan bantuan sarana dan prasarana dari sekolah	RD 06.01 Data pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.149	Data bantuan untuk siswa	Informasi bantuan untuk siswa	Bertujuan untuk mengetahui Informasi bantuan untuk siswa	RD 06.01 Data pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.150	data siswa mutasi pindah sekolah	Informasi siswa mutasi pindah sekolah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi siswa mutasi pindah sekolah	RD 06.01 Data pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.151	Data kurikulum dari SMP,	Informasi kurikulum dari SMP,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kurikulum dari SMP,	RD 06.01 Data pendidikan, RD 06.03	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.152	data peserta dan nilai akhir kelas 9 dari semua siswa SMP	Informasi peserta dan nilai akhir kelas 5 dari semua siswa SMP	Bertujuan untuk mengetahui Informasi peserta dan nilai akhir kelas 5 dari semua siswa SMP	RD 06.01 Data pendidikan, RD 06.03	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.153	Data surat ijin perpanjangan sekolah,	Informasi surat ijin perpanjangan sekolah,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi surat ijin perpanjangan sekolah,	RD 06.01 Data pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.154	Data proposal pengajuan bantuan sarana dan prasarana dari sekolah	Informasi proposal pengajuan bantuan sarana dan prasarana dari sekolah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi proposal pengajuan bantuan sarana dan prasarana dari sekolah	RD 06.01 Data pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.155	Data bantuan untuk siswa	Informasi bantuan untuk siswa	Bertujuan untuk mengetahui Informasi bantuan untuk siswa	RD 06.01 Data pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.156	data siswa mutasi pindah sekolah	Informasi siswa mutasi pindah sekolah	Bertujuan untuk mengetahui Informasi siswa mutasi pindah sekolah	RD 06.01 Data pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.157	Data guru dan tenaga pendidikan	Informasi guru dan tenaga pendidik	Bertujuan untuk mengetahui Informasi guru dan tenaga pendidik	RD 06.01 Data pendidikan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.158	data tunjangan penerima profesi	informasi penerima tunjangan penerima profesi	Bertujuan untuk mengetahui informasi penerima tunjangan penerima profesi	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.159	data aneka tunjangan pns	informasi tunjangan	Bertujuan untuk mengetahui informasi tunjangan	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.160	data usulan pembayaran tunjangan profesi PNS	informasi usulan pembayaran tunjangan profesi PNS	Bertujuan untuk mengetahui informasi usulan pembayaran tunjangan profesi PNS	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.161	data peningkatan kompetensi pendidik;	informasi peningkatan kompetensi pendidik yang ada di Deli Serdang	Bertujuan untuk mengetahui informasi peningkatan kompetensi pendidik yang ada di Deli Serdang	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.162	Data IKM	Kumpulan Informasi Industri Kecil Menengah	Bertujuan untuk mengetahui Kumpulan Informasi Industri Kecil Menengah	RD 02.01 Data Perindustrian, RD 02.10 Data usaha kecil dan menengah	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.163	Data Perusahaan terkait Industri	Informasi jumlah perusahaan industri yang ada di kabupaten setempat	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah perusahaan industri yang ada di kabupaten setempat	RD 02.02 Data Perdagangan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.164	Data Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Informasi jalur dan penerima pupuk bersubsidi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jalur dan penerima pupuk bersubsidi	RD 02.02 Data Perdagangan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.165	Data harga pangan	Informasi harga pangan tiap periode waktu tertentu	Bertujuan untuk mengetahui Informasi harga pangan tiap periode waktu tertentu	RD 02.02 Data Perdagangan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.166	Data perusahaan ekspor dan import	Informasi jumlah, tempat, perusahaan exportir dan importir	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah, tempat, perusahaan exportir dan importir	RD 02.02 Data Perdagangan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.167	Data UKM berpotensi	Informasi UKM yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih besar	Bertujuan untuk mengetahui Informasi UKM yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih besar	RD 02.01 Data Perindustrian	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.168	Data UKM unggulan	Informasi jumlah UKM yang memiliki produk unggulan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah UKM yang memiliki produk unggulan	RD 02.01 Data Perindustrian	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.169	Data Tradisional Pasar	Informasi jumlah, tempat, nama, pasar tradisional yang ada di kabupaten setempat	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah, tempat, nama,	RD 02.01 Data Perindustrian	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
			pasar tradisional yang ada di kabupaten setempat					
D.170	Data pasar modern	Jumlah, lokasi pasar moderen yang ada di kabupaten setempat	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah, lokasi pasar moderen yang ada di kabupaten setempat	RD 02.01 Data Perindustrian	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.171	Data retail	Jumlah , nama, lokasi pasar retail yang ada di kabupaten setempat	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah , nama, lokasi pasar retail yang ada di kabupaten setempat	RD 02.02 Data Perdagangan, RD 02.01 Data Perindustrian	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.172	Data gudang	Jumlah, lokasi, gudang penyimpanan pangan yang dikelola OPD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah, lokasi, gudang penyimpanan pangan yang dikelola OPD terkait	RD 02.02 Data Perdagangan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.173	Data Minkol	Informasi terkait Data Minkol	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait Data Minkol	RD 02.02 Data Perdagangan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.174	Data UMKM bagian marketing	Informasi pemasaran untuk memasarkan UMKM	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pemasaran untuk memasarkan UMKM	RD 02.01 Data Perindustrian, RD 02.10 Data usaha kecil dan menengah	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.175	Data Pemuda	Informasi penduduk remaja nama, umur, jenis kelamin	Bertujuan untuk mengetahui Informasi penduduk remaja nama, umur, jenis kelamin	RD 06.05 Data Pemuda	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.176	Data jumlah atlet	Informasi jumlah atlet	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah atlet	RD 06.06 Data olahraga	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.177	Data jumlah cabang olahraga	Informasi jumlah cabang olahraga	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah cabang olahraga	RD 06.06 Data olahraga	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.178	Data data organisasi keolahragaan	Informasi Informasi organisasi keolahragaan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Informasi organisasi keolahragaan	RD 06.06 Data olahraga	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.179	Data NPC.	Informasi NPC (atlet difabel nasional)	Bertujuan untuk mengetahui Informasi NPC Informasi NPC (atlet difabel nasional)	RD 06.06 Data olahraga	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.180	daftar cagar budaya	informasi cagar budaya	Bertujuan untuk mengetahui informasi cagar budaya	RD 02.11 Data pariwisata	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.181	daftar sanggar seni	informasi sanggar seni	Bertujuan untuk mengetahui informasi sanggar seni	RD 02.11 Data pariwisata	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.182	daftar benda yang ada di museum	informasi benda yang ada di museum	Bertujuan untuk mengetahui informasi benda yang ada di museum	RD 02.11 Data pariwisata	Online	Server OPD	MySQL	Publik
D.183	data objek-objek wisata	informasi objek-objek wisata, budaya,	Bertujuan untuk mengetahui informasi objek-objek wisata, budaya,	RD 02.11 Data pariwisata	Online	Server OPD	MySQL	Publik
D.184	data kepemudaan dan olahraga yang dipromosikan	informasi kepemudaan dan olahraga melalui media cetak maupun media sosial dan online	Bertujuan untuk mengetahui informasi kepemudaan dan olahraga melalui media cetak maupun media sosial dan online	RD 06.05 Data Pemuda,RD 02.11 Data pariwisata	Online	Server OPD	MySQL	Publik
D.185	data usaha-usaha kepariwisataan	Informasi dibidang kuliner pemandian alam karaoke dan spa yang berkaitan dengan kepariwisataan.	Bertujuan untuk mengetahui Informasi dibidang kuliner pemandian alam karaoke dan spa yang berkaitan dengan kepariwisataan.	RD 02.01 Data Perindustrian, RD 02.11 Data pariwisata	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.186	data terkait pelatihan untuk pelaku pariwisata	Informasi pelatihan untuk pelaku pariwisata	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pelatihan untuk pelaku pariwisata	RD 02.11 Data pariwisata	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.187	data kendala kependudukan	informasi permasalahan data penduduk	Bertujuan untuk mengetahui informasi permasalahan data penduduk	RD 03.07 Data kependudukan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi pakai
D.188	Data pelayanan pembuatan akta	Informasi tentang Data pelayanan pembuatan akta	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data pelayanan pembuatan akta	RD 03.07 Data kependudukan	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.189	data penduduk	akta perkawinan,akta perceraian, Akta lahir, akta kematian,	Bertujuan untuk mengetahui akta perkawinan,akta perceraian, Akta lahir, akta kematian,	RD 03.07 Data kependudukan	Online	Server pihak ketiga	Oracle	Bagi pakai
D.190	data kependudukan aplikasi DELLICA	informasi data kependudukan data terupdate aplikasi DELLICA	Bertujuan untuk mengetahui informasi data kependudukan data terupdate aplikasi DELLICA	RD 03.07 Data kependudukan	Online	Server pihak ketiga	Oracle	Bagi pakai
D.191	Data kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pro justitiakerjasama dengan instansi terkait dalam hal pro justitia	Informasi tentang Data kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pro justitiakerjasama dengan instansi terkait dalam hal pro justitia	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pro justitiakerjasama dengan instansi terkait dalam hal pro justitia	RD 03.07 Data kependudukan	Online	Server pihak ketiga	Oracle	Bagi pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.192	Data analisa kondisi PLKB dan Kader KB	Informasi tentang Data analisa kondisi PLKB dan Kader KB	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data analisa kondisi PLKB dan Kader KB	RD 04.03 Data pemberdayaan perempuan, RD04.01 Data Kesehatan, RD 03.07 Data kependudukan	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.193	data alkon	Informasi alat kontrasepsi yang dimiliki oleh dinas terkait	Bertujuan untuk mengetahui Informasi alat kontrasepsi yang dimiliki oleh dinas terkait	RD 04.01 Data Kesehatan	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.194	data ekonomi keluarga,	informasi kesejahteraan keluarga	Bertujuan untuk mengetahui informasi kesejahteraan keluarga	RD 04.02 Data Sosial	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.195	data kesehatan keluarga	informasi kesejahteraan keluarga	Bertujuan untuk mengetahui informasi kesejahteraan keluarga	RD 04.01 Data Kesehatan, RD 04.02 Data Sosial	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.196	data jumlah kader partai poltik perempuan	Informasi terkait data jumlah kader partai poltik perempuan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data jumlah kader partai poltik perempuan	RD 04.03 data pemberdayaan perempuan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.197	data jumlah perempuan pelaku industri keluarga	Informasi terkait data jumlah perempuan pelaku industri keluarga	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data jumlah perempuan pelaku industri keluarga	RD 04.03 data pemberdayaan perempuan, RD 06.02 Data Ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.198	data angkatan kerja	Informasi terkait data angkatan kerja	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data angkatan kerja	RD 06.02 Data Ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.199	data kesetaraan gender	Informasi terkait data kesetaraan gender	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data kesetaraan gender	RD 05.03 Data hak asasi manusia, RD 04.03 Data pemberdayaan perempuan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.200	data sensus keluarga	laporan jumlah keluarga	Bertujuan untuk mengetahui laporan jumlah keluarga	RD 03.07 Data kependudukan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.201	data kekerasan anak	Informasi terkait data kekerasan anak	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data kekerasan anak	RD 04.02 Data sosial, RD 05.03 Data hak asasi manusia, RD	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
				04.03 data pemberdayaan perempuan				
D.202	data kekerasan perempuan	Informasi terkait data kekerasan perempuan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data kekerasan perempuan	RD 04.02 Data sosial, RD 05.03 Data hak asasi manusia, RD 04.03 data pemberdayaan perempuan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.203	data desa	Informasi profil desa, perkembangan desa, pelatihan desa	Bertujuan untuk mengetahui Informasi profil desa, perkembangan desa, pelatihan desa	RD 09.01 Data dalam negeri, RD 03.07 Data kependudukan, RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Internal
D.204	data pembinaan masyarakat (PKK)	laporan pembinaan PKK (meningkatkan ekonomi perdesaan)	Bertujuan untuk mengetahui laporan pembinaan PKK (meningkatkan ekonomi perdesaan)	RD 09.01 Data dalam negeri, RD 03.07 Data kependudukan, RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.205	data BUMDES	laporan jumlah pelatihan dan pembinaan yg sudah dilakukan	Bertujuan untuk mengetahui laporan jumlah pelatihan dan pembinaan yg sudah dilakukan	RD 09.01 Data dalam negeri, RD 03.07 Data kependudukan, RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.206	Data LPM Desa dan kelurahan	Informasi tentang Data LPM Desa dan kelurahan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data LPM Desa dan kelurahan	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.207	Data layanan keuangan Desa	Informasi laporan hasil evaluasi keuangan desa dari aplikasi SISKEUDES	Bertujuan untuk mengetahui Informasi laporan hasil evaluasi keuangan desa dari aplikasi SISKEUDES	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.05 Data perencanaan	Online	Server Kominfo	MySQL	Bagi pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
				pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparaturnegara,				
D.208	Data Kapal	Jumlah dan ukuran kapal	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah dan ukuran kapal	RD 02.06 Data perikanan	Online	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.209	Data sarpras alat tangkap	Jumlah dan jenis alat tangkap	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah dan jenis alat tangkap	RD 02.06 Data perikanan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Publik
D.210	Data Konversi Bahan bakar	Konversi BBM ke BBG	Bertujuan untuk mengetahui Konversi BBM ke BBG	RD 02.06 Data perikanan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Publik
D.211	Data asuransi nelayan	asuransi nelayan	Bertujuan untuk mengetahui asuransi nelayan	RD 02.06 Data perikanan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Publik
D.212	Data Kapal mesin diesel	kapal mesin diesel	Bertujuan untuk mengetahui kapal mesin diesel	RD 02.06 Data perikanan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Publik
D.213	Data RTP Budidaya	Jumlah RTP Budidaya	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah RTP Budidaya	RD 02.06 Data perikanan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Publik
D.214	Data Jumlah Produksi	Produksi Perikanan Budidaya	Bertujuan untuk mengetahui Produksi Perikanan Budidaya	RD 02.06 Data perikanan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Publik
D.215	Data Distribusi Benih	Jumlah Benih Ikan yang akan didistribusikan ke masyarakat	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah Benih Ikan yang akan didistribusikan ke masyarakat	RD 02.06 Data perikanan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Publik
D.216	Data Inventarisasi teknis budidaya ikan	Informasi tentang Data Inventarisasi teknis budidaya ikan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data Inventarisasi teknis budidaya ikan	RD 07.04 Data Kelautan	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.217	Data sarana prasaran perlengkapan jalan	Informasi tentang Data sarana prasaran perlengkapan jalan dan rekayasa jalan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data sarana prasaran perlengkapan jalan dan rekayasa jalan	RD 03.01 Data Pekerjaan Umum, RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.218	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Informasi Kendaraan Uji KIR, Macam macam alat Uji KIR yang tersedia,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Kendaraan Uji KIR	RD 03.03 Data Transportasi	Online	Server OPD	Ms.SQL Server	Internal
D.219	Data terminal penumpang	Informasi tentang Data terminal penumpang	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data terminal penumpang	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.220	Data titik lokasi parkir khusus	Informasi lokasi penyebaran parkir khusus	Bertujuan untuk memberikan informasi penyebaran parkir	RD 03.03 Data Transportasi	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.221	Data Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Informasi tentang Data Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.222	Data aduan perlindungan dan jaminan sosial	Informasi rekap aduan dari layanan Call Center	Bertujuan untuk mengetahui Informasi rekap aduan dari layanan Call Center	RD 04.02 Data sosial, RD 05.03 Data hak asasi manusia	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.223	Data Panti Sosial anak dan lansia	Informasi tentang Data Panti Sosial anak dan lansia	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data Panti Sosial anak dan lansia	RD 04.02 Data Sosial	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.224	data kependudukan	Informasi penerima bantuan sosial	Bertujuan untuk mengetahui Informasi penerima bantuan sosial	RD 03.07 Data kependudukan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.225	Data fakir miskin	Informasi tentang Data fakir miskin	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data fakir miskin	RD 04.02 Data Sosial	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.226	Data Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Informasi Terkait Data Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Terkait Data Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.227	Data Pencatatan Pkwt, Lks Bipartit, Pengesahan Peraturan Perusahaan, Pendaftaran Pkb	Informasi Terkait Data Pencatatan Pkwt, Lks Bipartit, Pengesahan Peraturan Perusahaan, Pendaftaran Pkb	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Terkait Data Pencatatan Pkwt, Lks Bipartit, Pengesahan Peraturan Perusahaan, Pendaftaran Pkb	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.228	Data Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial	Informasi Terkait Data Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Terkait Data Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.229	Data Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja	Bertujuan Untuk Mengetahui Jumlah Pencari Kerja	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.230	Data Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	Bertujuan Untuk Mengetahui Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.231	Data Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3mi)	Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3mi)	Bertujuan Untuk Mengetahui Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3mi)	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.232	Data Bursa Kerja Khusus (Bkk)	Jumlah Bursa Kerja Khusus (Bkk)	Bertujuan Untuk Mengetahui Jumlah Bursa Kerja Khusus (Bkk)	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.233	Data Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Informasi Terkait Data Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Bertujuan Untuk Mengetahui Informasi Terkait Data Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.234	data pengaduan	informasi pengaduan dengan OPD terkait	Bertujuan untuk mengetahui informasi pengaduan dengan OPD terkait	RD 09.04 Data komunikasi	Online	Server OPD	MySQL	Bagi Pakai
D.235	postikan berita, infografis, vidio	berita kegiatan pemkab	Bertujuan untuk mengetahui berita kegiatan pemkab	RD 09.04 Data komunikasi	Online	Server OPD	MySQL	Publik
D.236	data kegiatan OPD, informasi pemkab, talk show	informasi berita masyarakat	Bertujuan untuk mengetahui informasi berita masyarakat	RD 09.04 Data komunikasi	Online	Server OPD	MySQL	Publik
D.237	Data kependudukan	Informasi data kependudukan yang didapat dari dinas pencatatan sipil	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data kependudukan yang didapat dari dinas pencatatan sipil	RD 03.07 Data kependudukan	Online	Server OPD	MySQL	Bagi Pakai
D.238	Data UMKM	Informasi tentang Data UMKM	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data UMKM	RD 02.01 Data Perindustrian, RD 02.10 Data usaha kecil dan menengah	Online	Server OPD	MySQL	Bagi Pakai
D.239	Data Sosial	Informasi tentang Data Sosial	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data Sosial	RD 04.02 Data Sosial	Online	Server OPD	MySQL	Bagi Pakai
D.240	Data Pendidikan	Informasi tentang Data Pendidikan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data Pendidikan	RD 06.01 Data pendidikan	Online	Server OPD	MySQL	Bagi Pakai
D.241	Data subdomain	Informasi sub domain seluruh OPD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi sub domain seluruh OPD	RD 06.01 Data Komunikasi	Online	Server OPD	MySQL	Internal
D.242	data bandwidth OPD	infomasi subdomain seluruh OPD deli serdang	Bertujuan untuk mengetahui infomasi subdomain seluruh OPD deli serdang	RD 06.01 Data Komunikasi	Online	Server OPD	MySQL	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.243	data rekaman	informasi distribusi bandwidth OPD	Bertujuan untuk mengetahui informasi distribusi bandwidth OPD	RD 06.01 Data Komunikasi	Online	Server OPD	MySQL	Internal
D.244	data pengaduan jaringan TIK	monitoring keaktifan CCTV	Bertujuan untuk mengetahui monitoring keaktifan CCTV	RD 06.01 Data Komunikasi	Online	Server OPD	MySQL	Publik
D.245	Data deliserdang dalam angka dan kecamatan dalam angka	Data yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan dan komunikasi, keuangan dan harga, pendapatan regional dan beberapa data suplemen.	Data untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kabupaten Deli	RD 09.03 Data Informasi	Offline	Internal OPD	Ms Excel dan Ms Word	Publik
D.246	Data penerimaan dan pengiriman surat melalui email sanapati	Sanapati dari BSSN. Seluruh surat dari kementerian ini melalui surat elektronik sanapati ini dikirimkan ke bagian umum untuk dikirimkan ke seluruh OPD di deli serdang.	Untuk melakukan dokumentasi data surat dari pusat dan menjamin kerahasiaannya	RD 09.03 Data Informasi	Offline	Pusat BSSN	Surat digital	Internal
D.247	Data Pengadaan Pupuk Dan Pestisida	Informasi tentang Data Pengadaan Pupuk Dan Pestisida	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data Pengadaan Pupuk Dan Pestisida	RD 02.03 Data pertanian	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.248	Luas Tanam Luas Panen Produktivitas	Informasi luas panen produksi PAJALE	Bertujuan untuk mengetahui Informasi luas panen produksi PAJALE	RD 02.03 Data pertanian	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.249	Luas Tanam Luas Panen Produktivitas	Informasi luas panen produksi HORTIKULTURA - FLORIKULTURA	Bertujuan untuk mengetahui Informasi luas panen produksi HORTIKULTURA - FLORIKULTURA	RD 02.03 Data pertanian	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.250	Luas Tanam Luas Panen Produktivitas	Informasi luas panen produksi Tanaman Kebun	Bertujuan untuk mengetahui Informasi luas panen produksi Tanaman Kebun	RD 02.04 Data perkebunan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.251	Data Jumlah Produksi Hewan Ternak	Informasi jumlah produksi hewan ternak (sapi, kerbau, telur ayam)	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah produksi hewan ternak (sapi, kerbau, telur ayam)	RD 02.05 Data peternakan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.252	Data Penyuluh	Informasi identitas, keanggotaan, penyuluh	Bertujuan untuk mengetahui Informasi identitas, keanggotaan, penyuluh	RD 02.03 Data pertanian	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.253	Data Kel. Tani	Informasi keluarga yang terdata bekerja sebagai petani	Bertujuan untuk mengetahui Informasi keluarga yang terdata bekerja sebagai petani	RD 02.03 Data pertanian	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.254	Gapoktan	Himpunan informasi kelompok tani yang terdata pada OPD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Himpunan informasi kelompok tani yang terdata pada OPD terkait	RD 02.03 Data pertanian	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.255	Kep	Informasi badan usaha gapoktan.	Bertujuan untuk mengetahui Informasi badan usaha gapoktan.	RD 02.03 Data pertanian	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.256	Data diservikasi ketahanan pangan	Hasil peningkatan diversifikasi ketahanan pangan masyarakat	Bertujuan untuk mengetahui Hasil peningkatan diversifikasi ketahanan pangan masyarakat	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.257	Data Stok Gudang	Jumlah dan persebaran stock gudang cadangan makanan pemerintah	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah dan persebaran stock gudang cadangan makanan pemerintah	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.258	Data Lumbung pangan	Jumlah llumbung pangan	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah llumbung pangan	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.259	Data Harga Pangan	Rekap fluktuasi harga pangan	Bertujuan untuk mengetahui Rekap fluktuasi harga pangan	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.260	Data Enumerator Harga	Informasi Periset/ Enumerator yang dimiliki oleh dinas ketahanan pangan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Periset/ Enumerator yang dimiliki oleh dinas ketahanan pangan	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.261	Data Target Konsumsi Perkapita	Informasi terkait Data Target Konsumsi Perkapita	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait Data Target Konsumsi Perkapita	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.262	Data Diversifikasi Ketahanan Pangan	Informasi terkait Data Diversifikasi Ketahanan Pangan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait Data Diversifikasi Ketahanan Pangan	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.263	Data BPP wilayah Deli Serdang	Jumlah pelayanan dalam pengujian sample pangan	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah pelayanan dalam pengujian sample pangan	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.264	Data buku perpustakaan	Judul buku, pengarang, jumlah anggota, jumlah buku yang dipinjamkan dan statistik kegiatan layanan perpustakaan	Bertujuan untuk mengetahui Judul buku, pengarang, jumlah anggota, jumlah buku yang	RD 06.01 Data pendidikan	Online	Server Kominfo	MySQL	Bagi Pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
			dipinjamkan dan statistik kegiatan layanan perpustakaan					
D.265	Data buku perpustakaan keliling	Rekap Daftar buku pustaka untuk perpustakaan keliling	Bertujuan untuk mengetahui Rekap Daftar buku pustaka untuk perpustakaan keliling	RD 06.01 Data pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.266	Data desa binaan perpustakaan keliling	Rekap pembinaan perpustakaan desa dan kelurahan; monitoring perkembangan hasil pembinaan perpustakaan desa dan kelurahan	Bertujuan untuk mengetahui Rekap pembinaan perpustakaan desa dan kelurahan; monitoring perkembangan hasil pembinaan perpustakaan desa dan kelurahan	RD 06.01 Data pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.267	Data tatakelola pengarsipan	hasil rekap kegiatan penyuluhan dan implementasi monitoring tata naskah dan pengawasan arsip semua OPD	Bertujuan untuk mengetahui hasil rekap kegiatan penyuluhan dan implementasi monitoring tata naskah dan pengawasan arsip semua OPD	RD 06.01 Data pendidikan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.268	Data arsip statis	Informasi Gambar dan dokumen statis yang ada pada JIKN	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Gambar dan dokumen statis yang ada pada JIKN	RD 06.01 Data pendidikan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Publik
D.269	Data Potensi Daerah	Informasi daftar potensi yang dimiliki setiap kecamatan dan kawasan kabupaten setempat	Bertujuan untuk mengetahui Informasi daftar potensi yang dimiliki setiap kecamatan dan kawasan kabupaten setempat	RD 02.08 Data investasi	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.270	Data Realisasi Investasi	Data realisasi investasi PMA dan PMDN	Bertujuan untuk mengetahui Data realisasi investasi PMA dan PMDN	RD 02.08 Data investasi	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.271	Data Perizinan	Informasi data pemohon Izin, data perusahaan, data izin	Bertujuan untuk mengetahui Informasi data pemohon Izin, data perusahaan, data izin	RD 02.08 Data investasi	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.272	Data Aduan Penanaman Modal	Informasi pengaduan Masyarakat terkait investasi dan izin pembukaan usaha	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pengaduan Masyarakat terkait investasi dan izin pembukaan usaha	RD 02.08 Data investasi	Online	Server Kominfo	MySQL	Publik
D.273	Data sarana prasana pemadam kebakaran	Informasi tentang Data sarana prasana pemadam kebakaran	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data sarana prasana pemadam kebakaran	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.274	Data kejadian pemadan kebakaran	Informasi tentang Data kejadian pemadan kebakaran	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data kejadian pemadan kebakaran	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.275	Data penanggulangan unit operasional	Informasi tentang Data penanggulangan unit operasional	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data penanggulangan unit operasional	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.276	Data sarana prasana pemadam kebakaran	Informasi tentang Data sarana prasana pemadam kebakaran	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data sarana prasana pemadam kebakaran	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal
D.277	Data tindak pelanggaran PNS	Informasi PNS yang melakukan pelanggaran seperti melakukakan tindak kriminal	Bertujuan untuk mengetahui Informasi PNS yang melakukan pelanggaran seperti melakukakan tindak kriminal	RD 05.02 Data keamanan, RD 05.01 Data Hukum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.278	Data penertiban izin bangunan	Informasi bangun yang berdiri tanpa izin	Bertujuan untuk mengetahui Informasi bangun yang berdiri tanpa izin	RD 05.02 Data keamanan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.279	Data Personil Pengamanan	Informasi jumlah penertiban yang telah dilakukan dan personil yang ikut dalam kegiatan penertiban	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah penertiban yang telah dilakukan dan personil yang ikut dalam kegiatan penertiban	RD 05.02 Data keamanan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.280	Data Kegiatan Pengamanan	Informasi pengawalan pejabat daerah ke lokasi tujuan, pegawai yang dikawal	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pengawalan pejabat daerah ke lokasi tujuan, pegawai yang dikawal	RD 05.02 Data keamanan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.281	Data Personil Tambahan	Informasi pihak ketiga yang meminta dukungan personil untuk menertibkan kegiatan yang mereka laksanakan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pihak ketiga yang meminta dukungan personil untuk menertibkan kegiatan yang mereka laksanakan	RD 05.02 Data keamanan, RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.282	Data LATSAR	Informasi personil yang ikut dalam pelatihan dasar yang digunakan sebagai standar personil	Bertujuan untuk mengetahui Informasi personil yang ikut dalam pelatihan dasar yang digunakan sebagai standar personil	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.283	Data jabatan fungsional	Informasi status kepegawaian	Bertujuan untuk mengetahui Informasi status kepegawaian	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.284	Data kompetensi pegawai	Informasi pegawai mana saja yang telah memiliki kompetensi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pegawai mana saja yang telah memiliki kompetensi	RD 09.06 Data aparatur negara, RD 10.02 Data	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
				Manajemen Kegiatan				
D.285	Data Penertiban Demo	Informasi pengamanan demo dan unjuk rasa yang telah dilakukan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pengamanan demo dan unjuk rasa yang telah dilakukan	RD 05.02 Data keamanan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.286	Data bencana alam dan keamanan masyarakat	Informasi bencana alam dan kegiatan masyarakat yang diamankan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi bencana alam dan kegiatan masyarakat yang diamankan	RD 05.02 Data keamanan, RD 05.01 Data Hukum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.287	Data sosialisasi Narkotik	Dokumentasi sosialisasi bahwa telah berlangsung kegiatan penyuluhan di desa tertentu	Bertujuan untuk mengetahui Dokumentasi sosialisasi bahwa telah berlangsung kegiatan penyuluhan di desa tertentu	RD 05.02 Data keamanan, RD 05.01 Data Hukum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.288	Data Rekam Medis Pasien	Informasi identitas, kondisi, penyakit, dan tagihan yang dibebankan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi identitas, kondisi, penyakit, dan tagihan yang dibebankan	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server OPD	Postgre	Internal
D.289	Data Kepegawaian	Pegawai tetap dan Honorer	Bertujuan untuk mengetahui Pegawai tetap dan Honorer	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.290	Data Aset Alkes	Informasi kondisi, jumlah, tipe sarana prasana alkes	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kondisi, jumlah, tipe sarana prasana alkes	RD 04.01 Data kesehatan, RD 09.02 Data keuangan, RD 10.04 Data dukung lain	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.291	Data Aset Sarpras	Informasi kondisi, jumlah, tipe sarana prasana non alkes	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kondisi, jumlah, tipe sarana prasana non alkes	RD 04.01 Data kesehatan, RD 09.02 Data keuangan, RD 10.04 Data dukung lain	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.292	Data surat masuk	surat keluar dari bagian-bagian yang ada di RS SK dan arsip dokumen	Bertujuan untuk mengetahui surat keluar dari bagian-bagian yang ada di RS SK dan arsip dokumen	RD 04.01 Data Kesehatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.293	Data Laboratorium rekanan	Jumlah rumah sakit yang bekerjasama dengan RS terkait laboratorium	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah rumah sakit yang	RD 04.01 Data Kesehatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
			bekerjasama dengan RS terkait laboratorium					
D.294	Data rujukan pasien	Jumlah rujukan pasien tiap periode tertentu	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah rujukan pasien tiap periode tertentu	RD 04.01 Data Kesehatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.295	Data Limbah B3	Informasi terkait kebersihan rumah sakit lingkungan dan limbah medis B3	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait kebersihan rumah sakit lingkungan dan limbah medis B3	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.296	Data Ambulan	Jumlah dan kondisi ambulan RSUD	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah dan kondisi ambulan RSUD	RD 04.01 Data Kesehatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.297	Data Protokoler kegiatan upacara	Rekap kegiatan Upacara hari besar	Bertujuan untuk mengetahui Rekap kegiatan Upacara hari besar	RD 09.01 Data dalam negeri, RD 09.07 Data kesekretariatan negara	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.298	Laporan tahunan, SPP	Informasi surat perintah pembayaran : nomor kontrak, nilai, nama penyedia, nama kegiatan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi surat perintah pembayaran : nomor kontrak, nilai, nama penyedia, nama kegiatan	RD 09.02 Data keuangan	Online	Server pihak ketiga	Postgre	Bagi Pakai
D.299	SPM	Surat Perintah Membayar nomor kontrak, nilai, nama penyedia, nama kegiatan, pajak	Bertujuan untuk mengetahui Surat Perintah Membayar nomor kontrak, nilai, nama penyedia, nama kegiatan, pajak	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.01 Data dalam negeri	Online	Server pihak ketiga	Postgre	Bagi Pakai
D.300	BKU	Informasi buku kas umum hasil rekapitulasi dari SPP	Bertujuan untuk mengetahui Informasi buku kas umum hasil rekapitulasi dari SPP	RD 09.02 Data keuangan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.301	SPJ	Informasi Pertanggung jawaban : data pegawai, nama kegiatan, dan realisasi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Pertanggung jawaban : data pegawai, nama kegiatan, dan realisasi	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.01 Data dalam negeri	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.302	LK	Informasi laporan neraca keuangan.	Bertujuan untuk mengetahui Informasi laporan neraca keuangan.	RD 09.02 Data keuangan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.303	Data RKA	Informasi perencanaan anggaran	Bertujuan untuk mengetahui Informasi perencanaan anggaran	RD 09.02 Data keuangan, RD	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
				09.01 Data dalam negeri				
D.304	Data DPA	Informasi realisasi penganggaran	Bertujuan untuk mengetahui Informasi realisasi penganggaran	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.01 Data dalam negeri	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.305	Data pengadaan barang jasa	Informasi perencanaan pengadaan barang dan jasa	Bertujuan untuk mengetahui Informasi perencanaan pengadaan barang dan jasa	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.01 Data dalam negeri	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.306	Data Usulan DAK	Informasi usulan Dana Alokasi Khusus	Bertujuan untuk mengetahui Informasi usulan Dana Alokasi Khusus	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.01 Data dalam negeri	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.307	Data barang milik daerah dan negara	Informasi status, keadaan, jumlah barang yang dimiliki daerah dan negara yang dikelola RSUD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi status, keadaan, jumlah barang yang dimiliki daerah dan negara yang dikelola RSUD	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.01 Data dalam negeri	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.308	Data survey kepuasan	Informasi hasil Survey Masyarakat dari webportal tentang pelayanan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi hasil Survey Masyarakat dari webportal tentang pelayanan	RD 09.04 Data komunikasi	Online	Server OPD	Postgre	Publik
D.309	Data Pelaporan Farmasi	Informasi evaluasi penerapan furnas, pemantauan indikator layanan kefarmasian, stok obat covid hibah provinsi, laporan SIRS Covid obat, SIRS covid APD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi evaluasi penerapan furnas, pemantauan indikator layanan kefarmasian, stok obat covid hibah provinsi, laporan SIRS Covid obat, SIRS covid APD	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.310	Data Record PCR, REAGON, NAR	Informasi hasil tes COVID-19	Bertujuan untuk mengetahui Informasi hasil tes COVID-19	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.311	Data tabung oksigen dan alkes lain	Informasi jumlah tabung oksigen dan ketersediaan alat alkes lain untuk pasien COVID 19	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah tabung oksigen dan ketersediaan alat alkes lain untuk pasien COVID 19	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.312	Data pelaporan pasien rawat inap,	Laporan pasien rawat inap	Bertujuan untuk mengetahui Laporan pasien rawat inap	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server OPD	MySQL	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.313	Data jumlah tenaga keperawatan,	Rekap jumlah tenaga keperawatan	Bertujuan untuk mengetahui Rekap jumlah tenaga keperawatan	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server OPD	MySQL	Internal
D.314	Data kebutuhan sarana dan prasarana (SK tempat tidur dan alat medis),	Rekap kebutuhan sarana dan prasarana (jumlah tempat tidur dan alat medis untuk penukaran jika ada perubahan tempat tidur)	Bertujuan untuk mengetahui Rekap kebutuhan sarana dan prasarana (jumlah tempat tidur dan alat medis untuk penukaran jika ada perubahan tempat tidur)	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server OPD	MySQL	Internal
D.315	Data pengajuan pelatihan	Rekap kegiatan pelatihan	Bertujuan untuk mengetahui Rekap kegiatan pelatihan	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server OPD	MySQL	Internal
D.316	Data kematian ibu dan bayi	daftar nama dan jumlah kematian ibu dan bayi	Bertujuan untuk mengetahui daftar nama dan jumlah kematian ibu dan bayi	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.317	Data kasus TBC	Jumlah pasien TBC	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah pasien TBC	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.318	Data klaim biaya	Informasi tentang identitas pasien, pengajuan klaim biaya, jenis penyakit	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang identitas pasien, pengajuan klaim biaya, jenis penyakit	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.319	Data pelayanan RSUD	Informasi ketersediaan dokter untuk pasien yang dibawa ke RSUD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi ketersediaan dokter untuk pasien yang dibawa ke RSUD	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.320	Data rujukan	daftar pasien yang mengajukan rujukan masuk atau keluar	Bertujuan untuk mengetahui daftar pasien yang mengajukan rujukan masuk atau keluar	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.321	Data CPPT tindakan medis	informasi tindakan medis, diagnosa, dan hasil pemeriksaan lab radiologi	Bertujuan untuk mengetahui informasi tindakan medis, diagnosa, dan hasil pemeriksaan lab radiologi	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server OPD	Postgre	Internal
D.322	Data penyakit potensi wabah	daftar sejumlah penyakit dan penderita yang berpotensi menular dan menjadi wabah	Bertujuan untuk mengetahui daftar sejumlah penyakit dan penderita yang berpotensi menular dan menjadi wabah	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.323	Data Ispa berat	Jumlah penderita ISPA berat yang melakukan pemeriksaan di RSUD	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah penderita ISPA berat yang melakukan pemeriksaan di RSUD	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server OPD	MySQL	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.324	Data intensif COVID untuk nakes	Informasi Nakes yang mendapat insentif sebagai petugas Nakes untuk COVID 19	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Nakes yang mendapat insentif sebagai petugas Nakes untuk COVID 19	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.325	Data HIV	Jumlah, dan persebaran lokasi penderita HIV	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah, dan persebaran lokasi penderita HIV	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.326	Data Pegawai RSUD	Informasi SK PNS, Kenaikan jabatan, SK Fungsional, SK Honorer, Surat ijin bekerja, Praktek Apoteker, Surat ijin Praktek	Bertujuan untuk mengetahui Informasi SK PNS, Kenaikan jabatan, SK Fungsional, SK Honorer, Surat ijin bekerja, Praktek Apoteker, Surat ijin Praktek	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.327	Data SKP	Informasi Sasaran Kinerja Pegawai	Bertujuan untuk mengetahui Informasi Sasaran Kinerja Pegawai	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.328	Data penilaian Kinerja	Informasi performa kinerja pegawai	Bertujuan untuk mengetahui Informasi performa kinerja pegawai	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.329	Data Pasien	Informasi identitas, kondisi, dan pelayanan yang diterima pasien	Bertujuan untuk mengetahui Informasi identitas, kondisi, dan pelayanan yang diterima pasien	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server OPD	Postgre	Internal
D.330	Data akreditasi	Informasi akreditasi rumah sakit	Bertujuan untuk mengetahui Informasi akreditasi rumah sakit	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.331	Data BOR	data ketersediaan tempat tidur,	Bertujuan untuk mengetahui data ketersediaan tempat tidur,	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.332	Data kategori Pasien Rawat	Jumlah pasien rawat inap, jalan, kondisi pasien pulang, pindah ruangan	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah pasien rawat inap, jalan, kondisi pasien pulang, pindah ruangan	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.333	Data Obygn	Jumlah ibu hamil dan melahirkan, bayi sehat atau sakit dan meninggal, jumlah pasien kuret,	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah ibu hamil dan melahirkan, bayi sehat atau sakit dan meninggal, jumlah pasien kuret,	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.334	Data Test COVID	Jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan NAR SWAB, PCR, NAR ANTIGEN	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan NAR SWAB, PCR, NAR ANTIGEN	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.335	Data klaim BPJS	Jumlah pasien yang melakukan klaim BPJS	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah pasien yang melakukan klaim BPJS	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.336	Data rujukan BPJS	Informasi pasien yang melakukan pendaftaran, rujukan internal dan eksternal, pasien rujuk balik	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pasien yang melakukan pendaftaran, rujukan internal dan eksternal, pasien rujuk balik	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.337	Data pengaduan BPJS	Informasi masalah pengaduan yang biasa ditangani atau memerlukan eskalasi ke NPJS, perhitungan denda diagnosa, informasi bayi baru lahir,	Bertujuan untuk mengetahui Informasi masalah pengaduan yang biasa ditangani atau memerlukan eskalasi ke NPJS, perhitungan denda diagnosa, informasi bayi baru lahir,	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.338	Data keaktifan peserta BPJS	Informasi identitas pasien yang memiliki keanggotaan BPJS	Bertujuan untuk mengetahui Informasi identitas pasien yang memiliki keanggotaan BPJS	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.339	Data klaim diluar pelayanan	Informasi pelayanan diluar tubuh : klaim korset, kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pelayanan diluar tubuh : klaim korset, kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.340	Data Kependudukan	Informasi Identitas Penduduk, Dan Jumlah Penduduk Pada Kecamatan	Bertujuan Untuk Mengetahui Informasi Identitas Penduduk, Dan Jumlah Penduduk Pada Kecamatan	RD 03.07 Data kependudukan	Offline	Internal OPD	Ms. Access	Internal
D.341	Data Pertanahan	Informasi Kondisi Pertanahan Dan Wilayah Kecamatan	Bertujuan Untuk Mengetahui Informasi Kondisi Pertanahan Dan Wilayah Kecamatan	RD 09.01 Data dalam negeri, RD 09.07 Data kesekretariatan negara	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.342	Data Keuangan Desa	Informasi Jumlah Keuangan Yang Dikelola Setiap Desa	Bertujuan Untuk Mengetahui Informasi Jumlah Keuangan Yang Dikelola Setiap Desa	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparatur negara,	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.343	Data Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kel	Informasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Bertujuan Untuk Mengetahui Informasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	RD 04.02 Data Sosial, RD 09.01 Data dalam negeri, RD 09.07 Data kesekretariatan negara	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.344	Data Dtk	Informasi Data Penerima Bantuan Untuk Masyarakat Miskin, Pkh, Bansos	Bertujuan Untuk Mengetahui Informasi Data Penerima Bantuan Untuk Masyarakat Miskin, Pkh, Bansos	RD 04.02 Data Sosial, RD 09.01 Data dalam negeri, RD 09.07 Data kesekretariatan negara	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.345	Data IMB	Informasi Pengajuan Izin Pendirian Bangunan	Bertujuan Untuk Mengetahui Informasi Pengajuan Izin Pendirian Bangunan	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.346	Data Pelaku Umkm	Informasi Jumlah, Jenis Umkm Kecamatan	Bertujuan Untuk Mengetahui Informasi Jumlah, Jenis Umkm Kecamatan	RD 02.01 Data Perindustrian, RD 02.10 Data usaha kecil dan menengah	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.347	Data Pemilu	Informasi Partai Politik, Peserta Pemilu	Bertujuan Untuk Mengetahui Informasi Partai Politik, Peserta Pemilu	RD 04.02 Data Sosial, RD 09.01 Data dalam negeri, RD 09.07 Data kesekretariatan negara	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.348	Data Retribusi	Informasi Iuran Tonase Sampah Kecamatan, Rute Pelayanan Kebersihan, Retribusi Kebersihan, Dan Idenititas Petugas Kebersihan	Bertujuan Untuk Mengetahui Informasi Iuran Tonase Sampah Kecamatan, Rute Pelayanan Kebersihan, Retribusi Kebersihan, Dan Idenititas Petugas Kebersihan	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.349	Data administrasi pemerintahan	Informasi tentang Data administrasi pemerintahan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi tentang Data administrasi pemerintahan	RD 09.01 Data dalam negeri, RD 03.07 Data	Offline	Internal OPD	Ms.Excel	Internal

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
				kependudukan, RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan				
D.350	Data Pegawai	Informasi Data Pegawai Desa Sekip	Bertujuan Untuk Mengetahui Informasi Data Pegawai Desa Sekip	RD 09.06 Data aparatur negara, RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.351	Data Pencacatan Kependudukan	Informasi Pencatatan Kependudukan Kelahiran, Pindah Tinggal, Kematian	Bertujuan Untuk Mengetahui Informasi Pencatatan Kependudukan Kelahiran, Pindah Tinggal, Kematian	RD 03.07 Data kependudukan	Online	Server Kominfo	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.352	Data Infrastruktur Jalan	Uuslan Pengajuan Infrastruktur Jalan Untuk Rpmdes	Bertujuan Untuk Mengetahui Uuslan Pengajuan Infrastruktur Jalan Untuk Rpmdes	RD 03.01 Data pekerjaan umum	Online	Server pihak ketiga	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.353	Data Kependudukan	Informasi Idenititas Penduduk Tetap/ Tidak Tetap Desa Setempat	Bertujuan Untuk Mengetahui Informasi Idenititas Penduduk Tetap/ Tidak Tetap Desa Setempat	RD 03.07 Data kependudukan	Online	Server Kominfo	Ms. Excel	Bagi Pakai
D.354	Data penerima manfaat	Informasi penduduk yang menerima manfaat	Bertujuan untuk mengetahui Informasi penduduk yang menerima manfaat	RD 04.02 Data Sosial, RD 09.01 Data dalam negeri, RD 09.07 Data kesekretariatan negara	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.355	Data kependudukan	Informasi anggota keluarga, identitas penduduk penghuni desa	Bertujuan untuk mengetahui Informasi anggota keluarga, identitas penduduk penghuni desa	RD 03.07 Data kependudukan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.356	Data pasien	Informasi jumlah, riwayat, identitas pasien rawat jalan dan rawat inap	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah, riwayat, identitas pasien rawat jalan dan rawat inap	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.357	Data pasien COVID	Informasi penderita COVID yang ada di RSUD terkait	Bertujuan untuk mengetahui Informasi penderita COVID yang ada di RSUD terkait	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.358	Data medis	Informasi perlengkapan medis	Bertujuan untuk mengetahui Informasi perlengkapan medis	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.359	Data vaksinasi	Jumlah pelaksanaan vaksinasi dan informasi pasien yang telah di vaksin	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah pelaksanaan vaksinasi dan informasi pasien yang telah di vaksin	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.360	Data Gizi	Informasi nilai gizi	Bertujuan untuk mengetahui Informasi nilai gizi	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.361	Data pegawai	Informasi identitas pegawai medis non medis	Bertujuan untuk mengetahui Informasi identitas pegawai medis non medis	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.362	Data Bidan	Informasi identitas khusus bidan yang bertugas	Bertujuan untuk mengetahui Informasi identitas khusus bidan yang bertugas	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.363	Data ibu hamil dan melahirkan	informasi angka kelahiran anak, riwayat persalinan, angka bayi sehat selamat/ meninggal	Bertujuan untuk mengetahui informasi angka kelahiran anak, riwayat persalinan, angka bayi sehat selamat/ meninggal	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.364	Data surat masuk	Jumlah nomor surat masuk/ keluar rumah sakit	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah nomor surat masuk/ keluar rumah sakit	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.01 Data dalam negeri	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.365	Data pengajuan surat sehat	Informasi pengajuan surat sehat untuk pasien	Bertujuan untuk mengetahui Informasi pengajuan surat sehat untuk pasien	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.366	Laporan keuangan tahunan	Informasi realisasi anggaran dibanding perencanaan anggaran	Bertujuan untuk mengetahui Informasi realisasi anggaran dibanding perencanaan anggaran	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.05 Data perencanaan pembangunan nasional, RD 09.06 Data aparaturnegara,	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.367	Aset	Informasi inventaris aset fisik non fisik dan alat medis	Bertujuan untuk mengetahui Informasi inventaris aset fisik non fisik dan alat medis	RD 04.01 Data kesehatan, RD 09.02 Data keuangan, RD	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
				10.04 Data dukung lain				
D.368	Data obat	Informasi jenis, jumlah, produksi, obat yang bereda di RSUD	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jenis, jumlah, produksi, obat yang bereda di RSUD	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.369	data SDM kesehatan	Daftar tenaga kesehatan yang dimiliki Puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui Daftar tenaga kesehatan yang dimiliki Puskesmas	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.370	data rujukan	Daftar pasien yang mendapat rujukan ke rumah sakit rekanan/terdekat dari puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui Daftar pasien yang mendapat rujukan ke rumah sakit rekanan/terdekat dari puskesmas	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.371	data vaksinasi	Daftar pelaksanaan vaksin dan penerima vaksinasi	Bertujuan untuk mengetahui Daftar pelaksanaan vaksin dan penerima vaksinasi	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.372	data penyakit lainnya;	Informasi terkait data penyakit lainnya;	Bertujuan untuk mengetahui Informasi terkait data penyakit lainnya;	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.373	data rencana kebutuhan	Daftar rencana anggaran belanja yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu	Bertujuan untuk mengetahui Daftar rencana anggaran belanja yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.01 Data dalam negeri	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.374	data perjalanan dinas;	Daftar tujuan, pelaksana, tempat perjalanan dinas	Bertujuan untuk mengetahui Daftar tujuan, pelaksana, tempat perjalanan dinas	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.01 Data dalam negeri	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.375	data daftar pegawai;	Daftar pegawai non medis Puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui Daftar pegawai non medis Puskesmas	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.376	data laporan tahunan	Informasi rencana dibanding realisasi kegiatan yang diadakan tiap tahun oleh Puskesmas setempat	Bertujuan untuk mengetahui Informasi rencana dibanding realisasi kegiatan yang diadakan tiap tahun oleh Puskesmas setempat	RD 09.02 Data keuangan, RD 09.01 Data dalam negeri	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.377	alat kesehatan dan barang	Daftar aset alat kesehatan dan non alat kesehatan yang dimiliki puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui Daftar aset alat kesehatan dan non alat kesehatan yang dimiliki puskesmas	RD 04.01 Data kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.378	data ibu dan anak	Informasi kesehatan ibu dan anak	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kesehatan ibu dan anak	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.379	data bersalin ibu	Informasi waktu, riwayat persalinan	Bertujuan untuk mengetahui Informasi waktu, riwayat persalinan	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.380	data wanita usia subur	Informasi jumlah wanita subur	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah wanita subur	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.381	data penyakit warga	Informasi masalah kesehata warga	Bertujuan untuk mengetahui Informasi masalah kesehata warga	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.382	data gizi	informasi nilai gizi, daftar posyandu	Bertujuan untuk mengetahui informasi nilai gizi, daftar posyandu	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.383	data PISPK	Informasi kesehatan keluarga	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kesehatan keluarga	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.384	data pasien rawat jalan	Jumlah, jenis penyakit pasien rawat jalan	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah, jenis penyakit pasien rawat jalan	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.385	data pasien gawat darurat	Jumlah, riwayat kesehatan pasien gawat darurat	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah, riwayat kesehatan pasien gawat darurat	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.386	data obat-obat yang dimiliki puskesmas	inforamsi obat yang dimiliki puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui inforamsi obat yang dimiliki puskesmas	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.387	hasil lab pasien	informasi hasil pemeriksaan lab pasien	Bertujuan untuk mengetahui informasi hasil pemeriksaan lab pasien	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.388	daftar keluarga yang mengikuti program KKB	daftar keluarga yang megnikuti program KKB	Bertujuan untuk mengetahui daftar keluarga yang megnikuti program KKB	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.389	data pasien yang melakukan perawatan dan pencabutan gigi dan mulut	Jumlah pasien yang melakukan perawatan gigi dan mulut	Bertujuan untuk mengetahui Jumlah pasien yang melakukan perawatan gigi dan mulut	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Bentuk Data	Tempat penyimpanan data	Aplikasi database	Akses Data
D.390	Data pasien dari UKM Puskesmas Lain	Informasi jumlah pasien sakit dari puskesmas pembantu	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah pasien sakit dari puskesmas pembantu	RD 04.01 Data Kesehatan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.391	Data pegawai	Informasi jumlah pegawai yang bekerja diluar puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui Informasi jumlah pegawai yang bekerja diluar puskesmas	RD 06.02 Data ketenagakerjaan	Online	Server pihak ketiga	MySQL	Bagi Pakai
D.392	Data kesehatan jiwa	Informasi kesehatan jiwa	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kesehatan jiwa	RD 04.01 Data Kesehatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.393	data indera	Informasi kesehatan indra	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kesehatan indra	RD 04.01 Data Kesehatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.394	data lansia	Informasi kesehatan lansia	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kesehatan lansia	RD 04.01 Data Kesehatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.395	data olahraga	Informasi kegiatan olahraga bersama puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui Informasi kegiatan olahraga bersama puskesmas	RD 04.01 Data Kesehatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.396	data gigi masyarakat puskesmas lubuk pakam	Informasi riwayat perawatan gigi pasien puskesmas	Bertujuan untuk mengetahui Informasi riwayat perawatan gigi pasien puskesmas	RD 04.01 Data Kesehatan	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal
D.397	data dan indeks kepuasan masyarakat (IKS) dan kesehatan keluarga	Informasi indeks kepuasan kesehatan keluarga	Bertujuan untuk mengetahui Informasi indeks kepuasan kesehatan keluarga	RD 09.04 Data komunikasi	Offline	Internal OPD	Ms. Excel	Internal

Lampiran 5.1 Metadata Layanan SPBE

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.001	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik	berfungsi kesesuaian kerja OPD sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan	RL 02.07	Kemendagri	Pendukung KDH dan WKDH	Seluruh OPD	Online	T	e-SAKIP REVIU
L.002	layanan koreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) seluruh OPD	Melakukan koreksi dan penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Membuat laporan penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	RL 02.06	Kemendagri	Pendukung KDH dan WKDH	Seluruh OPD	Offline	T	Manual
L.003	Layanan Monitoring Pembangunan	Memastikan pembangunan sesuai dengan sasaran	monitoring pembangunan	RL 02.06	Kemendagri	Pembinaan dan Pengawasan	Seluruh OPD	Offline	T	Manual
	TIDAK ADA LAYANAN									
L.004	Layanan Kearsipan produk hukum daerah	Digunakan untuk memberikan informasi dokumen arsip daerah	Laporan dokumen arsip daerah	RL 02.06	Kemenkumham	Pendukung KDH dan WKDH	Publik	Online	T	JDIH
L.005	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Memberikan informasi hukun daerah	Infomasi produk hukum daerah	RL 01.28	Kemenkumham	Pendukung KDH dan WKDH	Publik	Online	T	JDIH
L.006	Layanan surat menyurat antar OPD	Layanan yang digunakan untuk pendataan surat masuk dan surat keluar antar OPD	Dokumentasi surat menyurat	RL 02.06	Kemendagri	Pendukung KDH dan WKDH	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.007	Layanan Pendaftaran MTQ	Sebagai pendataan MTQ daerah	Menjaring mendataan daerah dan MTQ	RL 01.42	Kemenag	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Publik	Online	T	E-MTQ

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
	TIDAK ADA LAYANAN									
	TIDAK ADA LAYANAN									
L.008	Layanan Informasi Data sektoral	Layanan terkait informasi data barang sektoral	dokumentasi data barang sektoral	RL 02.02	LKPP	Pendukung KDH dan WKDH	Internal OPD	Offline	T	
L.009	Layanan Pengelolaan LPSE	Pengelolaan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Melaksanakan pengadaan secara elektronik, mulai dari permintaan LPSE hingga penilaian LPSE	RL 02.02	LKPP	Keuangan	Internal OPD	Offline	Y	
L.010	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Digunakan untuk pencatatan pengadaan barang dan jasa	Penyusunan laporan pengadaan barang dan jasa	RL 02.02	LKPP	Pendukung KDH dan WKDH	Seluruh OPD	Online	Y	LPSE, SIRUP, E-katalog, SIMDA Barang
L.011	Penjadwalan kegiatan bupati	Digunakan untuk Manajemen kegiatan bupati	Sebagai laporan kegiatan Bupati	RL 02.06	Daerah		Internal OPD	Offline	T	Manual
L.012	Layanan Pengawasan	Digunakan untuk pengawasan kinerja dan anggaran OPD	Pengawasan kinerja dan anggaran OPD	RL 02.05	BPKP	Pembinaan dan Pengawasan	Seluruh OPD	Offline	T	
L.013	Layanan Pengaduan publik	Digunakan untuk mendata terkait pengaduan terhadap layanan yang ada di Inspektorat	Bertujuan untuk menampung pengaduan terhadap layanan yang ada di Inspektorat	RL 01.44	Daerah	Pembinaan dan Pengawasan	Publik	Online	T	SP4N Lapor
L.014	Layanan fasilitasi anggota DPRD	Digunakan untuk memberikan fasilitas penganggaran dan pengawasan untuk DPRD, serta untuk menampung aspirasi masyarakat	sebagai fasilitas penganggaran dan pengawasan DPRD, serta bertujuan agar aspirasi masyarakat dapat didengarkan oleh DPRD	RL 02.04	Daerah	pendukung DPRD	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.015	Layanan persidangan	Layanan pendokumentasian	bertujuan untuk melakukan	RL 02.04	Daerah	pendukung DPRD	Internal OPD	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
		pengelolaan persidangan, mulai dari penyiapan agenda hingga laporan akhir kegiatan	dokumentasi kegiatan persidangan							
L.016	Layanan perjalanan dinas	Layanan yang digunakan untuk memberikan persetujuan untuk pengajuan perjalanan dinas seluruh OPD. Mulai dari pengajuan hingga pencairan perjalanan dinas	melakukan pengelolaan perjalanan dinas	RL 02.05	Kemendagri	Pendukung KDH dan WKDH	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.017	Layanan perencanaan	Digunakan untuk penyusunan perencanaan program OPD	Penyusunan dan Pelaporan perencanaan OPD	RL 02.03	Kemendagri	Perencanaan	Seluruh OPD	Online	Y	SIPD
L.018	Layanan keuangan	Digunakan untuk pencatatan keuangan OPD	Penyusunan laporan keuangan OPD	RL 02.02	Kemendagri	Perencanaan	Seluruh OPD	Online	Y	SIMDA Keuangan
L.019	layanan Dokumen Perencanaan dan Dokumentasi Penelitian	Sebagai layanan rekomendasi dan perencanaan dan penelitian	Sebagai laporan perencanaan dan penelitian	RL 02.02	Kemendagri	Perencanaan	Internal OPD	Offline	Y	
L.020	Layanan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Mengembangkan data dan informasi lingkungan	RL 02.09	Kemendagri	Perencanaan	Internal OPD	Offline	Y	
L.021	Layanan Pameran Promosi Daerah	Pelayanan promosi daerah	Memberikan informasi daerah	RL 01.44	Kemendagri	Perencanaan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.022	Layanan Pengelolaan Penanganan Kemiskinan	Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan	Melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan, mulai dari pembentukan TKPK hingga penanganan	RL 01.26	Kemendagri	Perencanaan	Seluruh OPD	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.023	Layanan Pemberian Rekomendasi Izin Tata Ruang	Pelayanan Rekomendasi Izin Tata Ruang	Memberikan Rekomendasi Izin Tata Ruang	RL 01.16	Kemendagri	Perencanaan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.024	Layanan Penyusunan RTRW	Pelayanan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Mengelola Rencana Tata Ruang Wilayah	RL 01.20	BKN	Perencanaan	Publik	Offline	Y	
L.025	Pelayanan Izin Riset dan Penelitian Mahasiswa dan Masyarakat	Sebagai layanan perizinan penelitian publik	Perizinan publik	RL 01.33	Kemendagri	Penelitian dan Pengembangan	Publik	Offline	Y	
L.026	Layanan Deteksi Kewaspadaan Dini	Pelayanan kewaspadaan dini	Memberikan layanan Kewaspadaan Dini	RL 01.44	Kemendagri	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Publik	Offline	Y	
L.027	Layanan Bantuan Keuangan Partai Politik	Pelayanan bantuan keuangan partai politik	Mengelola bantuan keuangan partai politik	RL 01.03	Kemendagri	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Publik	Offline	Y	
L.028	Layanan Pengelolaan Partai Politik	Pelayanan partai politik	Mengelola pelayanan partai politik	RL 01.03	Kemendagri	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Publik	Offline	Y	
L.029	Layanan Pemberian Hukuman Disiplin	Pelayanan hukuman disiplin	Memberikan hukuman disiplin	RL 02.06	Kemendagri	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	internal OPD	Offline	Y	
L.030	Layanan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	pelayanan disiplin pegawai	Memberikan sanksi untuk pegawai	RL 02.06	Kemendagri	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	internal OPD	Offline	Y	
L.031	Layanan Rekomendasi Penelitian	Memberikan rekomendasi penelitian	Laporan penelitian	RL 01.33	Kemendagri	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Publik	Offline	Y	
L.032	Layanan Pengelolaan	Pelayanan organisasi masyarakat	Mengelola kebutuhan organisasi masyarakat	RL 02.06	Kemendagri	Urusan Kesatuan	internal OPD	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
	Organisasi Masyarakat					Bangsa dan Politik				
L.033	layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Digunakan untuk manajemen pengelolaan barang milik daerah	Laporan pengelolaan barang milik daerah	RL 02.08	Kemendagri	Keuangan	Seluruh OPD	Online	Y	SIMDA BMD
L.034	Layanan penganggaran	Digunakan untuk penyusunan perencanaan anggaran OPD	Penyusunan dan Pelaporan perencanaan anggaran OPD	RL 02.02	Kemendagri	Keuangan	Seluruh OPD	Online	T	SIPD
L.035	Layanan Pembayaran Bumi Bangunan	Layanan Pajak Bumi dan Bangunan	Sebagai penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan masyarakat	RL 01.04	Kemendagri	Penanaman Modal	Publik	Online	T	Aplikasi PBB
L.036	Pelayanan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	Sebagai penerimaan pajak retribusi daerah	Serapan anggaran pajak daerah	RL 02.02	Kemendagri	Penanaman Modal	Internal OPD	Online	Y	Aplikasi BPHTB
L.037	Layanan Informasi Pegawai Online	Digunakan untuk memberikan informasi kepegawaian secara realtime	Informasi kepegawaian	RL 01.44	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Publik	Online	T	MySAPK
L.038	Layanan Integrasi Data dan Manajemen Kepegawaian	Digunakan untuk manajemen data kepegawaian	laporan manajemen kepegawaian	RL 02.06	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Internal OPD	Online	Y	SIMPEG
L.039	Layanan Kinerja Pegawai	Digunakan untuk pengembangan sumberdaya manusia dan Sebagai salah satu data acuan pemberian tunjangan kinerja yang diterima pegawai.	Berfungsi sebagai laporan pengembangan SDM dan kenaikan pangkat maupun tunjangan kinerja	RL 02.07	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Internal OPD	Online	Y	E-Kinerja
L.040	Layanan Pengelolaan Kinerja Instansi	Pelayanan pengelolaan kinerja instansi	Mengelola kinerja instansi	RL 02.07	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Online	Y	E-Sakip

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementrian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.041	Layanan Pengelolaan Pegawai	Pelayanan pengelolaan pegawai	Mengelola kebutuhan kepegawaian	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.042	Layanan Pengelolaan CPNS dan PPPK	Pelayanan CPNS dan PPPK	Mengelola CPNS dan PPK, seperti pendaftaran CPNS dan PPK, Penerimaan PNS dan PPK	RL 01.32	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.043	Layanan Pengelolaan PNS	Pelayanan PNS	Mengelola kebutuhan PNS	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.044	Layanan Mutasi	Pelayanan mutasi pegawai	Mengelola mutasi pegawai	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.045	Layanan Ujian Penyesuaian Ijazah	Pelayanan ujian penyesuaian ijazah	Melaksanakan ujian penyesuaian ijazah	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.046	Layanan Kenaikan Pangkat PNS	Pelayanan kenaikan pangkat PNS	Mengelola kenaikan pangkat PNS	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.047	Layanan Pelaksanaan Uji Kompetensi PNS	Pelayanan uji kompetensi PNS	Melaksanakan uji kompetensi PNS	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.048	Layanan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Pelayanan standar kompetensi jabatan	Mengelola standar kompetensi jabatan	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.049	Layanan Pengembangan Karier dan Promosi Pegawai	Pelayanan karier dan promosi pegawai	Mengelola pengembangan karier dan promosi pegawai	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.050	Layanan Tunjangan Kinerja Daerah	Pelayanan tunjangan kinerja daerah	Mengelola tunjangan kinerja daerah	RL 02.06	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.051	Layanan Evaluasi Standar Kompetensi Jabatan	Pelayanan evaluasi standar kompetensi jabatan	Melaksanakan evaluasi standar kompetensi jabatan	RL 02.06	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.052	Layanan Fasilitas Kelembagaan/Organisasi Profesi ASN	Pelayanan kelembagaan/organisasi profesi ASN	Memfasilitasi kelembagaan/organisasi profesi ASN	RL 02.08	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.053	Layanan Kegiatan Keorganisasian	Pelayanan kegiatan keorganisasian	Melaksanakan kegiatan keorganisasian	RL 02.08	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.054	Layanan Kehadiran	Pelayanan kehadiran	Mengelola kehadiran pegawai	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.055	Layanan Pengelolaan Diklat	Pelayanan pengelolaan diklat	Melaksanakan pengelolaan diklat	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.056	Layanan Pengelolaan Jabatan	Pelayanan jabatan	Mengelola jabatan	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.057	Layanan Pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian/Tewas ASN	Pelayanan pelayanan jaminan kerja	Mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian/Tewas ASN	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.058	Layanan Seleksi JPTP	Pelayanan seleksi JPTP	Persiapan seleksi JPTP	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta	Seluruh OPD	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
						Pendidikan dan Pelatihan				
L.059	Layanan Tata Hubungan Kerja	Pelayanan tata hubungan kerja	Mengelola tata hubungan kerja	RL 02.06	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.060	Layanan Pelantikan	Pelayanan Pengambilan sumpah dan jani dan pelantikan struktural dan fungsional	Pengambilan sumpah dan janji, serta melakukan pelantikan kepada jabatan struktural dan fungsional	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.061	Layanan Pemberian Hukuman Disiplin	Pemberian Hukuman Disiplin pada PNS	Pemberian penjatuhan hukuman disiplin untuk PNS	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.062	Layanan Pemberian Penghargaan	pelayanan usulan pemberian penghargaan pada Pegawai	Pemberian penghargaan pada pegawai	RL 02.04	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.063	Layanan Pembuatan Surat Edaran Pengisian LHKPN Secara Online	pelayanan pembuatan surat edaran pengisian LHKPN secara online	pembuatan surat edaran pengisian LHKPN secara online	RL 02.06	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.064	Layanan Penerbitan Kartu Taspen	pelayanan penerbitan kartu taspen	Menerbitkan kartu Taspen	RL 02.06	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.065	Layanan Usulan Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Pegawai	Pelayanan usulan kartu istri, kartu suami dan kartu pegawai	Mengelola usulan kartu istri, kartu suami dan kartu pegawai	RL 02.06	BKN	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.066	layanan pra bencana	Memberikan bantuan kebencanaan	Bantuann penanganan kebencanaan	RL 01.26	BNPB	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan	Publik	Offline	T	manual

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
						Perlindungan Masyarakat				
L.067	Layanan pasca bencana	Memberikan bantuan paska bencana	Pemberian bantuan pasca bencana	RL 01.26	BNPB	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Publik	Offline	T	manual
L.068	Layanan pencegahan bencana	Memberikan bantuan pencegahan bencana	pemberian bantuan guna pencegahan bencana	RL 01.26	BNPB	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Publik	Offline	T	manual
L.069	Layanan informasi penataan ruang publik	Memberikan informasi standart pertanahan ruang publik	Laporan hasil penataan ruang publik	RL 02.09	Kementerian PUPR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Internal OPD	Online	T	SIP3NTAR
L.070	Layanan monitoring pekerjaan umum	Bertujuan untuk memudahkan petugas PU untuk memantau setiap kegiatan/pekerjaan yang diadakan oleh Dinas PU Kabupaten Deli Serdang	Untuk memudahkan pengontrolan progres pekerjaan fisik	RL 01.20	Kementerian PUPR		Internal OPD	Offline	T	
L.071	Layanan monitoring tata ruang	Untuk keperluan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang di Kabupaten Deli Serdang	Digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang di Kabupaten Deli Serdang	RL 01.20	Kementerian PUPR		Internal OPD	Offline	T	
L.072	Layanan penyewaan alat berat	Bertujuan untuk menyediakan penyewaan alat berat untuk masyarakat	berfungsi untuk penyediaan alat berat bagi masyarakat	RL 01.16	Kementerian PUPR		Publik	Offline	T	
L.073	Layanan monitoring kinerja pegawai kesehatan	Digunakan untuk untuk monitoring kinerja pegawai kesehatan	sebagai pemantauan kinerja pegawai	RL 02.07	Daerah	Kesehatan	Internal OPD	Online	Y	PMPRB

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.074	layanan gawat darurat kepada masyarakat	Sebagai layanan kesehatan publik	Layanan kesehatan publik	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Online	Y	Public Service Center
L.075	Layanan Berobat Jalan Pasca Covid	Pelayanan berobat jalan pasca covid	Mengelola pengobatan jalan pasca covid	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.076	Layanan Isoman Di Isolasi Terfokus	Pelayanan isoman di isolasi terfokus	Melaksanakan proses isoman di isolasi terfokus	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.077	Layanan Isoman Di Rumah Pasien	Pelayanan isoman di rumah pasien	Melaksanakan proses isoman di rumah pasien	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.078	Pelayanan Pelacakan Kontak Erat	Pelayanan prosedur pelacakan kontak erat	Mengelola pelacakan kontak erat	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.079	Layanan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Covid-19 di Puskesmas	Pelayanan rujukan pelayanan kesehatan covid-19 di puskesmas	Mengelola rujukan pelayanan kesehatan covid-19 di puskesmas	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.080	Layanan Izin Klinik Kecantikan	Bertujuan untuk persyaratan Izin Operasional klinik kecantikan	Berfungsi untuk pengelolaan klinik kecantikan	RL 01.16	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.081	Layanan Rekomendasi Perizinan Tenaga kesehatan	Memberikan Rekomendasi untuk Izin Praktek Tenaga Kesehatan	Berfungsi untuk pengelolaan praktek tenaga kesehatan	RL 01.16	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.082	Layanan kesehatan masyarakat	Bertujuan untuk memberkan layanan kesehatan masyarakat berbasis elektronik	Mempermudah pendataan/proses pelayanan kesehatan di puskesmas	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.083	Layanan Pendataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bertujuan untuk pemetaan keadaan SDM, perencanaan SDM, pendayagunaan SDM, pengadaan SDM, dan peningkatan mutu SDM.	Mendukung proses SDM Kesehatan	RL 01.32	Kemenkes	Kesehatan	Internal OPD	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.084	Layanan Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	Bertujuan untuk menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.	Menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.	RL 02.09	Kemenkes	Kesehatan	Internal OPD	Offline	Y	
L.085	Layanan Farmasi	Bertujuan untuk melakukan pendataan obat dan stok obat yang ada	untuk menghitung stok obat	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Internal OPD	Offline	Y	
L.086	Layanan Informasi Manajemen Air Minum dan Sanitasi	Untuk manajemen ketersediaan air minum dan sanitasi	Sebagai laporan pengelolaan air minum dan sanitasi	RL 02.09	KemenPUP R	Lingkungan Hidup	Internal OPD	Online	T	SIMANTAN
L.087	layanan izin mendirikan bangunan	Sebagai pelayanan perizinan mendirikan bangunan	Untuk manajemen dan tata kelola bangunan daerah	RL 01.20	KemenPUP R	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Publik	Offline	T	
L.088	Layanan hibah tanah	Mendata tanah hibah	Laporan tanah hibah	RL 02.06	KemenPUP R	Pertanahan	Internal OPD	Offline	T	
L.089	Layanan perawatan gedung	Perawatan gedung pemerintahan	Laporan hasil perawatan gedung	RL 02.06	KemenPUP R	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Internal OPD	Offline	T	
L.090	Layanan Pendataan rumah tidak layak huni (RTLH)	Untuk melakukan Pendataan rumah tidak layak huni (RTLH)	Untuk memberikan bantuan rumah kepada masyarakat	RL 01.20	KemenPUP R	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Publik	Offline	Y	
L.091	Layanan rekomendasi UKL-UPL	Memberikan rekomendasi UKL dan UPL (upaya pengelolaan lingkungan)	Memberikan arahan terkait pengelolaan lingkungan Memberikan rekomendasi UKL-UPL	RL 01.41	KemenLHK	Lingkungan Hidup	Publik	Offline	Y	
L.092	Layanan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan	Memberikan verifikasi terkait kesanggupan pengelolaan dan	Sebagai lapran kesanggupan pengelolaan dan	RL 01.41	KemenLHK	Lingkungan Hidup	Publik	Online	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
	pemantauan lingkungan hidup (SPPLH)	pemantauan lingkungan hidup	pemantauan lingkungan hidup							
L.093	Layanan Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup (SKKLH)	Verifikasi kelayakan lingkungan hidup	Untuk laporan terkait kelayakan lingkungan hidup Mengelola Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup (SKKLH)	RL 01.41	KemenLHK	Lingkungan Hidup	Publik	Offline	Y	
L.094	Layanan pengelolaan persampahan	Bertujuan untuk mengelola permintaan pengangkutan sampah oleh masyarakat.	Berfungsi untuk menampung permintaan pengangkutan sampah untuk selanjutnya diverifikasi dan penerbitan MOU persampahan bagi yang telah memenuhi kriteria.	RL 01.41	KemenLHK	Lingkungan Hidup	Publik	Offline	Y	
L.095	Layanan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Bertujuan untuk mengelola dan memantau terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan	Berfungsi untuk menampung permohonan UKL-UPL untuk selanjutnya diverifikasi dan dilakukan penerbitan dokumen UKL-UPL beserta izin dan rekomendasi lingkungan bagi pihak yang memenuhi kriteria.	RL 01.41	KemenLHK	Lingkungan Hidup	Publik	Offline	Y	
L.096	Deli Serdang Mall	Sebagai media pengenalan dan promosi produk UMKM daerah	Untuk memberikan informasi publik terkait produk daerah	RL 01.13	Daerah	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Publik	Online	T	http://www.deliserdangmall.com

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.097	Layanan Pendirian Koperasi	Pelayanan pendirian koperasi	Mengelola pendirian koperasi	RL 01.13	Kemenkop ukm	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Publik	Offline	Y	
L.098	Layanan Identifikasi Keaktifan Koperasi	pelayan identifikasi keaktifan koperasi tidak aktif untuk usulan pembubaran	Melakukan pendataan terkait koperasi yang masih aktif, sehingga dapat memberikan usulan pembubaran untuk koperasi yang sudah tidak aktif	RL 01.13	Kemenkop ukm	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Publik	Offline	Y	
L.099	Layanan Inventarisasi Permasalahan Kelembagaan Dan Usaha Koperasi.	Pelayanan menginventarisasi permasalahan kelembagaan dan usaha koperasi	melakukan inventaris permasalahan kelembagaan dan usaha koperasi	RL 01.13	Kemenkop ukm	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	publik	Offline	Y	
L.100	Layanan Pelayanan Izin Simpan Pinjam	Pelayanan simpan pinjam	Mengelola izin simpan pinjam	RL 01.13	Kemenkop ukm	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Publik	Offline	Y	
L.101	Layanan Pembukaan Kantor Cabang	Pelayanan kantor cabang	Mengelola pembukaan kantor cabang	RL 01.13	Kemenkop ukm	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Publik	Offline	Y	
L.102	Layanan Pemeriksaan Kelembagaan Usaha Koperasi	Pelayanan pemeriksaan kelembagaan usaha koperasi	Memeriksa kelembagaan usaha koperasi	RL 01.13	Kemenkop ukm	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Publik	Offline	Y	
L.103	Layanan Pengelolaan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Koperasi Dan Lembaga Keuangan Mikro.	Mengelola penerapan peraturan perundang-undangan bagi koperasi dan lembaga keuangan mikro.	Menerapkan peraturan perundang-undangan bagi koperasi dan lembaga keuangan mikro.	RL 01.13	Kemenkop ukm	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Publik	Offline	Y	
L.104	Layanan Manajemen Data	Digunakan untuk manajemen data	laporan manajemen pegawai dinas pendidikan	RL 02.06	Kemendikbud	Pendidikan	Internal OPD	Online	T	SIMPAI

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
	Kepegawaian di Dinas Pendidikan	kepegawaian dinas pendidikan								
L.105	Layanan Akuntabilitas Dana BOS	Digunakan untuk pertanggung jawaban kesesuaian penggunaan dana BOS	Berfungsi untuk laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS	RL 02.07	Kemendikbud	Pendidikan	Internal OPD	Online	Y	Mesrah Bertuah
L.106	Layanan data pokok pendidikan	digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah	Laporan data pendidikan	RL 02.06	Kemendikbud	Pendidikan	Internal OPD	Online	Y	Datok Soltan
L.107	Layanan SIOP (surat operasional sekolah)	Pelayanan SIOP	Mengelola SIOP	RL 01.31	Kemendikbud	Pendidikan	Publik	Offline	Y	
L.108	Layanan manajemen pendidikan	Melakukan pengelolaan data administratif sekolah, penyiapan Kepala Sekolah, mutasi guru, data guru karyawan siswa, hingga pengelolaan dana BOS sehingga perencanaan, pemanfaatan, pelaporan dan pendapatan asetnya	Melakukan manajemen data pendidikan secara menyeluruh	RL 01.31	Kemendikbud	Pendidikan	Publik	Offline	T	
L.109	Layanan Rekomendasi Gudang	Memberikan surat ijin penyediaan gudang	Laporan perizinan penyediaan gudang	RL 01.16	Kementerian Perindustrian	Perdagangan	Publik	Offline	Y	
L.110	Layanan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Pelayanan distribusi pupuk bersubsidi	Melaksanakan distribusi pupuk bersubsidi	RL 01.06	Kementerian Perindustrian	Perdagangan	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.111	Layanan Stock Opname	Pelayanan stock opname	Mengelola stock opname	RL 01.06	Kementerian Perindustrian	Perdagangan	Publik	Offline	Y	
L.112	Layanan Izin Usaha Industri	Pelayanan izin usaha industri	Mengelola izin usaha industri	RL 01.16	Kementerian Perindustrian	Perdagangan	Publik	Offline	Y	
L.113	Layanan Pelaksanaan Pameran Dagang Lokal	mempromosikan pameran dagang lokal	sebagai media pelaksanaan pameran hasil dagang lokal	RL 01.06	Kementerian Perindustrian	Perdagangan	Publik	Offline	Y	
L.114	Layanan Pemantauan Harga Dan Stok Barang Pokok Dan Barang Penting	Pelayanan pemantauan harga dan stok barang pokok dan barang penting	Memantau harga dan stok barang pokok dan barang penting	RL 02.06	Kementerian Perdagangan	Perdagangan	Internal OPD	Offline	Y	
L.115	Layanan Penerimaan Produk Masuk Mitra P3UD	Pelayanan penerimaan produk masuk mitra P3UD	Menerima produk masuk mitra	RL 02.06	Kementerian Perdagangan	Perdagangan	Internal OPD	Offline	Y	
L.116	Layanan Pengawasan Distribusi Barang Pokok, Penting Dan Barang Yang Diatur	Pelayanan pengawasan distribusi barang pokok, penting dan barang yang diatur	Mengawasi distribusi barang pokok, penting dan barang yang diatur	RL 02.06	Kementerian Perdagangan	Perdagangan	Internal OPD	Offline	Y	
L.117	Layanan Pengelolaan Pameran Dagang IKM	Pelayanan fasilitasi IKM dalam kegiatan pameran	Memberikan fasilitas kebutuhan IKM dalam kegiatan pameran	RL 01.06	Kemen Koperasi dan UKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Publik	Offline	Y	
L.118	Layanan Pengelolaan Teknologi Industri	Pelayanan teknologi industri	Memberikan pelatihan teknologi industri dan pemanfaatan teknologi industri	RL 01.34	Kementerian Perindustrian	Perdagangan	Publik	Offline	Y	
L.119	Layanan Penjualan Produk	Pelayanan penjualan produk	Laporan penjualan produk	RL 01.06	Kementerian an	Perdagangan	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
					Perindustrian					
L.120	Layanan Penyajian Data Potensi Industri	Pelayanan data potensi industri	Menyajikan data potensi industri	RL 01.05	Kementerian Perindustrian	Perdagangan	Publik	Offline	Y	
L.121	Layanan Penyelenggaraan Pasar Murah	Pelayanan pasar murah	Menyelenggarakan pasar murah	RL 01.06	Kementerian Perdagangan	Perdagangan	Publik	Offline	Y	
L.122	Layanan Sosialisasi Pengembangan Produk Ekspor	Pelayanan sosialisasi produk ekspor	Memberikan informasi terkait pengembangan produk ekspor	RL 01.44	Kementerian Perindustrian	Perdagangan	Publik	Offline	Y	
L.123	Layanan Tera	Pelayanan Tera	Tera Ulang Tangki Ukur Mobil (Tum)	RL 01.06	Direktorat Metrologi	Perdagangan	Publik	Offline	Y	
L.124	Layanan IKM	Untuk Memudahkan Para Pelaku IKM Untuk Meningkatkan Kualitas Usaha Dari Segala Aspek Khususnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Agar Lebih Dikenal Dalam Lingkup Yang Lebih Luas Baik Nasional Maupun Internasional Sesuai Dengan Prosedur Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah.	Peningkatan usaha lingkungan	RL 01.41	Kemen Koperasi dan UKM	Perdagangan	Publik	Online	Y	https://limbatdelimas.deliserdangkab.go.id/login
L.125	Layanan e-commerce produk lokal	Membantu pemasaran produk daerah	Memasarkan produk daerah	RL 01.44	Kemen Koperasi dan UKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Publik	Online	Y	https://galerip3ud.com/
L.126	layanan informasi pariwisata	Sebagai layanan informasi pariwisata daerah	Laporan pengelolaan daerah pariwisata	RL 01.15	Kememparekraf	Pariwisata	Publik	Online	Y	SI DEWI DESA https://w

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
										ww.sidew idesa.com
L.127	Fasilitator layanan pembuatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Memberikan Rekomendasi pada usaha pariwisata untuk diteruskan di dinas DPMPTSP	Laporan pengelolaan daerah pariwisata	RL 01.15	Kememparekraf	Pariwisata	Publik	Online	Y	PTDUP
L.128	Monitoring dan evaluasi Usaha Pariwisata	melakukan monitoring dan evaluasi usaha pariwisata pada Kabupaten Deli Serdang	melakukan monitoring dan evaluasi usaha pariwisata pada Kabupaten Deli Serdang	RL 02.06	Kememparekraf	Pariwisata	Internal OPD	Offline	Y	
L.129	Pengelolaan Website Profile	Pelayanan pengelolaan website profile	melakukan pengelolaan website profile	RL 02.06	Daerah	Pariwisata	Publik	Online	Y	
L.130	Pemilihan Duta Wisata Deli Serdang	pelayanan pemilihan duta wisata deli serdang	Melakukan pemilihan duta wisata pada deli serdang	RL 01.35	Kememparekraf	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	
L.131	Mengikuti Pameran Pariwisata Dalam Daerah	digunakan untuk ikut serta pada pameran pariwisata dalam daerah	mengenalkan pariwisata dalam daerah	RL 02.06	Kememparekraf	Pariwisata	Internal OPD	Offline	Y	
L.132	Diklat bela negara dan wawasan kebangsaan	pelayanan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan	pengadaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan	RL 02.06	Daerah	Kepemudaan dan Olah Raga	Internal OPD	Offline	Y	
L.133	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	pelayanan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	pengadaan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	RL 02.06	BKN	Kepemudaan dan Olah Raga	Internal OPD	Offline	Y	
L.134	Kewirausahaan	pelayanan kewirausahaan	pengadaan kewirausahaan	RL 01.35	KemenKWU	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	
L.135	Seleksi & pembentukan Tim Paskibraka	melakukan seleksi untuk pemberntukan tim paskibraka	menentukan tim Paskibraka	RL 01.35	Kemenpora	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	
L.136	Seleksi & pembentukan pengiriman atlet	melakukan seleksi untuk pembentukan dan pengiriman atlet	menentukan atlet yang akan dikirim	RL 01.36	Kemenpora	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.137	Bimtek dan sertifikasi tenaga keolahragaan	melakukan bimtek dan sertifikasi tenaga keolahragaan	mengadakan bimtek dan sertifikasi tenaga keolahragaan	RL 01.36	Kemenpora	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	
L.138	Penyelenggaraan event Prestasi	menyelenggarakan event prestasi	pengadaan event prestasi	RL 01.36	Kemenpora	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	
L.139	Penghargaan Bidang Olahraga	melakukan pemberian penghargaan pada bidang olahraga	Memberikan penghargaan pada bidang olahraga	RL 01.36	Kemenpora	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	
L.140	Penyelenggaraan event Olahraga Tradisional	menyelenggarakan event olahraga tradisional	mengadakan event olahraga tradisional	RL 01.36	Kemenpora	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	
L.141	Legalisasi Sertifikat/Piagam Bidang Olahraga	mengadakan legalisasi sertifikasi/piagam bidang olahraga	memberikan legalisasi sertifikasi/piagam bidang olahraga	RL 01.36	Kemenpora	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	
L.142	Seleksi Atlit Pelajar	melakukan seleksi atlit pelajar	menentukan atlit pelajar	RL 01.36	Kemenpora	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	
L.143	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	melakukan peningkatan sarana dan prasarana pada bidang olahraga	melakukan peningkatan sarana dan prasarana pada bidang olahraga	RL 01.36	Kemenpora	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	
L.144	Pemberiaan rekomendasi bidang keolahragaan	memberikan rekomendasi bidang keolahragaan	pemberian rekomendasi bidang keolahragaan	RL 01.36	Kemenpora	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	
L.145	Pembentukan dan pengiriman Tim Olahraga Masyarakat	Melakukan pembentukan dan pengiriman tim olahraga masyarakat	pengiriman tim olahraga masyarakat	RL 01.36	Kemenpora	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	
L.146	Penyelenggaraan Event Olahraga Rekreasi	menyelenggarakan event olahraga rekreasi	mengadakan event olahraga rekreasi	RL 01.36	Kemenpora	Kepemudaan dan Olah Raga	Publik	Offline	Y	
L.147	Kebersihan Museum Deli Serdang	memberikan pelayanan kebersihan museum deli serdang	menjaga kebersihan museum deli serdang	RL 01.43	Kemendikbud	Kebudayaan	Publik	Offline	Y	
L.148	Pemeliharaan Koleksi Museum	melakukan pemeliharaan koleksi	memelihara koleksi museum daerah	RL 01.43	Kemendikbud	Kebudayaan	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
	Daerah Deli Serdang	museum daerah deli sedang								
L.149	Keamanan Museum Daerah Deli Serdang	menjaga keamanan museum daerah	Menjaga keamanan museum daerah	RL 01.43	Kemendikbud	Kebudayaan	Publik	Offline	Y	
L.150	Pemeliharaan Gedung Museum Daerah Deli Serdang	melakukan pemeliharaan gedung museum daerah Deli Serdang	memelihara gedung museum daerah Deli Serdang	RL 01.43	Kemendikbud	Kebudayaan	publik	Offline	Y	
L.151	Pembuatan Materi Promosi Museum Daerah Deli Serdang	membuat materi untuk promosi museum daerah Deli Serdang	melakukan promosi museum daerah Deli Serdang	RL 02.06	Kemendikbud	Kebudayaan	Internal OPD	Offline	Y	
L.152	layanan Pengunjung Museum Deli Serdang	Pelayanan pengunjung museum Deli Serdang	Memberikan layanan untuk pengunjung museum Deli Serdang	RL 01.43	Kemendikbud	Kebudayaan	Publik	Offline	Y	
L.153	Penyimpanan Koleksi Museum Daerah Deli Serdang	melakukan penyimpanan koleksi museum daerah Deli Serdang	menyimpan koleksi museum daerah Deli Serdang	RL 02.06	Kemendikbud	Kebudayaan	Internal OPD	Offline	Y	
L.154	Pergerakan Koleksi Museum Daerah Deli Serdang	Melakukan pergerakan koleksi museum daerah Deli Serdang	Melakukan pergerakan koleksi museum daerah Deli Serdang	RL 02.06	Kemendikbud	Kebudayaan	Internal OPD	Offline	Y	
L.155	Pengkajian Koleksi Museum Daerah Deli Serdang	melakukan kajian koleksi museum daerah deli serdang	mengkaji koleksi museum daerah deli serdang	RL 02.06	Kemendikbud	Kebudayaan	Internal OPD	Offline	Y	
L.156	Peminjaman Koleksi Museum Daerah Deli Serdang	melakukan pendataan peminjaman koleksi museum daerah deli serdang	pendataan peminjaman koleksi museum daerah deli serdang	RL 02.06	Kemendikbud	Kebudayaan	Internal OPD	Offline	Y	
L.157	Pencatatan Koleksi Museum Daerah Deli Serdang	melakukan pendataan koleksi yang terdapat pada museum daerah deli serdang	mendata koleksi yang terdapat pada museum daerah	RL 02.06	Kemendikbud	Kebudayaan	Internal OPD	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.158	Pengelolaan Surat Keluar Museum Daerah Deli Serdang	mengelola surat keluar pada museum daerah	mengelola surat keluar pada museum daerah	RL 02.06	Kemendikbud	Kebudayaan	Internal OPD	Offline	Y	
L.159	Pengadaan Koleksi Museum Daerah Deli Serdang	melakukan pengadaan koleksi museum daerah	melakukan pengadaan koleksi museum daerah	RL 02.06	Kemendikbud	Kebudayaan	Internal OPD	Offline	Y	
L.160	Pengelolaan Keuangan Museum Daerah Deli Serdang	melakukan pengelolaan keuangan museum daerah	mengelola keuangan museum daerah	RL 02.06	Kemendikbud	Kebudayaan	Internal OPD	Offline	Y	
L.161	Kegiatan Edukasi Museum Daerah Deli Serdang	mengadakan kegiatan edukasi museum daerah	mengadakan kegiatan edukasi museum daerah	RL 01.43	Kemendikbud	Kebudayaan	Publik	Offline	Y	
L.162	Pelayanan Penelitian Museum Daerah Deli Serdang	melakukan pelayanan penelitian museum daerah	memberikan pelayanan penelitian museum daerah	RL 01.43	Kemendikbud	Kebudayaan	Publik	Offline	Y	
L.163	Pengelolaan Media Sosial Museum Daerah Deli Serdang	melakukan pengelolaan media sosial museum daerah	pengelolaan media sosial museum daerah untuk promosi	RL 01.43	Kemendikbud	Kebudayaan	Publik	Offline	Y	
L.164	Tata Pamer Museum Daerah Deli Serdang	melakukan pameran museum daerah	melakukan pameran museum daerah untuk mengenalkan museum ke masyarakat	RL 01.43	Kemendikbud	Kebudayaan	Publik	Offline	Y	
L.165	Layanan destinasi wisata deli serdang	Memudahkan masyarakat untuk mengenal potensi wisata yang ada di Deli Serdang	Sebagai layanan pengenalan destinasi wisata deli serdang	RL 01.15	Kemenparekraf	Pariwisata	Publik	Online	Y	Si dewi desa (playstore)
L.166	Layanan Jemput Bola	Pelayanan berkeliling ke lokasi-lokasi seperti kecamatan, desa, dan lapas, dan lokasi strategis lainnya untuk pencatatan akta dan kematian	pencatatan akta dan akta kematian	RL 01.23	Ditjen Dukcapil Kemendagri	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.167	Layanan Kependudukan	Pelayanan pengurusan legalisir dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	legalisir dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	RL 01.23	Ditjen Dukcapil Kemendagri	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Offline	Y	
L.168	Layanan Pemberian Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memberikan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RL 01.23	Ditjen Dukcapil Kemendagri	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Offline	Y	
L.169	Layanan Pembuatan akta kelahiran	Pelayanan pembuatan akta kelahiran	menerbitkan akta kelahiran	RL 01.23		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Offline	Y	
L.170	Layanan pembuatan akta perkawinan	Pelayanan pembuatan akta perkawinan	menerbitkan akta perkawinan	RL 01.23		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Offline	Y	
L.171	layanan pembuatan akta perceraian	Pelayanan pembuatan akta perceraian	menerbitkan akta perceraian	RL 01.23		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Offline	Y	
L.172	layanan pembuatan akta perubahan status anak	Pelayanan pembuatan akta perubahan status anak	menerbitkan akta perubahan status anak	RL 01.23		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Offline	Y	
L.173	layanan pembuatan akta kematian	Pelayanan pembuatan akta kematian	menerbitkan akta kematian	RL 01.23		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Offline	Y	
L.174	layanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	Pelayanan pembuatan akta perubahan status kewarganegaraan	menerbitkan akta perubahan status kewarganegaraan	RL 01.23		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Offline	Y	
L.175	Layanan pendaftaran NIK	Pelayanan pendaftaran NIK	Melaksanakan pendaftaran NIK	RL 01.23	Ditjen Dukcapil Kemendagri	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Online	Y	SIAK

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.176	Layanan Penerbitan Kutipan Akta Kedua	Pelayanan penerbitan akta kedua	Menerbitkan kutipan akta kedua	RL 01.23	Ditjen Dukcapil Kemendagri	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Online	Y	SIAK
L.177	Layanan pengelolaan identitas penduduk	Pelayanan penerbitan kartu identitas anak, surat keterangan tempat tinggal, data WNA, surat pindah datang penduduk.	Mengelola identitas penduduk mulai dari kartu identitas hingga data penduduk.	RL 01.23	Ditjen Dukcapil Kemendagri	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Online	Y	SIAK
L.178	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan seperti pengajuan hak akses SIAK, Pemeliharaan SIAK, perubahan status kewarganegaraan	RL 01.23	Ditjen Dukcapil Kemendagri	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Online	Y	SIAK
L.179	Layanan Percetakan KK	Pelayanan penerbitan KK	Mengelola percetakan KK	RL 01.23	Ditjen Dukcapil Kemendagri	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Online	Y	SIAK
L.180	Layanan Percetakan KTP	Pelayanan penerbitan KTPEL	Mengelola percetakan KTPEL	RL 01.23	Ditjen Dukcapil Kemendagri	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Publik	Online	Y	SIAK
L.181	Layanan Alur Keluar / Masuk Alat Kontraspesi	Pelayanan alur keluar atau masuk alat kontraspesi	Mengelola alur keluar atau masuk alat kontraspesi	RL 01.25	BKKBN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	Offline	Y	
L.182	Layanan informasi publik	Pelayanan informasi publik	Memberikan informasi publik	RL 01.44	BKKBN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	Offline	Y	
L.183	Layanan Pengendalian KB	Pelayanan pengendalian KB	Pencatatan dan Pelaporan	RL 01.23	BKKBN	Pengendalian Penduduk dan	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementrian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
			Pengendalian Lapangan KB			Keluarga Berencana				
L.184	Layanan Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pelayanan lomba institusi masyarakat pedesaan	Mengelola lomba institusi masyarakat pedesaan	RL 01.45	BKKBN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	Offline	Y	
L.185	Layanan Mobil Unit Penerangan (Mupen) KB	Pelayanan mobil unit penerangan (Mupen) KB	Mengelola mobil unit penerangan (Mupen) KB	RL 01.23	BKKBN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	Offline	Y	
L.186	Layanan Pelaksanaan Pendataan Keluarga	Pelayanan pendataan keluarga	Melaksanakan pendataan keluarga	RL 01.23	BKKBN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	Offline	Y	
L.187	Layanan Pembentukan PIK Remaja (PIK.R)	Pelayanan pembentukan PIK remaja (PIK.R)	Melaksanakan pembentukan PIK remaja (PIK.R)	RL 01.35	BKKBN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	Offline	Y	
L.188	Layanan Pembinaan Kelompok UPPKS	Pelayanan pembinaan kelompok UPPKS	Meningkatkan pendapatan keluarga sejahtera	RL 01.23	BKKBN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	Offline	Y	
L.189	Layanan Pembinaan Tribina (BKB, BKR dan BKL)	Pelayanan pembinaan tribina (BKB, BKR, dan BKL)	Memberikan pembinaan/pelatihan (BKB, BKR, dan BKL)	RL 01.23	BKKBN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	Offline	Y	
L.190	Layanan Pencatatan dan Pelaporan Klinik KB	Pelayanan pencatatan dan pelaporan klinik KB	Mencatat pelaporan klinik KB	RL 01.25	BKKBN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	Offline	Y	
L.191	Layanan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Pelayanan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT)	Mengelola pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT)	RL 01.27	BKKBN	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.192	Layanan Pendaftaran Klinik KB	Pelayanan pendaftaran klinik KB	Mengelola pendaftaran klinik KB	RL 01.25	BKKBN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	Offline	Y	
L.193	Layanan Pusat Pemberdayaan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak	Pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan anak	RL 01.27	BKKBN	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Publik	Offline	Y	
L.194	layanan KB	Sebagai layanan pengendalian penduduk	Memberikan pengarahan masyarakat KB	RL 01.23	BKKBN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	Online	Y	SIGA (sistem informasi keluarga) KBBKN
L.195	Layanan penganggaran Desa	Digunakan untuk penyusunan perencanaan anggaran Desa	Penyusunan dan Pelaporan perencanaan anggaran OPD	RL 02.02	Kemendes	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Seluruh OPD	Online	Y	OM SPAN, SISKUDES
L.196	Layanan Keuangan Desa	Digunakan untuk pencatatan keuangan desa	Penyusunan laporan keuangan desa	RL 02.02	Kemendes	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Seluruh OPD	Online	Y	SISKUDES
L.197	Layanan Penyusunan LKPJ	Pelayanan penyusunan LKPJ	Menyusun LKPJ	RL 02.06	Kemendes	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Internal OPD	Offline	Y	
L.198	Layanan Penyusunan LPPD	Pelayanan penyusunan LPPD	Menyusun LPPD	RL 02.06	Kemendes	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Internal OPD	Offline	Y	
L.199	Layanan manajemen dan informasi desa	Melihat update perkembangan desa menjadi lebih sistematis, data lebih akurat dan sebagai bahan perencanaan pembangunan kedepan, pemberian bantuan dana desa, melakukan	Untuk melakukan perencanaan pembangunan desa, pemberian bantuan dana desa, melakukan pendataan pemberdayaan masyarakat desa	RL 02.06	Kemendes	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Internal OPD	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
		pendataan pemberdayaan masyarakat desa								
L.200	Layanan asuransi nelayan	layanan yang digunakan untuk asuransi nelayan	memberikan asuransi kepada pelayan	RL 01.40	KKP	Kelautan dan Perikanan	Publik	Offline	Y	
L.201	Layanan legalitas hak milik tanah nelayan	layanan legalitas hak milik tanah nelayan	memberikan legalitas hak milik tanah nelayan	RL 01.22	KKP	Kelautan dan Perikanan	Publik	Offline	Y	
L.202	layanan komunikasi nelayan	layanan komunikasi nelayan	memberikan komunikasi untuk para nelayan	RL 01.45	KKP	Kelautan dan Perikanan	Publik	Offline	Y	
L.203	layanan Informasi nelayan	layanan informasi nelayan	memberikan informasi terkait nelayan	RL 01.44	KKP	Kelautan dan Perikanan	Publik	Offline	Y	
L.204	Layanan Bidang Perikanan Tangkap	Pelayanan administrasi bidang perikanan tangkap	Mengelola administrasi	RL 02.06	KKP	Kelautan dan Perikanan	Internal OPD	Offline	Y	
L.205	Layanan Bidang perikanan budidaya	Pelayanan administrasi bidang perikanan budidaya	Mengelola administrasi	RL 02.06	KKP	Kelautan dan Perikanan	Internal OPD	Offline	Y	
L.206	layanan Pendaftaran uji berkala secara online	Sebagai layanan pengujian kendaraan berkala publik	memberikan laporan pengujian kendaraan	RL 01.19	Kemenhub	Perhubungan	Publik	Online	Y	E-Kir
L.207	Layanan perpakiran	Bertujuan untuk memberikan pemilik parkir untuk mengelola parkir di wilayah tersebut.	Mengelola permintaan ijin perparkiran hingga menerbitkan surat ijin perparkiran bagi pihak yang memenuhi syarat.	RL 01.19	Kemenhub	Perhubungan	Publik	Offline	Y	
L.208	layanan pengaduan sosial	Layanan jaminan keamanan penduduk	Pengaduan sosial	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Online	T	Call Center Dinsos
L.209	Layanan Bantuan Rehab Taman Makam Pahlawan	Pelayanan rehab taman makam pahlawan	Melaksanakan bantuan rehab taman makam pahlawan	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementrian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.210	Layanan Korban Tindak Kekerasan	Pelayanan korban tindak kekerasan	Menangani korban tindak kekerasan	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	
L.211	Layanan Korban Trafficking	Pelayanan korban trafficking	Menangani korban trafficking	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	
L.212	Layanan Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Pelayanan pekerja migran bermasalah sosial	Mengelola pekerja migran bermasalah sosial	RL 01.32	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	
L.213	Layanan Pelatihan Karang Taruna	Pelayanan pelatihan karang taruna	Memberikan pelatihan karang taruna	RL 01.35	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	
L.214	Layanan Pelayanan LK3	Menggali informasi mengenai permasalahan psikososial keluarga	sebagai salah satu solusi untuk permasalahan psikososial keluarga	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	
L.215	Layanan penanganan anak	Pelayanan penanganan perlindungan anak, penanganan anak balita terlantar, anak berhadapan hukum, anak jalanan, anak telantar, anak korban tindak kekerasan, anak penyandang disabilitas	Mengelola penanganan perlindungan anak, penanganan anak balita terlantar, anak berhadapan hukum, anak jalanan, anak telantar, anak korban tindak kekerasan, anak penyandang disabilitas	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	
L.216	Layanan Penanganan Lanjut Usia Terlantar	Pelayanan penanganan lanjut usia terlantar	Menangani lanjut usia yang terlantar	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	
L.217	Layanan Penanganan Penerima Bantuan Orang Dengan Kecacatan (ODK) Berat	Pelayanan penanganan penerima bantuan orang dengan kecacatan (ODK) Berat	Mengelola penanganan penerima bantuan orang dengan kecacatan (ODK) Berat	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	
L.218	Layanan Perjanjian Anak Asuh	Pelayanan perjanjian anak asuh	Mengelola perjanjian anak asuh	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	
L.219	Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Susila Pada Dinas Sosial	Pelayanan rehabilitasi sosial bagi tuna susila	Mengelola rehabilitasi sosial bagi tuna susila	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.220	Layanan Tanda Daftar ORSOS	Pelayanan tanda daftar organisasi sosial	Mengelola tanda daftar organisasi sosial	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	
L.221	Layanan Verifikasi Orang Tidak Mampu	Pelayanan verifikasi orang tidak mampu	Memverifikasi data orang tidak mampu	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	
L.222	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Mengelola Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Online	Y	
L.223	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Mempermudah masyarakat mendapat informasi tentang bantuan pemerintah	Sebagai rujukan bantuan sosial masyarakat	RL 01.26	Kemensos	Sosial	Publik	Offline	Y	Manual
L.224	Layanan Bantuan Sosial	Bertujuan membantu dalam pemberian pelayanan bantuan untuk masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan, misal terdampak bencana alam	Membantu dalam pemberian pelayanan bantuan untuk masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan,	RL 01.26				Offline	Y	
L.225	Layanan informasi pekerjaan	Sebagai informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat	Untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Online	Y	KARIRHUB
L.226	Layanan Pendaftaran Program Magang Ke Jepang	Pelayanan pendaftaran program magang ke Jepang	Mengelola pendaftaran program magang ke Jepang	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.227	Layanan Anjuran Mediasi PPHI	Pelayanan anjuran mediasi PPHI	Mengelola anjuran mediasi PPHI	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.228	Layanan Calon Peserta Pelatihan	Pelayanan calon seleksi peserta pelatihan	Mengelola calon seleksi peserta pelatihan	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.229	Layanan Fasilitasi PPHI Dan PHK	Pelayanan fasilitasi PPHI dan PHK	Mengelola fasilitasi PPHI dan PHK	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.230	Layanan FGD Perundang-Undangan PPHI	Pelayanan FGD perundang-undangan PPHI	FGD perundang-undangan PPHI	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.231	Layanan JAMSOSTEK	Pelayanan JAMSOSTEK	Mengelola JAMSOSTEK	RL 01.26	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.232	Layanan Kartu Pencari Kerja AK-I	Pelayanan kartu pencari kerja AK-I	Mengelola kartu pencari kerja AK-I	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.233	Layanan Kebutuhan Pelatihan (Tna)	Pelayanan kebutuhan pelatihan (Tna)	Melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan (Tna)	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.234	Layanan Kegiatan Calon Wirausaha Dan Wirausaha Baru	Pelayanan kegiatan calon wirausaha dan wirausaha baru	Mengelola kegiatan calon wirausaha dan wirausaha baru	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.235	Layanan Kegiatan Dialog Sosial Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Pelayanan kegiatan dialog sosial serikat pekerja/serikat buruh	Melaksanakan kegiatan dialog sosial serikat pekerja/serikat buruh	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.236	Layanan Kegiatan Peringatan Hari Buruh	Pelayanan kegiatan peringatan hari buruh	Mengadakan kegiatan peringatan hari buruh	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Internal OPD	Offline	Y	
L.237	Layanan Latihan Kerja	Pelayanan latihan kerja	Mengadakan latihan kerja	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.238	Layanan Pelaksanaan Pelatihan Produktivitas Bagi Wirausahawan dan Calon Wirausahawan	Pelayanan pelatihan produktivitas bagi wirausahawan dan calon wirausahawan	Mengadakan pelatihan produktivitas bagi wirausahawan dan calon wirausahawan	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.239	Layanan Pembuatan Surat Pelaksanaan Rekrutmen Calon Peserta Pelatihan	Pelayanan pembuatan surat pelaksanaan rekrutmen calon peserta pelatihan peningkatan produktivitas	Mengelola pembuatan surat pelaksanaan rekrutmen calon peserta pelatihan peningkatan produktivitas	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
	Peningkatan Produktivitas									
L.240	Layanan Pencatatan Dan Inventarisasi BMD	Pelayanan pencatatan dan inventarisasi BMD	Mencatat inventarisasi BMD	RL 02.06	Kemnaker	Tenaga Kerja	Internal OPD	Offline	Y	
L.241	Layanan Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Pelayanan pencatatan serikat pekerja/ serikat buruh	Melakukan pencatatan serikat pekerja/ serikat buruh	RL 02.06	Kemnaker	Tenaga Kerja	Internal OPD	Offline	Y	
L.242	Layanan Pendaftaran Calon Peserta Pelatihan	Pelayanan pendaftaran calon peserta pelatihan	Mengelola pendaftaran calon peserta pelatihan	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.243	Layanan Pendaftaran LKS BIPARTIT	Pelayanan pendaftaran LKS BIPARTIT	Mengelola pendaftaran LKS BIPARTIT	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.244	Layanan Pendaftaran PKB	Pelayanan Pendaftaran PKB	Mengelola pendaftaran PKB	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.245	Layanan Penerbitan Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Pelayanan penerbitan izin lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	Mengelola penerbitan izin lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.246	Layanan Penerbitan Kartu Tanda Pencari Kerja	Pelayanan penerbitan kartu tanda pencari kerja	Mengelola penerbitan kartu tanda pencari kerja	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.247	Layanan Penerbitan Rekom Paspur CPMI	Pelayanan penerbitan rekom paspor CPMI	Mengelola penerbitan rekom paspor CPMI	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.248	Layanan Penyaluran Perlengkapan, Peralatan Dan Bahan Pelatihan	Pelayanan penyaluran perlengkapan, peralatan dan bahan pelatihan	Mengelola penyaluran perlengkapan, peralatan dan bahan pelatihan	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.249	Layanan Penyelesaian Kasus Phi-Mediasi	Pelayanan penyelesaian kasus phi-mediasi	Menyelesaikan kasus phi-mediasi	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.250	Layanan PKWT	Pelayanan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	Mengelola Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	RL 01.32	Kemnaker	Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.251	Layanan izin Kantor cabang	Penerbitan Rekom Izin Kantor Cabang	memberikan rekomendasi izin kantor cabang	RL 02.06		Tenaga Kerja	Publik	Offline	Y	
L.252	SISKOTKLN	Sistem pendataan bagi calon pekerja migran indonesia yang akan berangkat keluar negeri	Sebagai laporan pendataan imigran indonesia	RL 02.06	Kemnaker	Tenaga Kerja	Internal OPD	Online	T	http://sis.kotkln.bnptki.go.id/index.php
L.253	layanan Informasi publik	Digunakan sebagai informasi publik	Sebagai informasi publik	RL 01.44	Kemenkom info	Komunikasi dan Informatika	Publik	Online	T	PPID, Radio Streaming DSB
L.254	Layanan PPID	Pelayanan PPID	Pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik	RL 01.44	Kemenkom info	Komunikasi dan Informatika	Publik	Online	Y	PPID
L.255	layanan pengaduan layanan publik	Layanan pengaduan sosial	Sebagai layanan pengaduan perlindungan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, penanggulangan ancaman terorisme, penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan, pengelolaan lalu lintas, dan penyerapan aspirasi masyarakat	RL 01.44	Kemenkom info	Komunikasi dan Informatika	Publik	Online	T	SP4N Lapor
L.256	Layanan pengendalian menara	Layanan yang digunakan untuk melakukan pengendalian menara telekomunikasi	pengendalian menara telekomunikasi	RL 02.06	Kemenkom info	Komunikasi dan Informatika	Internal OPD	Offline	T	
L.257	Layanan retribusi daerah	Bertujuan untuk mencatat retribusi yang masuk	Berfungsi untuk mengelola data retribusi	RL 02.06	Kemenkeu	Keuangan	Publik	Offline	T	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.258	Layanan pengelolaan data center	Layanan terkait penyediaan jaringan, pengelolaan server, permintaan pembuatan aplikasi, seluruh pelayanan kominfo terkait kebutuhan opd terhadap kominfo	Untuk penyediaan jaringan, pengelolaan server, permintaan pembuatan aplikasi, seluruh pelayanan kominfo terkait kebutuhan opd terhadap kominfo	RL 02.09	Kemenkom info	Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD	Offline	Y	
L.259	Layanan Informasi Data sektoral	Mempermudah dan mendukung keterbukaan data untuk proses bisnis di OPD lain	Efisiensi pelayanan publik	RL 02.09	Kemenkom info	Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD	Online	Y	PPID
L.260	Layanan Penyajian Data Tenaga Penyuluh, Petani Dan Kelembagaan	Pelayanan penyajian data tenaga penyuluh, petani dan kelembagaan	Mengelola penyajian data tenaga penyuluh, petani dan kelembagaan	RL 02.09	Kementerian Pertanian	Pertanian	Internal OPD	Offline	T	
L.261	Layanan Penyajian Informasi Dan Media Penyuluhan Pertanian	Pelayanan penyajian informasi dan media penyuluhan pertanian	Memberikan penyajian informasi dan media penyuluhan pertanian	RL 01.44	Kementerian Pertanian	Pertanian	Publik	Offline	T	
L.262	Layanan Program Penyuluhan Pertanian	Pelayanan program penyuluhan pertanian	Pelayanan program penyuluhan pertanian	RL 01.07	Kementerian Pertanian	Pertanian	Publik	Offline	T	
L.263	Layanan melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di petak tersier	Sebagai layanan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Sebagai laporan pemeliharaan jaringan irigasi	RL 02.06	Kementerian Pertanian	Pertanian	Internal OPD	Online	Y	P3A (Simantau)
L.264	Layanan Distribusi dan Cadangan Pangan	Bertujuan untuk menghimpun informasi harga pangan dan memudahkan masyarakat mengetahui harga komoditas bahan pangan yang akan dikonsumsi setiap hari	Melakukan pengelolaan distribusi dan cadangan pangan	RL 01.44	BKP	Pangan	Internal OPD	Offline	T	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementrian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.265	Layanan Informasi Harga Pangan	Bertujuan untuk menghimpun informasi harga pangan dan memudahkan masyarakat mengetahui harga komoditas bahan pangan yang akan dikonsumsi setiap hari	Memberikan informasi harga pangan	RL 01.44	BKP	Pangan	Publik	Offline	T	
L.266	Layanan Kearsipan	Digunakan untuk manajemen kearsipan daerah	Laporan kearsipan daerah	RL 02.06	ANRI	Kearsipan	Seluruh OPD	Online	T	SRIKANDI
L.267	Inlislite 3.1	Pengelolaan Layanan Otomasi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Sebagai layanan laporan pengelolaan perpustakaan	RL 02.06	ANRI	Perpustakaan	Publik	Online	T	http://inlislite3.perpus.deliserdangkab.go.id
L.268	Layanan Pencarian Arsip	Pelayanan pencarian arsip	Mengelola pencarian arsip	RL 02.06	ANRI	Kearsipan	Internal OPD	Offline	Y	
L.269	Layanan Pengurangan Retribusi	Pelayanan pengurangan retribusi	Pengurangan retribusi daerah	RL 01.12	BKPM	Penanaman Modal	Publik	Offline	Y	
L.270	Layanan Penyusunan buku Potensi Daerah dan Peluang Investasi	pelayanan penyusunan buku potensi daerah dan peluang investasi	menyusun buku potensi daerah dan peluang investasi	RL 02.06	BKPM	Penanaman Modal	Internal OPD	Offline	Y	
L.271	layanan perizinan	Sebagai pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu	Untuk memberikan perizinan publik	RL 01.16	BKPM	Penanaman Modal	Publik	Online	Y	SERIDELI
L.272	Layanan Edukasi Pemandan Kebakaran	Pelayanan edukasi kepada masyarakat	Memberikan kesempatan kunjungan siswa di	RL 01.31	Kemendagri	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
			dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan			Perlindungan Masyarakat				
L.273	Layanan Pelatihan Pemadam Kebakaran	Pelayanan pelatihan pemadam kebakaran	Melaksanakan pelatihan pemadam kebakaran	RL 01.31	Kemendagri	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Publik	Offline	Y	
L.274	Layanan Patroli	Pelayanan patroli	Melaksanakan patroli lingkungan	RL 01.29	Kemendagri	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Publik	Offline	Y	
L.275	Layanan Pembinaan Mental, Fisik Dan Disiplin Aparatur	Pelayanan pembinaan mental, fisik dan disiplin aparatur	Melaksanakan pembinaan mental, fisik dan disiplin aparatur	RL 02.04	Kemendagri	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Internal OPD	Offline	Y	
L.276	Layanan Pembongkaran Bangunan	Pelayanan pembongkaran bangunan	Mengelola pembongkaran bangunan	RL 02.03	Kemendagri	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Internal OPD	Offline	Y	
L.277	Layanan Pendataan Linmas Desa Dan Kelurahan	Pelayanan pendataan linmas desa dan kelurahan	Melaksanakan pendataan linmas desa dan kelurahan	RL 02.04	Kemendagri	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Internal OPD	Offline	Y	
L.278	Layanan Penertiban Pedagang Kaki Lima	Pelayanan penertiban pedagang kaki lima	Melaksanakan penertiban pedagang kaki lima	RL 01.06	Kemendagri	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Publik	Offline	Y	
L.279	Layanan Penertiban Reklame	Pelayanan penertiban reklame	Melaksanakan penertiban reklame	RL 01.29	Kemendagri	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
						Perlindungan Masyarakat				
L.280	Layanan Pengamanan Unjuk Rasa	Pelayanan pengamanan unjuk rasa	Mengamankan unjuk rasa	RL 01.29	Kemendagri	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Publik	Offline	Y	
L.281	Layanan Pengawasan	Pelayanan pengawasan pejabat/orang-orang penting	Melaksanakan pengawasan pejabat/orang-orang penting	RL 01.29	Kemendagri	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Publik	Offline	Y	
L.282	Layanan Penyuluhan Mitigasi Pra Dan Pasca Bencana	Memberikan pelayanan penyuluhan mitigasi pra dan pasca bencana	memberikan informasi dan penyuluhan mitigasi pra dan pasca bencana	RL 01.44	Kemendagri	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Publik	Offline	Y	
L.283	Layanan Sosialisasi	Pelayanan sosialisasi	Memberikan sosialisasi	RL 01.45	Kemendagri	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Publik	Offline	Y	
L.284	Pengendalian Intern Pemerintah bidang kesehatan	Digunakan untuk pengawasn internal	Pengawasan bidang kesehatan	RL 02.06	Kemenkes	Pembinaan dan Pengawasan	Seluruh OPD	Online	Y	SPIP
L.285	Layanan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja	Digunakan untukmempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik	berfungsi kesesuaian kerja OPD sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah di tetapkan	RL 02.07	Kemenkes	Pembinaan dan Pengawasan	Seluruh OPD	Online	Y	LKIP

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.286	layanan manajemen rumah sakit	Sebagai manajemen rumas sakit	Laporan pengelolaan manajemen rumah sakit	RL 02.08	Kemenkes	Kesehatan	Seluruh OPD	Online	T	SIMRS
L.287	Layanan rekam medis online via WhatsApp	Untuk rekam medis	Mempermudah pelayanan rekam medis publik secara online	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	T	Manual menggunakan WhatsApp
L.288	Layanan Penanganan Pasien Kabur	Pelayanan Penanganan Pasien Kabur	Memberikan penanganan terhadap pasien yang kabur dari rumah sakit	RL 02.06	Kemenkes	Kesehatan	Internal OPD	Offline	Y	
L.289	Layanan Pelayanan DPJP	Pelayanan DPJP	Memberikan pertanggung jawaban atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien oleh dokter	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.290	Layanan Pelayanan Pasien	Pelayanan kebutuhan dan penanganan pasien	Mengelola kebutuhan dan penanganan pasien	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.291	Layanan Pelayanan Rumah Sakit	Pelayanan rumah sakit	Mengelola alur pelayanan rumah sakit	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.292	Layanan Penerimaan Pasien	Pelayanan penerimaan pasien	Menangani pasien gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.293	Layanan Pengelolaan Berkas Rekam Medis	Pelayanan assembling berkas rekam medis	assembling berkas rekam medis	RL 02.06	Kemenkes	Kesehatan	Internal OPD	Offline	Y	
L.294	Layanan Penghentian Pengobatan	Pelayanan penghentian pengobatan pasien	Penolakan atau penghentian pengobatan atau tindakan medis selama dalam pelayanan	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.295	Layanan Rawat	Layanan rawat pasien	Mengelola rawat pasien seperti alih rawat pasien, anih rawat inap DPJP	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.296	Layanan skrining	Pelayanan skrining	Mengelola pelayanan skrining	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.297	Layanan Transfer Pasien	Pelayanan transfer pasien igd ke rawat inap	Mengelola pelaksanaan transfer pasien igd ke rawat inap	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.298	Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Mengelola administrasi terpadu kecamatan	RL 01.24	Ditjen Dukung Kemendagri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Publik	Offline	Y	
L.299	Layanan Pelayanan Kartu Keluarga	Pelayanan kartu keluarga	Mengelola pelayanan kartu keluarga	RL 01.23	Ditjen Dukung Kemendagri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Publik	Offline	Y	
L.300	Layanan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Mengelola Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	RL 01.23	Ditjen Dukung Kemendagri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Publik	Offline	Y	
L.301	Layanan Pelayanan Surat Pindah	Pelayanan surat pindah	Mengelola surat pindah	RL 01.23	Ditjen Dukung Kemendagri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	publik	Offline	Y	
L.302	Layanan Masyarakat	Pelayanan masyarakat	Mmengelola layanan masyarakat	RL 01.24	Ditjen Dukung Kemendagri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Publik	Offline	Y	
L.303	Layanan fasilitas surat menyurat	Memfasilitasi Surat Menyurat (Pengurusan Resi, Domisili, Kematian)	Sebagai laporan administrasi desa	RL 02.06	Ditjen Dukung Kemendagri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Seluruh OPD	Online	T	E-Desa
L.304	Layanan Pelayanan Pasien	Pelayanan kebutuhan dan penanganan pasien	Mengelola kebutuhan dan penanganan pasien	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.305	Layanan Pelayanan Rumah Sakit	Pelayanan rumah sakit	Mengelola alur pelayanan rumah sakit	RL 01.25	Kemenkes	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.306	Layanan Informed Consent	Pelayanan informed consent	Mengelola informed consent	RL 01.44	Kesehatan	Kesehatan	Publik	Offline	Y	

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	SOP	Nama Aplikasi
L.307	Layanan Penyuntikan	Pelayanan penyuntikan	Mengelola pelayanan penyuntikan	RL 01.25	Kesehatan	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.308	Layanan Strelisasi	Pelayanan strelisasi	Mengelola strelisasi	RL 01.25	Kesehatan	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.309	Layanan Transportasi	Pelayanan transportasi	Mengelola Pelayanan transportasi	RL 01.19	Kesehatan	Kesehatan	Publik	Offline	Y	
L.310	layanan antrian online bagi pengguna jkn	Sebagai untuk mengelola antrian JKN	Mempermudah antrian JKN	RL 01.25	Daerah	Kesehatan	Publik	Online	T	SIMPUS

Lampiran 6.1 Daftar Aplikasi SPBE

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi	Pengguna Aplikasi
1	Bagian Organisasi	A.001	e-SAKIP REVIU	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
2	Bagian Administrasi Pembangunan		TIDAK ADA APLIKASI					
3	Bagian Tata Pemerintahan	A.002	Sippaten	Sedang dikembangkan	Tidak digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik dan Operator Kecamatan
4	Bagian Hukum	A.003	JDIH	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
5	Bagian Umum		TIDAK ADA APLIKASI					
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	A.004	E-MTQ	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan		TIDAK ADA APLIKASI					
8	Bagian Perekonomian dan SDA		TIDAK ADA APLIKASI					
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	A.005	LPSE	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	A.006	SIRUP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	A.007	E-Katalog	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	A.008	SIMDA Barang	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	A.009	SIKAP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan		TIDAK ADA APLIKASI					

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi	Pengguna Aplikasi
11	Inspektorat Daerah	A.010	Web Portal Inspektorat Daerah	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
12	Sekretariat DPRD	A.011	Web Portal Sekretariat DPRD	Sedang dikembangkan	Tidak digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.012	SIMDA Keuangan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.013	E-CASCADING	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.014	E-SAKIP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.015	eplanning.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.016	Web Portal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang dikembangkan	Tidak digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.017	KRISNA DAK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.018	SIPD	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	A.019	Web Portal Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	A.020	SIPD	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	A.021	SIMDA Perencanaan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi	Pengguna Aplikasi
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	A.022	SIMDA BMD	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	A.023	Web Portal Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
16	Badan Pendapatan Daerah	A.024	Aplikasi PBB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
16	Badan Pendapatan Daerah	A.025	Aplikasi BPHTB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal OPD
16	Badan Pendapatan Daerah	A.026	Web Portal Badan Pendapatan Daerah	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
17	Badan Kepegawaian Daerah	A.027	MySAPK	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Publik
17	Badan Kepegawaian Daerah	A.028	SIMPEG	Sedang dikembangkan	Belum digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal OPD
17	Badan Kepegawaian Daerah	A.029	E-Kinerja	Sedang dikembangkan	Belum digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal OPD
17	Badan Kepegawaian Daerah	A.030	Web Portal Badan Kepegawaian Daerah	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A.031	Web Portal Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang dikembangkan	Tidak digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	A.032	SIP3NTAR	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal OPD
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	A.033	dispu.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal OPD

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi	Pengguna Aplikasi
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	A.034	Web Portal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
20	Dinas Kesehatan	A.035	PMPRB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal OPD
20	Dinas Kesehatan	A.036	Public Service Center	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
20	Dinas Kesehatan	A.037	Web Portal Dinas Kesehatan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	A.038	SIMANTAN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal OPD
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	A.039	appperkim.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal OPD
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	A.040	Web Portal Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
22	Dinas Lingkungan Hidup	A.041	Web Portal Dinas Lingkungan Hidup	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
22	Dinas Lingkungan Hidup	A.042	layanandlh.deliserdangkab.go.id	Sedang dikembangkan	Belum digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal OPD
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	A.043	http://www.deliserdangmall.com	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	A.044	wirusaha.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	A.045	Web Portal Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
24	Dinas Pendidikan	A.046	SIMPAI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal OPD

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi	Pengguna Aplikasi
24	Dinas Pendidikan	A.047	dinaspendidikanikm.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
24	Dinas Pendidikan	A.048	kembalisekolah.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
24	Dinas Pendidikan	A.049	siadit.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
24	Dinas Pendidikan	A.050	simpeldikit.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal OPD
24	Dinas pendidikan	A.051	Mesrah Bertuah	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal OPD
24	Dinas Pendidikan	A.052	Datok Soltan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal OPD
24	Dinas Pendidikan	A.053	Web Portal Dinas Pendidikan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
24	Dinas Pendidikan	A.054	SIMTUN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
24	Dinas Pendidikan	A.055	SIMTENDIK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
24	Dinas Pendidikan	A.056	SIM DIKLAT	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
24	Dinas Pendidikan	A.057	SIM ANTUN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
24	Dinas Pendidikan	A.058	VERVAL PTK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
24	Dinas Pendidikan	A.059	SIM Pembayaran	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi	Pengguna Aplikasi
24	Dinas Pendidikan	A.060	SIM KSG	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
24	Dinas Pendidikan	A.061	SIM PKB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	A.062	https://limbatdelimas.deliserdangkab.go.id/login	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Publik
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	A.063	https://galerip3ud.com/	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	A.064	Web Portal Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	A.065	Si dewi desa (playstore)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	A.066	Deli Serdang Tourism	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	A.067	Web Portal Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	A.068	SIAK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Publik
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	A.069	Web Portal Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	A.070	Akta Online	Sedang dikembangkan	Belum digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	A.071	Web Portal Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi	Pengguna Aplikasi
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	A.072	OM SPAN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	A.073	SISKUDES	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	A.074	Web Portal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
30	Dinas Perikanan	A.075	Sehat Nelayan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
30	Dinas Perikanan	A.076	www.kusuka.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
30	Dinas Perikanan	A.077	Radio Nelayan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
30	Dinas Perikanan	A.078	Web Portal Dinas Perikanan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
31	Dinas Perhubungan	A.079	E-Kir	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
31	Dinas Perhubungan	A.080	sipancor.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
31	Dinas Perhubungan	A.081	Web Portal Dinas Perhubungan	Sedang dikembangkan	Tidak digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
32	Dinas Sosial	A.082	Call Center Dinsos	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
32	Dinas Sosial	A.083	Web Portal Dinas Sosial	Sedang dikembangkan	Belum digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi	Pengguna Aplikasi
33	Dinas Ketenagakerjaan	A.084	KARIRHUB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
33	Dinas Ketenagakerjaan	A.085	http://siskotkln.bnptki.go.id/index.php	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal OPD
33	Dinas Ketenagakerjaan	A.086	Web Portal Dinas Ketenagakerjaan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
34	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.087	Radio Streaming DSB (Deli Serdang Berseri)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.088	SIKKOMIN (Sistem Informasi Kinerja Kominfo)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal OPD
34	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.089	e-KLIPPING	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
34	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.090	CAD (Covid Analisa Deliserdang)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Publik
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.091	SP4N Laporan	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
34	Dinas Komunikasi dan Informatika	A.092	PPID	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Seluruh OPD
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.093	Web Portal Dinas Komunikasi Dan Informatika	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.094	alsintan.deliserdangkab.go.id	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal OPD
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.095	berita.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.096	dailyreport.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi	Pengguna Aplikasi
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.097	deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Seluruh OPD
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.098	helpdesk.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.099	portal.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.100	profil.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.101	radio.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Internal OPD
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.102	ssh.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.02	Aplikasi fungsi tertentu	Internal OPD
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.103	visitoranalisis.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.02	Aplikasi fungsi tertentu	Internal OPD
35	Dinas Pertanian	A.104	P3A (Simantau)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
35	Dinas Pertanian	A.105	siptan.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.02	Aplikasi fungsi tertentu	Publik
35	Dinas Pertanian	A.106	Web Portal Dinas Pertanian	Sedang dikembangkan	Belum digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
36	Dinas Ketahanan Pangan	A.107	Web Portal Dinas Ketahanan Pangan	Sedang dikembangkan	Belum digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	A.108	SRIKANDI	Sedang dikembangkan	Belum digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi	Pengguna Aplikasi
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	A.109	arsipsunggal.deliserdangkab.go.id	Sedang dikembangkan	Belum digunakan	RA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Seluruh OPD
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	A.110	perpuskejari.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	A.111	perpustakaan.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	A.112	http://inislite3.perpus.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	A.113	Web Portal Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	A.114	SERIDELI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	A.115	Web Portal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		TIDAK ADA APLIKASI					
40	Satuan Polisi Pamong Praja	A.116	Web Portal Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
40	Satuan Polisi Pamong Praja	A.117	evaprogiat.deliserdangkab.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.02	Aplikasi fungsi tertentu	Internal OPD
41	RSUD Deli serdang	A.118	SPIP	Sedang dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Internal OPD
41	RSUD Deli serdang	A.119	LKIP	Sedang dikembangkan	Tidak digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Internal OPD
41	RSUD Deli serdang	A.120	Rekam Medis Online (WhatsApp)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan	Status Penggunaan	Area Aplikasi	Model Referensi	Pengguna Aplikasi
41	RSUD Deli serdang	A.121	Web Portal Rumah Sakit Umum Daerah	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
41	RSUD Deli serdang	A.122	SISMADAK (Sistem Manajemen Dokumentasi Akreditasi)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Internal OPD
41	RSUD Deli serdang	A.123	E-Claim	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Internal OPD
41	RSUD Deli serdang	A.124	SIMRS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Seluruh OPD
42	Kecamatan Lubuk Pakam	A.125	Web Portal Kecamatan Lubuk Pakam	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
43	Kecamatan Labuhan Deli	A.126	Web Portal Kecamatan Labuhan Deli	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Publik
44	Desa Sekip		TIDAK ADA APLIKASI					
45	Desa Pematang Johar	A.127	E-Desa	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Seluruh OPD
46	RSUD Pancur Batu		TIDAK ADA APLIKASI					
47	Puskesmas	A.128	SIMPUS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan	RA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Publik

Lampiran 6.2 Metadata Aplikasi SPBE

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
1	Bagian Organisasi	A.001	e-SAKIP REVIU	E-SAKIP adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Data kinerja pegawai	Laporan hasil pemantauan kinerja pegawai	Website	Pusat	Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2	Bagian Administrasi Pembangunan		TIDAK ADA APLIKASI							
3	Bagian Tata Pemerintahan	A.002	SIPPATEN	Merupakan aplikasi yang ditunjukan untuk digunakan pelayanan di kecamatan, dengan adanya aplikasi ini masyarakat tidak perlu membawa persyaratan beberapa data cukup diupload pada sistem. dengan begitu akan mempermudah masyarakat dalam mengurus beberapa data di kecamatan. Aplikasi ini juga mempermudah antrian pengurusan data di kecamatan	Layanan Kecamatan	Data Masyarakat, KK, KTP, Akta Kelahiran	Surat Rekomendasi langsung ke kecamatan	Desktop	Kominfo	Sub Bagian ekonomi daerah
4	Bagian Hukum	A.003	JDIH	Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen	Layanan Kearsipan	Produk hukum daerah	Informasi hasil produk	Website	Pusat	Sub Bagian Dokumentasi

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembangan	Unit Operasional Teknologi
				hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum	produk hukum daerah, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		hukum daerah yang sudah diklasifikasikan			dan Informasi
5	Bagian Umum		TIDAK ADA APLIKASI							
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	A.004	E-MTQ	Electronic Musabaqah Tilawatil Quran (e-MTQ) yang diberikan untuk suatu penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet, intranet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya	Pendaftaran MTQ	Data MTQ	Daftar peserta MTQ	Website	Pihak ketiga	Sub Bagian Bina Mental Spiritual
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan		TIDAK ADA APLIKASI							
8	Bagian Perekonomian dan SDA		TIDAK ADA APLIKASI							
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	A.005	LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan	Layanan Informasi Data sektoral	Data pengadaan barang/jasa	Laporan pengadaan barang atau jasa	Desktop	Pusat	Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				Barang/Jasa secara elektronik						
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	A.006	SIRUP	SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data RUP	Laporan hasil RUP	Website	Pusat	Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	A.007	E-Katalog	Sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data barang dan jasa	Laporan penyedia barang milik pemerintahan	Website	Pusat	Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	A.008	SIMDA Barang	Sistem Informasi Manajemen barang milik daerah adalah sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya pengelolaan barang milik daerah	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data barang	Laporan pengelolaan barang	Website	Pusat	Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	A.009	SIKAP	SIKAP merupakan subsistem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa.	Layanan barang dan jasa	Data riwayat kinerja dan Data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa	Informasi riwayat kinerja dan Informasi kualifikasi Penyedia Barang/Jasa	Website	Kominfo	
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan		TIDAK ADA APLIKASI							

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembangan	Unit Operasional Teknologi
11	Inspektorat Daerah	A.010	Web Portal Inspektorat Daerah	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
12	Sekretariat DPRD	A.011	Web Portal Sekretariat DPRD	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	MU
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.012	SIMDA Keuangan	SIMDA keuangan merupakan program aplikasi yang dapat membantu pemerintah dalam pengolahan data keuangan yang lebih mudah, akurat, serta efisien.	Layanan keuangan	Data keuangan	Laporan hasil penggunaan anggaran	Website	Pusat	Sub Bagian Keuangan
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.013	E-CASCADING	Aplikasi berbasis Website untuk pemantauan monitoring dan input pohon kinerja yang diturunkan untuk penyusunan Program sampai sub kegiatan OPD	Layanan Perencanaan	Data renja, renstra, rkpdp	dokumen renja renstra	Website	Kominfo	Bagian Penyusunan Program
13	Badan Perencanaan	A.014	E-SAKIP	Aplikasi berbasis Website untuk pemantauan	Layanan Perencanaan	Data kinerja OPD	Laporan Kinerja OPD	Website	Kominfo	Bagian Penyusunan Program

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembangan	Unit Operasional Teknologi
	Pembangunan Daerah			monitoring realisasi kinerja OPD						
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.015	eplanning.deliserdangkab.go.id	Aplikasi Eplanning adalah sistem aplikasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang telah dikembangkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan akuntabel.	Layanan Perencanaan	Data perencanaan jangka menengah dan jangka pendek	Dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek	Website	Kominfo	
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.016	Web Portal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.017	KRISNA DAK	Aplikasi KRISNA adalah Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.	Layanan penganggaran	Data perencanaan dan data anggaran	Informasi perencanaan daerah	Website	Pusat	

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A.018	SIPD	SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah	Layanan perencanaan	Data perencanaan dan data anggaran	Informasi perencanaan daerah	Website	Pusat	
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	A.019	Web Portal Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	A.020	SIPD	SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi	Layanan penganggaran	Data perencanaan, pelaksanaan, evaluasi	Laporan administrasi	Website	Pusat	Sub Bagian Umum

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				kinerja pemerintah daerah						
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	A.021	SIMDA Perencanaan	SIMDA perencanaan merupakan program aplikasi yang dapat membantu pemerintah dalam pengolahan data perencanaan yang lebih mudah, akurat, serta efisien.	Layanan penganggaran	Data perencanaan	Informasi Perencanaan daerah	Desktop	Pusat	Sub Bagian Program
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	A.022	SIMDA BMD	Sistem Informasi Manajemen barang milik daerah adalah sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya pengelolaan barang milik daerah	layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data perencanaan	Informasi Perencanaan daerah	Desktop	Pusat	Sub Bagian Umum
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	A.023	Web Portal Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
16	Badan Pendapatan Daerah	A.024	Aplikasi PBB	Aplikasi e-PBB adalah aplikasi pelayanan yang digunakan Wajib Pajak yang berfungsi untuk mengetahui status pembayaran, status piutang, informasi sppt,	Layanan Pembayaran Bumi Bangunan	Data pajak	Laporan pembayaran pajak	Android	Mandiri OPD	Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				tempat pembayaran, cek status berkas, saran dan masukan atau pengaduan wajib pajak langsung.						
16	Badan Pendapatan Daerah	A.025	Aplikasi BPHTB	BPHTB adalah sistem informasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan BPHTB	Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	Data tanah	Laporan pengelolaan pelayanan BPHTB	Website	Mandiri OPD	Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah
16	Badan Pendapatan Daerah	A.026	Web Portal Badan Pendapatan Daerah	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
17	Badan Kepegawaian Daerah	A.027	MySAPK	MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil Pegawai Negeri Sipil	Layanan Informasi Pegawai Online	Data PNS	Informasi profil PNS	Android	Mandiri OPD	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi
17	Badan Kepegawaian Daerah	A.028	SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian SIMPEG Aplikasi kepegawaian berbasis web yang	Layanan Integrasi Data dan Manajemen	Data pegawai	Laporan pengelolaan data kepegawaian	Website	Mandiri OPD	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				ditujukan untuk pegawai agar dapat mengakses dan mengelola data-data dan proses kepegawaian	n Kepegawaian					
17	Badan Kepegawaian Daerah	A.029	E-Kinerja	Ekinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja pegawai negeri sipil, khususnya di Lingkungan Pemerintah Kota	Layanan Kinerja Pegawai	Data pegawai Data kinerja	Laporan kinerja pegawai	Website	Mandiri OPD	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi
17	Badan Kepegawaian Daerah	A.030	Web Portal Badan Kepegawaian Daerah	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A.031	Web Portal Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	A.032	SIP3NTAR	Merupakan aplikasi sebagai informasi standart penataan ruang publik	Layanan informasi petanaan ruang publik	Data tentang tata ruang	Informasi tata ruang	Website	Pihak ketiga	Bidang Penataan Ruang
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan	A.033	dispu.deliserdangkab.go.id	Aplikasi profil dinas PUPR	Layanan informasi	Data tentang tata ruang	Informasi tata ruang	Website	Mandiri OPD	

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembangan	Unit Operasional Teknologi
	Penataan Ruang									
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	A.034	Web Portal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
20	Dinas Kesehatan	A.035	PMPRB	PMPRB Online merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk kemudahan pelaksanaan PermenPAN dan RB No. 1 tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB.	Layanan monitoring kinerja pegawai kesehatan	Data RB	Laporan RB	Website	Pihak ketiga	Sub Bagian Program
20	Dinas Kesehatan	A.036	Public Service Center	Merupakan aplikasi layanan gawat darurat kepada masyarakat	Layanan gawat darurat kepada masyarakat	Data layanan gawat darurat, data pasien	Informasi layanan gawat darurat dan informasi pasien	Website	Pusat	Bidang Pelayanan Kesehatan
20	Dinas Kesehatan	A.037	Web Portal Dinas Kesehatan	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	A.038	SIMANTAN	Merupakan aplikasi yang digunakan untuk layanan Informasi Manajemen Air Minum dan Sanitasi	Layanan Informasi Manajemen Air Minum dan Sanitasi	Data ketersediaan air minum dan sanitasi	Informasi ketersediaan air minum dan sanitasi	Website	Pihak ketiga	Bidang Penyehatan Lingkungan
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	A.039	Apperkim .deliserdangkab.go.id	Aplikasi untuk perkim	Layanan Informasi Dinas	Data profil Perkim	Informasi tentang Perkim	Website	Mandiri OPD	
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	A.040	Web Portal Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
22	Dinas Lingkungan Hidup	A.041	Web Portal Dinas Lingkungan Hidup	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layanan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
22	Dinas Lingkungan Hidup	A.042	layanandh. deliserdangkab.go.id	Aplikasi Layanan DLH	Layanan Informasi	data Layanan	Informasi Layanan	Website	Kominfo	
23	Dinas Koperasi Dan Usaha	A.043	http://www.deliserdangmall.com	Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempromosikan produk UMKM daerah	Deli Serdang Mall	Data produk UMKM	Jual beli produk UMKM	Website	Pihak ketiga	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
	Kecil Menengah									
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	A.044	wirusaha.deliserdangkab.go.id	Aplikasi Wirausaha Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Aplikasi Wirausaha berisi database UMKM seluruh kabupaten Deli Serdang.	Layanan Dinkop	Data UMKM	Informasi UMKM	Website	Kominfo	
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	A.045	Web Portal Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
24	Dinas Pendidikan	A.046	SIMPAI	Adalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang bertujuan untuk memajemen Data Kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.	Layanan Manajemen Data Kepegawaian di Dinas Pendidikan	Data pendidik	Laporan hasil manajemen kependidikan	Website	Pihak ketiga	Bidang Pembinaan Ketenagaan
24	Dinas Pendidikan	A.047	dinaspendidikanikm.deliserdangkab.go.id	Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Layanan pendidikan	Data IKM	Informasi IKM	Website	Kominfo	
24	Dinas Pendidikan	A.048	kembalisekolah.deliserdangkab.go.id	Aplikasi untuk peningkatan layanan pendidikan	Layanan pendidikan	Data layanan pendidikan	Informasi layanan	Website	Pihak Ketiga	
24	Dinas Pendidikan	A.049	siadit.deliserdangkab.go.id	Sistem Aplikasi Digital Tracking Pada Unit Layanan Administrasi Terpadu Dinas Pendidikan Deli Serdang	Layanan pendidikan	Data layanan pendidikan	Informasi layanan	Website	Pihak Ketiga	

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
24	Dinas Pendidikan	A.050	simpeldikit. deliserdangkab.go.id	Sistem Pelayanan Digital Kepegawaian Terpadu	Layanan pendidikan	Data pegawai pendidikan	Informasi pegawai	Website	Kominfo	
24	Dinas Pendidikan	A.051	Mesrah Bertuah	Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak Bersama Masyarakat,Orang Tua dan Sekolah	Layanan Akuntabilitas Dana BOS	Data Sekolah	Informasi sekolah dan pendidikan	Website	Pihak ketiga	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
24	Dinas Pendidikan	A.052	Datok Soltan	Merupakan aplikasi yang digunakan untuk menjangkau semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah	Layanan data pokok pendidikan	Data sekolah Data kurikulum Data Siswa Data Guru Data Sarana dan Prasarana Sekolah	Laporan data pendidikan	Website	Pihak ketiga	Sub Bagian Umum
24	Dinas Pendidikan	A.053	Web Portal Dinas Pendidikan	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembangan	Unit Operasional Teknologi
24	Dinas Pendidikan	A.054	SIMTUN	Aplikasi Simtun adalah produk yang dikeluarkan Kemdikbud tahun 2014, yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengajukan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) bagi guru yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).	Layanan pendidikan	Data Guru	Informasi Guru dan Tunjangan	Website	Pusat	
24	Dinas Pendidikan	A.055	SIMTENDIK	Aplikasi Simtendik (Sim Tendik) adalah aplikasi yang berfungsi untuk menjaring Data Pokok Tenaga Kependidikan Pengawas. Aplikasi ini bertujuan untuk mendapatkan data pengawas yang valid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, aplikasi ini juga merupakan salah satu sub sistem pendukung DAPODIK yang sebelumnya telah menjaring data pokok sekolah, ptk, peserta didik, rombongan belajar dan pembelajaran, namun belum menjaring data pengawas.	Layanan pendidikan	Data Pokok Tenaga Kependidikan Pengawas	Informasi Tenaga Kependidikan Pengawas	Website	Pusat	
24	Dinas Pendidikan	A.056	SIM DIKLAT	SIM DIKLAT merupakan sistem penunjang pelaksanaan diklat untuk		Data Diklat Guru dan	Informasi Diklat Guru	Website	Pusat	

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				guru dan tenaga pendidik. Sehingga proses diklat menjadi lebih terdokumentasi.		Tenaga Pendidik	dan Tenaga Pendidik			
24	Dinas Pendidikan	A.057	SIM ANTUN	SIM-Antun adalah sistem aplikasi mengenai informasi manajemen aneka tunjangan untuk tenaga pendidik	Layanan pendidikan	Data aneka tunjangan untuk tenaga pendidik	Informasi aneka tunjangan untuk tenaga pendidik	Website	Pusat	
24	Dinas Pendidikan	A.058	VERVAL PTK	Verval PTK atau Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan sebuah layanan online yang masih menjadi satu rangkaian dengan Dapodik, lebih tepatnya verifikasi dan validasi ini merupakan terusan dari sistem dapodik. Sistem ini berfungsi sebagai layanan yang diperuntukkan untuk PTK yang memiliki atau mengalami masalah dengan NUPTK.	Layanan pendidikan	Data PTK dan NUPTK	Informasi PTK dan NUPTK	Website	Pusat	
24	Dinas Pendidikan	A.059	SIM Pembayaran	SIM Pembayaran merupakan sistem yang membantu dalam pengelolaan pembayaran tenaga pendidik	Layanan pendidikan	Data pembayaran tenaga pendidik	Informasi pembayaran tenaga pendidik	Website	Pusat	
24	Dinas Pendidikan	A.060	SIM KSG	Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai media komunikasi penyelenggaraan	Layanan pendidikan	Data sertifikasi guru	Informasi sertifikasi guru	Website	Pusat	

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				sertifikasi guru di Indonesia						
24	Dinas Pendidikan	A.061	SIM PKB	SIM PKB merupakan Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang mana merupakan salah satu program bagi seluruh guru di Indonesia. Selain itu, SIM PKB juga merupakan salah satu persyaratan untuk profesi guru mendapatkan beberapa benefit seperti tunjangan.	Layanan pendidikan	Data guru dan Data tunjangan	Informasi guru dan tunjangan	Website	Pusat	
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	A.062	https://limbatdelimas.deliserdangkab.go.id/login	Sebuah aplikasi online yang dirancang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang yang menyediakan berbagai macam layanan dalam upaya pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri yang siap ekspor.	Layanan IKM	Data Industri Kecil Menengah	Informasi Industri Kecil Menengah	Website	Pihak ketiga	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	A.063	https://galerip3ud.com/	Merupakan aplikasi E-commerce yg menampilkan produk produk UMKM daerah sebagai wadah jual beli antara produsen dan konsumen	Layanan e-commerce produk lokal	Data UMKM dan Data Produk	Informasi Produk UMKM	Website	Pihak ketiga	Bidang Pengembangan Perdagangan

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	A.064	Web Portal Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
26	Dinas Kepemudaan, Kebudayaan Dan Pariwisata	A.065	Si dewi desa (playstore)	Merupakan aplikasi berbasis android yg bisa di unduh di play store, aplikasi ini merupakan aplikasi destinasi wisata deli serdang	Layanan destinasi wisata deli serdang	Titik Ordinat Objek Wisata, Data Kebudayaan	Informasi Titik Ordinat Objek Wisata dan Kebudayaan	Android	Pihak ketiga	Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	A.066	Deli Serdang Toursim	Aplikasi yang menampilkan informasi destinasi wisata Deli Serdang	Layanan destinasi wisata deli serdang	Titik Ordinat Objek Wisata, Data Kebudayaan,	Informasi Titik Ordinat Objek Wisata dan Kebudayaan	Android	Pihak ketiga	Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	A.067	Web Portal Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	A.068	SIAK	adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem	Layanan pendaftaran NIK, Percetakan KK dan KTP	Data kependudukan	Laporan Kependudukan	Desktop	Pusat	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. SIAK melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan peristiwa kependudukan						
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	A.069	Web Portal Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	A.070	Akta Online	Merupakan layanan berbasis email yang digunakan untuk pengajuan pembuatan akta secara online	Layanan pembuatan akta	Data kependudukan	Surat AKTA (lahir, mati, nikah, cerai)	Website	Mandiri OPD	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	A.071	Web Portal Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
29	Dinas Pemberdayaan	A.072	OM SPAN	Aplikasi Online Monitoring Sistem perbendaharaan Anggaran negara (OM	Layanan penganggaran Desa	Data anggaran	Laporan hasil monitoring	Website	Pusat	Seksi Keuangan dan Aset Desa

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
	Masyarakat Dan Desa			SPAN) adalah media aplikasi penyaluran dana desa						
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	A.073	SISKEUDES	Aplikasi siskeudes merupakan Aplikasi yang di kembangkan ole Tim BPKP untuk mempermudah Desa dalam mengelola keuangan desa	Layanan penganggaran desa, Layanan Keuangan Desa	Data keuangan desa	Laporan penggunaan keuangan desa	Desktop	Pusat	Seksi Keuangan dan Aset Desa
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	A.074	Web Portal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
30	Dinas Perikanan	A.075	Sehat Nelayan	Merupakan aplikasi untuk memberikan pelayanan atas kepemilikan tanah nelayan	Layanan legalitas hak milik tanah nelayan	Data kependudukan	Surat asuransi nelayan	Website	Pihak ketiga	Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil
30	Dinas Perikanan	A.076	www.kusuka.go.id	Merupakan aplikasi yang digunakan untuk layanan asuransi nelayan	Layanan asuransi nelayan	Data asuransi nelayan	Informasi asuransi nelayan	Website	Pihak ketiga	Bidang Pengawasan dan Bina Usaha Perikanan
30	Dinas Perikanan	A.077	Radio Nelayan	Merupakan layanan radio informasi nelayan	layanan komunikasi nelayan	Data nelayan, Data kapal, Data hasil tangkap	Data nelayan, Data kapal, Data hasil tangkap	Website	Pihak ketiga	Bidang Pengawasan dan Bina Usaha Perikanan
30	Dinas Perikanan	A.078	Web Portal Dinas Perikanan	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada						
31	Dinas Perhubungan	A.079	E-Kir	Merupakan aplikasi yang digunakan untuk uji kendaraan berkala	Layanan Pendaftaran uji berkala secara online	Data KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI	Kartu Elektronik Uji Berkala (BLUE)	Android	Pihak ketiga	Bidang Angkutan dan Sarana
31	Dinas Perhubungan	A.080	Sipancor .deliserdangkab.go.id	Aplikasi Pendataan Becak Online Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang	Layanan Dishub	Data becak	Informasi jumlah becak	Website	Kominfo	
31	Dinas Perhubungan	A.081	Web Portal Dinas Perhubungan	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Profil OPD, Struktur Organisasi, Tupoksi, Update Berita, Saran dan Kritik	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
32	Dinas Sosial	A.082	Call Center Dinsos	Merupakan layanan aduan kekerasan secara realtime	Layanan pengaduan sosial	Data kekerasan	laporan penindakan kekerasan	Call Center	Pihak ketiga	Sub Bagian Umum
32	Dinas Sosial	A.083	Web Portal Dinas Sosial	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
33	Dinas Ketenagakerjaan	A.084	KARIRHUB	Merupakan aplikasi yang digunakan untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada pencari kerja (publik)	Layanan informasi pekerjaan	Data lowongan pekerjaan	Informasi lowongan pekerjaan	Website	Pihak ketiga	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
33	Dinas Ketenagakerjaan	A.085	http://siskotkln.bnptki.go.id/index.php	Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri SISKOTKLN	SISKOTKLN	Data tenaga kerja luar negeri	Informasi tenaga kerja luar negeri	Website	Pihak ketiga	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
33	Dinas Ketenagakerjaan	A.086	Web Portal Dinas Ketenagakerjaan	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.087	Radio Streaming DSB (Deli Serdang Berseri)	Berita, talkshow, hiburan, dan informasi terkini terkait deli serdang. Statusnya lembaga penyiaran publik lokal, belum ada perdanya.	Layanan Informasi publik	Data berita dan kejadian	Berita dan kejadian	Website	Mandiri OPD	
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.088	SIKKOMIN (Sistem Informasi Kinerja Kominfo)	Untuk laporan kinerja harian pegawai kominfo saja. Ada strukturnya, merekam SKP dan kontrka kerja, yang bersangkutan akan melihat laporan harian. Atasan akan melakukan	Layanan Kinerja Pegawai	Data Kinerja pegawai Kominfo	Laporan kinerja dan pengawasan	Android	Kominfo	Bidang TIK

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembangan	Unit Operasional Teknologi
				verifikasi, jika iya akan di paraf secara digital, dikumpulkan sampai 1 bulan. laporan bulan diantar ke BKD, belum terintegrasi, dalam bentuk print out. bisa berfungsi seperti sosial media, bisa melakukan komentar ke laporan lain. Hasil akhir laporan kinerja dan pengawasan. Hampir sama dengan SIMPAI di dinas pendidikan, dulu kominfo yang membuat, proses bisnisnya hampir mirip.						
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.089	e-KLIPPING	kliping berbabis elektronik, berisikan berita daerah.	Layanan kliping	Data Berita	Berita	Website	Kominfo	Bidang Informasi Publik
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.090	CAD (Covid Analisa Deliserdang)	Aplikasi untuk analisa covid deli serdang. Menampilkan dalam bentuk grafik dan tabel. Untuk menentukan ppkm mikro dan membantu pengambilan keputusan tentang data covid. Beberapa OPD bisa diberikan akun seperti dinsos. Sampai melihat titik sasaran untuk penerima bantuan, bukan menampilkan data siapa saja yang menerima bantuan. Pemandu untuk	Layanan informasi covid	Data analisis covid	Informasi bantuan Covid dan Informasi tingkat persebaran Covid	Website	Kominfo	Bidang TIK dan Bidang Statistik

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				sekolah dalam memberikan keputusan untuk melakukan pembelajaran. Seluruh sekolah memiliki login masing-masing. Data yang bisa digunakan oleh seluruh pihak untuk mengambil keputusan						
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.091	SP4N Lapor	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.	layanan pengaduan layanan publik	Data laporan	Daftar laporan publik	Website	Pusat	Bidang Komunikasi Publik
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.092	PPID	Merupakan aplikasi berbasis website yang berfungsi sebagai pengelola informasi dan dokumen pejabat	Layanan Informasi Data sektoral	Data administrasi pejabat	laporan administrasi pejabat	Website	Kominfo	Bidang Informasi Publik
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.093	Web Portal Dinas Komunikasi Dan Informatika	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
34	Dinas Komunikasi	A.094	alsintan. deliserdangkab.go.id	Aplikasi alat mesin pertanian	Layanan mesin pertanian	Data mesin pertanian	Informasi mesin pertanian	Website	Mandiri OPD	

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
	Dan Informatika									
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.095	berita. deliserdangkab.go.id	Sistem ini merupakan website yang membantu dalam penyebaran informasi dan berita yang ada di Kabupaten Deli Serdang	Layanan informasi	Data Berita dan Kejadian	Berita	Website	Mandiri OPD	
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.096	dailyreport. deliserdangkab.go.id	Aplikasi pemantau harian	Layanan pemantauan	Data daily report	Informasi report	Website	Mandiri OPD	
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.097	deliserdangkab.go.id	Website ini adalah Dashboard resmi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang menampung berbagai jenis layanan dan aplikasi yang ada di Kabupaten Deli Serdang	Layanan informasi kabupaten	Data Layanan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Informasi Layanan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Website	Mandiri OPD	
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.098	helpdesk. deliserdangkab.go.id	Website helpdesk ini merupakan sistem yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai sarana masyarakat dalam melakukan berbagai pelaporan yang akan diteruskan ke lembaga yang terkait dan berwenang	Layanan pengaduan	Data Pelaporan	Informasi Pelaporan	Website	Mandiri OPD	
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.099	portal. deliserdangkab.go.id	Aplikasi layanan dsub domain	Layanan sub domain	Data subdomain	Informasi sub domain	Website	Mandiri OPD	
34	Dinas Komunikasi	A.100	profil. deliserdangkab.go.id	Website Profil ini merupakan sistem yang	Layanan informasi	Data profil Pemerintah	Informasi profil	Website	Mandiri OPD	

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
	Dan Informatika			menyajikan profil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun yang dapat diakses oleh publik		Kabupaten Deli Serdang	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang			
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.10 1	radio. deliserdangkab.go.id	Radio Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merupakan radio yang memberikan informasi dan berita secara audio dan real time kepada masyarakat	Layanan informasi	Data Berita dan Kejadian	Informasi Berita dan Kejadian	Website	Mandiri OPD	
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.10 2	ssh.deliserdangkab.go.id	Website SSH Deli Serdang adalah sistem yang menyajikan Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok (HSPK) dan Analisis Standar Biaya (ASB) untuk keperluan pembangunan daerah.	Layanan informasi SSH	Data Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok (HSPK) dan Analisis Standar Biaya (ASB)	Informasi Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok (HSPK) dan Analisis Standar Biaya (ASB)	Website	Mandiri OPD	
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A.10 3	visitoranalisis. deliserdangkab.go.id	Aplikasi pendataan visitor	Layanan informasi	Data visitor	informasi jumlah visitor	Website	Mandiri OPD	
35	Dinas Pertanian	A.10 4	P3A (Simantau)	Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi	Layanan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di petak tersier	Data sawah Data debit air data aliran surngai	Laporan pengelolaan air	Website	Pusat	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
35	Dinas Pertanian	A.105	siptan.deliserdangkab.go.id	Sistem Informasi pemasaran pertanian	Layanan pemasaran pertanian	Data Pertanian	Informasi produk pertanian	Website	Mandiri OPD	
35	Dinas Pertanian	A.106	Web Portal Dinas Pertanian	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
36	Dinas Ketahanan Pangan	A.107	Web Portal Dinas Ketahanan Pangan	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	A.108	SRIKANDI	Aplikasi SRIKANDI pada merupakan aplikasi yang digunakan untuk manajemen arsip daerah	Layanan Kearsipan	Data arsip	Laporan pengelolaan arsip	Website	Pusat	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	A.109	arsipsunggal.deliserdangkab.go.id	Aplikasi pendataan arsip	Layanan perpustakaan	Data arsip	Informasi jumlah arsip	Website	Mandiri OPD	
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	A.110	perpuskejari.deliserdangkab.go.id	Perpustakaan Ilmu Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang	Layanan perpustakaan	Data perpustakaan	Informasi perpustakaan	Website	Mandiri OPD	
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	A.111	perpustakaan.deliserdangkab.go.id	Aplikasi pengelolaan perpustakaan	Layanan perpustakaan	Data perpustakaan	Informasi perpustakaan	Website	Mandiri OPD	

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	A.112	http://inlislite3.perpus.deliserdangkab.go.id	Merupaka aplikasi untuk pengelolaan Layanan Otomasi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Inlislite 3.1	Data buku	Laporan pengelolaan buku	Website	Pihak ketiga	Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	A.113	Web Portal Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	A.114	SERIDELI	Merupakan aplikasi yang digunakan untuk perizinan	Layanan perizinan	Data Perizinan	Informasi Izin	Website	Pihak ketiga	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	A.115	Web Portal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan		TIDAK ADA APLIKASI							

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
	Penyelamatan									
40	Satuan Polisi Pamong Praja	A.116	Web Portal Satuan Polisi Pamong Praja	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
40	Satuan Polisi Pamong Praja	A.117	evaprogiat.deliserdangkab.go.id	Aplikasi untuk pendataan satpol PP	Layanan satpol PP	Data satpol PP	Informasi jumlah satpol pp	Website	Kominfo	
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	A.118	SPIP	Merupakan aplikasi dari BPKP yang digunakan untuk manajemen intern terkait tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus	Pengendalian Intern Pemerintah	Data kegiatan	Laporan kajian, laporan pemantauan, dan laporan evaluasi intern	Website	Pusat	Bidang sumber daya kesehatan
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	A.119	LKIP	Merupakan aplikasi yang digunakan untuk laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja	Layanan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja	Data kinerja instansi	Laporan kinerja instansi	Website	Pusat	Bidang sumber daya kesehatan
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	A.120	Rekam Medis Online (WhatsApp)	Merupakan layanan hasil rekam medis yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp	Layanan rekam medis	Data hasil rekam medis	Informasi hasil rekam medis	WhatsApp	Mandiri OPD	Bagian Umum

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
					online via WhatsApp					
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	A.12.1	Web Portal Rumah Sakit Umum Daerah	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada	Layanan Informasi Dinas	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	Bagian Umum
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	A.12.2	SISMADAK (Sistem Manajemen Dokumentasi Akreditasi)	Aplikasi alat bantu yang diperuntukan bagi rumah sakit untuk mengikuti program akreditasi yang diselenggarakan oleh komisi akreditasi rumah sakit atau KARS	Layanan Akreditasi Rumah Sakit	Data Akreditasi Rumah Sakit	Informasi Dokumentasi Akreditasi	Desktop	Pihak ketiga	Tim Akreditasi Rumah Sakit
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	A.12.3	E-Claim	Aplikasi untuk mengklaim pasien BPJS dan pasien Covid	Layanan pengklaiman pasien BPJS dan Pasien Covid	Data pasien BPJS dan pasien Covid	Nilai Klaim Pasien, Data Pasien yang diklaim	Website	Pusat	Tim Verifikasi Rumah Sakit
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	A.12.4	SIMRS	Merupakan aplikasi yang digunakan untuk manajemen rumah sakit	layanan manajemen rumah sakit	Data pasien, Data Obat, Data Rawat Inap, Data Radiologi, Data Dokter, Data hasil pemeriksaan	Laporan manajemen rumah sakit	Desktop	Mandiri OPD	Bagian Umum
42	Kecamatan Lubuk Pakam	A.12.5	Web Portal Kecamatan Lubuk Pakam	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca	Layanan Informasi Kecamatan	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada.						
43	Kecamatan Labuhan Deli	A.126	Web Portal Kecamatan Labuhan Deli	Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca hasil kegiatan telah dilaksanakan dan untuk memberikan informasi seputar layanan yang ada.	Layanan Informasi Kecamatan	Data kegiatan dan layan PD	Informasi kegiatan dan layan PD	Website	Kominfo	
44	Desa Sekip		TIDAK ADA APLIKASI							
45	Desa Pematang Johar	A.127	E-Desa	Aplikasi E-Desa adalah suatu aplikasi yang berfungsi untuk mengelola admintrasi pemerintahan desa antara lain pengelolaan data penduduk, pengelolaan data APB Desa, Pembuatan Surat Keterangan/Rekomendasi, Agenda Surat Masuk/Keluar, Pengelolaan Data dan Status Perangkat Desa, Pembuatan Surat Tugas/SPPD.	Layanan fasilitasi surat menyurat	Data surat menyurat desa	Laporan administrasi desa	Website	Pihak ketiga	sekretariat
46	RSUD Pancur Batu		TIDAK ADA APLIKASI							
47	Puskesmas Lubuk Pakam	A.128	SIMPUS	merupakan software yang ditujukan untuk mengelola aktivitas keseharian Puskesmas mulai dari pendaftaran	layanan antrian online bagi pengguna jkn	Data pasien, Data Obat, Data Rawat Inap, Data Radiologi,	Laporan pengelolaan aktivitas puskesmas	Website	Pihak ketiga	Bagian Umum

Kode OPD	Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Uraian	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Keluaran aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				pasien, manajemen diagnosa, manajemen obat, manajemen pasien, sampai dengan rekap pelaporan data.		Data Dokter, dan Data hasil pemeriksaan				

Lampiran 7.1 Kondisi Eksisting Kepemilikan Perangkat Jaringan

Kode PD	Nama PD	Perangkat Network																	
		Modem			HUB/Switch			Gateway-Router			Access-Point			Repeater Wifi			Antena Outdoor Wireless		
		Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn
1	Bagian Organisasi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bagian Tata Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
4	Bagian Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bagian Umum	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	13	0	0	8	0	0	0	0
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bagian Perekonomian dan SDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11	Inspektorat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sekretariat DPRD	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
17	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Kode PD	Nama PD	Perangkat Network																	
		Modem			HUB/Switch			Gateway-Router			Access-Point			Repeater Wifi			Antena Outdoor Wireless		
		Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5	0	0	3	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0
20	Dinas Kesehatan	1	0	0	0	2	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dinas Pendidikan	0	0	0	0	40	0	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0	1	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
30	Dinas Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
32	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Dinas Pertanian	0	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kode PD	Nama PD	Perangkat Network																	
		Modem			HUB/Switch			Gateway-Router			Access-Point			Repeater Wifi			Antena Outdoor Wireless		
		Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn	Lebih dari 5 thn	1-5 thn	< 1 thn
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Satuan Polisi Pamong Praja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	1	0	0	10	5	15	4	10	0	2	10	26	0	0	0	0	1	0
42	Kecamatan Lubuk Pakam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
43	Kecamatan Labuhan Deli	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Desa Sekip	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Desa Pematang Johar	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
46	RSUD Pancur Batu	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Puskesmas Lubuk Pakam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 7.2 Kondisi Eksisting Media Penyimpanan

Kode OPD	Nama OPD	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
1	Bagian Organisasi	Google Drive	Media Upload Data dari PD	Data SAKIP dan RB	Semua PD	Bagian Organinsasi	Bagian Organisasi	Google Drive	Google	15 Gb	Link Akses
2	Bagian Administrasi Pembangunan	Hardisk	bagus	data kerja	kantor	Administrasi pembangunan	tenaga administrasi	tenaga administrasi	-	1 TB	manual
3	Bagian Tata Pemerintahan	Hard Disk	File Umum	Umum	Milik OPD	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	-	500 GB	Digunakan bersama
4	Bagian Hukum	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5	Bagian Umum	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Bagian Perekonomian dan SDA	Hard Disk External	Seagate	Dokumen penting	Milik Sendiri	Bagian Perekonomian dan SDA Setdakan Deli Serdang	Bagian Perekonomian dan SDA Setdakan Deli Serdang	Bagian Perekonomian dan SDA Setdakan Deli Serdang	Tidak Ada	1 TB	Tidak Ada
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Hard Disk External		Back Up data LPSE	Milik Sendiri	Milik Sendiri	Bagian Barang / Jasa	Bagian Barang / Jasa	tidak ada	2 Tb	Plug and Play
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Sharing (User1-PC)	Komputer PC	Data Keprotokolan	dikelola Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	PC Komputer	500Gb	Sharing (User1-PC)
11	Inspektorat Daerah	FLASHDISK	PENYIMPANAN DATA	DATA MICROSOFT	MILIK PD	INSPEKTORAT	INSPEKTUR PEMBANTU 1-4	RUANG INSPEKTUR	WINDOWS	TIDAK TAU	TIDAK TAU

Kode OPD	Nama OPD	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
								PEMBANTU 1-4			
12	Sekretariat DPRD	Server,	Surat dan foto foto kegiatan anggota dewan	Data surat	Milik internal	Sekretaris daerah	Sekretaris daerah	Di ruang server	Ubuntu	32 tera	Tidak ada
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hardisk dan Flashdisk	Untuk penyimpanan data	Data perencanaan	milik OPD	Pribadi	Pribadi	Di OPD	TIDAK ADA	Hardis:2 tera, FD: 16GB	Pakai hardisk
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Server,	akses SIMDA keuangan	data yang terdapat di aplikasi SIMDA, data keuangan	Milik OPD	BPKAD	Admin pengelola Server	Di ruang server	Windows xeon 2000	6 tera	Internal OPD
16	Badan Pendapatan Daerah	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
17	Badan Kepegawaian Daerah	Media Server BKD	Media server data / Bank data terdapat pada server bkd	Database, Dokumen , foto	BKD Kabupaten Deli Serdang	BKD	BKD	Kantor BKD Kabupaten Deli Serdang (Ruang Server BKD)	Linux (Own Cloud)	1 T	Online , Sharing , Web Host
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PC internal	penyimpan data	data terkait kebencanaan	BPBD	BPBD	BPBD	kantor BPBD	office	500gb	flasdisk
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan	Data Arsip Surat	Data Arsip Surat Umum	Data Arsip Surat Keluar Masuk	Aset PD	DPUPR	DPUPR	Sub. Bag. Program	Linux	5 TB	Melalui browser

Kode OPD	Nama OPD	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
	Penataan Ruang										
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Data Arsip Surat	Data Arsip Surat Umum	Data Arsip Surat Keluar Masuk	Aset PD	DPUPR	DPUPR	Sub. Bag. Program	Linux	5 TB	Melalui browser
20	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	TIDAK MEMILIKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Flashdisk	-	-	Milik Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	Kecil	-
24	Dinas Pendidikan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	PC/LAPTOP	Komputer	Semua data	Setiap ruangan	OPD	OPD	PC/LAPTOP	WINDOWS	-	TIDAK
27	Dinas Kependudukan Dan	harddisk eksternal	backup database	database kependudukan	dinas kependudukan dan	dinas kependudukan dan	dinas kependudukan dan	dinas kependudukan dan	tidak ada	1 tera	tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
	Pencatatan Sipil		kependudukan		pencatatan sipil	pencatatan sipil	pencatatan sipil	pencatatan sipil			
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	HDD Eksternal Bidang P4	Dokumen dan Data Kependudukan	Dokumen dan Data Kependudukan	Bidang P4	Dinas P2KBP3A	Dinas P2KBP3A, BKKBN	Bidang P4	HDD Eksternal	1 TB	File Transfer
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	HDD Eksternal Data Aset	Data Aset Dinas P2KBP3A	Dokumen Word dan Excel	Pengelola Barang dan Aset	Dinas P2KBP3A	Dinas P2KBP3A dan BKAD	Pengelola Barang dan Aset	Ms. Word dan Ms. Excel	1 TB	File Transfer
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	HDD Eksternal Data Pegawai	Data Pegawai	Data Kepegawaian	Subbag Umum	Dinas P2KBP3A	Dinas P2KBP3A dan BKD	Dinas P2KBP3A	Ms. Word dan Ms. Excel	1 TB	File Transfer
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	HDD Eksternal Dokumentasi dan KIE	Dokumentasi dan KIE	Dokumentasi dan KIE	Dinas P2KBP3A	Dinas P2KBP3A	Dinas P2KBP3A	Dinas P2KBP3A	Ms. Word dan Ms. Excel dan Photo	1 TB	File Transfer
29	Dinas Pemberdayaan	PC kantor	menyimpan data	data desa, data	masing masing seksi	DPMD	DPMD	DPMD	office	500 GB	internal

Kode OPD	Nama OPD	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
	n Masyarakat Dan Desa		kebutuhan dinas	BUMDES, data profil desa, data pelatihan							
30	Dinas Perikanan	Flash Disk	USB Flashdisk 16gb dan 32gb	-	Milik Dinas	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	-	16gb dan 32gb	-
31	Dinas Perhubungan	hard disk external	1 terra	data dinas perhubungan	milik kantor	dinas perhubungan	dinas perhubungan	dinas perhubungan	tidak ada	1 terra	manual
32	Dinas Sosial	Dinas Sosial	USB Drive	Excel, Power Point, CXV	Kepemilikan sendiri	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Windows	32 GB	Akses Point
33	Dinas Ketenagakerjaan	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Server , Harddisk external	Data base , Foto-Foto, Video,	Data base , Foto-Foto, Video,	Kominfo	Kominfo	Kominfo	Kominfo	Filezilla	15 TB	API
35	Dinas Pertanian	HARDISK EXTERNAL	EXTERNAL HARDISK	FILE	ASET DAERAH	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	SUBBAG.UMUM DAN KEPEGAWAIAN	WINDOWS	-	-
36	Dinas Ketahanan Pangan	HARDDISK EKSTERNAL	SEAGEAT	Dinas Ketahanan Pangan Kab, Deli Serdang	BMD (Badan Milik Daerah)	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Deli Serdang	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Deli Serdang	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Deli Serdang	Microsoft Office , dan aplikasi lainnya	1000 GB	-
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Hardisk	Hardware	Data terkait kepegawaian dan nilai-nilai hasil perlombaan perpustakaan	Beli	OPD	OPD	Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip	-	1 Tb	manual

Kode OPD	Nama OPD	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Harddisk Eksternal	Harddisk Eksternal	Data Kantor	DPMPTSP	DPMPTSP	DPMPTSP	DPMPTSP	-	1 TB	-
39	Dinas Pemadam Kebakaran	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
40	Satuan Polisi Pamong Praja	Harddisk Eksternal	My Passport	Data OPD	Milik OPD	Satpol PP Deli Serdang	Satpol PP Deli Serdang	Deli Serdang	tidak ada	1TB	tidak ada
41	Rumah Sakit Umum Daerah	NAS (Network Attached Storage)	penyimpanan yang tersambung ke jaringan dan memungkinkan penyimpanan maupun pengambilan data dari lokasi terpusat untuk pengguna jaringan dan klien heterogen yang sah	Data base SIMRS, File Akreditas, File-file unit yang menggunakan	PRIVET / PEMILIK SENDIRI	RSUD DELI SERDANG	RSUD DELI SERDANG	Unit IT (SIMRS)	Synology System	36TB`	Webbased
42	Kecamatan Lubuk Pakam	Flash Disk	Milik Pribadi	-	Pribadi	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Labuhan Deli	Google Drive	Google Drive	Data Kecamatan	Kantor Camat	email kantor camat	Kantor Camat	Google Drive	Web	15GB	Public Sharing
44	Desa Sekip	FD	-	-	-	-	-	Setiap seksi	-	16 gb	sharing

Kode OPD	Nama OPD	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
45	Desa Pematang Johar	HDD Eksternal	Penyimpanan berupa Hardisk	Penyimpanan File Kantor	Milik Pemerintah Desa Pematang Johar	Sekretaris Desa dan Kaur tata usaha dan umum	Pemerintah Desa Pematang Johar	HDD Eksternal	HDD Eksternal	1 Tb dan 500 Gb	iya
46	RSUD Pancur Batu	Hardisk	penyimpanan data	Data pasien dan pegawai	OPD	RSUD Pancur Batu	RSUD Pancur Batu	OPD	-	500Gb	Manual
47	Puskesmas Lubuk Pakam	Flash disk	Toshiba dan Sandisk	data kegiatan di lapangan sesuai bidang masing-masing	bidang	Puskesmas Lubuk Pakam	Puskesmas Lubuk Pakam	Puskesmas Lubuk Pakam	tidak ada	8Gb-32Gb	Tidak

Lampiran 7.3 Kondisi Eksisting Perangkat Perkantoran

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	ID Metadata Terkait
PL.P.001	Windows	Sistem Operasi berbasis Windows	Sistem Operasi	Sistem Operasi	Berbayar	OPD	Tahunan	
PL.P.002	Linux	Sistem Operasi berbasis Linux	Sistem Operasi	Sistem Operasi	Open Source	OPD / General Public License	Lifetime	
PL.P.003	Mac	Sistem Operasi berbasis MacOS	Sistem Operasi	Sistem Operasi	Berbayar	OPD	Lifetime	
PL.P.004	Microsoft Word	merupakan program aplikasi dari microsoft office yang biasa sering di gunakan untuk pengelolaan teks, pengelolaan dokumen, laporan dan lain sebagainya.	Sistem Utilitas	Pengolah Kata	Berbayar	OPD	free	
PL.P.005	Microsoft Excel	sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik hingga manajemen data.	Sistem Utilitas	Pengolah Angka	Berbayar	OPD	Lifetime	
PL.P.006	Microsoft Power Point	sebuah program yang digunakan untuk membuat presentasi bisnis, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan pendidikan atau informal.	Sistem Utilitas	Pengolah Visual (Presentasi)	Berbayar	OPD	Lifetime	
PL.P.007	Photoshop	program berbasis grafis raster (bitmap), sebuah perangkat lunak (software) untuk membuat dan mengedit gambar lalu menyimpannya dalam berbagai format.	Sistem Utilitas	Design	Berbayar	OPD	Lifetime	
PL.P.008	Corel Draw	perangkat lunak desain berbasis vektor yang digunakan untuk membuat gambar dua dimensi.	Sistem Utilitas	Design	Berbayar	OPD	Lifetime	
PL.P.009	Netbeans	suatu serambi pengembangan perangkat lunak yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java.	Sistem Utilitas	Programming	Open Source	OPD / General Public License	Free	

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	ID Metadata Terkait
PL.P.010	Atom	ext editor yang bersifat free source dan open source bagi macOS, Linux, dan Microsoft Windows	Sistem Utilitas	Programming	Open Source	OPD / General Public License	Free	
PL.P.011	Visual Studio	Sebuah perangkat lunak lengkap yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal, ataupun komponen aplikasinya, dalam bentuk aplikasi console, aplikasi Windows, ataupun aplikasi Web.	Sistem Utilitas	Programming	Open Source	OPD / General Public License	Free	
PL.P.012	Bootstrap	kerangka kerja CSS yang sumber terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web.	Sistem Utilitas	Programming	Open Source	OPD / General Public License	Free	
PL.P.013	Github	layanan hos web bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem kendali versi Git dan layanan hosting internet.	Sistem Utilitas	Programming	Open Source	OPD / General Public License	Free	
PL.P.014	BigBucket	sebuah layanan hosting yang berbasis web untuk kode sumber dan pembangunan proyek yang menggunakan Mercurial ataupun sistem kendali versi Git yang dimiliki oleh Atlassian.	Sistem Utilitas	Programming	Open Source	OPD / General Public License	Free	
PL.P.015	Ms. Access	sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah.	Sistem Database	Database	Berbayar	OPD	Free	
PL.P.016	SQL Server	sebuah sistem manajemen basis data relasional produk Microsoft.	Sistem Database	Database	Open Source	OPD / General Public License	Free	
PL.P.017	Oracle	relational database management system (RDBMS) untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif dan terintegrasi	Sistem Database	Database	Open Source	OPD / General Public License	Free	
PL.P.018	MySQL	Sistem manajemen database relasional open source (RDBMS) dengan client-server model. Sedangkan RDBMS merupakan software	Sistem Database	Database	Open Source	OPD / General	Free	

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	ID Metadata Terkait
		untuk membuat dan mengelola database berdasarkan pada model relasional.				Public License		
PL.P.019	PostgreSQL	sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut Perjanjian lisensi BSD yang dimana menyediakan fitur yang berguna untuk replikasi basis data.	Sistem Database	Database	Open Source	OPD / General Public License	Free	
PL.P.020	Adobe Premiere	sebuah program penyunting video berbasis non-linier dari Adobe Systems.	Sistem Utilitas	Pengolah Video	Berbayar	OPD	Lifetime	
PL.P.021	Sony Vegas	paket perangkat lunak pengeditan video untuk pengeditan non-linear	Sistem Utilitas	Pengolah Video	Open Source	OPD / General Public License	Free	
PL.P.022	Zoom	aplikasi komunikasi menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun desktop.	Sistem Utilitas	Video Conference	Berbayar	OPD	Free	
PL.P.023	Google Meet	layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google	Sistem Utilitas	Video Conference	Open Source	OPD / General Public License	Free	
PL.P.024	Mozilla Firefox	peramban web lintas platform bebas dan sumber terbuka	Sistem Utilitas	Browser	Open Source	OPD / General Public License	Free	
PL.P.025	Google Chrome	peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google.	Sistem Utilitas	Browser	Open Source	OPD / General Public License	Free	
PL.P.026	Internet Explor	sebuah peramban web dan perangkat lunak tak bebas yang gratis dari Microsoft,	Sistem Utilitas	Browser	Open Source	OPD / General Public License	Free	

Lampiran 7.4 Kondisi Eksisting Perangkat Lunak Platform (1)

Kode OPD	Nama OPD	Operating Sistem					Perangkat Lunak								
							Pemrosesan Kata			Pemrosesan Angka			Pemrosesan Visual		
		Windows	Linux	Mac	Dual OS	Lainnya	Ms. Word (Y/T)	Google Doc (Y/T)	Lainnya (Y/T)	Ms. Excel (Y/T)	Google Sheets (Y/T)	Lainnya (Y/T)	Ms. Power Point (Y/T)	Google Slide (Y/T)	Lainnya (Y/T)
1	Bagian Organisasi	7	0	0	0	0	V		V	V			V		
2	Bagian Administrasi Pembangunan	13	0	0	0	0	V	V		V	V		V	V	
3	Bagian Tata Pemerintahan	7	0	0	0	0	V			V	V	V	V		
4	Bagian Hukum	1	0	0	0	0				V					
5	Bagian Umum	14	0	0	0	0	V			V			V		
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	0	0	0	0	V			V			V		
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	0	0	0	0	V			V			V		
8	Bagian Perekonomian dan SDA	8	0	0	0	0	V			V			V		
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	7	1	1	0	0	V			V			V		
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	13	0	0	0	0	V			V			V		
11	Inspektorat Daerah	33	0	0	0	0	V	V		V	V		V	V	
12	Sekretariat DPRD	24	0	0	0	0	V			V			V		
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	58	0	0	0	0	V	V		V	V		V		
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10	0	0	0	0	V			V			V		
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	82	0	4	0	0	V			V			V		
16	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0	0	V			V			V		
17	Badan Kepegawaian Daerah	39	1	0	0	0	V	V		V	V	V	V	V	V
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	0	0	0	0	V			V			V		
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	121	1	0	0	0	V			V			V		
20	Dinas Kesehatan	0	1	0	0	0	V	V		V	V		V	V	V

Kode OPD	Nama OPD	Operating Sistem					Perangkat Lunak								
		Windows	Linux	Mac	Dual OS	Lainnya	Pemrosesan Kata			Pemrosesan Angka			Pemrosesan Visual		
							Ms. Word (Y/T)	Google Doc (Y/T)	Lainnya (Y/T)	Ms. Excel (Y/T)	Google Sheets (Y/T)	Lainnya (Y/T)	Ms. Power Point (Y/T)	Google Slide (Y/T)	Lainnya (Y/T)
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	78	0	0	0	0	V			V			V		
22	Dinas Lingkungan Hidup	20	0	0	0	0	V			V			V		
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	2	0	0	0	0	V			V			V		
24	Dinas Pendidikan	118	0	0	0	0	V	V		V	V		V	V	
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	26	0	0	0	0	V			V			V		
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	0	0	0	0	0	V			V			V		
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	89	0	0	0	0	V			V			V		
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	13	0	0	0	0	V			V			V		
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	28	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V		
30	Dinas Perikanan	37	0	0	0	0	V			V			V		
31	Dinas Perhubungan	23	0	1	0	0	V			V			V		
32	Dinas Sosial	18	0	0	0	0	V	V		V	V		V		
33	Dinas Ketenagakerjaan	21	0	0	0	0	V			V			V		
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	100	1	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V
35	Dinas Pertanian	271					V	V	V	V	V		V	V	
36	Dinas Ketahanan Pangan	13	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	0	0	0	0	0	V			V			V		
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	40	2	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	0	0	0	0	V			V			V		

Kode OPD	Nama OPD	Operating Sistem					Perangkat Lunak								
		Windows	Linux	Mac	Dual OS	Lainnya	Pemrosesan Kata			Pemrosesan Angka			Pemrosesan Visual		
							Ms. Word (Y/T)	Google Doc (Y/T)	Lainnya (Y/T)	Ms. Excel (Y/T)	Google Sheets (Y/T)	Lainnya (Y/T)	Ms. Power Point (Y/T)	Google Slide (Y/T)	Lainnya (Y/T)
40	Satuan Polisi Pamong Praja	25	0	0	0	0	V			V			V		
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	180	10	5	5	0	V	V		V	V		V	V	
42	Kecamatan Lubuk Pakam	10	0	0	0	0	V	V		V	V	V	V		
43	Kecamatan Labuhan Deli		0	0	0	0	V			V	V		V		V
44	Desa Sekip	10	0	0	0	0	V			V			V		
45	Desa Pematang Johar	3	0	0	0	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V
46	RSUD Pancur Batu	0	0	0	0	0	V			V			V		
47	Puskesmas Lubuk Pakam						V			V			V		

Lampiran 7.4 Kondisi Eksisting Perangkat Lunak Platform (2)

Kode OPD	Nama OPD	Editing Foto				Tools Programming										
		Paint (Y/T)	Photoshop (Y/T)	Corel Draw (Y/T)	Lainnya (Y/T)	Netbeans	ATOM	Visual Studio Code	Bootstrap	HTML5 Builder	Github	BitBucket	Gitlab	Grafana	Zabbix	Lainnya
1	Bagian Organisasi	V	V													
2	Bagian Administrasi Pembangunan	V	V	V												
3	Bagian Tata Pemerintahan	V	V	V												
4	Bagian Hukum															
5	Bagian Umum	V	V	V												
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	V	V	V												
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	V														
8	Bagian Perekonomian dan SDA		V													
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	V	V								V					
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan			V												
11	Inspektorat Daerah	V	V	V												
12	Sekretariat DPRD	V	V	V												
13	Badan Perencanaan		V	V					V		V					

Kode OPD	Nama OPD	Tools Programming														
		Editing Foto				Tools Programming										
		Paint (Y/T)	Photoshop (Y/T)	Corel Draw (Y/T)	Lainnya (Y/T)	Netbeans	ATOM	Visual Studio Code	Bootstrap	HTML5 Builder	Github	BitBucket	Gitlab	Grafana	Zabbix	Lainnya
	Pembangunan Daerah															
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik															
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah															
16	Badan Pendapatan Daerah		V					V	V	V	V					
17	Badan Kepegawaian Daerah	V	V					V			V					
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		V					V								
20	Dinas Kesehatan	V	V						V	V						
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	V	V	V												V
22	Dinas Lingkungan Hidup	V	V													

Kode OPD	Nama OPD	Editing Foto				Tools Programming										
		Paint (Y/T)	Photoshop (Y/T)	Corel Draw (Y/T)	Lainnya (Y/T)	Netbeans	ATOM	Visual Studio Code	Bootstrap	HTML5 Builder	Github	BitBucket	Gitlab	Grafana	Zabbix	Lainnya
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	V	V	V												
24	Dinas Pendidikan	V	V	V												
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan		V					V	V							
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata		V	V												
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	V	V	V	V			V		V						V
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	V														
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				V											
30	Dinas Perikanan	V	V													
31	Dinas Perhubungan		V	V												

Kode OPD	Nama OPD	Editing Foto				Tools Programming										
		Paint (Y/T)	Photoshop (Y/T)	Corel Draw (Y/T)	Lainnya (Y/T)	Netbeans	ATOM	Visual Studio Code	Bootstrap	HTML5 Builder	Github	BitBucket	Gitlab	Grafana	Zabbix	Lainnya
32	Dinas Sosial	V	V	V		V		V		V	V					
33	Dinas Ketenagakerjaan															
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	V	V	V	V			V	V	V	V	V	V		V	V
35	Dinas Pertanian	V	V	V												
36	Dinas Ketahanan Pangan	V	V	V	V											
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip															
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		V	V	V			V	V	V	V	V				
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan															
40	Satuan Polisi Pamong Praja		V													
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	V	V	V	V			V	V	V	V	V	V		V	
42	Kecamatan Lubuk Pakam		V		V											

Kode OPD	Nama OPD	Editing Foto				Tools Programming										
		Paint (Y/T)	Photoshop (Y/T)	Corel Draw (Y/T)	Lainnya (Y/T)	Netbeans	ATOM	Visual Studio Code	Bootstrap	HTML5 Builder	GitHub	BitBucket	Gitlab	Grafana	Zabbix	Lainnya
43	Kecamatan Labuhan Deli	V	V	V	V	V		V	V	V	V					
44	Desa Sekip															
45	Desa Pematang Johar	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
46	RSUD Pancur Batu															
47	Puskesmas Lubuk Pakam															

Lampiran 7.4 Kondisi Eksisting Perangkat Lunak Platform (3)

Ko de OP D	Nama OPD	Perangkat Lunak																	
		DBMS						Penyuntingan Video					Browser				Video Conference		
		Ms. Acce ss	SQL Serv er	Orac le	MyS QL	Postgree SQL	Lainn ya	Adobe Premiere	Windo ws Movie Maker	Appl e iMov ie	Son y Veg as	Lainn ya	Mozi la Firef ox	Googl e Chro me	Inter net Explo r	Lainn ya	Zoo m	Googl e Meet	Lainn ya
1	Bagian Organisasi												V	V		V		V	V
2	Bagian Administrasi Pembangunan												V	V	V		V	V	
3	Bagian Tata Pemerintahan												V	V	V	V	V		
4	Bagian Hukum												V	V			V		
5	Bagian Umum												V	V	V	V	V	V	
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat												V	V	V	V	V	V	
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan												V	V	V	V	V	V	V
8	Bagian Perekonomian dan SDA												V	V			V	V	
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa		V			V		V				V	V	V		V			
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan							V					V	V			V		

Ko de OP D	Nama OPD	Perangkat Lunak																	
		DBMS						Penyuntingan Video					Browser				Video Conference		
		Ms. Acce ss	SQL Serv er	Orac le	MyS QL	Postgrec SQL	Lainn ya	Adobe Premi ere	Windo ws Movie Maker	Appl e iMov ie	Son y Veg as	Lainn ya	Mozi la Firef ox	Googl e Chro me	Inter net Explo r	Lainn ya	Zoo m	Goog le Meet	Lainn ya
11	Inspektorat Daerah								V				V	V	V		V	V	
12	Sekretariat DPRD							V					V	V	V		V	V	V
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		V		V								V	V	V		V	V	
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																	V	
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah																V		
16	Badan Pendapatan Daerah			V	V	V	V						V	V	V	V	V	V	V
17	Badan Kepegawaian Daerah	V	V		V	V							V	V	V	V	V	V	V
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				V							V	V	V			V		

Ko de OP D	Nama OPD	Perangkat Lunak																	
		DBMS						Penyuntingan Video					Browser				Video Conference		
		Ms. Access	SQL Server	Oracle	MySQL	PostgreSQL	Lainnya	Adobe Premiere	Windows Movie Maker	Apple iMovie	Sony Vegas	Lainnya	Mozilla Firefox	Google Chrome	Internet Explorer	Lainnya	Zoom	Google Meet	Lainnya
20	Dinas Kesehatan				V			V					V	V			V	V	
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman												V	V	V	V	V	V	
22	Dinas Lingkungan Hidup							V	V			V	V	V	V	V	V	V	V
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah											V	V	V	V		V		V
24	Dinas Pendidikan											V	V	V	V		V	V	
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan		V					V						V			V		V
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata							V	V				V	V	V		V		
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		V	V	V								V	V	V	V	V	V	

Ko de OP D	Nama OPD	Perangkat Lunak																		
		DBMS						Penyuntingan Video						Browser				Video Conference		
		Ms. Acce ss	SQL Serv er	Orac le	MyS QL	Postgre SQL	Lainn ya	Adobe Premi ere	Windo ws Movie Maker	Appl e iMov ie	Son y Veg as	Lainn ya	Mozi la Firef ox	Googl e Chro me	Inter net Explo r	Lainn ya	Zoo m	Goog le Meet	Lainn ya	
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												V	V			V	V		
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa								V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	
30	Dinas Perikanan												V			V				
31	Dinas Perhubungan						V					V	V							
32	Dinas Sosial											V	V	V		V	V	V		
33	Dinas Ketenagakerjaan																			
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	V	V		V		V	V			V	V	V	V	V	V	V	V		
35	Dinas Pertanian								V			V	V	V		V				
36	Dinas Ketahanan Pangan		V		V		V	V			V	V	V	V	V	V				

Ko de OP D	Nama OPD	Perangkat Lunak																	
		DBMS						Penyuntingan Video					Browser				Video Conference		
		Ms. Acce ss	SQL Serv er	Orac le	MyS QL	Postgree SQL	Lainn ya	Adobe Premi ere	Windo ws Movie Maker	Appl e iMov ie	Son y Veg as	Lainn ya	Mozi la Firef ox	Googl e Chro me	Inter net Explo r	Lainn ya	Zoo m	Goog le Meet	Lainn ya
46	RSUD Pancur Batu																		
47	Puskesmas Lubuk Pakam												V	V	V		V		V

Lampiran 9.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan Anggaran SPBE

Ko de	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A.	Nilai A	B	Nilai B	C.	Nilai C	TOTAL	Persentase	Total RKA
			Deskripsi		Deskripsi		Deskripsi				
1	Bagian Organisasi	Y	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0
2	Bagian Administrasi Pembangunan	Y	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0
3	Bagian Tata Pemerintahan	Y	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0
4	Bagian Hukum	Y	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0
5	Bagian Umum	Y	Tidak ada	Rp0	Pengadaan PC, Laptop, Notebook, Printer, UPS	Rp45.357.439	Pemeliharaan CCTV, PC, Notebook, Server, NAS	Rp29.764.000	Rp75.121.439	0,09%	Rp80.453.769.080
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Y	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Y	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0
8	Bagian Perekonomian dan SDA	Y	Pembuatan Website TPAKD (Tim Percepatan Akses	Rp43.084.000	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Rp43.084.000	0,00%	Rp0

Ko de	Nama OPD	Ketersedi aan Anggaran (Y/T)	A.	Nilai A	B	Nilai B	C.	Nilai C	TOTAL	Persen tase	Total RKA
			Deskripsi		Deskripsi		Deskrip si				
			Keuangan Daerah) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)								
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	TIDAK ADA DI RKA		Rp120.000.000	Pembelian UPS dan Baterai	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Rp120.000.000	0,00%	Rp0
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Y	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Ikut ke bagian Umum	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0
11	Inspektora t Daerah	TIDAK MENYERTAKAN RKA	Tidak ada	Rp0	Tidak ada	Rp0	Tidak ada	Rp0	Rp0	0,00%	Rp16.468.677.308
12	Sekretariat DPRD	TIDAK MENYERTAKAN RKA	Tidak ada		Komputer Pc, Laptop, Printer, Keyboard, Hardisk	Rp550.093.936		Rp0	Rp550.093.936	0,00%	Rp131.651.949.560
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Y	Pengembangan aplikasi e-SAKIP, e-CASCADING	Rp60.000.000	Kompute PC, Laptop, Printer	Rp30.000.000	Service PC, Printer	Rp7.000.000	Rp97.000.000	0,71%	Rp13.742.443.259
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	T	Tidak ada	Rp0	Komputer PC, Laptop, Printer,	Rp18.652.000	Tidak ada	Rp0	Rp18.652.000	0,14%	Rp13.547.105.177
15	Badan Pengelolaan Keuangan	Y	Tidak ada	Rp0	Pengadaan Genset, PC, Hardisk, Printer, Scanner, Pengadaan Internet 100MBps IDIA Premium	Rp612.522.704	Pemeliharaan Server SIMDA Gaji,	Rp72.980.000	Rp685.502.704	0,56%	Rp121.593.425.339

Kode	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A.	Nilai A	B	Nilai B	C.	Nilai C	TOTAL	Persentase	Total RKA
			Deskripsi		Deskripsi		Deskripsi				
	Dan Aset Daerah						Jaringan Internet, PC, Notebook, Server SIMDA Keuangan				
16	Badan Pendapatan Daerah	Y	Jasa Pembuatan Aplikasi Pajak Daerah	Rp200.000.000	Belanja Modal PC, Server, Hardisk	Rp531.018.812	Pemeliharaan Software Aplikasi Pajak, PC, Notebook, Server	Rp236.530.000	Rp967.548.812	1,92%	Rp50.269.300.904
17	Badan Kepegawaian Daerah	TIDAK ADA DI RKA	Tidak ada	Rp0	Pembelian PC Server, Peralatan Jaringan Komputer, Personal Komputer, Peralatan Peripheral	Rp463.645.000			Rp463.645.000	1,78%	Rp26.050.639.986
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TIDAK ADA DI RKA	Tidak ada	Rp0	Website, Finger Print, Note Book, Printer dan Scanner	Rp0	Tidak ada	Rp0	Rp0	0,00%	Rp7.733.525.993
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Y	Tidak ada	Rp0	Pengadaan PC, Notebook, UPS, Hardisk, Printer	Rp544.471.240	Pemeliharaan Printer, Laptop	Rp45.500.000	Rp589.971.240	0,08%	Rp716.117.064.121
20	Dinas Kesehatan	Y	Tidak ada	Rp0	Pengadaan Jaringan internet dan Hardware PSC119 100Mbps, PC, Hardware untuk Sistem Kesehatan	Rp793.978.936	Pemeliharaan Jaringan Internet PSC 119	Rp60.000.000	Rp853.978.936	0,01%	Rp5.856.868.003.420

Kode	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A.	Nilai A	B	Nilai B	C.	Nilai C	TOTAL	Persentase	Total RKA
			Deskripsi		Deskripsi		Deskripsi				
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Y	Pengembangan Aplikasi Website Geospasial, Pengembangan Aplikasi berbasis Mobile Android	Rp95.000.000	Pengadaan Jaringan Internet, Mesin Absensi IOT, CCTV	Rp215.796.000	Pemeliharaan PC, Laptop, Printer	Rp30.000.000	Rp340.796.000	0,13%	Rp256.117.515.315
22	Dinas Lingkungan Hidup	TIDAK MENYERTAKAN RKA	Tidak ada	Rp0	Tidak ada	Rp0	Tidak ada	Rp0	Rp0	0,00%	Rp19.754.819.740
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Y	Tidak ada	Rp0	Komputer, notebook	Rp115.803.984	Pemeliharaan Komputer	Rp17.990.000	Rp133.793.984	1,56%	Rp8.589.895.773
24	Dinas Pendidikan	Y	Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat	Rp20.000.000	Pengadaan PC, Laptop, Printer	Rp188.500.000	Pemeliharaan Komputer; SIM Aplikasi Pintar	Rp321.549.500	Rp530.049.500	0,04%	Rp1.367.464.156.021
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	TIDAK MENYERTAKAN RKA	Tidak ada	Rp0	Tidak ada	Rp0	Tidak ada	Rp0	Rp0	0,00%	Rp72.778.628.581
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan	Y			Net Book (4); PC (5), Printer (6)	Rp186.410.680			Rp186.410.680	0,56%	Rp33.373.289.885

Kode	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A.	Nilai A	B	Nilai B	C.	Nilai C	TOTAL	Persentase	Total RKA
			Deskripsi		Deskripsi		Deskripsi				
	n Dan Pariwisata										
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Y	Tidak ada	Rp0	perangkat pendukung rekam KTP 18 unit, PC 16, laptop 9, notebook 8, print cetak A3 2 unit, printer warna 2 unit, scanner uk A3 2 unit, A4 8 unit, hardisk eksternal 8 unit, printer lesser jet 16 unit, switch hub 16 port 8 unit, 8 port 3 unit, UPS 7 unit, peralalatan KTPL iris mata 9 unit, printer cargo 13 unit, stabiliser 16 unit, finger print 13 unit, signature pad 9 unit, camera 6 unit	Rp2.227.694.680	Tidak ada	Rp0	Rp2.227.694.680	10,85%	Rp20.529.397.830
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Y	Tidak ada	Rp0	Pengadaan PC, Notebook, Laptop, Hardisk, Printer,	Rp549.271.536	Pemeliharaan PC, Laptop	Rp20.046.000	Rp569.317.536	2,02%	Rp28.239.950.518
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	TIDAK ADA DI RKA			Pembelian Proyektor,TV,,Microphone,Speaker,Laptop, PC, Tablet Printer dll	Rp182.213.949	Tidak ada	Rp0	Rp182.213.949	0,03%	Rp535.136.167.051
30	Dinas Perikanan	Y	Tidak ada	Rp0	Proyekstor, PC All in One, Mouse Kabel, Biaya Layanan Telepon, handy talky, biaya layanan internet BBIAT,	Rp246.761.396	Pemeliharaan PC, Printer, CCTV	Rp23.040.000	Rp269.801.396	1,53%	Rp17.609.287.900

Kode	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A.	Nilai A	B.	Nilai B	C.	Nilai C	TOTAL	Persentase	Total RKA
			Deskripsi		Deskripsi		Deskripsi				
					Pembuatan Vidio Profil Dinas Perikanan, Aplikasi Ikan deli ku						
31	Dinas Perhubungan	Y	Tidak ada	Rp0	Pengadaan Notebook, Laptop, Printer, Wifi Indoor, Langganan Layanan Internet 10 Mbps	Rp140.504.000	Pemeliharaan PC, Printer, Software Server Online	Rp23.946.000	Rp164.450.000	0,57%	Rp28.726.972.627
32	Dinas Sosial	Y	Tidak ada	Rp0	Pengadaan Notebook, PC, Printer, Hardisk, Flashdisk,	Rp68.957.211	Tidak ada	Rp0	Rp68.957.211	0,35%	Rp19.888.577.644
33	Dinas Ketenagakerjaan	Y	Tidak ada	Rp0	cctv 2 unit, laptop 5 unit, printer 5 unit, printer fotocopy besar 1 unit	Rp86.558.800	Tidak ada	Rp0	Rp86.558.800	0,77%	Rp11.284.733.100
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Y	Tidak ada	Rp0	Lisense Software, Layanan Internet,	Rp55.000.000	Pemeliharaan CCTV, Pemeliharaan Jaringan Internet	Rp3.446.000	Rp3.501.000	21,73%	Rp16.111.844.034
35	Dinas Pertanian	Y	Tidak ada	Rp0	Pengadaan Printer, Scanner	Rp37.500.000	Pemeliharaan Jaringan Internet, Service PC dan Printer	Rp52.280.000	Rp89.780.000	0,16%	Rp55.806.977.073
36	Dinas Ketahanan Pangan	Y	Tidak ada	Rp0	Tidak ada	Rp0	Pemeliharaan printer, Laptop, internet, PC	34164000	Rp34.164.000	0,28%	Rp12.289.720.790
37	Dinas Perpustakaan	Y	Tidak ada	Rp0	Pengadaan PC, Laptop	Rp130.729.680	Tidak ada	Rp0	Rp130.729.680	1,71%	Rp7.629.058.978

Kode	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A.	Nilai A	B	Nilai B	C.	Nilai C	TOTAL	Persentase	Total RKA
			Deskripsi		Deskripsi		Deskripsi				
	an Dan Arsip										
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Y	Tidak ada	Rp0	Belanja Modal TIK	Rp164.754.776	Pemeliharaan Server	Rp6.168.000	Rp170.922.776	0,98%	Rp17.356.755.318
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TIDAK MENYERTAKAN RKA	Tidak ada	Rp0	Tidak ada	Rp0		Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp0
40	Satuan Polisi Pamong Praja	Y	Tidak ada	Rp0	Komputer (5 Unit), Laptop (2 Unit), Printer (6 Unit)	Rp101.588.000	Pemeliharaan Laptop	Rp902.378	Rp102.490.378	0,26%	Rp39.233.451.276
41	Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang	Y	Tidak ada	Rp0	Pengadaan PC, Router, UPS, Lisensi Software PACS	Rp1.199.800.000	Pemeliharaan Laptop, PC, Printer	Rp219.200.000	Rp1.419.000.000	1,07%	Rp132.051.566.800
42	Kecamatan Lubuk Pakam	T	Tidak ada	Rp0	Tidak ada	Rp0	Tidak ada	Rp0	Rp0	0,00%	Rp15.212.222.534
43	Kecamatan Labuhan Deli	Y	Tidak ada	Rp0	Laptop, PC, Printer	Rp38.196.000	Tidak ada	Rp0	Rp38.196.000	0,91%	Rp4.194.962.131
45	Desa Pematang Johar	TIDAK MENYERTAKAN RKA	Tidak ada	Rp0	Server	Rp14.000.000	Tidak ada	Rp0	Rp14.000.000	0,00%	Rp0
45	Desa Sekip	Y	Pengembangan	Rp13.540.000	Pengadaan Jaringan Internet	Rp6.960.000	Tidak ada	Rp0	Rp20.500.000	0,00%	Rp0

Ko de	Nama OPD	Ketersediaan Anggaran (Y/T)	A.	Nilai A	B	Nilai B	C.	Nilai C	TOTAL	Persentase	Total RKA
			Deskripsi		Deskripsi		Deskripsi				
			aplikasi E-Desa								
46	RSUD Pancur Batu	Y	Tidak ada	Rp0	Pengadaan PC, UPS, Jaringan Internet, Perangkat & Jaringan Sistem Informasi RSUD Pancur	Rp268.618.868	Pemeliharaan PC, Printer	Rp1.428.000	Rp270.046.868	1,14%	Rp23.702.485.771
47	Puskesmas Lubuk Pakam	T	Tidak ada	Rp0	Tidak ada	Rp0	Tidak ada	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0

Lampiran 10.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan SDM TIK

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
1	Bagian Organisasi	Ada Adhoc	Teknisi Komputer	SUGIYONO	PNS	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
1	Bagian Organisasi	Ada Adhoc	Teknisi & Admin Jaringan	SUGIYONO	PNS	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
1	Bagian Organisasi	Ada Adhoc	Analisis Sistem & Desain	SUGIYONO	PNS	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
1	Bagian Organisasi	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	RADJA	HONORER	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Bagian Administrasi Pembangunan	Tidak Ada							
3	Bagian Tata Pemerintahan	Ada Adhoc	Teknisi Komputer	Ahmad Junaidi	HONORER	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Bagian Tata Pemerintahan	Ada Adhoc	Teknisi & Admin Jaringan	Ahmad Junaidi	HONORER	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Bagian Hukum	Ada Adhoc	Admin Website	Suprihatin	PNS	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Bagian Umum	Ada Adhoc	Muhammad Irfan	Honorer	HONORER	T	SMA	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada							
7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	Lenny mayda siregar	PNS	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Bagian Perekonomian dan SDA	Tidak Ada							
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Ada, Struktural	Teknisi Komputer	Puput Mahardhika Trianto	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	BNSP
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Ada, Struktural	Teknisi & Admin Jaringan	Puput Mahardhika Trianto	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	BNSP
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Ada, Struktural	Service/Help Desk	Puput Mahardhika Trianto	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	BNSP
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Ada, Struktural	Admin Database	Puput Mahardhika Trianto	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	BNSP
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Ada, Struktural	Analisis Sistem & Desain	Puput Mahardhika Trianto	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	BNSP
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Puput Mahardhika Trianto	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	BNSP
9	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Ada, Struktural	Admin Keamanan TI	Puput Mahardhika Trianto	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	BNSP

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorar)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Yogi kashogi,	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Ardy	HONORER	Y	S2	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Inspektorat Daerah	Ada Adhoc	Admin Website	HENDRI PARULIAN	PNS	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Inspektorat Daerah	Ada Adhoc	Admin Database	DIAN NOVITA SARI	PNS	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Inspektorat Daerah	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	NURHAYATI	HONORER	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Sekretariat DPRD	Ada Adhoc	Teknisi & Admin Jaringan	Abdul Karim Nasution	HONORER	T	S1	Sertifikasi profesi	Tidak Ada
12	Sekretariat DPRD	Ada Adhoc	Programmer	Fajar Mulya Nasution	HONORER	T	D3	BNSP Web programmer	Tidak Ada
12	Sekretariat DPRD	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	Victor Maruli	PNS	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada Adhoc	Teknisi Komputer	Dana	HONORER	T	D3	Tidak Ada	BNSP
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada Adhoc	Teknisi Komputer	Pak Joko	HONORER	T	D3	Tidak Ada	BNSP
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada Adhoc	Teknisi & Admin Jaringan	Dana	HONORER	T	D3	Tidak Ada	BNSP
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada Adhoc	Teknisi & Admin Jaringan	Pak Joko	HONORER	T	S1	Tidak Ada	BNSP
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada Adhoc	Admin Website	Dana	HONORER	T	D3	Tidak Ada	BNSP
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada Adhoc	Admin Website	Pak Joko	HONORER	T	D3	Tidak Ada	BNSP
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada Adhoc	Programmer	Dana	HONORER	T	D3	Tidak Ada	BNSP
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada Adhoc	Programmer	Pak Joko	HONORER	T	S1	Tidak Ada	BNSP
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ada Adhoc	Teknisi Komputer	Khairul Adha	HONORER	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Ada Adhoc	Programmer	Andreas Suroso	HONORER	T	S1	BNSP	Tidak Ada
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	Johan	PNS	T	S1	Tidak ada	tidak ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorar)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	M. Tamrin	PNS	T	S1	Tidak ada	tidak ada
16	Badan Pendapatan Daerah	Ada, Struktural	Teknisi & Admin Jaringan	TRIMANTO	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Ada
16	Badan Pendapatan Daerah	Ada, Struktural	Programmer	TRIMANTO	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Ada
16	Badan Pendapatan Daerah	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Muhammad Sani	HONORER	Y	SMA	Tidak Ada	Tidak Ada
16	Badan Pendapatan Daerah	Ada, Struktural	Teknisi Komputer	Esa Surya	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Ada
17	Badan Kepegawaian Daerah	Ada, Struktural	Teknisi & Admin Jaringan	Muhaltatin Jabaarsyah Dach	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Ada
17	Badan Kepegawaian Daerah	Ada, Struktural	Teknisi & Admin Jaringan	Esa Surya	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Ada
17	Badan Kepegawaian Daerah	Ada, Struktural	Service/Help Desk	Purwandi dan Hendri	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Ada
17	Badan Kepegawaian Daerah	Ada, Struktural	Admin Website	Muhaltatin Jabaarsyah Dach	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Ada
17	Badan Kepegawaian Daerah	Ada, Struktural	Admin Database	Hendri	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Ada
17	Badan Kepegawaian Daerah	Ada, Struktural	Admin Database	Muhaltatin Jabaarsyah Dach	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Ada
17	Badan Kepegawaian Daerah	Ada, Struktural	Analisis Sistem & Desain	Muhaltatin Jabaarsyah Dach	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Ada
17	Badan Kepegawaian Daerah	Ada, Struktural	Programmer	Muhaltatin Jabaarsyah Dach	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Ada
17	Badan Kepegawaian Daerah	Ada, Struktural	Programmer	Hendri	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Ada
17	Badan Kepegawaian Daerah	Ada, Struktural	Programmer	Esa Surya	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Ada
17	Badan Kepegawaian Daerah	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Muhaltatin Jabaarsyah Dach	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Ada
17	Badan Kepegawaian Daerah	Ada, Struktural	Admin Keamanan TI	Muhaltatin Jabaarsyah Dach	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Ada
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	Elizar	PNS	T	S2	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorar)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ada Adhoc	Teknisi Komputer	Mas Ridzki	HONORER	T	S1	Pelatihan Website Dan Jaringan Tk. Nasional	Tidak Ada
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ada Adhoc	Teknisi & Admin Jaringan	Mas Ridzki	HONORER	T	S1	Pelatihan Website Dan Jaringan Tk. Nasional	Tidak Ada
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ada Adhoc	Service/Help Desk	Mas Ridzki	HONORER	T	S1	Pelatihan Website Dan Jaringan Tk. Nasional	Tidak Ada
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ada Adhoc	Admin Website	Mas Ridzki	HONORER	T	S1	Pelatihan Website Dan Jaringan Tk. Nasional	Tidak Ada
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ada Adhoc	Admin Database	Mas Ridzki	HONORER	T	S1	Pelatihan Website Dan Jaringan Tk. Nasional	Tidak Ada
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ada Adhoc	Analisis Sistem & Desain	Mas Ridzki	HONORER	T	S1	Pelatihan Website Dan Jaringan Tk. Nasional	Tidak Ada
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ada Adhoc	Programmer	Mas Ridzki	HONORER	T	S1	Pelatihan Website Dan Jaringan Tk. Nasional	Tidak Ada
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	Mas Ridzki	HONORER	T	S1	Pelatihan Website Dan Jaringan Tk. Nasional	Tidak Ada
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ada Adhoc	Admin Keamanan TI	Mas Ridzki	HONORER	T	S1	Pelatihan Website Dan Jaringan Tk. Nasional	Tidak Ada
20	Dinas Kesehatan	Tidak Ada							

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Ada, Struktural	Admin Website	Henny Rahayu	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	Bu ester	PNS	T	S2	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	Mas Reza	PNS	T	S2	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Dinas Lingkungan Hidup	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	Bu Lamriah	PNS	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
23	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Ada, Struktural	Admin Website	Suaidah	PNS	Y	S2	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Dinas Pendidikan	Ada, Struktural	Admin Website	Abdul Latif	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Ada, Struktural	Teknisi Komputer	Nyoto Budi Putro	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Ada, Struktural	Teknisi & Admin Jaringan	Nyoto Budi Putro	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Ada, Struktural	Service/Help Desk	Nyoto Budi Putro	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Ada, Struktural	Admin Website	Nyoto Budi Putro	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Ada, Struktural	Admin Database	Rizky Pratama	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Ada, Struktural	Analisis Sistem & Desain	Rizky	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Ada, Struktural	Programmer	Rizky	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Tengku Firmanda	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Ada Adhoc	Admin Website	Fico Fittorio Kaban	PNS	T	S2	Belum Ada	Belum Ada
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	Muliono	HONORER	T	S1	Belum Ada	Belum Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	Munifah Suryani Harahap	PNS	T	S1	Belum Ada	Belum Ada
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	Vionita Pelawi	PNS	T	S1	Belum Ada	Belum Ada
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Ada, Struktural	Teknisi Komputer	Deddy Prananta Sembiring, S.Kom	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Ada, Struktural	Teknisi & Admin Jaringan	Khairun Nizar Nasution, S.Kom	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Ada, Struktural	Service/Help Desk	Fajar Khairunnas	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Ada, Struktural	Admin Website	Daniel H.S .Silalahi, S.Kom	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Ada, Struktural	Admin Database	Muhammad Yusuf Pulungan, S.Kom	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Ada, Struktural	Analisis Sistem & Desain	Erwin Sumbayak, ST	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Ariswono Gulton, A.Md	PNS	Y	D3	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Ada, Struktural	Admin Keamanan TI	Amos Ginting, S.Kom	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ada, Struktural	Admin Website	Berry bermana ginting	PNS	T	D3	Ada	TIDAK ADA
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ada, Struktural	Admin Website	muh. Faris azani	HONORER	T	S1	Ada	TIDAK ADA
28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	fitri andriani	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Ada Adhoc	Admin Website	Juliansyah	HONORER	T	SMA	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorar)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	feri kurniawan	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	juliansyah	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	elita rambe	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	hendra rambe	HONORER	Y	SMA	Tidak Ada	Tidak Ada
30	Dinas Perikanan	Ada, Struktural	Admin Website	Khairunnisa	HONORER	Y	SMA	Tidak Ada	Tidak Ada
30	Dinas Perikanan	Ada, Struktural	Admin Database	Khairunnisa	HONORER	Y	SMA	Tidak Ada	Tidak Ada
30	Dinas Perikanan	Ada Adhoc	Analisis Sistem & Desain	Abdul Malik Kaliaman Marpaung	PNS	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
31	Dinas Perhubungan	Ada, Struktural	Admin Website	Elantira Kencana Putri S.H	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
31	Dinas Perhubungan	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Elantira Kencana Putri S.H	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
31	Dinas Perhubungan	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Rudianto Panjaitan S.E	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
31	Dinas Perhubungan	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Bambang Eka Wijaya S.Sos	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
32	Dinas Sosial	Ada Adhoc	Teknisi & Admin Jaringan	Zulkifli	HONORER	T	SMA	Tidak Ada	Tidak Ada
32	Dinas Sosial	Ada Adhoc	Service/Help Desk	M. Reza Nurseha	HONORER	T	SMA	Tidak Ada	Tidak Ada
32	Dinas Sosial	Ada Adhoc	Analisis Sistem & Desain	M. Khalil Gibran	HONORER	T	SMA	Tidak Ada	Tidak Ada
32	Dinas Sosial	Ada Adhoc	Programmer	Victor Pasaribu	HONORER	T	SMA	Tidak Ada	Tidak Ada
33	Dinas Ketenagakerjaan	Ada, Struktural	Admin Website	Hosianna Br Girsang	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Ada, Struktural	Teknisi Komputer	Jepry Kadinata Tambunan	HONORER	Y	S1	MTCNA	BNSP
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Ada, Struktural	Teknisi & Admin Jaringan	Asep Imanuddin	HONORER	Y	S1	MTCNA	BNSP
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Ada, Struktural	Service/Help Desk	Torkis	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	BNSP

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorar)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Ada, Struktural	Admin Website	Anton	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	BNSP
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Ada, Struktural	Admin Database	Adnan	HONORER	Y	S2	Tidak Ada	BNSP
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Ada, Struktural	Analisis Sistem & Desain	Adnan	HONORER	Y	S2	Tidak Ada	BNSP
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Ada, Struktural	Programmer	Kicky Maulana	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	BNSP
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Rafly	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	BNSP
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Ada, Struktural	Admin Keamanan TI	Ganda Manik	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	BNSP
35	Dinas Pertanian	Tidak Ada							
36	Dinas Ketahanan Pangan	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Rian dwi Rangga harahap	HONORER	Y	D3	Tidak Ada	Tidak Ada
36	Dinas Ketahanan Pangan	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Eva Anasti	HONORER	Y	D4	Tidak Ada	Tidak Ada
36	Dinas Ketahanan Pangan	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	suci Ramadhani	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
36	Dinas Ketahanan Pangan	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Ajeng	HONORER	Y	D3	Tidak Ada	Tidak Ada
36	Dinas Ketahanan Pangan	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Windarmayanti	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
36	Dinas Ketahanan Pangan	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Putri Robiyah Nur H	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
37	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Tidak Ada							
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Ada, Struktural	Teknisi & Admin Jaringan	Arif Tito A. Siregar	HONORER	Y	S1	Pelatihan Teknisi Jaringan	BNSP
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Ada Adhoc	Teknisi & Admin Jaringan	Rizky Arjuna	HONORER	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
38	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Ada, Struktural	Programmer	Ade Tri Putra	HONORER	Y	S1	Pelatihan Programmer	Bnsp

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorer)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ada Adhoc	Admin Website	said mhd abror	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
39		Ada Adhoc	Admin Database	sofyul hayat hsb	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ada Adhoc	Analisis Sistem & Desain	dedek dan harzian	HONORER	T	SMA	Tidak Ada	Tidak Ada
40	Satuan Polisi Pamong Praja	Ada, Struktural	Admin Website	Hafazh Fadhillah	PNS	Y	D3	Tidak Ada	Tidak Ada
40	Satuan Polisi Pamong Praja	Ada, Struktural	Analisis Sistem & Desain	Hafazh Fadhillah	PNS	Y	D3	Tidak Ada	Tidak Ada
40	Satuan Polisi Pamong Praja	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Hafazh Fadhillah	PNS	Y	D3	Tidak Ada	Tidak Ada
41	Rumah Sakit Umum Daerah	Ada, Struktural	Teknisi Komputer	M. Iqbal	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
41	Rumah Sakit Umum Daerah	Ada, Struktural	Teknisi & Admin Jaringan	Teguh Pramidya	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
41	Rumah Sakit Umum Daerah	Ada, Struktural	Service/Help Desk	Rahmat Ade Syahputra	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
41	Rumah Sakit Umum Daerah	Ada, Struktural	Admin Website	Rizki Andika	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
41	Rumah Sakit Umum Daerah	Ada, Struktural	Admin Database	Dormansyah Pasaribu	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
41	Rumah Sakit Umum Daerah	Ada, Struktural	Analisis Sistem & Desain	Dormansyah Pasaribu	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
41	Rumah Sakit Umum Daerah	Ada, Struktural	Programmer	Prapto Herlambang	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
41	Rumah Sakit Umum Daerah	Ada, Struktural	Operator/User Sistem	Rizki Andika	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
41	Rumah Sakit Umum Daerah	Ada, Struktural	Admin Keamanan TI	Rahmat Ade Syahputra	HONORER	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
42	Kecamatan Lubuk Pakam	Ada Adhoc	Teknisi Komputer	RURI FAHRERA	HONORER	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
42	Kecamatan Lubuk Pakam	Ada, Struktural	Service/Help Desk	NIWA DZAVIRA	PNS	Y	S2	Tidak Ada	Tidak Ada
42	Kecamatan Lubuk Pakam	Ada, Struktural	Admin Website	Farida Hanum	PNS	Y	S1	Tidak Ada	Tidak Ada
42	Kecamatan Lubuk Pakam	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	SITI ZUWAI	HONORER	T	S1	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode OPD	Nama OPD	Ketersediaan SDM	Kompetensi Pekerjaan	Nama Staff	Status Pegawai (PNS/Honorar)	ADA TUPOKSI/SK TERTULIS (Y/T)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
43	Kecamatan Labuhan Deli	Ada Adhoc	Teknisi Komputer	Agus, Indra	HONORER	T	S1	training jaringan, programming	Tidak Ada
43	Kecamatan Labuhan Deli	Ada Adhoc	Teknisi & Admin Jaringan	Indra	PNS	T	S1	training jaringan, programming	Tidak Ada
43	Kecamatan Labuhan Deli	Ada Adhoc	Service/Help Desk	Nurul Hasanah	HONORER	T	S1	TIDAK ADA	Tidak Ada
43	Kecamatan Labuhan Deli	Ada Adhoc	Admin Website	Indra	PNS	T	S1	training jaringan, programming	Tidak Ada
43	Kecamatan Labuhan Deli	Ada Adhoc	Admin Website	Agus	HONORER	T	S1	training jaringan, programming	Tidak Ada
43	Kecamatan Labuhan Deli	Ada Adhoc	Admin Database	Indra	PNS	T	S1	training jaringan, programming	Tidak Ada
43	Kecamatan Labuhan Deli	Ada Adhoc	Analisis Sistem & Desain	Agus	HONORER	T	S1	TIDAK ADA	Tidak Ada
43	Kecamatan Labuhan Deli	Ada Adhoc	Programmer	Indra	PNS	T	S1	training jaringan, programming	Tidak Ada
43	Kecamatan Labuhan Deli	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	Nurul Hasanah	HONORER	T	S1	TIDAK ADA	Tidak Ada
44	Desa Sekip	Tidak Ada							
45	Desa Pematang Johar	Ada Adhoc	Teknisi Komputer	Muhtadin, S.Kom	HONORER	T	S1	Jaringan Komputer	Tidak Ada
45	Desa Pematang Johar	Ada Adhoc	Teknisi & Admin Jaringan	Muhtadin, S.Kom	HONORER	T	S1	Jaringan Komputer	Tidak Ada
45	Desa Pematang Johar	Ada Adhoc	Admin Database	Muhtadin, S.Kom	HONORER	T	S1	Jaringan Komputer	Tidak Ada
45	Desa Pematang Johar	Ada Adhoc	Operator/User Sistem	Muhtadin, S.Kom	HONORER	T	S1	Jaringan Komputer	Tidak Ada
45	Desa Pematang Johar	Ada Adhoc	Admin Keamanan TI	Muhtadin, S.Kom	HONORER	T	S1	Jaringan Komputer	Tidak Ada
46	RSUD Pancur Batu	Tidak Ada							
47	Puskesmas Lubuk Pakam	Tidak Ada							

